

DENNY J.A

Kumpulan Tulisan di Jawa Pos & Indopos

MELEWATI PERUBAHAN

Sebuah Catatan
Atas Transisi Demokrasi Indonesia



Editor:
Fransiskus Surdiasis

LKiS

Sanksi Pelanggaran Pasal 44
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Limapuluh Juta Rupiah)

DENNY J.A
Kumpulan Tulisan di Jawa Pos & Indopos

MELEWATI PERUBAHAN

Sebuah Catatan
Atas Transisi Demokrasi Indonesia

Editor:
Fransiskus Surdiasis

LKiS

DENNY J.A

DENNY J. A

Denny J.A

Kumpulan Tulisan di Jawa Pos & Indopos

Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi

Demokrasi Indonesia

Denny J.A

(C) Denny J.A

xii + 310 halaman: 15 x 23 cm

1. Ilmu Politik

2. ISBN : 979-25-5234-0

Editor : Fransiskus Surdiasis

Rancang Sampul : Imam Syahirul Alim

Setting/layout : Santo

Penerbit

LkiS Yogyakarta

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Tlp. (0274) 387194/ 7472110

Faks. (0274) 417762

Cetakan I : Agustus 2006

DENNY J.A

*Untuk Tiga Matahari:
Mulia Jayaputri Istriku,
Rafi dan Ramy Anakku*

PENGANTAR

Involusi, sebuah kosa kata yang dulu pernah digunakan Clifford Geertz untuk menggambarkan dunia pertanian Indonesia yang makin lama makin mengalami penyempitan daya dukung, mungkin merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan dinamika politik Indonesia pada tahun-tahun awal reformasi. Involusi berarti terjadinya berbagai perumitan aksi dan manuver politik, namun tidak berujung pada perubahan sistem politik yang substansial, alias status quo.

Di tingkat permukaan, politik hadir dalam sekel gambar yang kompleks, yang tak mudah diurai. Namun sesungguhnya, di pusat semua itu tidak ada perubahan berarti yang terjadi atau dihasilkan oleh dinamika tersebut. Politik tetap menjadi panggung bagi para aktor politik. Pemerintahan hampir dijalankan tanpa komitmen teguh bagi perbaikan masyarakat. Tokoh dan partai politik menikmati kebebasan, namun tanpa kesanggupan untuk mencapai konsensus menyangkut hal-hal dasar kehidupan bernegara. Hal-hal ini kita saksikan dalam kinerja lembaga negara, khususnya eksekutif dan legislatif.

Gejala yang sama juga merembet ke daerah. Otonomi tak hanya memberi fleksibilitas bagi daerah untuk memperjuangkan kepentingan terbaik warganya dengan cara terbaik pula. Pada saat yang sama, otonomi itu ikut menyebarkan praktik korupsi. Kekerasan juga merembet di daerah yang untuk sebagian lagi merupakan cerminan kerawanan di tingkat grass root. Itu yang kita saksikan di Aceh, Poso, dan Ambon.

Reformasi juga ditandai oleh merebaknya terorisme, sebuah jalan politik kekerasan yang datang dari sekelompok orang yang ingin merekonstruksi kehidupan bernegara sesuai dengan keyakinan politik dan ideologinya. Di luar masalah kekerasan, terorisme di Indonesia mengindikasikan belum solidnya konsensus dasar

menyangkut kehidupan bernegara. Karena itu sekelompok orang dengan militan memperjuangkan model yang diinginkanya.

Meskipun terdapat banyak ketidakpuasan, bagaimanapun reformasi telah menghasilkan sejumlah pencapaian yang penting dan strategis, antara lain kebebasan sipil, termasuk di dalamnya kebebasan pers. Dengan modal kebebasan itu kita memiliki peluang untuk bersama-sama membuang kerikil bahkan batu sekalipun dari jalan perubahan yang kita sepakati bersama. Dengan modal kebebasan itu kita bisa hadir sebagai kekuatan check and balance bagi pemerintah maupun politisi partai.

Suasana politik yang involutif, namun dengan spirit menyingkirkan kerikil itulah yang bisa kita tangkap dalam buku ini yang merupakan kumpulan artikel Denny J.A di Harian Jawa Pos dan Indo Pos ini. Sejak tahun 2002 penulis secara rutin mengisi rubrik Sorotan Minggu ini setiap hari Kamis di Jawa Pos, kemudian di Indo Pos.

Artikel-artikel ini pada dasarnya merekam dan menyoroti aneka isu: mulai dari kinerja pemerintahan Megawati, dinamika politik lokal, masalah Aceh yang menyita energi nasional, hingga hiruk-pikuk persiapan dan pelaksanaan pemilu 2004.

Di tangan penulis, isu dan peristiwa politik ini tidak hanya dihadirkan sebagai potret, tetapi lebih sebagai medium berdialog dengan publik luas guna menyingkirkan kerikil dari carut-marut perpolitikan di Indonesia. Buku ini adalah rekaman atas aneka jejak politik bangsa ini dalam melewati perubahan. Karena itulah buku ini diberi judul: Melewati Perubahan, Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia.

Untuk membantu pembaca fokus dengan tema-tema yang digarap penulis, artikel-artikel ini dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Bagian Pertama: Menyoroti Dinamika Reformasi, merupakan tempat bagi aneka artikel yang bisa dianggap merupakan rekam jejak dan catatan kritis tentang proyek reformasi Indonesia.

Bagian Kedua: Menyoroti Kinerja Lembaga Politik. Artikel-artikel yang mengupas kinerja pemerintahan, DPR, maupun partai politik dimasukkan dalam bagian ini. Bagian Ketiga: Menyoroti Dinamika Politik Daerah, merupakan tempat bagi artikel-artikel yang secara khusus menganalisis tokoh-tokoh politik, interaksi di antara mereka maupun analisis atas prospek politik mereka.

Bagian Keempat: Menyoroti Dinamika Politik Elite, merupakan rekam jejak analisis dan opini penulis tentang gejolak dan peristiwa politik di daerah. Bagian Kelima: Menyoroti Konflik dan Terorisme, merupakan tempat bagi aneka opini penulis yang berkaitan dengan masalah konflik di daerah, baik di Aceh, Ambon, maupun Poso, serta peristiwa, isu dan wacana yang berkaitan dengan terorisme di Indonesia.

Bagian Keenam: Menyoroti Pemilu 2004, merupakan rumah besar bagi opini dan analisis penulis berkaitan dengan pemilu 2004, baik regulasi dan sistemnya, kontestan, maupun penyelenggaraannya.

Semoga buku ini bermanfaat, tidak terutama sebagai dokumen yang mengajak Anda pembaca melihat ke belakang, melainkan ke depan: bagaimana membuat demokrasi yang dibangun dengan pengorbanan ini bertumbuh semakin hari semakin mantap.

Akhirnya, selama membaca!!!

Jakarta, Agustus 2006

Fransiskus Surdiasis

Editor

DAFTAR ISI

Pengantar	v
Daftar Isi	viii

Bagian Pertama

Menyoroti Dinamika Reformasi

- Keresahan Purnawirawan Atas Amandemen * 3
- Merosotnya Momentum Reformasi * 7
- Era Baru Politik Tentara * 10
- MPR Segera Jadi Dinosaurus? * 13
- Tentara dan Komisi Konstitusi * 16
- Bau Busuk di DPR * 19
- Korupsi Gotong Royong * 23
- Merosotnya Wibawa DPR * 27
- Mengendalikan Politik TV dan Radio * 30
- Konflik di Dalam Peradaban * 34
- Kontroversi Pasal Agama? * 37
- Lima Tahun Reformasi * 40
- Memecat Anggota DPR? * 43
- Meremehkan Mahkamah Konstitusi * 47

- Pemecatan Massal Anggota DPR? * 50
- ST MPR yang Terakhir? * 53
- Rehabilitasi Korban Komunisme * 57

Bagian Kedua

Menyoroti Kinerja Lembaga Publik

- Mendengar Progress Report Presiden * 63
- Nyanyian Sedih Buruh di Rantau * 66
- TKI, Kelemahan Komunikasi Mega * 69
- Mengontrol Perang Irak? * 72
- Wajah Buruh Era Reformasi * 76
- Tangis Buruh di Luar Negeri * 79

Bagian Ketiga

Menyoroti Dinamika Politik Daerah

- Menggugat Pemerintah Pusat * 85
- Jakarta Mencari Gubernur * 88
- Korupsi Mempersatukan DPRD * 91
- Heboh Pemilihan Gubernur * 94
- Membatalkan Pemilihan Gubernur * 97
- Mengatasi Gejolak Papua * 101

- DPD, Forum Petualang Politik? * 104
- Kasus Pelantikan Gubernur Sumsel * 107

Bagian Keempat

Menyoroti Dinamika Politik Elite

- PKB Digandeng Poros Tengah? * 113
- Intelektual Mendirikan Partai * 117
- Prospek Akbar Tandjung * 120
- Man of The Year 2002 * 123
- Laksamana vs. Amien Rais * 126
- Kaukus Penyelamatan Bangsa? * 129
- Megawati Di ujung Tanduk? * 133
- Menggoyang Presiden Megawati * 136
- Akhir Politik Gus Dur? * 139
- Kembalinya Akbar Tandjung? * 142
- SBY Dikucilkan dari Kabinet? * 145

Bagian Kelima

Menyoroti Konflik dan Terorisme

- Darurat Militer di Ambon? * 151
- Darurat Militer untuk Aceh? * 154

- Poso Kembali Bergolak * 157
- Babak Baru Konflik Aceh * 160
- Setahun Tragedi 11 September * 163
- Al Qaidah di Indonesia? * 167
- Menangkap Abu Bakar Ba'asyir? * 171
- Jejak Al Qaidah di Bali? * 175
- Terorisme di Pundak DPR * 179
- Akhir Islam Radikal? * 182
- Damai di Aceh? * 185
- Aceh Ingin Merdeka? * 188
- Menjepit Gerakan Aceh Merdeka * 192
- Ketegasan Buat Aceh * 195
- Tujuh Tentara yang Gugur * 199
- Teror Bom Mengguncang Jakarta * 202
- Pro Kontra Terhadap ISA * 205
- Menangkap Alumni Afganistan * 208
- Satu Tahun Bom Bali * 211

Bagian Keenam

Menyoroti Pemilu 2004

- Amien Rais Terbantur Segmentasi Politik * 217

- Sentimen Anti pemilu * 220
- Menyeleksi Calon Presiden * 224
- Bursa Calon Presiden * 227
- Upaya Menjegal Megawati? * 230
- Kontroversi UU Pemilu Presiden * 233
- Presiden dari Purnawirawan? * 236
- Ical, Surya Paloh, dan Kalla * 239
- Kerusuhan Buleleng Menjelang Pemilu * 242
- Komplikasi Pemilu di Aceh * 246
- Pemain Baru Pemilu 2004 * 249
- Upaya Menggagalkan Pemilu? * 252
- Dewan Penyelamat Partai? * 255
- Blunder Politik Muhammadiyah? * 258
- Wakil Presiden dari Golkar? * 261
- Koalisi Kaki Tiga untuk Presiden * 264
- Kemana Permainan Golkar Pasca Konvensi? * 267
- Memperebutkan Nahdatul Ulama * 271
- Duet Megawati-Hasyim Muzadi * 274
- Retaknya Gerbong NU * 278
- Mengapa Amien Rais Kalah? * 282
- Mengapa Wiranto Kalah? * 285

- Gerbong Golkar Melaju ke Mana? * 288
- Dukungan Partai Buat Capres *291
- Menunggu Sikap Politik Golkar * 295
- Beban Berat Presiden Baru * 298

Sumber Naskah

Daftar Buku Denny J.A

**BAGIAN PERTAMA
MENYOROTI DINAMIKA
REFORMASI**

DENNY J.A

Keresahan Purnawirawan Atas Amandemen

PARA purnawirawan TNI/Polri berbondong-bondong datang ke MPR. Di antara mereka terdapat mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Menhankam Edy Sudradjat, mantan Ketua MPR/DPR Kharis Suhud, mantan Kasospol ABRI Bambang Triantoro dan mantan Gubernur Jatim, M. Noer. Di zamannya, mereka adalah tokoh yang berpengaruh. Tidak heran, kedatangan mereka secara rombongan ke MPR mendapatkan perhatian nasional yang cukup besar.

Terlebih lagi, pesan yang mereka sampaikan sangat penting dan kontroversial. Mereka meminta MPR bersedia menghentikan proses amandemen UUD 45 yang sekarang sedang berlangsung. Lalu MPR membuat Komisi Konstitusi yang independen. Komisi ini akan mengkaji semua amandemen yang sudah dilakukan. Sebelum amandemen yang baru disahkan MPR, draft ini harus disetujui oleh rakyat terlebih dahulu melalui referendum.

Apa yang disampaikan oleh para purnawirawan ini adalah versi baru dari kekhawatiran mereka yang lama. Bahwa amandemen UUD

45 sudah kebablasan, dan negara terancam. Spirit UUD 45 harus diselamatkan. Seberapa baik rekomendasi para purnawirawan itu? Apa yang sebenarnya mereka khawatirkan?

Reformasi memiliki tuntutananya sendiri. Dipandang dari kaca mata spirit masa kini, kekhawatiran para purnawirawan itu benar sebagian. Namun terlalu konservatif pada bagian lainnya. Ada tiga momok yang mereka ingin hindari.

Pertama, momok Piagam Jakarta. Para purnawirawan sangat khawatir jika pasal 29 UUD 45 diganti Piagam Jakarta. Kekhawatiran para purnawirawan didasarkan kepada pengalaman tahun 1950an. Betapa saat itu negara dalam keadaan krisis karena debat konstitusi antara paham Islam dan paham kebangsaan. Mereka juga merasakan betapa isu agama acapkali membelah masyarakat Indonesia secara dalam. Sementara pelopor Piagam Jakarta kini semakin aktif mempropagandakannya, baik di kalangan partai politik ataupun aneka gerakan Islam garis keras.

Kekhawatiran para purnawirawan atas Piagam Jakarta itu sah dan harus didengar. Namun kekhawatiran itu dapat dihindari tanpa perlu menyetop amandemen yang kini sedang berlangsung. Komunitas Islam di Indonesia beragam. Isu Piagam Jakarta justru ditolak oleh kalangan Islam sendiri yang datang dari tradisi yang berbeda. Politisi Islam yang berasal dari PDI-P, Golkar, PKB dan PAN menolak Piagam Jakarta. Sementara organisasi masyarakat Islam yang terbesar di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah juga menolak Piagam Jakarta. Mayoritas anggota MPR juga berada di belakang spirit purnawirawan.

Momok kedua yang dikhawatirkan adalah munculnya Dewan Perwakilan Daerah. Para purnawirawan menginginkan agar utusan daerah dan utusan golongan di MPR dipertahankan, sebagaimana yang ditetapkan oleh the Founding Fathers.

Agaknya para purnawirawan mengkhawatirkan jika daerah menguat dan tidak lagi mampu dikontrol pusat. Jika daerah menguat untuk mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pluralisme dan pembangunan ekonomi, itu tentu baik. Namun bagaimana jika sebaliknya. Misalnya daerah semakin kuat, dan muncul pula gerakan separatis dan pergolakan daerah?

Dari Aceh sampai Maluku dan Papua sudah muncul aneka gerakan separatis. Belum lagi terhitung banyaknya konflik primordial di daerah, mulai dari isu agama, isu etnik, sampai dengan isu penduduk asli dan pendatang. Sudah lebih dari sepuluh ribu warga terbunuh karena konflik jenis ini. Daerah dapat juga menolak kebijakan pusat seperti kasus Semen Padang. Dalam kondisi seperti ini, jika daerah justru lebih diberikan kekuasaan dalam DPD dengan sistem bicameral, bukankah NKRI diambang bahaya?

Kekhawatiran purnawirawan atas DPD juga sah, namun berlebihan. Pendukung DPD dalam sistem bicameral di MPR sekarang memang sama banyak bahkan mungkin lebih banyak daripada sistem MPR sekarang ini. Namun separatisme, pergolakan dan kerusuhan di daerah sama sekali terpisah dengan persoalan DPD atau tidak DPD, unikameral atau bicameral.

Pergolakan daerah dan kemampuan kontrol pemerintah pusat sangat tergantung dari leadership pemerintahan pusat sendiri. Banyak contoh negara unicameral ataupun bicameral yang baik ataupun yang buruk. DPD dan bikameral hanyalah variabel lembaga yang tidak otomatis membuat sebuah negara menjadi baik dan buruk. Amandemen UUD 45 tidak perlu disetop karena kekhawatiran lahirnya DPD dan sistem bikameral.

Momok ketiga adalah konstitusi baru. Berulang-ulang para purnawirawan ini menyatakan komitmennya kepada substansi jiwa dan isi UUD 45. Mereka menentang konstitusi baru. Para purnawirawan memang mengajukan komisi konstitusi. Namun tugas komisi konstitusi ini justru menjaga agar jiwa dan isi UUD 45 tetap mewarnai konstitusi yang diamandemen.

Para purnawirawan tentu dilatar belakangi oleh sejarah Indonesia sendiri. Mereka merasakan secara langsung ataupun tidak, pergantian konstitusi UUD 45, UUD RIS dan UUDS 50. Di luar UUD 45 yang mereka lihat kegagalan demi kegagalan. UUD RIS menunjang Indonesia Serikat. UUD ini dianggap menentang NKRI dan karena itu hanya berlaku sementara. UUDS 50 memang berlaku lebih panjang. Namun UUDS 50 juga dinilai liberal dan membuat pemerintah justru naik dan turun dalam waktu yang cepat sekali.

Hanya UUD 45 yang dianggap oleh para purnawirawan berhasil. Pemerintahan stabil dan pembangunan ekonomi tumbuh. Memang negara menjadi otoriter. Namun seperti yang dikatakan pemikir yang dekat dengan kalangan ini, penyebabnya bukan konstitusi, tetapi infrastruktur politik dan ekonomi yang ada dalam Orde Lama dan Orde Baru. UUD 45 sebagai konstitusi tidak bersalah. Mengapa UUD 45 itu yang harus dirombak total? Konstitusi yang sama sekali baru tentu saja ditentang oleh para purnawirawan ini. Konstitusi baru mereka anggap justru dapat membuat negara bubar.

Kekhawatiran ini yang paling berlebihan. Tidak hanya Indonesia yang bertransisi ke demokrasi. Sejak tahun 1974, lebih dari 40 negara yang menuju demokrasi. Umumnya negara itu juga mengembangkan konstitusi yang sama sekali baru. Contoh mutakhir adalah Thailand dan Afrika Selatan. Dengan konstitusi yang sama sekali baru, negara itu justru semakin kokoh sebagai negara demokrasi. Konstitusi baru sama sekali tidak membuat negara itu bubar.

Harus diakui semua rekomendasi yang diberikan para purnawirawan dilandasi oleh komitmen mereka yang tinggi atas masa depan bangsa. Namun komitmen itu tidak harus berujung pada rekomendasi untuk menghentikan amandemen konstitusi. Dunia baru memiliki spiritnya sendiri yang mungkin sulit dipahami oleh mereka yang bukan menjadi putra zamannya. **

Merosotnya Momentum Reformasi

SETELAH empat tahun lahirnya gerakan reformasi, apa yang telah kita capai? Ratusan mahasiswa menaburkan bunga di atas foto Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Secara simbolik mereka menyatakan bahwa reformasi sudah mati. Sementara Harian Kompas mempublikasikan lebih dari delapan puluh persen responden kecewa dengan reformasi, baik di bidang ekonomi, politik dan hukum.

Aneka talk show, editorial dan berita menggambarkan kekecewaan yang sama. Disebut-sebut betapa korupsi semakin parah, dan hukum tidak ditegakkan secara adil kepada para konglomerat hitam. Sementara kerusuhan di Ambon dan Aceh tetap tidak tertangani. Pembunuhan politik tetap terjadi, seperti yang dialami Theys di Papua. Mengapa momentum reformasi terus merosot? Apa akar dari kekecewaan publik?

Siapa pun yang menjadi pemimpin di era Orde Reformasi akan menghadapi warisan Orde Baru yang sangat sulit diatasi. Salah satunya adalah kultur korupsi, terutama di kalangan politisi, yang sudah sedemikian akut. Begitu parahnya kultur korupsi, sehingga berbagai tokoh reformasi yang dulu dikenal hidup sederhana dan punya komitmen atas demokrasi, juga tidak dapat lepas dari lilitan kultur korupsi itu.

Pemerintahan Soeharto saat itu dapat digolongkan ke dalam tipe "Predatory State." Secara umum, istilah ini dapat diterjemahkan menjadi pemerintahan pencuri. Pemerintahan ini mengutamakan pembangunan ekonomi. Lalu lintas dana sangat melimpah, terutama berasal dari utang luar negeri. Sementara kestabilan politik sangat dijaga. Stabilitas ini dipelihara dengan corak politik yang sangat represif dan otoritarian. Akibatnya kontrol masyarakat atas politik dan arus dana yang melimpah sangat tidak memadai.

Pemerintah memelihara dukungan politik dengan segala cara. Mereka yang sudah loyal terus dipelihara loyalitasnya. Sementara mereka yang berposisi diupayakan untuk dikooptasi agar menjadi bagian dari kekuasaan. Predatory State memelihara dukungan politik dengan memberikan reward ekonomi. Dana yang melimpah, yang tidak terkontrol, menjadi bagian dari money politics. Korupsi pun menjamur. Korupsi ini menjadi sangat fungsional dan terus mengakar karena ia menjadi variabel penting konsolidasi kekuasaan. Semakin besar dana yang dibutuhkan untuk konsolidasi politik, semakin besar pula korupsi yang dibutuhkan. Itulah sebab mengapa korupsi sangat sulit diberantas.

Ketika Soeharto dijatuhkan, konstruksi predatory state ini tidak sepenuhnya hilang. Elite baru di Orde Reformasi juga berkepentingan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Sekali lagi korupsi menjadi bagian penting dari transaksi kekuasaan. Tidak mengherankan, ketika kekuasaan tersebar ke banyak tangan, korupsi pun semakin ke banyak pihak.

Disamping warisan Orde Baru, hal lain yang menyulitkan reformasi adalah corak transisi menuju demokrasi. Berdasarkan perbandingan dengan negara lain, transisi demokrasi dapat digerakkan dari atas. Pemerintahan yang berkuasa itu sendiri menjadi sponsor transisi. Namun transisi dapat juga digerakkan dari bawah. Ini terjadi jika revolusi digerakkan oleh oposisi yang menjungkirbalikkan penguasa. Transisi dapat juga terjadi karena kerja sama oposisi di luar pemerintahan dan sebagian elite pemerintahan yang saat itu tengah berkuasa.

Indonesia menempuh jalan ketiga transisi, kerja sama antara oposisi dan sebagian elite yang berkuasa. Ketika terjadi pemilu demokratis, pola ini bertahan. Sebagian elite di pro reformasi menang dan berkuasa, sementara para elite lama juga ikut menang dan berkuasa pula. Para elite lama terus mengembangkan mental politik lama dan bermasalah di masa silam. Mudah diduga, para elite lama ini akan terus membuat manuver untuk menutupi kesalahannya di masa silam, berikut meneruskan mental korupnya sejauh itu dimungkinkan.

Konstruksi aliansi ini turut mempersulit reformasi. Elite baru yang ingin menegakkan sistem yang pro reformasi selalu terganjal oleh elite lama yang juga masih bercokol di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menjadi masalah, elite baru ini tergantung pula dengan elite lama dalam menjalankan kekuasaannya. Ini cukup menjelaskan mengapa pemerintahan reformasi sulit sekali membongkar kasus korupsi besar di masa silam, ataupun kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan para tokoh sangat penting.

Di samping itu, kesulitan reformasi juga disebabkan oleh lemahnya leadership para pemimpin Orde Reformasi. Banyak sekali momentum yang hilang karena para pemimpin memiliki kelemahan yang elementer. Habibie menghilangkan momentum itu karena tersangkut kasus Bank Bali. Gus Dur membuang momentum itu karena terkena kasus Buloggate 1 dan Bruneigate. Megawati mengalami

kesulitan karena partner politik di Golkar terkena Buloggate 2, dan kuatnya konservatisme politik di lingkaran partainya.

Padahal sejak era Habibie, seharusnya momentum itu digunakan untuk meletakkan fondasi yang kokoh bagi reformasi. Saya bayangkan, Indonesia tidak akan mengalami kesulitan seperti sekarang, jika sejak awal, di era Habibie, konstitusi sudah diamandemen. Aneka spirit reformasi otomatis akan menjadi aturan tertinggi karena ia tertulis dalam konstitusi yang sudah diamandemen itu. Saat itu momentum reformasi sedang tinggi-tingginya. Sangat sayang hal ini tidak terjadi.

Kesempatan kedua yang sia-sia terjadi di era Gus Dur. MPR dan DPR sudah merupakan hasil pemilu Orde Reformasi. Gus Dur juga merupakan presiden pertama yang terpilih secara demokratis. Sangat sayang kesempatan emas ini tidak ia lakukan untuk mengamandemen konstitusi, bersama MPR yang dulu sangat mendukungnya. Ia malah terlibat dalam aneka kontroversi akbiat pernyataan yang "nyeleneh." Perhatiannya habis mengurus hal yang "tetek bengkek" ketimbang masalah yang fundamental.

Kini kesempatan berada di tangan Megawati dan PDI Perjuangan. Akan pula disayangkan jika Megawati dan PDI Perjuangan tidak menjadi solusi bagi amandemen konstitusi, namun justru menjadi problem.

Setelah empat tahun momentum reformasi itu melemah. Publik semakin apatis. Tanpa inovasi, leadership dan komitmen dari para pemimpin yang kini sedang berkuasa, reformasi yang sekarat itu akan benar-benar mati. Jika ini terjadi, para pemimpin yang ada sekarang akan dicatat dengan tinta hitam karena telah membuang kesempatan sejarah. **

Era Baru Politik Tentara

"DARI dulu saya tidak suka politik," ujar KASD Letjen Ryamizard Ryacudu ketika baru terpilih. "Politik saya," sambungnya, "adalah politik negara, menjaga agar negara kesatuan tidak pecah. Jika terancam pecah, saya maju. Masalah kekuasaan dan lain-lain, itu bukan urusan saya."

Sementara calon panglima TNI Endriartono Sutarto dikenal sebagai emimpin yang sama tegas dan kerasnya. Sebagai KSAD di era pemerintahan Gus Dur, Sutarto juga menolak mematuhi Presiden selaku Panglima TNI/Polri tertinggi untuk menjalankan Dekrit Presiden. Kepatuhan politiknya, menurut Sutarto adalah kepada konstitusi negara. Ia menolak tentara dijadikan alat politik dan kekuasaan. Karena menilai Dekrit Presiden tidak bersandarkan konstitusi, ia menolak tegas dan bersedia menanggung resikonya.

Sikap kedua pimpinan teras TNI AD ini membangkitkan optimisme bahwa tentara tengah memang memasuki era yang sama sekali baru, yang sejalan dengan spirit reformasi.

Salah satu tugas terberat Orde Reformasi adalah mereformasi tentara. Sudah begitu lama tentara Indonesia tumbuh dan besar di rezim Orde Baru dengan doktrinnya sendiri. Saat itu Dwi Fungsi menjadi semacam “dua kalimat syahadat” bagi politik tentara. Doktrin ini menjadi basis legal dan ideologis bagi keterlibatan tentara di dunia politik dan ekonomi. Tentara pun menjadi alat kekuasaan sekaligus menjadi salah satu penguasa itu sendiri.

Saat itu tentara membawahi polisi. Tidak hanya masalah pertahanan, namun masalah keamanan juga menjadi urusan tentara. Polisi tumbuh menjadi partner junior yang tunduk kepada politik tentara. Pimpinan tentara aktif banyak pula yang menjadi pejabat publik. Istilah populer saat itu, tentara dikaryakan. Ada yang menjadi gubernur, duta besar dan menteri. Ada pula yang menjadi anggota DPR/MPR. Banyak pula yang aktif berbisnis melalui aneka lembaga.

Karena perannya yang sentral dalam menjaga stabilitas negara dan kepentingan penguasa, tentara pun banyak terlibat dalam kasus. Kini kasus ini ramai disebut sebagai pelanggaran HAM. Antara lain, kasus yang populer adalah terbunuhnya Marsinah, penculikan aktivis menjelang kejatuhan Soeharto, serta Trisakti. Belum lagi terhitung aneka kekerasan yang terjadi di Aceh, Papua, sampai Timor Timur yang saat itu belum merdeka.

Peran tentara di masa silam niscaya kini menjadi warisan berat bagi pimpinan tentara masa kini. Sebagian senior mereka akan terus dibayangi pengadilan hak asasi. Aneka privilege yang dulu dimiliki tentara dikurangi satu per satu. Reformasi membuat tentara harus mengubah paradigma dan doktrin inti. Kini Dwi Fungsi ABRI sudah dikuburkan. Para pemimpin tentara ingin konsisten dengan era baru tentara yang tidak lagi berpolitik.

Namun seberapa mudah perubahan paradigma tentara itu? Sungguhpun ada komitmen di tingkat pucuk pimpinan tentara, seberapa mudah perubahan internal yang mendasar itu dijalankan di tingkat bawah? Kelembagaan politik tentara (Kasospol) memang sudah dihapuskan. Polisi sudah dipisahkan dari tentara. Tidak ada lagi tentara aktif yang menjadi pejabat publik. Persidangan pelanggaran HAM oleh oknum tentara sudah dilakukan.

Namun pemisahan polisi dan tentara belum berjalan mulus. Masih sulit bagi kedua lembaga itu untuk berjalan sebagai mitra yang sejajar. Kasus Ambon misalnya, menunjukkan kesulitan koordinasi. Antara polisi dan tentara bukannya saling bekerjasama menjaga keamanan warga negara. Dua lembaga itu bahkan kadang terlibat untuk saling tembak. Akibatnya oknum polisi dan oknum tentara justru menjadi pihak yang harus diamankan.

Kekerasan politik tidak juga serta merta berhenti. Kasus kematian Theys, pemimpin kharismatik Papua pada 2002 membangkitkan kembali dugaan keterlibatan tentara atau oknum tentara dalam kekerasan yang bermotif politik. Seperti banyak kasus kekerasan politik di era Orde Baru, kasus ini pun sulit dibuktikan di ruang pengadilan.

Tentara pun masih gamang dengan posisi politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Memang sudah ada komitmen tentara untuk tidak lagi di DPR sampai tahun 2004, tetapi masih akan tetap di MPR sampai tahun 2009. Tentara juga belum memperlihatkan sikap yang tegas atas kontroversi soal Utusan Golongan. Kegamangan sikap yang masih abu-abu ini akan mudah ditafsirkan bahwa tentara masih ingin duduk di MPR melalui Utusan Golongan.

Mungkin sebagian pemikir tentara merasa itu adalah solusi yang adil bagi tentara untuk duduk di Utusan Golongan. Tentara tidak punya hak untuk dipilih. Sehingga harus ada penjatahan politik di MPR bagi kelompok yang tidak berhak dipilih.

Namun keberadaan tentara di Utusan Golongan akan merusak kaidah politik. Tentara pada dasarnya bawahan presiden. Jika tentara duduk di MPR (melalui Utusan Golongan), saat itu tentara menjadi atasan presiden karena MPR adalah lembaga tertinggi. Bagaimana mungkin tentara dapat menjadi bawahan sekaligus atasan presiden.

Masalah lain yang masih mengganjal peran tentara di era reformasi adalah persoalan bisnis. Ramai diketahui bahwa lembaga tentara juga mengelola bisnis. Awalnya kegiatan bisnis itu memang punya tujuan sosial. Kesejahteraan tentara, terutama di lapisan bawah, sangat memprihatinkan. Anggaran resmi negara untuk kesejahteraan tentara masih belum mencukupi. Kegiatan bisnis itu dapat menambal kecilnya kesejahteraan tentara. Jika tidak ada bisnis, dari mana dana untuk ekstra kesejahteraan itu didapat? Di sisi lain, jika terus berbisnis, akan ada conflict of interest di tubuh tentara sendiri, antara kepentingan negara dan netralitas politik dengan kepentingan bisnis.

Inilah sebagian pekerjaan rumah yang dihadapi duet baru Endriartono Sutarto dan Ryamizard Ryacudu. Sejauh mana kedua tokoh ini mampu menyelesaikan pekerjaan rumah reformasi TNI, sejarahlaj yang nanti mencatatnya. **

MPR Segera Jadi Dinosaurus?

HARI-hari ini elite politik sedang sibuk menyiapkan dan menyambut Sidang Tahunan MPR 1-10 Agustus 2002. Yang istimewa, Sidang Tahunan kali ini mungkin menjadi Sidang Tahunan MPR terakhir dengan format lama. Penyebabnya, MPR, sang tuan rumah, segera berubah wajah.

MPR agaknya, mengikuti jejak Dinosaurus, makhluk yang sangat perkasa, namun kemudian hilang dari bumi. Lingkungan baru membuat Dinosaurus itu tidak lagi dapat bertahan hidup lalu punah. Sebagaimana Dinosaurus di dunia, MPR juga adalah lembaga paling berkuasa di Indonesia. Dalam format lama, bahkan MPR disebut dengan lembaga tertinggi negara, dan pelaksana kedaulatan rakyat. Sebagaimana Dinosaurus, lingkungan baru reformasi membuat MPR dengan format lama tidak lagi sesuai. Nama MPR memang tetap digunakan. Tetapi kekuasaan dan strukturnya berubah secara sangat mendasar.

Sidang tahunan ini akan menjadi finalisasi perubahan wajah MPR untuk lima kategori. Pertama, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Di era politi otoriter, format lembaga tertinggi itu lazim diterima. Namun di era demokrasi, lembaga tertinggi justru menjadi bahaya.

Demokrasi mengasumsikan bahwa setiap lembaga mungkin membuat kesalahan. Jika lembaga itu posisinya tertinggi dan tidak dapat dikontrol lembaga lain, maka kesalahan lembaga tertinggi hanya dapat dikoreksi oleh pemberontakan dan revolusi, lembaga tertinggi itu hanya mengkonsolidasikan otoriterisme. Dalam sejarah MPR memang pernah membuat kesalahan yang tidak bisa dikoreksi secara damai. Misalnya, MPR (S) pernah mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

Karena bukan lagi lembaga tertinggi, MPR dianggap tidak lagi layak menilai laporan dari aneka lembaga tinggi negara seperti presiden dan mahkamah agung. Bahkan mulai tahun ini, progress report dari lembaga tinggi negara itu hanya didengarkan saja oleh MPR.

Kedua, komposisi MPR juga sangat mungkin berubah melalui Sidang Tahunan 2002. Dari suara yang berkembang, baik di lingkungan MPR maupun publik luas, ke depan semua anggota MPR sebaiknya dipilih. Akibatnya semua anggota yang diangkat harus dihilangkan, termasuk Utusan Golongan dan TNI/Polri. MPR berubah komposisinya hanya menjadi joint session DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Ketiga, MPR tidak lagi memproduksi aturan hukum yang lebih tinggi dari Undang-Undang. MPR hanya diberikan wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD saja. TAP MPR dalam format lama sekarang dianggap barang haram, meminjam istilah pakar hukum tata negara Harus Al Rasyid. Legislasi yang tertinggi di bawah UUD adalah undang-undang.

Keempat, MPR tidak lagi berfungsi memilih presiden. Memang kini masih kuat keinginan sebagian pihak agar MPR masih memilih presiden. Setelah dipilih langsung oleh rakyat di putaran pertama, dua calon tertinggi (jika tidak ada yang meraih mayoritas), akan dipilih MPR. Namun kian hari aspirasi MPR memilih presiden makin kecil. Partai besar menunjukkan gelagat menyetujui pemilihan langsung oleh rakyat bahkan untuk putaran kedua. MPR pun kehilangan kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menjadi presiden RI.

Kelima, MPR juga tidak dapat memecat presiden secara mudah. Sebelumnya, jika DPR meminta MPR bersidang melalui memorandum 1, 2 dan 3, kendali berada di tangan MPR sepenuhnya untuk memberhentikan presiden. Hal ini tidaklah sulit bagi MPR mengingat seluruh anggota DPR, sebagai pengusul, adalah juga mayoritas anggota MPR.

Namun kini, MPR harus berbagi kekuasaan dengan mahkamah konstitusi. Mahkamah ini yang akan menilai dari sisi hukum, apakah memang ada pelanggaran hukum oleh presiden. Jika Mahkamah Konstitusi mengatakan belum cukup bukti pelanggaran hukum, maka MPR juga tidak dapat berbuat apa-apa.

Mengapa terjadi perubahan mendasar ini? Energi reformasi begitu kuatnya. Tidak cukup hanya kebebasan politik yang diminta oleh gerakan reformasi, kelembagaan negara juga dituntut berubah. Lembaga presiden sudah direformasi dengan membatasi sang presiden berkuasa hanya dua periode. Lembaga DPR sudah pula direformasi dengan memberikannya kekuasaan legislator utama. Kini giliran MPR yang diterpa angin reformasi.

Tentu ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam perubahan wajah MPR. Yang dirugikan jelaslah kelompok yang akan hilang. Mereka adalah Utusan Golongan dan TNI/Polri, yang

selama ini masuk ke dalam MPR melalui proses pengangkatan bukan pemilihan.

Yang memperoleh keuntungan adalah lembaga baru seperti DPD. Utusan Daerah dinaikkan posisinya menjadi sebuah lembaga dan kamar sendiri dalam DPD. Tentu saja DPD mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar dibandingkan Utusan Daerah. Lembaga tinggi negara lain, mulai dari presiden sampai Mahkamah Agung diuntungkan pula karena tidak lagi mempunyai "bos besar" yang mengawasi dengan kepentingannya sendiri.

Adakah komplikasi dengan perubahan wajah MPR dalam Sidang Tahunan 2002 ini? Karena sudah terbentuk lebih dari 40 tahun, MPR format lama tentu saja masih mempunyai pendukungnya. Di samping Utusan Golongan dan TNI/Polri yang terancam hilang oleh format baru, kalangan nasionalis lama juga menentang perubahan wajah MPR karena kecintaan mereka atas UUD 45 yang asli.

Mereka tentu akan terus bertarung dengan cara yang konstitusional sampai tetes darah yang penghabisan. Sidang Tahunan MPR 2002 menjadi pertempuran terakhir antara mereka yang ingin mempertahankan format MPR lama melawan pendukung MPR wajah baru. **

Tentara dan Komisi Konstitusi

TIDAK diduga, yang menjadi leader dalam ST MPR 2002 bukanlah partai politik besar yang menang pemilu, tetapi Fraksi TNI/Polri, yang semua anggotanya diangkat. Ketika aneka partai besar masih memaksakan diri untuk menuntaskan amandemen keempat dan bersikap antipati atas konstitusi transisi, TNI/Polri justru menawarkan perlunya amandemen sekarang berlaku hanya sebagai konstitusi transisi. Lalu ada Komisi Konstitusi yang menyempurnakan konstitusi itu.

Ketika partai lain masih menimbang-nimbang apakah Komisi Konstitusi itu memang diperlukan saat ini, Fraksi TNI/Polri bahkan sudah siap dengan komposisi keanggotaan Komisi Konstitusi yang tergolong maju. Mengapa TNI/Polri kini terkesan jauh lebih liberal bahkan dibandingkan dengan partai politik besar sekalipun?

Tanpa Komisi Konstitusi, hampir dapat dipastikan seluruh proses amandemen yang kini berlaku hanya melahirkan konstitusi yang

compang-camping. Kenyataan ini jelas berbahaya, tidak saja dari segi sistematika perundang-undangan, tetapi juga dari kemungkinan adanya konflik kelembagaan. Konstitusi hasil amandemen tidak koheren dalam platform politik.

Proses amandemen konstitusi kita tidak mengikuti kaidah dan metodologi reformasi konstitusi yang benar. Sesuai dengan pengalaman baku negara lain, seharusnya proses dan metodologi perubahan ini berjalan dalam empat tahap yang sinkron.

Pertama, tahap kesepakatan blueprint, yang merupakan intisati dan pedoman nilai dari konstitusi yang akan dihasilkan. Dalam tahap ini, sudah ditentukan platform kelembagaan apa yang diinginkan. Misalnya, sudah diputuskan bahwa semua anggota perwakilan rakyat harus dipilih. Dengan blueprint yang sudah disepakati, perdebatan soal Utusan Golongan, MPR sebagai the supreme body atau Piagam Jakarta, tidak lagi terjadi.

Kedua, proses penjabaran. Tahap kedua ini merupakan perombakan pasal demi pasal mengikuti garis pedoman blueprint yang sudah ditetapkan. Karena sudah ada blueprint, menjadi jelas pasal mana yang harus dibuang, pasal mana yang semestinya dipertahankan.

Ketiga, tahap proses validasi. Sebelumnya sudah dibentuk dulu lembaga semacam Mahkamah Konstitusi, atau Mahkamah Agung yang diberikan otoritas tersendiri. Mahkamah ini yang membuat validasi apakah proses penjabaran pasal demi pasal itu sesuai dengan blueprint yang sudah disepakati.

Keempat, adalah tahap peresmian. Setelah validasi selesai, MPR selaku pemegang kewenangan konstitusi meresmikan amandemen. Dalam tahap ini tidak ada lagi perdebatan atau kompromi. Segala hal sudah dievaluasi pada tahap ketiga.

Proses amandemen kita tidak terjadi dengan metodologi yang benar. Anggota MPR langsung masuk mengubah pasal per pasal

yang dicicil per tahun. Tidak ada blueprint, dan tidak ada pula validasi. Sangatlah mungkin, dengan cara ini, pasal yang satu akan bertentangan dengan pasal lain.

Satu saja contohnya, soal sistem presidensialisme. Jika amandemen keempat ini disepakati, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat bahkan di putaran kedua. Namun, pada amandemen sebelumnya, presiden tidak diberikan hak veto atas RUU yang dibuat DPR. Sangat mungkin, presiden yang terpilih kelak, harus bekerja dengan UU yang dibuat DPR. Padahal dalam konteks multi partai, hampir dapat dipastikan, partai presiden tidak menguasai lebih dari 50% kursi DPR. Tidak mustahil, UU yang dihasilkan DPR itu sebenarnya bertentangan dengan platform politik presiden sendiri.

Ditinjau secara akademik murni, Komisi Konstitusi diperlukan untuk sinkronisasi hasil amandemen kita yang carut marut. Melalui Komisi Konstitusi, setidaknya aneka potensi konflik kelembagaan dapat diantisipasi dan diselesaikan. Persoalannya, apa yang baik secara akademis, belum tentu akan terealisasi secara politik. Baik dan buruk secara akademis ditentukan oleh pertimbangan ilmiah. Sedang terealisasi atau tidak di alam nyata, ditentukan oleh dukungan politik mayoritas.

Melihat pertarungan yang ada di MPR sekarang, Komisi Konstitusi hanya dijadikan sekoci politik. Partai besar agaknya ingin berjuang sehabis-habisnya untuk menyelesaikan amandemen keempat. Setelah selesai, energi yang ada ingin mereka konsentrasikan untuk membuat UU Politik sebagai operasionalisasi konstitusi yang sudah diamandemen. Misalnya, membuat UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Presiden, UU Mahkamah Konstitusi. Mengangkat Komisi Konstitusi dianggap hanya menunda perkelahian politik. Ini justru akan memberikan beban kepada pemerintah di tahun selanjutnya.

Namun melihat sikap partai-partai besar, Komisi Konstitusi tidak akan terbentuk. Komisi Konstitusi hanya mungkin terbentuk jika ada

kemungkinan deadlock dalam Sidang Tahunan MPR 2002. Ini terjadi misalnya, kelompok yang menolak amandemen ketiga dan/atau keempat cukup besar. Penolakan kelompok ini harus diakomodasi jika tidak menginginkan deadlock. Pembentukan Komisi Konstitusi akan dipilih sebagai sekoci politik, untuk penyelamatan sementara.

Sekali Komisi Konstitusi dipilih, gagasan yang dikemukakan TNI/Polri dianggap yang paling maju sekaligus kompromistis. Koalisi Ornop untuk konstitusi baru memang lebih memiliki konsep yang liberal dan maju. Namun karena mereka menolak anggota MPR masuk ke dalam Komisi Konstitusi, gagasan Koalisi Ornop itu tidak populer di kalangan anggota MPR. Sedangkan gagasan TNI/Polri jelas mengakomodasi setiap fraksi MPR, juga memberi tempat kepada birokrat yang ditunjuk presiden, di samping ada ruang pula bagi Utusan Daerah, para pakar dan tokoh masyarakat.

Mengapa ide yang cukup maju ini lebih cepat dikemukakan oleh TNI/Polri, bukan oleh partai politik besar? Di sinilah canggihnya TNI/Polri dalam berpolitik. Ketika partai besar sibuk dengan persoalan internalnya masing-masing, TNI/Polri berlari terlebih dahulu dengan pandangan yang visioner. Semoga TNI/Polri ikut dalam politik hanya dalam situasi genting saja. **

Bau Busuk di DPR

LEMBAGA DPR membutuhkan shock therapy, sebuah metode penyembuhan radikal yang sedikit mengguncangkan politik nasional dan membuat jera para anggotanya. Ide ini muncul seketika merespons perkembangan terakhir di lembaga yang terhormat ini. Metode solusi biasa, agaknya tidak lagi mempan.

Isu kasus suap anggota DPR oleh BPPN dalam rangka divestasi Bank Niaga bukan merupakan isu pertama dan sangat mungkin bukan pula isu sejenis yang terakhir. Sebelumnya, ada pula isu faktor uang dalam divestasi BCA. Sebelumnya lagi, ada isu money politics dalam penyelesaian kasus BLBI di DPR.

Seperti biasa, isu itu menghangat, kemudian menghilang digantikan isu nasional lain yang sensasional dan lebih baru. Isu itu kembali menguap tanpa solusi dan preseden yang membuat jera.

Apakah korupsi di negeri kita ini memang sudah memasuki stadium ganas yang mematikan? Lalu, kita tinggal menunggu saja kematian Ibu Pertiwi?

Banyak ironi yang dilahirkan oleh gerakan reformasi. Sejak 1955, melalui gerakan reformasi, untuk kali pertama kita melakukan pemilu demokratis yang bebas pada 1999. Walau belum sempurna, DPR hasil 1999 diakui sebagai lembaga yang mewakili rakyat secara sah. Suara di DPR itu adalah suara rakyat. Rakyat menitipkan pula kepada DPR untuk menerangi korupsi yang menjadi agenda utama reformasi.

Setelah reformasi bergulir tahun demi tahun, korupsi tidak bertambah hilang. Aneka undang-undang korupsi dibuat, namun korupsi justru semakin menyebar ke banyak tangan. Ironisnya, korupsi tersebut bahkan dituduhkan terjadi di lembaga DPR itu sendiri.

Bagaimana lembaga DPR ini dapat mengurangi korupsi jika dalam lembaga itu sendiri praktik korupsi seperti suap terus berjungkit? Sebagai lembaga pengawas, ternyata DPR justru harus paling harus diawasi. Sebagai lembaga pengontrol, DPR justru harus paling harus dikontrol. Jika presiden dituduh melakukan korupsi, presiden dapat dijatuhkan seperti kasus Gus Dur. Bagaimanakah jika anggota dan ketua DPR yang dituduh? Apakah mereka juga dapat dijatuhkan?

Ada tiga langkah untuk memberikan shock therapy kepada lembaga DPR. Namun masing-masing langkah itu agaknya sulit terlaksana. Pertama, langkah sanksi yang tegas bagi anggota yang memang korup. Misalnya, dibentuk Dewan Kehormatan DPR untuk menilai dan memberikan sanksi kepada anggota yang dituduh.

Namun, sebelum menuju ke Dewan Kehormatan, usul sanksi itu harus diproses di Badan Musyawarah dan disetujui pula di rapat pleno DPR. Dan sebelum dibawa ke Badan Musyawarah, harus pula ada laporan resmi dari anggota yang mengusulkan sanksi itu untuk dibahas.

Seandainya pun ada yang nekat mengusulkan isu korupsi itu ke Badan Musyawarah, apakah Badan Musyawarah bersedia

meneruskannya ke sidang pleno? Apakah sidang pleno bersedia merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan? Apakah Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi tegas?

Mekanisme tersebut melibatkan ratusan anggota DPR. Jika memang praktik korupsi sudah menjadi cara lazim anggota DPR menambah pendapatan, dengan sendirinya dapat diduga bahwa kasus itu akan mati di tengah jalan. Sangat sedikit anggota DPR yang berani mengambil resiko mengungkapkan isu korupsi di DPR.

Sangat mungkin pihak yang bersangkutan juga terlibat menerima amplop dalam kasus lain. Yang terjadi kemudian adalah self mechanism, yakni masing-masing pihak di DPR saling melindungi. Persis seperti yang terjadi dalam kasus pembentukan Pansus Skandal Bulog jilid kedua.

Seandainya kasus itu diserahkan kepada polisi untuk diselidiki, akhir kasus itu sudah dapat diduga. Katakanlah presiden mengizinkan anggota DPR yang dituduh untuk diperiksa. Lalu, lakukanlah proses Pengadilan yang sangat panjang. Bahkan, mungkin vonis pengadilan negeri dijatuhkan dan anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah, walau belum ada keputusan final.

Toh, anggota yang bersangkutan masih bisa banding dan aktif sebagai anggota DPR. Mereka akan berkata, bukankah Ketua DPR Akbar Tandjung sendiri juga menempuh jalan yang sama?

Kedua, untuk mengurangi korupsi di DPR, dilakukan langkah yang lebih moderat. Mungkin disadari gaji anggota DPR itu kurang. Berpolitik di Senayan itu mahal. Gaji yang ada sekarang untuk hidup di Jakarta, lobi di hotel, membayar iuran partai, dan kadang-kadang memberi sumbangan kepada konstituante tidak memadai. Menurut pikiran rasional, gaji anggota DPR akan dinaikkan dengan janji akan ada sanksi keras bagi anggota yang masih korupsi setelah gajinya dinaikkan.

Namun, menaikkan gaji anggota DPR saja tentu akan diprotes publik. Bagaimana dengan gaji guru? Bagaimana dengan gaji

pegawai negeri? Mengapa gaji wong cilik tidak dinaikkan, tetapi malah para elite di Senayan yang lebih diperhatikan? Bukankan hidup wong cilik itu lebih susah, apalagi di zaman krisis?

Seandainya sebagai konsekuensi kenaikan gaji DPR, gaji para wong cilik (guru dan pegawai negeri) turut dinaikkan, berapa dana yang harus disediakan? Apakah kita punya uangnya? Bukankan negara dalam keadaan krisis?

Jalan kedua ini juga mentok sebagai shock therapy? Bagaimana dengan jalan ketiga, biarkan rakyat yang mengadakan anggota DPR melalui pemilu yang dipercepat? Sebab, mereka diangkat rakyat dan rakyat pula yang dapat mengganti mereka melalui pemilu.

Pemilu yang berlaku sekarang adalah lima tahun sekali. Periode itu terlalu lama bagi rakyat pemilih untuk memberikan sanksi tidak lagi memilih anggota DPR yang sama. Bagaimana jika pemilu untuk anggota DPR dibuat sekali dalam dua setengah tahun dan masa jabatan anggota DPR dibuat separuh dari masa jabatan presiden Republik Indonesia? Ini terjadi di Amerika Serikat. Di negeri Amerika Serikat, presiden menjabat empat tahun, tetapi anggota konggres hanya dua tahun

Dengan mempersingkat masa jabatan anggota DPR, seleksi atas anggota DPR yang kompeten melalui pemilu dapat dilaksanakan. Namun, perubahan itu memerlukan undang-undang baru. Dan, yang mengesahkan undang-undang itu adalah DPR juga. Apakah anggota DPR bersedia mengesahkan undang-undang yang memotong masa jabatannya sendiri?

Jalan ketiga ini yang paling rasional untuk dijadikan pilihan shock therapy. Jika publik luas marah dan memaksa, masa jabatan DPR dapat dibuat dua setengah tahun saja. Sirkulasi tersebut mungkin dapat menghilangkan bau busuk di DPR dalam jangka panjang. Tapi akankah publik luas marah dan memaksa? Ataukah mereka juga sudah terlanjur apatis? **

Korupsi Gotong Royong

APALAGI yang harus dikatakan. Indonesia, dari pusat sampai daerah, sudah dipersatukan oleh mata rantai korupsi. Isu suap melanda di semua cabang pemerintahan.

Belum tuntas kita menyelesaikan kasus korupsi Akbar Tandjung, sudah menyusul isu suap anggota DPR oleh BPPN. Belum tuntas kita kupas soal korupsi anggota DPR, Jaksa Agung M.A Rahman telah pula menjadi "tertuduh." Belum puas kita gali kasus Jaksa Agung, aneka korupsi di daerah merebak, mulai dari kasus di Yogyakarta, Semarang sampai Bandung.

Siapa yang harus membongkar kasus korupsi ini? Kita ingin minta tolong kepada wakil rakyat di lembaga legislatif, tetapi pimpinan tertingginya, Akbar Tandjung juga sedang dirundung masalah KKN yang sama. Kita ingin minta tolong ke eksekutif, jalurnya melalui kejaksaan agung. Namun Jaksa Agung juga sedang dituduh sejenis KKN pula. Kita ingin minta tolong kepada lembaga yudikatif, tetapi korps hakim sedang pula dirundung malang. Tiga hakimnya dari

kasus Manulife sedang diperiksa untuk kasus KKN juga. Tiga hakim itu hanyalah puncak dari gunung es mafia peradilan yang sudah sangat kesohor. Lengkaplah sudah korupsi pemerintahan di era reformasi.

Kasus suap yang melanda DPR dan DPRD sangatlah unik karena dilakukan secara gotong-royong. Ambilah kasus suap di Yogyakarta. Diberitakan sejumlah anggota DPRD Yogyakarta meminta dana kepada kontraktor PT Adhi Karya, dalam hubungannya dengan pembangunan gedung mewah Jogja Expo Center, sekitar 42 milyar. Agar pembayaran kepada PT itu lancar, sebagian anggota DPRD itu meminta uang pelicin. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 25 anggota DPRD (sekitar 50% anggota DPRD) ikut gotong-royong dalam praktek amplop itu.

Sebanyak 25 anggota DPRD itu datang dari aneka partai, mulai dari PDIP, Golkar sampai PPP. Mereka juga berasal dari berbagai komisi, mulai dari komisi A sampai komisi E. mereka juga punya posisi politik di DPRD yang beragam, mulai dari ketua DPRD, sekretaris komisi, sampai ke anggota komisi. Perbedaan latar belakang dan posisi itu ternyata tidak menghalangi mereka bersatu padu dalam proyek korupsi kolektif.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga diramaikan oleh bau tak sedap yang sama. Di Jakarta, Sutiyoso terpilih kembali namun diributkan dengan kasus money politics. Sejumlah anggota PDIP menebalkan kertas suara secara kolektif memilih pasangan Sutiyoso dan Fauzi Wibowo. Sementara di Yogyakarta, isu sogokan 1 milyar mewarnai pemilihan wakil gubernur. Pengusaha di Yogja mengeluh harus mengeluarkan sejumlah uang untuk pemilihan wakil gubernur itu.

Korupsi gotong-royong itu hanya dimungkinkan oleh kombinasi besarnya kewenangan bersama, sekaligus kecilnya kontrol dan

absennya punishment. Kekuasaan DPR dan DPRD sekarang sangatlah besar. Kekuasaan itu dapat diproyekkan. Semakin penting kasus yang dapat ditangani melalui kekuasaan itu, semakin besar pula nilai proyek uangnya.

DPRD memiliki kekuasaan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Sekaligus DPRD juga memiliki kekuasaan untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban gubernur. Kekuasaan ini dapat mereka tawarkan kepada calon gubernur dan wakil gubernur yang berminat. Tentu ini dilakukan dengan kompensasi dana secukupnya. Karena banyak yang ingin menjadi gubernur, tawaran ini umumnya disambut. Sang gubernur kemudian terpilih.

Untuk mengembalikan "modal" yang sudah disetor kepada anggota DPRD, sang gubernur akan pula "kerja keras" mengumpulkan kekayaan pribadi, dengan memanfaatkan jabatannya. Jika sang gubernur tidak ingin laporan tahunannya ditolak, ada lagi kompensasi bagi anggota DPRD yang terhormat. Semua jalin menjalin dalam jaringan korupsi yang saling menguntungkan.

DPR juga memiliki kewenangan menentukan anggaran untuk provinsi. Anggaran daerah tertentu mungkin dinaikkan atau diturunkan. Petualang politik di DPR dapat menegosiasikan naiknya anggaran bagi daerah yang berminat. Tentu saja itu dilakukan dengan uang pelicin buat segerombolan anggota DPR yang terhormat.

Kekuasaan yang sama dimiliki oleh DPRD. Seberapa besar dana harus disediakan untuk proyek tertentu dan kapan harus dicaikannya ditentukan oleh DPRD. Tidak heran, anggota DPRD Yogyakarta mampu memperoleh amplop dari PT Adhi Karya melalui kekuasaan anggaran itu.

Bahkan kekuasaan DPR dan DPRD di bidang legislasi tidak kalah basahnya. Pasal apa yang harus ada, dan pasal apa yang harus hilang, dalam undang-undang atau peraturan daerah dapat diatur. Semakin pasal itu memiliki konsekuensi ekonomi bagi sebuah

perusahaan besar atau lembaga yang berpengaruh, semakin tinggi posisi bargaining anggota DPR dan DPRD.

Penyalahgunaan kekuasaan itu harus dilakukan secara kolektif, karena kekuasaan di DPR dan DPRD memang bersifat kolegal. Tidak ada gunanya sebuah calon kebijakan jika hanya didukung oleh minoritas. Keputusan di DPR diambil melalui voting. Suap yang berhasil haruslah suap terhadap mayoritas anggota DPR dan DPRD.

Di samping itu, mekanisme internal kontrol bagi DPR dan DPRD harus pula dilumpuhkan. DPR memang memiliki kode etik dan Dewan Kehormatan. Bahkan Dewan Kehormatan itu berwenang memecat anggota DPR. Namun mekanisme dan prosedur untuk membentuk Dewan Kehormatan, serta prinsip dalam kode etik, disusun sedemikian rupa sehingga tidak memiliki daya kontrol yang efektif. Dua lembaga itu akhirnya tidak pernah sekalipun digunakan dan tidak berfungsi.

Justu karena dilakukan secara kolektif, korupsi secara gotong royong ini sulit dikupas tuntas. Masing-masing pihak akan saling melindungi. Satu terbongkar, yang lain terancam kena. Korupsi gotong-royong juga menghasilkan upaya menghalangi pembongkarannya secara gotong-royong pula.

Korupsi gotong-royong umumnya terbongkar melalui the whistle blowers. Istilah ini merujuk kepada orang dalam, yang juga menerima amplop, tetapi kemudian bernyanyi ke luar, membuka rahasia. Orang dalam ini yang membuat kasus ini terbuka ke luar dan menjadi santapan pers. Di DPR, the whistle blowers itu antara lain, Meliono Suwondo dan Indira Damayanti. Sementara di DPRD Yogyakarta adalah Khairuddin dan Agus Subagyo.

Namun mafia korupsi itu ibarat dinding raksasa. Sementara the whistle blowers hanya memiliki sebuah pisau kecil. Harus ada koalisi politik yang sama besarnya, terdiri dari pers, LSM, dan politisi berpengaruh yang berkomitmen, untuk membongkar dinding raksasa korupsi.

Sebuah koalisi anti korupsi perlu segera dibentuk guna membangun front perlawanan bersama terhadap tindak korupsi massal yang dilakukan anggota dewan maupun pejabat negara yang lain. **

Merosotnya Wibawa DPR

BAYANGKAN skenario ideal seperti ini. Di gedung MPR/DPR, para wakil rakyat bertemu secara intens berhari-hari. Masing-masing pimpinan DPR terlibat dalam debat tentang bagaimana negara harus keluar dari krisis. Berbagai draft rancangan Undang-Undang dibicarakan untuk menjadi fondasi politik dan ekonomi Indonesia baru. Publik luas sangat puas menyaksikan betapa para wakil rakyat itu sangat serius mengemban amanah untuk mengubah Indonesia pasca gerakan reformasi.

Namun bayangan itu hanyalah angan-angan. Lembaga DPR kini begitu merosot. Yang kini sedang diributkan oleh DPR bukanlah debat mengenai visi mengenai fondasi Indonesia baru. Yang sedang hangat dibicarakan adalah bagaimana menyelamatkan beberapa ketua DPR dari tuduhan korupsi. Tiga dari lima ketua DPR, yang berasal dari tiga partai besar, sedang terkena kasus korupsi. Yang paling bermasalah adalah ketua DPR Akbar Tandjung, yang juga menjadi ketua umum Partai Golkar, Partai terbesar kedua. Bagi lawan politiknya, sumbangan terbesar Akbar Tandjung untuk negara

adalah mengundurkan diri sebagai ketua DPR, dan juga ketua umum Golkar.

Namun Akbar Tandjung tidak sendirian. Kini persoalan korupsi juga menimpa pimpinan DPR lainnya, AM Fatwa dari Fraksi Reformasi, dan PAN. Sebagaimana Akbar Tandjung, AM Fatwa juga terkena kasus yang berkaitan dengan "fulus." Permadi SH menyatakan kepada publik luas, bahwa AM Fatwa pernah menawarkan sebanyak 20 milyar rupiah untuk menyogok sebuah tim kecil. Masih menurut Permadi SH, dengan sumpalan uang itu, diharapkan DPR tidak lagi menginvestigasi kasus uang palsu dan kualitas buruk uang produksi PT Pura.

Tentu AM Fatwa memberikan bantahan resmi. Lebih jauh lagi, AM Fatwa membawa kasus itu ke pengadilan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Kasus ini sedang diproses secara hukum. Berbagai pihak bahkan memberikan simpati kepada Permadi SH, dan bersedia mendampingi dalam pengadilan kelak. Walau belum ada keputusan hukum, namun wibawa DPR semakin merosot akibat kasus yang menimpa ketua dan wakil ketuanya.

Tidak hanya Akbar Tandjung dan AM Fatwa, satu lagi pimpinan DPR terkena kasus: Tosari Wijaya, dari PPP. Sebagaimana dua pimpinan lain, kasus Tosari juga masih soal uang. Namun Tosari tidak dituduh suap menyuap, seperti Fatwa, atau penyalahgunaan uang negara seperti Akbar Tandjung. Tosari dituduh menyalahi aturan karena menginvestasikan uang partai, PPP, sebesar Rp 5 milyar di PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR).

Disinyalir, Tosari ikut dalam kepemimpinan perusahaan yang sangat kontroversial itu. Seandainya ia terlibat secara individual, itu sepenuhnya menyeret uang partai, PPP. Padahal dalam aturan, partai dilarang memiliki saham di sebuah PT. karena ulah Tosari, PPP diancam tidak dapat mengikuti pemilu 2004.

Akbar Tandjung, AM Fatwa dan Tosari Wijaya adalah tiga dari lima pimpinan DPR. Apa jadinya DPR jika lembaga ini dipimpin oleh

mayoritas tokoh yang bermasalah? Mengapa DPR, lembaga yang dulu sangat kita banggakan sebagai produk pemilu demokratis, dipimpin oleh tokoh kontroversial? Jika pimpinannya saja bermasalah, apakah mayoritas anggota DPR juga bermasalah? Seberapa benar sinyalemen yang mengatakan bahwa DPR sudah dipenuhi oleh prokem politik?

DPR hasil reformasi masih dililit kasus uang dan korupsi karena tiga hal. Pertama, DPR secara sengaja tidak membuat aturan yang keras soal korupsi. Setiap tahun, ada puluhan undang-undang yang dihasilkan DPR. Namun di antara undang-undang itu, tidak ada undang-undang tentang Komisi Anti Korupsi. Draft soal Komisi Anti Korupsi terus dipendam dan tidak kunjung dibahas dan dijadikan undang-undang. Padahal komisi sangat diperlukan untuk menggulung praktik korupsi. Tentu dengan syarat, bahwa komisi diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk menyelidik, menyidik dan menuntut para pejabat.

Tidak ada pula undang-undang tentang etika pejabat. Padahal undang-undang ini penting untuk mengatur pemberian apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Undang-undang itu juga sekaligus mengatur sanksi yang keras bagi pelanggar etik. Tanpa aturan etik yang ketat, berbagai jenis amplop yang kini berseliweran di DPR dianggap normal saja.

Hal lain yang penting untuk dibuat DPR adalah undang-undang korupsi yang mengatur pembuktian terbalik. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan kadang sangat sulit pembuktiannya, perlu dibuat mekanisme khusus yang agak menyimpang dari aturan pidana umum. Jika dalam kasus umu, penuntut yang harus membuktikan kejahatan, untuk kasus korupsi dapat dibuat terbalik. Si tertuduh itu sendiri yang harus membuktikan bahwa kekayaannya tidak didapat melalui hasil korupsi.

Kedua, korupsi ternyata mempunyai fungsi besar dalam rangka konsolidasi kekuasaan. Uang adalah susunya politik. Untuk membangun sebuah imperium kekuasaan, diperlukan dana yang besar. Kekuasaan DPR ternyata dapat diubah menjadi proyek untuk mencari uang.

Jika daerah ingin budget yang lebih besar, misalnya, maka itu dapat dinegosiasikan dengan imbalan tertentu. Jika misalnya, BI tidak ingin direpotkan dengan pengawasan DPR soal BLBI, harus ada kompensasi finansial tertentu. Jika ada pasal tertentu dalam undang-undang yang memberatkan pihak tertentu, itu semua dapat diatur dengan kesepakatan tertentu. Di DPR hal ini semua dilakukan secara gotong-royong, tahu sama tahu antara sekelompok orang. Semua mengerti bahwa uang ilegal itu dibutuhkan dalam rangka survive di dunia politik yang butuh dana besar.

Ketiga, para elite yang kini terpilih duduk di kekuasaan umumnya sangat lembek soal korupsi. Agenda korupsi dan hukuman sosial ataupun moral kepada pelakunya tidak dianggap penting. Ketika Akbar Tandjung divonis bersalah, umumnya pimpinan Golkar masih mendukung Akbar. Ketika kasus amplop menimpa anggota PDIP, tidak ada pula sanksi organisasi. Hal yang sama menimpa AM Fatwa dan Tosari Wijaya. Karena tidak ada sanksi yang keras, tidak ada preseden yang menakut-nakuti tokoh lain untuk tidak korupsi.

Akibatnya, DPR kini sangat merosot wibawanya. Survei yang dilakukan Kompas bulan Februari 2002, sekitar 70% responden tidak puas dan tidak lagi percaya kepada DPR. Jika survei itu dilakukan bulan ini, niscaya angka ketidakpuasan itu akan lebih tinggi. Alangkah malangnya nasib negeri ini, ditawan oleh DPR yang semakin tidak berwibawa. **

Mengendalikan Politik TV dan Radio

KAMIS, 28 November 2002, DPR kembali bersidang untuk memutuskan hal yang teramat penting dalam hal politik informasi. Harus kah RUU Penyiaran ditolak atau diterima dalam sidang paripurna.

Di luar DPR, pro dan kontra atas RUU Penyiaran itu semakin ramai. Sangat jarang masyarakat pers sendiri terbelah dalam menyikapi RUU. Asosiasi Televisi Swasta yang terdiri antara lain SCTV, RCTI dan Metro TV jelas anti RUU itu. Namun Asosiasi Televisi Lokal justru menjadi penggembira dan pendukung RUU. Berbagai elemen civil society seperti Institut Studi Arus Informasi (ISAI) mengharapkan RUU itu secepatnya diadopsi. Sementara civil society lain, seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independen) justru menentang RUU tersebut.

Apa yang ada dalam RUU Penyiaran itu, sehingga ia mampu membuat masyarakat pers sendiri bahkan terbelah? Kebebasan informasi, kepentingan bisnis dan pengaruh politik jalin menjalin dalam RUU Penyiaran. Sikap atas RUU beragam dan saling

bertentangan, sesuai dengan beragam dan bertentangnya persepsi dan kepentingan masing-masing pihak.

Di era informasi, tidak ada yang lebih berpengaruh daripada TV. Begitu besarnya pengaruh TV, bahkan banyak pihak yang menyatakan TV lebih penting dalam pendidikan politik ketimbang partai politik itu sendiri.

Begitu banyak warga negara yang kontak dengan televisi setiap hari. Di kamar tidur, di ruang keluarga, bahkan di ruang tunggu berbagai gedung, televisi bercokol. Setiap berita dikemas dalam gambar dan suara, disajikan kepada penonton, membuat TV merasuk ke dalam kesadaran penonton secara lebih dalam.

Runtuhnya gedung WTC di New York, dengan sekejap diketahui penduduk di Jakarta melalui TV. Imam Samudra yang tertangkap di Merak, seketika wajahnya dilihat oleh warga di Aceh dan Papua. Skandal Akbar Tandjung menjadi isu nasional karena televisi. Penderitaan warga di Nunukan Kalimantan dilihat oleh aktivis di Jakarta melalui TV. Dengan mudah TV menentukan apa yang harus dibicarakan, bahkan apa yang harus dipikirkan. TV ada di mana-mana. Kita tidak bisa lagi hidup tanpa TV.

Soeharto di awal bulan Mei belum pasti jatuh. Namun melalui TV, warga melihat betapa sedihnya ayahanda mahasiswa Trisakti yang tertembak. Lalu gugur bunga dinyanyikan dan diputar di berbagai radio. Akibatnya, secara sekejap kemarahan publik atas Soeharto meluas dan sambung menyambung, karena TV dan radio. Tidak perlu heran jika penguasa paling takut dengan televisi.

Persoalannya, televisi tidak hanya representasi dari kepentingan publik. Di balik itu ada pula kepentingan modal. Di balik itu ada pula kepentingan politik partisan. Ketika TV ingin dikontrol, dengan sendirinya tidak semua pihak menyatakan "Tidak." Banyak pula

pihak yang bergembira karena persepsi negatif tertentu terhadap konglomerasi dan politik partisan yang dimainkan TV.

Ada dua isu besar yang membuat RUU Penyiaran menjadi problematik. Pertama, isu seputar TV lokal dan TV nasional. RUU Penyiaran mengatur bahwa masa depan televisi Indonesia adalah TV lokal. Jika ada TV yang ingin melampaui lokalitas, maka ia harus berbentuk jaringan. Dengan paradigma TV lokal, maka kekuasaan atas dana dan informasi TV itu juga dikendalikan oleh masyarakat lokal.

Menjadi masalah karena TV lokal ini dibuat dengan cara menggusur TV swasta nasional yang kini sudah ada. TV swasta nasional hanya diberikan waktu peralihan untuk berubah menjadi TV jaringan. Sungguhpun sudah berjaringan, TV lintas lokal itu tetap dibatasi wilayah siarannya. Berarti, TV itu akan dibatasi pula pengaruh politik dan skala bisnisnya.

Bagi kepentingan konsumen, sebenarnya tidak penting betul TV itu nasional atau lokal. Konsumen berkepentingan mendapatkan berita yang akurat, mencerahkan, cepat, lengkap, dan merespons lingkungannya. TV yang memberikan kebutuhan itu akan digemari. Sebaliknya TV yang buruk akan dijauhi. Yang penting bagi konsumen adalah kompetisi bebas di mana setiap TV berlomba-lomba menyajikan tontonan terbaik.

Jika itu yang menjadi soal, maka biarkan pasar yang mengatur. Regulasi pemerintah harus sekecil mungkin. Seandainya memang perlu dibuat TV lokal, biarlah pasar yang memutuskannya. Seandainya TV swasta nasional harus bubar, biarlah pasar pula yang menggusurnya. Biarkan TV yang ada sekarang berlomba dengan TV lokal atau TV lainnya untuk menarik minat penonton.

Kedua, isu seputar Komisi Penyiaran Indonesia. Seberapa besar sebaiknya kekuasaan komisi ini. Jika komisi independen model

Amerika Serikat diikuti, maka komisi ini punya kekuasaan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif sekaligus. Lembaga ini yang membuat aturan di bidang penyiaran. Lembaga ini pula yang mengeksekusi aturan itu. Dan lembaga ini pula yang menjadi hakim bagi pihak yang melanggar aturan.

Pihak yang tidak setuju, khawatir komisi ini menjadi monster yang terlalu berkuasa. Di era KKN, dikhawatirkan pula komisi ini akan meminta pungutan liar lebih besar. Akibatnya muncul keinginan Komisi Penyiaran juga harus tetap didampingi pemerintah. Misalnya, komisi memberikan usul. Sementara yang memutuskan tetap pemerintah.

Namun jika komisi masih bergantung kepada pemerintah, muncul pula komplikasi lain. Apalagi jika Komisi Penyiaran daerah bergantung dengan DPRD. Bagaimana jika DPRD dikuasai oleh misalnya kelompok agama yang sangat tradisional dan sempit, semau-maunya melarang berbagai program TV hanya karena perbedaan tafsir. Majelis Mujahidin misalnya, pernah memprotes iklan "Islam Warna Warni" atau iklan kondom. Bagaimana jika DPRD dikuasai oleh politisi dengan semangat Mujahidin?

Sebenarnya tidak ada masalah dengan komisi independen yang memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sekaligus. Komisi itu memang harus bebas dari tangan pemerintah.

Yang perlu dibentuk kemudian untuk menetralisasi kewenangan yang luas ini adalah lembaga pengawas Komisi Penyiaran. Lembaga pengawas akan mengevaluasi apakah komisi itu sudah bekerja sesuai dengan standar, kriteria dan prosedur yang disepakati.

Di tengah pro kontra ini kita teringat apa yang pernah diucapkan Ronald Reagan, mantan Presiden Amerika Serikat, bahwa pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang memerintah sesedikit mungkin. *The best government is the least government.* RUU Penyiaran harus mempunyai spirit regulasi seminimal mungkin.

Biarkan pasar bebas dan kompetisi, bukan tangan pemerintah, yang menjadi panglima untuk politik informasi. **

Konflik di Dalam Peradaban

ULAMA dari berbagai wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat belum lama berkumpul serta membuat kesepakatan. Menurut mereka, kolom Ulil Abshar-Abdala, salah seorang penggagas Jaringan Islam Liberal, yang dimuat di harian Kompas, telah menghina Islam, Nabi Muhammad, dan Allah SWT sekaligus. Karena itu mereka menjatuhkan hukuman mati untuk Ulil.

Membaca berita itu, saya sedikit tersentak. Tampaknya, perkembangan dunia keagamaan di Indonesia sudah amat jauh. Hanya karena sebuah kolom, yang bagi sebagian orang sangat mencerahkan dan merangsang berpikir, Ulil dijatuhi hukuman yang tidak tanggung-tanggung: mati.

Kita bisa membandingkan hal yang dikerjakan Ulil dengan sesama muslim lainnya. Amrozi dan Imam Samudra. Baik Ulil maupun Amrozi serta Imam Samudra merupakan tiga anak muda yang sedang naik daun karena hal yang dikerjakannya. Ketiga-tiganya menggunakan simbol keislaman.

Amrozi dan Imam Samudra tidak henti-hentinya menyatakan bahwa mereka ingin berjihad di jalan Allah. Mereka mengaku membela ketidakadilan yang dialami dunia Islam. Serangkaian tindakan itu kini membawa mereka ke penjara. Mereka dituduh meledakan bom di berbagai tempat. Yang paling dahsyat adalah bom di Bali.

Pengadilan kelak memutuskan benar atau tidaknya tuduhan itu. Namun, berdasarkan berita di berbagai media koran, Amrozi dan Imam Samudra sudah mengakui bahwa mereka memang terlibat bom di Bali.

Ratusan manusia mati karena bom itu. Sebagian dengan badan terpenggang, sebagian lagi sudah tidak dikenali. Ketika dinyatakan bahwa karena tindakan itu mereka bisa diancam hukuman mati, dengan tersenyum Amrozi mengatakan bahwa dia mati di jalan Allah.

Sementara itu, Ulil mengembangkan jenis pemahaman Islam yang berbeda. Tidak ada pembunuhan yang dibuat Ulil atas nama Islam. Dia hanya menulis kolom dan mengajak berdebat di era demokrasi. Dia memang menyatakan ketidaksetujuan atas tafsir Islam lain yang dianggap bisa mengarah pada pembenaran radikalisme.

Ulil tidak menyatakan bahwa lawan pemahaman Islamnya dari kalangan Islam fundamentalis itu adalah sesat dan harus dihukum mati. Dia hanya, sekali lagi, mengajak berpikir ulang atas interpretasi Islam. Yang membuat saya heran, mengapa para ulama itu justru marah kepada Ulil, bukan kepada Amrozi dan Imam Samudra? Mengapa ancaman hukuman mati secara keagamaan diarahkan kepada Ulil yang tidak membunuh siapa pun dan tidak mendorong dilakukannya kekerasan atas pihak manapun?

Sementara itu, kepada Amrozi dan Imam Samudra yang jelas-jelas dituduh menggunakan Islam sebagai pembenaran pembunuhan massal dalam bom terorisme, kelompok ulama ini tidak banyak bereaksi. Misalnya, tidak memberikan hukuman keagamaan yang sama.

Pada titik inilah, kita teringat buku yang ditulis Dieter Senghas, *The Clash Within Civilizations*. Senghas mengambil posisi berada dengan Samuel Huntington yang menulis buku *The Clash of Civilizations*.

Huntington menyatakan bahwa konflik paling potensial pasca perang dingin adalah perang peradaban. Konflik terdalam bukan bersandar pada perbedaan ideologi atau kepentingan ekonomi, tetapi pada identitas kultural. Satu bentuk dari konflik peradaban itu adalah antara dunia Islam dan dunia barat yang bersandar pada peradaban Kristen, Judeo dan Romawi.

Analisis Huntington seolah mendapatkan pembenaran dengan semakin munculnya permusuhan global antara Amerika Serikat yang berasal dari peradaban Barat dan dunia Islam akibat isu terorisme.

Namun, kata Senghas, konflik parah yang sering terjadi justru bukan konflik antar peradaban. Konflik yang sering berdarah dan jauh lebih sulit didamaikan adalah konflik intern peradaban itu sendiri. Misalnya, konflik antara sesama komunitas Barat yang Kristen: antara Protestan dan katolik; atau konflik antara sesama Islam yang Sunni melawan Syiah. Dalam bentuknya yang lebih kecil, telah terjadi *conflict within civilizations* antara ulama yang menjatuhkan hukuman mati versus Ulil. Baik para ulama itu maupun Ulil sama-sama bersandarkan pada peradaban yang sama: Islam. Lebih khusus lagi, mereka semua berasal dari Islam Sunni di Indonesia.

Kini kita tahu, konflik di dalam peradaban Islam itu bisa sedemikian parah. Hanya karena perbedaan interpretasi, satu kelompok menjatuhkan hukuman mati kepada sesama muslim dari peradaban yang sama. Perbedaannya dengan *the real conflict within civilizations* versus Senghas, konflik antar ulama itu dan Ulil hanya terjadi sepihak. Hanya para ulama itu yang menjatuhkan hukuman mati kepada Ulil. Sementara Ulil dan kelompoknya tidak menjatuhkan hukuman mati kepada ulama itu. Sungguhpun

mempunyai pemahaman yang sangat berbeda, Ulil tidak pernah menjatuhkan hukuman mati kepada lawan berpikirnya hanya karena perbedaan pandangan.

Bagi mereka yang sudah terbiasa membaca filsafat antar agama dan perennial philosophy, sebenarnya tidak ada yang mengagetkan dengan tulisan Ulil di harian Kompas itu. Bahkan, tulisan Ulil tersebut masih tergolong lunak dan moderat. Jauh lebih banyak renungan filsafat yang lebih liberal dan lebih radikal daripada yang dituliskan Ulil.

Perbedaan pandangan agama sejak dulu di Indonesia ternyata sudah merupakan hal biasa. Namun yang membuat kita semakin prihatin adalah eskalasi reaksi atas perbedaan itu.

Mungkin, benar yang dinyatakan Imam Samudra, bom bunuh diri sudah datang di Indonesia. Hanya karena kemarahan dan sentimen agama, seseorang bisa membunuh dirinya sendiri melalui bom seraya membunuh begitu banyak orang lain yang tidak dia kenal, hanya disebabkan orang lain itu berbeda dengannya.

Hanya disebabkan perbedaan pemahaman agama, sebagian ulama juga sebegitu jauh menjatuhkan hukuman mati kepada seorang anak muda. Padahal Ulil, sang anak muda itu, hanya hidup dalam tradisi menulis dan berpikir. **

Kontroversi Pasal Agama?

KONTROVERSI yang melibatkan massa dengan isu agama kembali terjadi. Pangkal kontroversi adalah RUU Sistem Pendidikan Nasional. Sekitar 1000 orang demo di depan gedung DPR, Selasa, 18 Maret 2003, agar RUU itu dibatalkan. Umumnya, mereka adalah guru serta penganut Katolik dan Protestan.

Sementara, yang muslim justru membela RUU itu. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor dan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah malah memuji RUU itu. Kedua tokoh Islam itu secara terpisah menyatakan dukungannya atas RUU tersebut setelah bertemu dengan menteri pendidikan nasional dan bertemu Wakil Presiden Hamzah Haz.

Pro dan kontra berawal dari pasal 12 ayat 1 (a). Lengkapnya, ayat itu berbunyi, "Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, serta diajarkan oleh pendidik yang seagama." Jika disahkan, berarti UU itu kelak mengharuskan ratusan atau ribuan sekolah Katolik dan Kristen

menyediakan guru agama Islam, yang juga beragama Islam, bagi murid beragama Islam terhadap murid non-Islam.

Berbagai argumen dilontarkan dan saling bertabrakan. Pihak yang menentang – Katolik dan Protestan – menyatakan RUU itu tidak menghormati keberagaman dan kemajemukan. Pihak yang pro, yang Islam, menyatakan RUU itu sangat toleran dan melindungi kemajemukan. Yang satu protes, ini RUU pendidikan atau RUU agama. Lainnya menyahut, RUU Pendidikan ini sudah mengikiskan roh agama ke dalam sistem pendidikan yang memang semestinya.

Para pemimpin agama, apakah itu Islam, Katolik, Kristen dan lainnya, melihat kebangkrutan moral yang sama di Indonesia. Tidak perlu penelitian atau survei untuk melihat buruk dan merosotnya moralitas publik. Tetapi, apakah kebangkrutan moralitas publik itu memang tepat dijawab dengan membuat regulasi pendidikan agama di sekolah?

Keburukan moral di negeri kita sudah terjadi sangat meluas. Bangkrutnya moralitas publik ini, agaknya tidak dapat diselesaikan dengan formalisme pendidikan agama di sekolah umum. Yang terjadi bisa bahkan sebaliknya. Kemunafikan akan terjadi lebih dahsyat. Di sekolah, para murid menghafal-hafalkan ajaran agama secara formal. Namun, dalam kehidupan riil sehari-hari di masyarakat, perilaku tidak bermoral yang menentang prinsip semua agama terjadi semakin buruk.

Kemunafikan itu sudah berlangsung secara rapi di Indonesia. Lihatlah, betapa masjid dan gereja semakin banyak dikunjungi. Rombongan haji juga semakin sesak dan antrean semakin panjang. Buku dan seminar dengan aneka tema agama laris dijual dan dihadiri banyak orang. Berkembang pula kegiatan zikir secara massal yang meminta ampun kepada Tuhan sambil menangis.

Namun, dalam masyarakat yang sama, korupsi terjadi pada tingkat yang paling buruk di dunia. Pada komunitas yang sama, massa saling membunuh dan membakar hanya karena perbedaan agama dan etnis. Anak-anak diminta mengulang-ulang bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Namun, Sungai Ciliwung dan sungai besar lainnya justru menjadi WC dan tong sampah terpanjang dan terbesar di dunia? Bahkan Departemen Agama termasuk departemen yang sangat korup.

Lihat pula apa yang terjadi di negara Barat sana. Misalnya, Amerika Serikat. Korupsi di negara itu jauh lebih rendah. Hukum ditegakkan. Ilmu pengetahuan tumbuh. Pemerintahan bersih dan dihormati. Kesejahteraan ekonomi melimpah. Segala hal yang dijunjung agama telah menjadi moralitas publik yang jauh lebih ditaati oleh masyarakat dan pemimpinnya.

Tetapi, di Amerika Serikat, pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah negeri. Justru di dunia pendidikan yang dimiliki publik, pendidikan agama formal tidak menjadi bagian kurikulum. Pendidikan agama hanya diajarkan di sekolah swasta. Sekolah swasta dibebaskan untuk mengajarkan agama apa pun secara otonom. Toh publik juga bebas ikut atau tidak ikut menjadi siswa di sekolah itu.

Apakah agama tidak penting di Amerika Serikat? Tentu saja, agama sangat penting. Justru di Amerika Serikat kebebasan agama dilindungi secara maksimal. Semua sekte agama dapat tumbuh bebas. Ada ratusan sekte protestan di sana. Bahkan, agama Islam juga tumbuh dalam aneka bentuk, mulai Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Black Moslem, Nation of Islam, hingga Rasyad Khalifah. Berkembang pula aneka ragam gerakan spiritual. Semuanya dilindungi hukum dan prinsip hak asasi.

Namun, agama dibiarkan menjadi urusan individu warga negara masing-masing. Negara tidak ikut campur mengurusnya di dalam sistem pendidikan ataupun sistem pemerintahan. Sekali agama dimasukkan pemerintah ke sektor publik, yang terjadi kelak bukan

ajaran agama memberikan roh kepada dunia publik. Sebaliknya, akan terjadi begitu banyak politisasi yang justru memiskinkan agama itu sendiri.

Selain itu, prinsip moral dan etika yang awalnya bersumber dari aneka agama besar sudah mengalami universalisasi. Prinsip kebaikan, kejujuran, kebersihan, kebenaran tidak lagi bisa dimonopoli oleh satu agama. Prinsip itu bahkan sudah mengambil bentuk di segala bidang kehidupan. Tidak terbatas hanya diajarkan oleh pelajaran agama, prinsip moralitas publik ini sudah menjadi bagian dari kode etik setiap sistem pengajaran, perkuliahan, pemerintahan dan profesi.

Dengan kata lain, prinsip dasar agama, di luar ritualnya, sudah diadopsi dalam aneka kehidupan yang sudah tidak bisa lagi diklaim sebagai milik agama tertentu. Pemimpin dan tokoh agama tidak lagi perlu ribut apakah sebaiknya agama Islam atau Kristen diajarkan guru yang beragama Islam atau Kristen juga. Moralitas agama sudah begitu universal dan tidak bisa lagi dikerangkeng dalam formalisme sempit pelajaran atau mata kuliah agama.

Pemerintah memang sebaiknya jangan terlalu banyak membuat aturan soal agama, bahkan untuk sistem pendidikan sekalipun. Biarlah sekolah swasta dan komunitas serta keluarga yang mengaturnya secara otonom. Jika tidak, akan terlalu banyak politik di dunia agama dan terlalu banyak manipulasi yang menggunakan agama di ruang publik. **

Lima Tahun Reformasi

TANGGAL 21 Mei 1998, Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden. Berakhir lah sebuah orde terpanjang dalam politik Indonesia, yang acapkali disebut dengan Orde Baru. Harapan dan cita-cita baru lahir melalui Orde Reformasi. Namun pada 2003 ini, setelah lima tahun Orde Reformasi bergulir, apa yang tengah terjadi dengan kehidupan politik dan ekonomi kita, tidak seluruhnya sesuai dengan harapan reformasi. Sebagian kalangan mungkin puas, namun sebagian lagi menyimpan kekecewaan.

Hidup di era transisi seperti saat ini, secara politik dan ekonomi, sangat tidak nyaman. Nilai-nilai lama sudah kehilangan legitimasi. Sulit membayangkan kita dapat kembali hidup dengan sistem nilai, misalnya, Dwi Fungsi ABRI, di mana ABRI memiliki peran politik yang signifikan. Sulit pula kita membayangkan dapat hidup dengan kebebasan yang terbatas; terbatas membuat partai, terbatas berorganisasi dan terbatas dengan kebebasan pers. Kita pun tidak nyaman membayangkan politik lama di mana seorang presiden begitu dikeramatkan dan tidak dapat dikritik oleh publik.

Namun nilai-nilai baru yang akan dianut juga belum mengakar. Nilai dan sistem baru itu bahkan menghasilkan pula persoalan baru. Ketika polisi dipisahkan dengan tentara, tidak dinyana, polisi dan tentara dapat saling serang dan saling tembak. Ketika diterapkan otonomi daerah yang sangat signifikan, yang terjadi justru kekacauan koordinasi. Politik lokal semakin pula disibukkan dengan bangkitnya konflik etnis atau agama di daerah. Yang paling parah, menguat pula gerakan separatisme seperti di Aceh, Papua, Maluku, dan sebagainya.

Ketika diterapkan sistem multi partai, ternyata partai meluber begitu banyaknya. Ketika kekuasaan disebar dan dibagi, ternyata korupsi juga ikut tersebar ke berbagai pihak dan wilayah.

Apa yang tengah terjadi dengan reformasi kita? Mengapa hasil akhir reformasi di tahun kelima ini mencemaskan? Corak transisi di negara kita sejak tahun 1998 telah berjalan tanpa skenario yang kuat dan tanpa arahan seorang sutradara yang dihormati. Ibarat pentas, para pemain hanya dibekali aturan main seadanya, dan dibebaskan berimprovisasi. Terjadi aneka benturan. Jangankan penonton, para pemainnya pun mungkin tidak pula menikmati pentas pertunjukan itu.

Transisi di Afrika Selatan dapat dijadikan perbandingan. Transisi di negara itu berjalan lebih rapi dan damai. Jauh hari sebelum transisi dimulai, sebuah skenario yang kuat sudah disiapkan terlebih dahulu. Berbagai ahli Afrika Selatan di bawah bimbingan seorang ahli transisi demokrasi yang terkenal, Arendt Lijphard, menyusun model politik Afrika Selatan yang baru.

Dalam model politik itu, sudah dipelajari karakter politik Afrika Selatan yang plural. Power sharing antara kulit dan kulit putih diatur sedemikian rupa sehingga semua pihak merasa diperlakukan secara

fair. Diperlakukan pula konstitusi masa transisi, sebelum diciptakan yang baru sama sekali. Tahapan transisi dan aturan main politik sudah diantisipasi dan diberikan solusinya.

Yang lebih penting lagi, ada pula seorang sutradara yang sangat dihormati. Nelson Mandela menjadi figur bapak bangsa Afrika Selatan yang baru. Sementara partainya, ANC, mendominasi kongres atau badan perwakilan rakyatnya secara tunggal. Partai itu tidak perlu kompromi atau melakukan manuver jangka pendek agar berkuasa. Semua berjalan sesuai dengan arahan "sutradara." Bahkan pergantian presiden juga sangat lancar yang terjadi berbarengan dengan peralihan generasi.

Corak transisi di Indonesia sangat berbeda. Jatuhnya Soeharto tidak diduga dan tidak dipersiapkan sejak jauh hari. Bahkan para pengamat asing yang kompeten tidak menduga Soeharto dapat jatuh secepat itu. Ketika kekuasaan berganti, semua menjadi terkesima. Sistem lama sudah hilang legitimasinya. Sementara skenario baru untuk politik dan ekonomi tidak tersedia. Aneka improvisasi, uji coba dan trial and error dilakukan.

Tidak ada pula sutradara yang dihormati. Sebaliknya, presiden bahkan terlalu mudah dijatuhkan. Habibie naik lalu pertanggungjawabannya ditolak. Gus Dur naik lalu dijatuhkan. Kini era Megawati yang jauh lebih beruntung. Tidak ada pula partai yang mendominasi parlemen atau kongres. PDIP menjadi pemenang pemilu, namun itu pun perolehan suaranya tidak lebih dari 35%.

Kompromi dengan partai lain akibatnya dibuat agar dapat menguasai mayoritas parlemen. Namun kompromi juga memiliki konsekuensi politik yang berat. Harus ada take and give. Yang menjadi persoalan, jika rekan politik yang berkompromi juga punya masalah politik. Saling melindungi atau saling menutupi kesalahan politik terjadi. Demi sebuah political survival, kompromi terhadap hal yang buruk pun terjadi.

Kompromi terbesar dan sistemik dalam politik reformasi adalah mengkompromikan model pemilihan presiden langsung dalam sistem multi partai. Berdasarkan studi di negara lain, kombinasi itu akan menghasilkan politik yang lemah. Kompromi sistemik itu dapat menghasilkan partainya presiden hanya menjadi minoritas di parlemen. Dengan kata lain, oposisi terhadap presiden menguasai parlemen. Mudah sekali presiden diganggu di parlemen, untuk mengacaukan pemerintahannya agar tidak kembali terpilih kedua kalinya.

Saatnya reformasi tanpa skenario dan tanpa sutradara ini dimodifikasi seperlunya. Sistem multi partai memang tidak bisa dipasung. Namun dapat dibuat rekayasa sukarela agar sistem multi partai itu mengerucut menjadi himpunan atau konfederasi dua partai saja. misalnya satu sisi adalah PDIP, Golkar dan PKB. Sedangkan sisi lainnya adalah PPP, PAN, PBB, PK dan lainnya.

Jika konfederasi itu terjadi maka politik jauh lebih stabil. Konfederasi itu dapat menjadi "sutradara" yang dihormati dan efektif karena ia mendominasi parlemen dan presiden sekaligus. PDIP, Golkar dan PKB, misalnya dapat muncul dalam satu paket pemilu. Yang satu mendapatkan jatah presiden, lainnya wakil presiden, dan lainnya lagi ketua DPR. Konfederasi lainnya juga mengajukan paket presiden yang sama. Siapapun yang menang, yang kalah harus menjadi oposisi. Politik lebih sehat karena jelas siapa yang memerintah dan siapa yang beroposisi.

Jika sutradara sudah kuat, tinggallah menciptakan skenarionya, berupa pembangunan politik reformasi jangka panjang. Setelah tahun 2004, Orde Reformasi akan semakin baik karena konfederasi partai itu. **

Memecat Anggota DPR?

Di tengah isu operasi terpadu di Aceh dan pemburuan Hasan Tiro di Swedia, para anggota DPR kini sedang sibuk. Mereka tengah membuat aturan tentang dirinya sendiri, dalam RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR.

Melalui RUU itu, sedang dirumuskan, misalnya, apakah anggota DPR tetap menjadi the untouchable, yang tidak tersentuh oleh kekuatan politik manapun? Sekali terpilih menjadi anggota, tidak ada yang dapat memecatnya. Bahkan ketua umum partainya tidak dapat memecatnya sebagai anggota DPR. Ataukah, harus dihidupkan kembali lembaga recall? Misalnya, diatur, jika memenuhi syarat tertentu, partai dapat memecat anggotanya di DPR.

Sebelum RUU Susduk dibahas, gaung atas hak recall, hak untuk memecat anggota DPR itu, sudah lama didukung. Dalam Rakernas 2003 PDIP di Bali, Megawati menyerukan bahwa PDIP mendukung dihidupkannya kembali lembaga recall. Melalui lembaga recall ini, partai dapat mendisiplinkan anggotanya di DPR karena partai diberi wewenang untuk memecatnya.

Seruan Megawati seketika disambut baik oleh ketua umum partai lain. Mulai dari Akbar Tandjung, Hamzah Haz sampai Amien Rais, dengan bahasanya sendiri-sendiri, sepakat bahwa lembaga recall harus kembali dihidupkan demi menjaga kinerja parlemen. Jika suara partai yang dipimpin empat tokoh itu digabung, jelas itu sudah melampaui suara mayoritas di DPR. Pada waktunya, lembaga recall agaknya akan benar-benar berfungsi lagi.

Pro dan kontra kembali lahir. Dapat dipastikan mayoritas pimpinan partai akan pro kepada lembaga recall karena instrumen itu memberikan tambahan kekuasaan kepada mereka untuk mengontrol parlemen. Namun intelektual, aktivis dan para pejuang demokrasi akan terbelah dalam pro dan kontra. Penyebabnya, lembaga recall itu adalah pisau bermata dua.

Lembaga recall dapat juga memperkuat oligarkhi partai. Akibatnya parlemen semakin menjadi tawanan dan kendaraan tiga atau empat ketua partai besar saja.

Tanpa perlu menjadi pengamat parlemen yang serius, mudah dipahami jika banyak publik yang kecewa atas kinerja parlemen. Mustahil kinerja ini dapat ditingkatkan tanpa ada inovasi atau improvisasi atas mekanisme kontrol dan sanksi kepada anggota parlemen.

Kelemahan mencolok DPR memang soal disiplin dan tingkat kehadiran. Bukan sekali atau dua kali, publik menyaksikan betapa sidang paripurna DPR sangat sepi. Melalui tayangan aneka TV yang kini bebas, jutaan pemirsa melihat sendiri betapa kursi anggota DPR sangat kosong. Beberapa kali sidang paripurna tidak mencapai kuorum untuk bersidang. Namun akhirnya sidang paripurna dipaksakan untuk sah dengan alasan sidang bukan untuk membuat keputusan tetapi hanya untuk mendengarkan laporan.

Tidak jarang pula publik “ditipu” oleh daftar hadir tertulis. Dari daftar itu tampak yang hadir sudah mencapai kuorum. Namun sebenarnya secara fisik, anggota yang bersangkutan tidak ada di ruangan. Sudah pula ramai diberitakan, sejumlah nama yang tingkat kehadirannya di bawah 50% dalam rapat DPR. Bahkan ada pula nama yang tingkat kehadirannya mencapai 0%. Anggota yang jarang hadir itu berasal dari hampir semua partai politik.

Kelemahan lain, persoalan kinerja. Parlemen sejak reformasi memang menunjukkan kegairahan dan kebebasan yang sangat tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Untuk tugas yang dapat menjatuhkan atau mengangkat presiden baru, bahkan pertemuan dibuat begitu intensifnya. Tidak cukup hanya di gedung DPR, bahkan pertemuan pun diselenggarakan di aneka lobi hotel dan rumah pribadi. Pertemuan itu kadang dilakukan tidak hanya lembur dari jam kantor, namun juga hingga dini hari.

Namun untuk tugas legislasi membuat UU, hal sebaliknya terjadi. Tahun 2002, DPR menyelesaikan kurang dari 60% dari target UU yang dibuatnya sendiri. Hingga pertengahan tahun 2003, kita juga menyaksikan betapa sidang-sidang membahas RUU sangat lamban dan sepi. Padahal, transisi demokrasi membutuhkan secara cepat ratusan UU baru untuk mem-back up sistem politik yang sama sekali baru. Partai tidak dapat mengontrol anggotanya di DPR karena tidak ada instrumen sanksi yang dapat membuat sang anggota jera dan memperbaiki kinerja.

Kelemahan yang tidak kalah pentingnya adalah money politics. Sudah bukan rahasia bahwa era reformasi justru diwarnai oleh semakin buruknya korupsi di tanah air. Di era akhir pemerintahan Soeharto, kita berada di rangking enam terburuk dunia, menurut Transparency International. Kini menurut lembaga yang sama dengan metodologi penelitian yang sama, posisi kita terburuk nomor tiga. Di Asia, bahkan kita juara satu. Korupsi atau money politics semakin meluas, dari lingkungan istana ke gedung parlemen.

Bahwa kinerja parlemen di atas harus diperbaiki dan bahwa harus ada perubahan sistemik untuk perbaikan kinerja parlemen, tentu semua pihak sepakat. Persoalannya, apakah solusi itu adalah dihidupkannya kembali lembaga recall, di mana partai politik kembali mempunyai hak untuk memecat anggotanya di DPR.

Hak recall di tangan partai hanya dapat berlaku secara baik dan berfungsi bagi kepentingan publik dengan satu syarat. Partai yang bersangkutan harus terlebih dahulu terlembaga. Partai itu, misalnya, memang punya platform dan AD/ART yang sungguh-sungguh berwibawa dan menjadi otoritas tertinggi. Di partai itu, mekanisme pengambilan keputusan juga sudah transparan dan demokratis. Sehingga dapat dipastikan kebijakan partai benar-benar dilahirkan oleh prosedur yang demokratis, di mana anggota berdaulat, dan dibimbing oleh platform serta AD/ART partai. Jika terjadi pemecatan anggota DPR, misalnya, prosedur itulah yang bekerja dan publik dengan mudah merujuk pada prosedur tersebut.

Sebaliknya, jika partai belum terlembaga, hak memecat anggota DPR oleh partai justru dapat memperburuk keadaan. Jika belum terlembaga, partai sangat dikuasai oleh elite partai, atau ketua umumnya. Sang ketua umum tidak benar-benar bertindak seperti ketua umum dalam partai modern, namun lebih terkesan sebagai pemilik sebuah partai.

Jika mayoritas partai besar kita belum terlembaga, maka lembaga recall justru akan memperkuat oligarkhi partai. Di tubuh setiap partai, kekuasaan elite atau ketua umum akan lebih besar. Parlemen pun akhirnya hanya menjadi forum tiga atau empat ketua umum partai besar saja. **

Meremehkan Mahkamah Konstitusi

BAYANGKAN skenario buruk seperti ini. Saat itu 17 Agustus 2003, yang merupakan batas waktu terakhir terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). UUD 1945 mengatur pembatasan waktu itu. Namun, pada hari itu, UU Mahkamah Konstitusi tidak kunjung selesai. Atau setidaknya sembilan hakim yang menduduki MK belum kunjung dipilih.

Ribuan massa turun ke jalan. Mereka mengklaim bahwa baik pemerintah maupun DPR melanggar konstitusi karena tidak kunjung berhasil membentuk MK, sesuai jadwal yang diamanatkan UUD 45. Sebagian meminta presiden dipecat karena pelanggaran konstitusi itu. Sebagian lagi meminta DPR dilikuidasi karena berani menantang ketentuan UUD 45.

Dapat dibayangkan, politik pasti bergolak. Kasus Sukhoi belum selesai, sudah pula muncul kasus MK. Kontroversi UU Sisdiknas masih hangat, sudah pula muncul kontroversi RUU Mahkamah Konstitusi. Dalam situasi seperti itu, apapun yang diambil mengundang resiko.

Sangat jelas, baik lembaga DPR maupun presiden telah meremehkan pembentukan MK. Sejak Agustus tahun lalu, UUD 45 yang sudah diamandemen mengamanatkan untuk segera membentuk MK. Waktu setahun yang diberikan UUD 45 sangat cukup. Sebab, UU merupakan kewenangan bersama antara DPR dan presiden, tentu dua lembaga ini yang diberikan tugas membentuk UU-nya.

Namun, baik DPR maupun presiden tidak kunjung mengambil inisiatif untuk membuat UU Mahkamah Konstitusi itu. Hanya dua bulan sebelum deadline, panitia bersama untuk membahas RUU baru terbentuk. Secara resmi, presiden menunjuk Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan Jaksa Agung M.A Rahman mewakili pemerintah. Sementara DPR juga membentuk pansus yang diketuai Zein Badjeber.

Namun, pembentukan tim itu sangat terlambat. Apa yang dapat dilakukan dalam tempo kurang dua bulan? Apalagi DPR juga akan reses 9 Juli 2003. Baik DPR maupun presiden kini menghadapi dilema yang sama buruknya. Pertama, menaati UUD 1945, dan secara terburu-buru mengesahkan UU Mahkamah Konstitusi, memilih hakimnya dan mengoperasionalkannya. Resikonya, akan terbentuk MK yang ecek-ecek.

Pilihan Kedua, baik presiden maupun DPR ingin membentuk lembaga MK yang sangat berwibawa. UU Mahkamah Konstitusi yang dibentuk harus sangat matang. Sembilan hakim yang dipilih untuk MK itu harus pula yang sangat superior. Namun hal ini sulit dituntaskan dalam waktu kurang dari dua bulan. Resikonya, baik presiden atau DPR melanggar deadline yang amanatkan konstitusi.

Baik pilihan pertama maupun kedua sama buruknya. Membentuk MK terburu-buru hanya membuat negara ini terpuruk lebih jauh. Penyebabnya, MK sangat berkuasa. Jika prosedur, hukum acara, dan personel yang mengatur MK ini buruk, negara dalam bahaya.

MK, misalnya memiliki wewenang membatalkan pemilu. Apa jadinya, misalnya pemilu pemilihan presiden 2004 dibatalkan oleh MK. Padahal, presiden lama sudah diganti presiden baru. Keabsahan kemenangan presiden baru dibatalkan oleh MK. Negara pun vakum kekuasaan. Mudah sekali MK melumpuhkan negara.

Atau bayangkan situasi lainnya. Berdasarkan kewenangannya, MK membubarkan partai terbesar pemenang pemilu 2004. Padahal, partai itu menjadi kendaraan politik bagi presiden terpilih dan bagi sekian banyak anggota DPR dan DPRD. Fraksi di DPR dan DPRD juga merupakan perpanjangan tangan partai. Sementara banyak pula segmen akar rumput yang terikat secara emosional dengan partai itu. Pembubaran partai politik terbesar itu dengan segera membuat politik gonjang-ganjing.

MK dapat pula menjungkirbalikkan situasi politik dengan membatalkan aneka UU. Katakanlah, misalnya, MK membatalkan UU Sisdiknas yang kontroversial itu. Padahal, proses pengesahan UU itu sudah membelah publik Indonesia ke dalam kelompok pro dan kontra. Yang lebih celaka, pro dan kontra itu konsisten pula dengan garis agama. Pembatalan kembali UU Sisdiknas itu niscaya akan menjadi bensin bagi api yang masih menyala.

Begitu besar kewenangan MK ini membuatnya tidak bisa dikerjakan dengan cara ecek-ecek. Resikonya terlalu besar. Kekuasaan organ ini juga terlalu hebat.

Jika memang MK sedemikian pentingnya, mengapa presiden dan DPR lambat merespons amanat UUD 1945 itu? Hanya ada dua kemungkinan.

Pertama, presiden, terutama DPR, lalai. Tidak ada motivasi politik di balik keterlambatan itu. Namun, kelalaian itu juga menggambarkan buruknya kinerja, terutama DPR, yang menjadi lembaga utama legislasi. DPR terlalu disibukkan oleh persoalan

jangka pendek dan personal anggotanya sendiri. Lihatlah apa yang terjadi dalam aneka sidang DPR? Kursi kosong melompong. Absensi anggota DPR amat parah. Jika untuk hadir di sidang saja, banyak anggota DPR yang enggan, apalagi memikirkan tugas jangka panjang seperti pembentukan MK?

Kedua, presiden, terutama DPR, lalai. Namun dengan kesengajaan. Tentu dua lembaga ini tetap ingin patuh kepada amanat konstitusi. Namun pembentukan MK itu dikerjakan terlambat, dengan harapan akan ada amandemen terhadap aturan peralihan UUD 45 itu. Jika amandemen atas aturan peralihan UUD 45 dapat dilakukan, pembentukan MK dapat diundur lebih lama.

Bagaimanapun, MK lembaga yang sangat powerful dan dapat mengimbangi baik presiden dan DPR. Bagi DPR dan presiden sekarang, mungkin, biarlah lembaga itu hadir untuk presiden dan DPR periode berikutnya setelah 2004.

Karena kelalaian DPR dan presiden merespons pembentukan MK secara lebih dini, kini kita semua memikul beban politik tambahan.

**

Pemecatan Massal Anggota DPR?

APA yang terjadi jika dalam waktu dekat ini anggota DPR dipecat secara serentak atau massal? Misalnya, anggota DPR yang selama ini “menyempal” dari kebijakan PDIP di DPR diberhentikan. Bersamaan dengan itu, anggota PBB dan PPP yang memisahkan diri, bahkan mendirikan partai baru direcall. Tidak ketinggalan, PKB Alwi Shihab mencopot semua anggota DPR yang “selingkuh” dengan PKB Matori. Belasan mungkin puluhan anggota DPR serentak harus “angkat kaki” dari Senayan.

Hal tersebut sangat mungkin terjadi. UU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD sudah disahkan. Dalam pasal 85, pergantian antar waktu memang mengatur kemungkinan anggota DPR yang diganti di tengah jalan. Sang anggota tersebut mungkin meninggal dunia, mengundurkan diri atau diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan untuk diberhentikan.

Usul tersebut perlu diproses lagi atau diseleksi oleh organ DPR, apakah itu sidang paripurna, rapat pimpinan, atau dewan kehormatan. Usul partai politik tersebut langsung dibawa oleh

pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan. Presiden tinggal mengetok palu saja.

Memang ada aturan peralihan. Pasal 109 menyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan dan pimpinan DPR hasil Pemilu 1999 tetap berlaku sampai ada anggota hasil pemilu berikutnya. Namun, pasal berikutnya, yakni pasal 111, membuat perkecualian. Pergantian antar waktu bagi anggota DPR itu sudah diberlakukan. Tidak perlu menunggu pemilu 2004, anggota DPR yang dianggap sudah “menyempal” dan “membre” secepatnya bisa dipecat.

Akankah UU yang baru tersebut bisa membuat DPR kita makin tertib karena anggota DPR sudah dapat dikontrol paksa oleh partai induknya? Atau, apakah DPR justru semakin terkekang secara politik karena anggota DPR semakin takut bersuara kritis walau pimpinan partainya salah?

Hak recall yang dimiliki partai politik terhadap anggota di DPR memang kini dirasakan seperti “madu sekaligus racun.” Ia menjadi madu karena bisa mengobati kemarahan politik akibat buruknya kinerja sebagian anggota DPR. Namun, hal itu juga bisa menjadi racun jika hasilnya berupa DPR yang kembali mandul.

Setelah reformasi bergulir, kita memang dikagetkan oleh hasilnya. Selama ini reformasi terlalu diarahkan untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan presiden. Sementara di sisi lain, reformasi itu memberdayakan DPR. Memang kekuasaan lembaga presiden sudah sedemikian terpangkas. Tidak ada lagi tokoh yang bisa menjadi presiden lebih dari dua periode. Proses pemecatan presiden juga harus diperjelas dengan diatur secara detail dalam konstitusi. Namun, kita lupa membuat mekanisme kontrol terhadap lembaga DPR. Misalnya, proses pemecatan anggota DPR tidak tercantum dalam konstitusi. Padahal, anggota DPR atau presiden sama-sama merupakan pejabat publik yang perlu diawasi dan dihukum jika bersalah.

Kita memberikan hak DPR untuk menjadi lembaga utama sebagai legislator. Namun, kita lupa mengontrolnya untuk juga memberikan hak veto kepada Presiden atas UU yang disetujui DPR. Presiden semestinya bisa menolak UU yang didukung DPR melalui hak veto itu. Jika DPR ingin mengalahkan hak veto presiden, DPR bisa kembali memperbaiki atau mengakomodasi keinginan presiden. Atau, DPR bisa mengalahkan hak veto presiden melalui voting yang disetujui 2/3 anggota DPR.

Jika dalam konstitusi saja kita lupa mengawasi dan mengontrol DPR, apalagi dalam tingkat undang-undang, tata tertib, dan praktis politik sehari-hari? Akibatnya, DPR menjadi the untouchables, yang tidak tersentuh. Tidak ada yang bisa memecat anggota DPR di tengah jalan. Banyak hal miring yang dikerjakan anggota DPR yang akhirnya diterima apa adanya.

Akibat absennya mekanisme pengawasan dan hukuman, buruknya kinerja anggota DPR sudah diketahui publik luas. Misalnya, kemalasan menghadiri sidang paripurna. Media massa, baik koran, majalah maupun TV, sering memotret jajaran kursi yang kosong. Sidang paripurna sering dibatalkan karena anggota DPR yang hadir tidak mencapai kuorum. Jika hadir dalam rapat sidang paripurna saja sangat sulit, apalagi yang bisa diharapkan?

Banyak produk DPR yang terlantar karena sidang yang akhirnya ditunda. Di antara yang hadir, tidak bisa pula dipastikan seberapa banyak yang menguasai materi. Itu bukan masalah kompetensi, tetapi merupakan komitmen anggota DPR untuk bekerja secara profesional mewakili pemilihnya dan mengawal agenda reformasi.

Yang lebih mengagetkan adalah maraknya isu KKN di DPR. Sejak reformasi, DPR sebenarnya diamanatkan mengawal republik dari kejahatan KKN. Tetapi isu tersebut justru sering bergema di DPR. Publik mendengar aneka kasus, mulai cek perjalanan, divestasi BCA, kasus BLBI, divestasi Bank Niaga sampai kasus uang PT Pura. Publik

juga menyaksikan sendiri kekayaan luar biasa beberapa anggota yang dulu dikenal sebagai aktivis yang kere.

Namun, semua itu tidak tersentuh. Tidak ada yang bisa mengontrol mereka. Bahkan ketua umum partainya sendiri tidak bisa berbicara banyak. Ada anggota bisa berbicara banyak. Ada anggota partai yang menyempal, lalu mendirikan partai baru. Tetapi, mereka tetap menjadi anggota DPR. Padahal, ketika mencalonkan diri, mereka adalah wakil partai induknya. Toh, ketua umum partai tidak bisa memecat sang penyempal itu. Anggota DPR semakin leluasa berbuat semauanya.

Hak recall, hak untuk memecat anggota DPR memang dirindukan sebagai solusi. Persoalannya, siapa yang seharusnya mempunyai wewenang recall itu? Apakah tidak terlalu riskan jika hak recall diserahkan begitu saja secara bebas kepada partainya masing-masing?

Semula, ada usul agar hak recall partai juga dikontrol. Benar bahwa partai bisa mengambil inisiatif untuk memecat anggotanya. Tetapi, keputusan akhir sebaiknya diserahkan kepada Dewan Kehormatan DPR. Harus ada kriteria obyektif, verifikasi dan penilaian dari dewan kehormatan itu untuk memilah.

Harus tetap dibedakan antara anggota yang memang layak dipecat karena kemalasan serta komitmen kerjanya dan anggota yang vokal serta kritis yang berani melawan kebijakan partai demi kepentingan umum. Lembaga recall oleh partai itu seharusnya juga dikontrol oleh UU yang baru. **

ST MPR yang Terakhir?

JUMAT 1 Agustus 2003, Sidang Tahunan MPR kembali digelar. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ST MPR 2003 ini tampak lebih tenang dan dingin. Dua hari sebelum sidang dimulai, misalnya, ST MPR itu tidak menjadi headline aneka koran besar. Berbagai siaran berita media elektronik dan talk show masih tidak kunjung mengangkat isu seputar ST MPR.

Juga berbeda dengan tahun sebelumnya aneka civil society dan politisi jalanan pun tidak bergerak. Tidak ada persiapan LSM tertentu, misalnya, untuk mobilisasi opini menuntut sesuatu dalam ST MPR kali ini. Pertikaian antara elite politik atau tokoh parpol juga tidak mencuat ke permukaan. Semua tampak serba biasa, serba normal dan tertib.

Mengapa ST MPR kali ini tampak berbeda? Apakah ini gambaran bahwa politik nasional menjadi semakin stabil dan normal? Apakah Sidang Tahunan MPR, juga agenda politik nasional lainnya, misalnya sudah ditanggapi sebagai gejala rutin saja? tidak ada euforia yang

berlebihan. Masa puber politik, agaknya sudah lewat. Elite politik, LSM atau politisi jalanan juga semakin matang dan menghemat tenaga untuk tidak mengumbar aktivisme yang tidak perlu.

Atau sebaliknya, ini gambaran apatisisme politik yang semakin parah? Mungkin, publik semakin tidak peduli terhadap agenda kenegaraan. Tahun sebelumnya, misalnya mereka pernah sangat peduli. Namun, toh mereka melihat bahwa tidak ada perubahan yang mendasar. Tuntutan publik, misalnya, dianggap sebagai anjing yang menggonggong saja. sementara itu, yang dihasilkan elite politik adalah hal yang sama sekali berbeda.

Empat tahun reformasi, kita melihat perbedaan respons publik yang sangat kentara terhadap Sidang Tahunan MPR. Pada masa awal reformasi, MPR memang dianjurkan, bahkan "dipaksa" untuk bersidang setiap tahun. Namun kini, ST MPR 2003 terancam menjadi ST MPR yang terakhir.

Setidaknya, ada tiga alasan penyebab ST MPR 2003 tampak lebih dingin, tidak lagi seksi, dan tidak sensasional dipandang dari sisi jurnalistik ataupun konsekuensi politik. Pertama, MPR yang menyelenggarakan sidang pada 2003 bukanlah MPR yang selama ini dikenal dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Akibat amandemen radikal dalam ST MPR 2002, MPR kini bukan lagi lembaga yang powerful. MPR bukan lembaga yang superbody, bukan lembaga tertinggi negara yang mungkin hanya ada di negara komunis. Satu per satu, kewenangan MPR dipreteli dan kini MPR hanya menjadi lembaga tinggi negara. Dari sisi status kelembagaan, MPR sama dengan posisi lembaga presiden, DPR, ataupun Mahkamah Agung.

MPR tidak lagi memilih dan memecat presiden. Presiden sudah ditetapkan untuk dipilih secara langsung. Tidak penting lagi, apakah MPR sebagai lembaga suka atau tidak terhadap tokoh tertentu untuk

menjadi presiden. Keputusan tentang siapa yang akan memimpin Indonesia kelak tidak lagi di tangannya. Presiden juga tidak lagi bisa dipecat oleh MPR begitu saja asal didukung mayoritas suara. Untuk memecat presiden, sudah ada mekanisme tambahan, yaitu elaborasi hukum dari Mahkamah Konstitusi.

Dalam memberikan laporan di ST MPR nanti, presiden juga sudah tidak lagi merasa melapor kepada atasannya. Presiden dan pendukungnya akan tampak lebih santai. Ia tidak sedang diawasi "bos" besarnya lagi karena MPR sudah "ompong."

MPR juga tidak lagi membuat Garis Besar Haluan Negara. Karena presiden bukan lagi mandataris MPR, tidak ada keharusan presiden untuk menjalankan kemauan politik MPR. Dengan dipilih secara langsung, presiden dapat mengembangkan agendanya sendiri. Publik luas yang nanti menjadi "pembeli" dalam pemilu langsung. Karena bukan lagi "bawahan" MPR, presiden dan pendukungnya juga tidak lagi memandang terlalu serius laporan pertanggungjawaban presiden kelak.

Kedua, ST MPR tahun 2003 juga sudah kehilangan isu besar dan seksi. Tahun sebelumnya, misalnya, ST MPR didominasi pertempuran wacana yang sangat hebat. Pada 2002, amandemen UUD 45 harus selesai. Aneka pertempuran, baik di MPR maupun di luar MPR, soal amandemen konstitusi menjadi pembicaraan yang panas.

Isu soal pemilihan presiden langsung, misalnya. Masih ada tarik-menarik antara mereka yang menginginkan presiden tetap dipilih MPR dan yang menginginkan presiden dipilih langsung. Hal yang sama terjadi pada Utusan Golongan. Sampai detik terakhir, masih diperdebatkan apakah Utusan Golongan yang diangkat itu harus dipertahankan sesuai dengan kultur politik Indonesia. Ataupun Utusan Golongan harus dibuang agar semua anggota MPR dipilih.

Tidak kalah hot-nya pada 2002, peran militer dan sipil di lembaga legislatif juga menjadi tema yang garang. Sebagian ingin militer

lengser dari DPR dan masuk ke MPR saja. sebagian lagi ingin militer dan polisi yang aktif tidak lagi ada di badan politik.

Namun, puncak pertarungan di ST MPR 2002 adalah kepastian amandemen UUD 45 itu sendiri. Ternyata banyak pula aspirasi agar kita kembali saja menerapkan UUD 45 yang asli karena amandemen sudah kebablasan. Cukup mengagetkan, isu itu tidak hanya diperjuangkan purnawirawan. Banyak pula pakar tata negara berdiri di belakang isu itu. Tidak ketinggalan, para "jago tua" di PDIP turut menjadi barisan anti amandemen. Wajar saja jika ST MPR 2002 menjadi mendidih.

ST MPR 2001 dan 2000 juga tidak kalah mendidihnya. Pada 2001, isu pelengseran Gus Dur sebagai presiden masih menjadi wacana. Sementara pada tahun 2000, isu naiknya Gus Dur sebagai presiden pertama era reformasi masih pula hangat. Saraf kekuasaan para elite politik, dinamika politik praktis di MPR serta pertempuran gagasan sangat kental membayangi Sidang Tahunan MPR.

Isu hot seperti itulah yang kini lenyap. Tidak ada lagi berita seksi seputar ST MPR 2003. Presiden tidak mungkin dijatuhkan, apalagi pemilu tinggal satu tahun lagi. Tidak ada isu besar yang kontroversial. Isu Sukhoitadinya ingin diangkat, namun tidak jelas permasalahannya dan siapa yang ingin dijadikan target. Ada isu Komisi Konstitusi, namun tampaknya publik tidak terlalu memberikan perhatian lagi.

ST MPR 2003 akhirnya malah kalah hot, kalah seksi dibandingkan dengan isu pemilihan gubernur di berbagai provinsi. Situasi konfliktual, intrik dan money politics dalam pemilihan gubernur itu jauh lebih sensasional. ST MPR 2003 akhirnya menjadi ritual politik belaka. Pentingnya ST MPR 2003 kali ini dalam rangka meninjau semua ketetapan MPRS dan MPR. Itu pun tidak terlalu dihiraukan. Inilah antiklimaks ST MPR 2003. Di masa akhirnya, ST MPR justru kehilangan pesona. **

Rehabilitasi Korban Komunisme

ISU komunisme sudah menjadi momok dan beban politik Indonesia selama sekitar empat tahun. Akankah momok itu berakhir dan kita, bangsa Indonesia, lebih enteng melangkah ke depan tanpa ada lagi tambahan beban politik masa silam? Cetusan pikiran ini timbul spontan melihat semakin derasnya tuntutan rekonsiliasi dan rehabilitasi dari berbagai lembaga.

Komnas HAM baru saja mengirimkan surat kepada Presiden Megawati. Komnas HAM meminta presiden secepatnya merehabilitasi korban dan keluarga PKI/komunis yang menjadi tertuduh peristiwa pemberontakan G30S/1965. Menurut Komnas HAM, korban sudah menderita cukup lama, tanpa pernah diputuskan bersalah atau tidak oleh pengadilan. Bukan hanya korban, istri, suami, anak, bahkan cucu terkena tindakan diskriminatif sepanjang Orde Baru.

Sebelum Komnas HAM, Mahkamah Agung pun memberikan pertimbangan serupa kepada presiden. Sesuai dengan amandemen

UUD 45, presiden hanya boleh memberikan rehabilitasi setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung. Pada 12 Juni 2003, Mahkamah Agung sudah memberikan pandangannya yang mendukung rehabilitasi itu.

Ali Sadikin, tokoh petisi 50, mendesak hal serupa. Saat menerima penghargaan atas jasanya di hari kemerdekaan, Ali sempat membisiki presiden. Menurut Bang Ali, saatnya Presiden Megawati memperhatikan korban G30S/PKI yang sudah sangat lama menderita. Puncak semua seruan itu adalah saran ST MPR 2003. Secara jelas dan tegas MPR meminta presiden menindaklanjuti kebijakan rekonsiliasi nasional.

Dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan, tidak ada peristiwa politik yang begitu dahsyat efeknya ketimbang peristiwa G30S/ 1965. Peristiwa itu sudah membelah komunitas politik Indonesia menjadi lawan dan kawan secara frontal. Luka menganga di dada begitu banyak pihak. Ada ratusan ribu, bahkan jutaan warga, jika kita hitung semua pihak yang berkonflik, berikut keluarga intinya yang menjadi korban. Empat puluh tahun sejak peristiwa itu, luka tersebut tidak kunjung selesai, tidak kunjung sembuh.

Komunisme menjadi stigma yang begitu menakutkan. Diskriminasi dilakukan tidak hanya kepada pelaku utama G30S, tetapi juga kepada banyak pihak yang dituduh terlibat dalam peristiwa itu. Diterapkan kebijakan bersih lingkungan. Keluarga PKI tidak dapat masuk ke jabatan dan keanggotaan strategis seperti pegawai negeri atau tentara. Mengapa terjadi represi politik yang sedemikian luas dan lama dalam politik Indonesia?

Setidaknya, ada tiga penjelasan. Pertama, PKI menjadi elemen penting dalam pertarungan elite politik di tahun 1960-an. Sayangnya, kompetisi politik saat itu tidak hanya terjadi di dalam wacana atau polemik di koran. Teror dan kontra teror terjadi, meluas dari kota hingga desa. Semboyan revolusioner yang dibawa oleh

paham komunisme menjadi begitu menakutkan banyak pihak. PKI dikalahkan dalam pertarungan politik yang sangat berdarah.

Tidak hanya para jenderal yang terbunuh. Tidak hanya para kiai dan tuan tanah di desa yang “diuber-uber” rakyat seperti garong. Ratusan ribu warga tewas secara mengenaskan. Konflik terjadi tidak hanya antara aparat keamanan dan pendukung komunisme. Yang jauh lebih dahsyat adalah pertempuran horizontal antara kekuatan masyarakat sendiri.

Kedua, PKI terlibat pula dalam konflik yang menumbuhkan sentimen keagamaan, khususnya Islam. Semboyan populisme PKI membuat tuan tanah dan para kiai yang punya banyak tanah tidak nyaman. Berbagai isu teror menerpa para kiai dan santrinya.

Titik balik terjadi. Setelah Angkatan Darat memukul PKI, “serdadu” dengan simbol agama bertempur melawan pendukung dan aktivis PKI dengan kekerasan. Beberapa sungai di Jawa menjadi merah karena darah dan busuk karena banyaknya mayat yang mengambang.

Ketiga, PKI juga menjadi bagian konflik global perang dingin. Saat itu blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet sedang berkompetisi dengan blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Dua kubu itu terus bersaing menjadi penguasa dunia dan berebut pengaruh. Pemberontakan terhadap pemerintah yang sah diupayakan terjadi di semua wilayah dunia. Jika penguasa condong ke “kiri,” pihak “kanan” mendorong revolusi. Sebaliknya jika terjadi.

Saat itu menang dan kalah dalam pertarungan politik sama dengan hidup atau mati sang politisi. Dalam demokrasi, pihak yang kalah dapat maju di pemilu berikutnya dan menjadi pemenang. Namun pada 1960-an itu, pihak yang kalah dalam pertarungan akan masuk penjara dan dibunuh. Kekejaman terjadi baik di kubu Uni Soviet maupun Amerika Serikat.

Di Uni Soviet, misalnya, tercatat jutaan warga mati di bawah Stalin. Begitu kerasnya Stalin menjalankan komunisme. Dia punya kamp pembuangan, GULAG. Dia juga memiliki begitu banyak polisi rahasia yang siap menyiksa lawan politik.

Amerika Serikat tidak ketinggalan walau tidak sekejam Uni Soviet. Di era 1950-an dan 1960-an, berkembang McCarthysism. Paham ini berasal dari McCarthy, politikus yang sangat anti komunisme. Sudah begitu banyak korban interogasinya, termasuk artis dan intelektual ternama di Amerika Serikat. Charlie Chaplin salah satu korbannya.

Wilayah yang dekat dengan Amerika Serikat, seperti Indonesia, juga mengembangkan pendekatan represi yang sama. Aneka kebijakan bersih lingkungan, Pulau Buru untuk pembuangan tokoh komunis, serta pelarangan partai atau ideologi komunisme lahir dalam konteks yang brutal seperti itu.

Kini dunia sudah sama sekali berubah. Uni Soviet sudah hilang dalam peredaran. Komunisme internasional sudah ambruk. Berbagai negara melakukan reposisi atas isu komunisme.

Namun, berbeda dengan banyak negara demokrasi lain, Indonesia mengambil respons yang moderat atas komunisme. Isu rehabilitasi keluarga atau korban komunisme sangat mungkin didukung oleh mayoritas elite. Kebijakan bersih lingkungan yang mendiskriminasi keluarga PKI sangat mungkin dihapus. Tetapi, ideologi komunisme tetap dilarang. Secara aklamasi, semua politisi di MPR pada 2003, dari berbagai partai, mulai dari yang paling kental nuansa keislamannya, seperti PBB, sampai yang paling "sekular" seperti PDIP, sepakat tetap melarang komunisme.

Ini kenyataan politik yang tidak bisa ditolak. Sungguhpun perubahan political mood atas PKI belum radikal, rehabilitasi korban komunisme sudah merupakan langkah maju. **

**BAGIAN KEDUA
MENYOROTI KINERJA
LEMBAGA POLITIK**

Mendengar Progress Report Presiden

TANGGAL 1 Agustus 2002 Presiden RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan laporan kerja tahunan. Tidak hanya anggota MPR yang mendengar paparan presiden itu, tetapi juga jutaan pasangan mata di seantero Indonesia yang menyaksikannya melalui siaran TV secara langsung. Publik luas selaku pemegang kedaulatan rakyat layak untuk tahu apa saja yang sudah dikerjakan presiden.

Berbagai jajak pendapat yang dimuat media massa, menunjukkan ketidakpuasan atas kinerja Megawati semakin tinggi. Namun pada saat yang sama, Megawati tetap dianggap sebagai tokoh paling populer yang mengalahkan tokoh lainnya. Setelah setahun ia menjadi presiden, apa kisah sukses pemerintahannya? Apa pula kegagalannya?

Ibarat kapten kesebelasan sepak bola, lapangan bermain Presiden Megawati sangat sulit. Ia tidak bermain di lapangan normal, tetapi di lapangan yang penuh kerikil, pasir, lumpur, becek dan tidak rata.

Megawati mewarisi segudang persoalan dari para pendukungnya. Sementara banyak pula masalah baru yang datang sebagai akibat kebijakannya sendiri.

Setidaknya dapat disinggung aneka kondisi yang menyulitkan. Ia mewarisi sistem kepartaian yang terfragmentasi. Tidak ada partai yang dominan sehingga koalisi partai menjadi keharusan. Sementara koalisi partai sangat mudah berubah. Konsensus sangat mudah dikhianati. Poros Tengah menggandeng PKB dan Golkar melawan PDIP, misalnya. Namun hanya dalam waktu setahun, Poros Tengah berubah menggandeng PDIP dan Golkar untuk melawan PKB. Kawan dan lawan menjadi tidak pasti.

Ia juga mewarisi kondisi civil society yang buruk. Tidak semua ormas yang ada pendukung demokrasi dan pluralisme. Tidak kalah banyaknya, bahkan jauh lebih banyak ormas yang menjadi mesin dari primordialisme. Konflik horizontal, baik atas basis agama, suku, etnis, sampai pendatang versus penduduk asli, mewarnai Indonesia dari Aceh sampai Papua. Tidak hanya partai politik yang terfragmentasi, publik luas juga sudah terkotak-kotak.

Sementara kualitas birokrasi yang ada, yang seharusnya menjadi mesin efisien dan efektif pemerintahannya, tidak pula fresh. Bahkan Megawati sendiri menyatakan para menteri tidak dapat memegang leher eselon satu. Mental pegawai negeri yang korup mewarnai birokrasi. Program pemerintah tidak dijalankan dengan semangat kepentingan publik, tetapi sebagai proyek mencari tambahan dengan kultur KKNya.

Aparat hukum seharusnya menjadi penjaga gawang terakhir pemerintahan Megawati. Namun baik peradilan ataupun kepolisian di Indonesia termasuk yang terburuk di dunia dalam urusan korupsi. Para hakim kasus Manulife kini sedang diinvestigasi berkaitan dengan isu suap atas keputusannya memailitkan sebuah perusahaan internasional. Bahkan pemerintah Kanada turun tangan. Opini internasional tentang Indonesia bertambah buruk.

Sementara, krisis ekonomi terus berlanjut. Jumlah pengangguran dikabarkan sudah berjumlah sekitar 40 juta. Utang terus menumpuk sampai anggaran untuk membayar utang lebih tinggi daripada anggaran untuk pembangunan. Investasi asing yang ingin masuk ke Indonesia tidak pula mencerahkan karena masih labil dan kotornya pemerintahan. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang berarti, apa yang dapat dilakukan Megawati?

Dalam lapangan yang sulit seperti ini, masih tetap ada kebijakan penting yang perlu digarisbawahi. Pertama, di tahun 2002 amandemen konstitusi selesai dilaksanakan. Indonesia akan memiliki sebuah konstitusi yang lebih demokratis dan sesuai dengan semangat zaman. Konstitusi itu sangatlah penting karena menjadi fondasi dari sistem politik dan hukum. Jika konstitusi itu berhasil diamandemen secara substansial, pemerintahan Megawati minimal akan dikenang turut meletakkan fondasi bagi Indonesia di masa depan.

Kedua, sudah ditemukannya metode konflik resolusi melalui pertemuan Malino. Konflik horizontal lebih mudah diatasi karena paradigma Malino. Berbagai pihak yang terlibat konflik duduk bersama merumuskan sendiri persoalan dan solusinya. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator. Jika hasil Malino ini belum maksimal, itu lebih disebabkan oleh kualitas aparat keamanan, bukan oleh metode Malino itu sendiri sebagai model solusi resolusi konflik.

Ketiga, pemerintah Megawati jauh berhasil mencegah keburukan yang lebih jauh dalam administrasi kenegaraan. Di masa Presiden Gus Dur, administrasi negara terkesan begitu amburadul. Keputusan yang dibuat hari ini dapat diubah lagi besok paginya. Sekneg diubah Gus Dur menjadi beberapa kantor yang sejajar. Akibatnya Sekneg memang terkesan lebih terbuka dan tidak menjadi "negara di dalam negara." Namun akibat lainnya, koordinasi menjadi sangat buruk. Kondisi ini berhasil ditertibkan Megawati. Politik pun semakin stabil.

Banyak pula sisi Megawati yang layak dikritik. Yang paling keras, dan paling sering dikemukakan, adalah masalah komunikasi politik. Kita hidup di era yang belum normal. Publik luas berharap lebih banyak dari Megawati untuk memberikan keterangan dan arah atas apa yang sedang terjadi. Boleh jadi apa yang dilakukan Megawati itu rasional dan penting, namun karena gagal dikomunikasikan akibatnya kebijakan itu dianggap salah arah dan “berkhianat.”

Publik perlu mendapat penjelasan atas aneka kebijakan atau keputusan politik yang dibuat, apalagi yang menimbulkan kontroversi, misalnya, mengapa ia menginstruksikan partainya menolak Pansus Buloggate 2; Mengapa ia mendukung Sutiyoso, seorang tersangka, untuk kembali memimpin Jakarta; Mengapa komisi konstitusi yang ia pidatokan tidak dilaksanakan oleh partainya sendiri; Mengapa krisis ekonomi tidak kunjung selesai; Mengapa begitu banyak jumlah pengangguran; atau pertanyaan yang jauh lebih strategis, Indonesia ini akan dibawa ke mana?

Di masa krisis, kehadiran dan keterlibatan seorang presiden dalam komunikasi politik sangat penting. Semoga di tahun kedua, Megawati lebih percaya diri untuk banyak tampil dan berdialog dengan publik. Pemerintahannya pun mesti punya target yang terukur tentang apa saja yang ingin dicapai di tahun kedua. Saatnya Megawati membangun tim yang kuat, untuk membantu membuat fokus kebijakan, serta merespon isu yang tengah hot di masyarakat.

**

Nyanyian Sedih Buruh di Rantau

RATUSAN ribu pekerja Indonesia yang kini tengah terlantar dan sedang diburu-buru aparat di Malaysia, mungkin teringat lagu Koes Plus di tahun 1970-an. "Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman." Kolam Susu yang jadi judul lagu ini menggambarkan betapa subur dan makmurnya tanah dan laut di Indonesia. Tongkat dan batu saja bisa tumbuh jadi tanaman. Laut seperti kolam susu. Cukup dengan kail dan jala, kebutuhan hidup akan terpenuhi.

Rupanya lain di lagu, lain di dunia nyata. Bagi sebagian besar rakyat kecil, Indonesia bukan kolam susu, tetapi tanah yang tidak lagi berpengharapan. Jumlah penganggur dan setengah penganggur sudah lebih dari 40 juta orang. Sementara investasi asing dari luar justru semakin merosot karena korupnya sistem hukum, dan masyarakat yang gemar saling membunuh karena sentimen etnis dan agama.

Akibatnya, lebih dari 2 juta pekerja memilih hidup di kampung orang lain di manca negara. Lebih dari 600.000 terdampar di Malaysia secara legal ataupun tidak. Tetapi kenyamanan hidup di kampung orang tidak berlangsung lama. Pemerintah Malaysia mengusir mereka yang datang secara ilegal.

Kini ratusan ribu pekerja Indonesia yang ilegal itu dalam kejaran aparat. Ada yang berhasil kembali ke Indonesia. Ada yang ketakutan, lari lalu tenggelam mati. Ada yang hilang tidak tentu rimbanya. Mengapa para pekerja ini menjadi terlantar? Mengapa pemerintah terkesan tidak bertindak cepat melindungi warganya sendiri? Apa yang dapat dilakukan DPR? Jumlah penduduk Malaysia kini sekitar 25 juta orang. Sepuluh persennya adalah warga asing. Dari sepuluh persen itu, sebagian besar berasal dari Indonesia.

Tentu secara ekonomi, kedatangan pekerja asal Indonesia menguntungkan bisnis di Malaysia. Mereka bisa mendapatkan harga buruh yang cukup murah. Untuk usaha yang bergerak di bidang padat karya, seperti perkebunan, konstruksi, pabrik barang massal, kedatangan pekerja Indonesia disambut dengan suka cita.

Namun dalam kondisi di mana penduduk asing sudah mencapai 10% dari penduduk asli, pemerintah Malaysia dengan sendirinya tidak hanya berpikir soal ekonomi. Malaysia tidak ingin menjadi seperti Lebanon. Di Lebanon, penduduk Palestina semakin banyak dan akhirnya dapat mendominasi persoalan politik domestik. Di Malaysia, jika kedatangan penduduk asal Indonesia tidak disetop, di masa depan pekerja asal Indonesia akan lebih banyak dan pada gilirannya akan punya pengaruh politik pula.

Sementara ini pengaruh dari pekerja Indonesia di Malaysia baru soal kriminal. Diberitakan, salah satu komunitas pekerja Indonesia secara massal terlibat kerusuhan dengan polisi setempat. Sebagian pekerja asal Indonesia ini diketahui menjadi konsumsi narkoba. Ketika digrebeg polisi, sebagian pekerja Indonesia malah menyerang dengan golok, pisau dan linggis.

Peristiwa kriminal ini menjadi picu dari diusirnya pekerja ilegal asal Indonesia dan diperbaharunya kebijakan imigrasi Malaysia. Karena nila setitik ulah sebagian kecil pekerja yang terlibat kriminal, rusak sudah susu sebelanga. Setelah lewat tanggal 1 Agustus, pekerja Indonesia menjadi investigasi aparat. Betapa ratusan ribu pekerja asal Indonesia yang ilegal itu tidak berdaya karena setidaknya tiga hal.

Pertama, status pekerja Indonesia sangat lemah bahkan dalam UU Perburuhan di Indonesia sendiri. Mereka tidak termasuk dalam definisi buruh formal yang terikat dengan upah dan waktu kerja dan kontrak tertentu. Pekerja Indonesia hanya menjadi sejenis pekerja harian yang lepas. Dalam kondisi seperti ini, mereka bahkan tidak berhak mempunyai Serikat Buruh untuk melindungi kepentingannya. Apalagi di Malaysia, di negeri orang. Para pekerja Indonesia praktis menghadapi kasusnya secara individual saja.

Tanpa adanya serikat kerja, posisi pekerja Indonesia sangat lemah. Tidak ada organisasi besar yang dapat mewakilinya dalam bernegosiasi, bahkan dalam pengurusan aneka dokumen administrasi. Jika pekerja ini tidak dibayar, bahkan diperkosa, umumnya mereka harus menghadapinya secara individual pula. Apalagi dalam kondisi mereka yang datang secara ilegal.

Kedua, kedatangan pekerja Indonesia itu umumnya menggunakan jasa agen pekerja. Karena lemahnya pengawasan pemerintah, agen sering kali bertindak sebagai perusahaan pemeras, tanpa memberikan perlindungan sama sekali. Tidak jarang, jaringan penyalur kerja itu bertindak selayaknya jaringan mafia, dengan prosedur yang serba gelap dan menyogok aparat setempat.

Mereka perlakukan pekerja selayaknya barang ekspor lain, seperti kopi dan cengkeh. Hak dan kemanusiaan pekerja tidak mereka pedulikan. Bahkan banyak pula pekerja wanita yang kemudian disulap menjadi penjaja seks.

Dalam kondisi agen yang seperti itu, tidak banyak pula yang dapat agen lakukan untuk melindungi pekerja Indonesia. Ketika para pekerja ini bersembunyi menghindari aparat, umumnya agen itu lepas tangan. No money no network. Padahal ancaman hukuman dari pemerintah Malaysia cukup menakutkan pekerja Indonesia. Apalagi yang diancam adalah hukuman cambuk, jenis hukuman yang diwariskan turun temurun sejak zaman kuda gigit besi.

Ketiga, yang sulit dimaafkan, adalah keterlambatan reaksi pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya di Malaysia. Padahal kebijakan imigrasi dan pengusiran atas pekerja ilegal Indonesia sudah diumumkan enam bulan sebelumnya. Namun tidak dirasakan adanya antisipasi dan persiapan pemerintah Indonesia. Ketika harinya datang, 1 Agustus 2002, tidak ada koordinasi, tidak ada upaya konkret dari pemerintah Indonesia untuk membantu pekerja Indonesia ilegal itu.

Bahkan nasib ribuan wong cilik Indonesia di Malaysia tidak pula disinggung sedikitpun dalam pidato pertanggungjawaban presiden Megawati di Sidang Tahunan MPR 2002. Sementara ketua DPR RI masih sempat menyinggung pekerja Indonesia ini sekedarnya di Sidang Tahunan yang sama, presiden Megawati seolah tidak menganggap penting nasib ratusan ribu wong cilik itu, untuk juga diketahui oleh MPR dan jutaan penduduk Indonesia yang menontonnya di TV.

Lengkap sudah nyanyian sedih pekerja Indonesia di rantau. Siapa kini yang benar-benar peduli dengan wong cilik? Baik DPR maupun pemerintah tidak melakukan sesuatu guna melindungi kepentingan buruh di rantau ini. **

TKI, Kelemahan Komunikasi Mega

IBU muda itu terus memeluk dua anaknya yang masih kecil. Air matanya sudah terkuras habis. Semalaman dia menangis sambil memeluk badan suaminya yang sudah menjadi mayat. Di Nunukan, Kalimantan Timur, ibu muda itu tidak sendirian. Sebagaimana suaminya, sudah puluhan TKI (tenaga kerja Indonesia) yang mati.

Pada saat yang sama, Presiden Megawati sedang berada di Johannesburg. Dia meminta pembantunya mengumpulkan wartawan dan melakukan konferensi pers. Saya membayangkan, presiden mengatakan hal berikut:

"Rekan-rekan wartawan sekalian. Sengajanya menyelenggarakan konferensi pers ini secara mendadak untuk merespons situasi di tanah air. Pikiran saya terus diganggu oleh persoalan tenaga kerja Indonesia yang kini terdampar di Nunukan."

Seterusnya presiden mengatakan, "Saya sudah meminta para pembantu saya melakukan hal sebagai berikut. Dalam jangka pendek, pemerintah akan memobilisasi aneka fasilitas yang dibutuhkan agar

para TKI itu dapat pulang kembali ke kampung halaman secara layak. Pemerintah akan menyediakan sejumlah kapal untuk mengangkut mereka. Juga akan disediakan obat-obatan, makanan, tempat berteduh sementara dan dokter dalam jumlah yang memadai.”

“Sedangkan dalam jangka panjangnya,” ujar presiden, “ saya sudah meminta partai saya untuk memperjuangkan RUU yang melindungi TKI di luar negeri. Saya minta RUU itu sudah selesai dibuat sebelum tahun ini berakhir. Saya juga sudah memerintahkan Menlu saya untuk selekasnya membuat perjanjian bilateral dengan pemerintah Malaysia. Perjanjian ini akan lebih melindungi TKI kita di sana, yang legal atau ilegal. Tadi saya juga menelepon wakil presiden untuk segera berangkat ke Malaysia, mengadakan pertemuan dengan pimpinan di sana, agar hubungan kedua negara tidak semakin buruk.”

Sampai hari ini, imajinasi saya ini tidak terjadi. Presiden Megawati agaknya memilih kebijakan yang lebih sunyi. Dia tidak memberikan satu kalimat pun kepada publik tentang TKI. Lingkaran terdekatnya memang terus bergerak, memantau dan membantu TKI di Nunukan. Kapal terus ditambah untuk mengangkut TKI. Obat-obatan terus dikirim. Wakil presiden, yang mewakili lembaga kepresidenan, juga dijadwalkan datang ke Nunukan.

Karena terkesan berdiam diri, Megawati semakin menjadi sasaran kritik yang empuk. Dia segera dibandingkan dengan Presiden Filipina, Arroyo, yang menghadapi persoalan yang sama. Namun Arroyo memberikan solusi berbeda. Dia menyempatkan diri menjemput tenaga kerjanya yang dipulangkan. Walau hanya menghabiskan waktu beberapa jam, kedatangan Arroyo dalam kerumunan tenaga kerja ini memberikan makna simbolik sangat tinggi tentang kepedulian seorang presiden.

Megawati juga dikritik atas platform partainya sendiri yang mencanangkan diri sebagai partai yang sebenarnya. Publik menanyakan apa yang sudah dan akan dilakukan Megawati dan

partainya. Mengapa respons yang diberikan begitu terlambat? Apakah slogan wong cilik itu hanya berguna untuk kampanye pemilu?

Dari kasus di atas, mudah disimpulkan bahwa Presiden Megawati mempunyai masalah dalam komunikasi politik. Kasus TKI di Nunukan bahkan kasus pertama dan sangat mungkin bukan pula kasus terakhir. Respon Megawati, dari kaca mata ilmu politik modern, terasa tidak memenuhi standar komunikasi politik yang diperlukan seorang presiden untuk menjaga citranya.

Tidak heran jika sejak menjadi presiden popularitas Megawati terus merosot. Harian Kompas melakukan survei reguler di berbagai kota pada tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan dan setahun pertama Megawati. Ada pola yang nyata bahwa semakin hari, dari serial survei itu, publik semakin merasa tidak puas.

Krisis yang ada tidak dengan sendirinya membuat publik tidak puas terhadap kinerja presiden. Lambatnya solusi atas krisis juga tidak otomatis membuat publik kecewa dengan presiden. Komunikasi politik presiden yang lebih menentukan apakah presiden bertambah populer atau sebaliknya. Dalam komunikasi politik yang efektif, walau negara masih dalam keadaan krisis, dahaga publik dapat dipuaskan jika presiden berhasil meyakinkan publik atas apa yang sedang terjadi dan harapan apa yang akan terjadi.

Contoh komunikasi politik yang baik adalah kasus George W. Bush, presiden Amerika Serikat, dalam Tragedi 11 September. Runtuhnya dua menara World Trade Center dan gedung Pentagon jelas merupakan pukulan dan shock nasional yang sangat berat. Apalagi, ribuan nyawa terbunuh secara massal dalam hari yang sama. Kebanggaan nasional atas sistem keamanan di negara itu rontok seketika.

Namun, Bush cukup piawai memainkan komunikasi politik. Hampir setiap hari dia berbicara langsung dengan rakyat Amerika

Serikat. Dia berkunjung ke berbagai tempat dan berbicara dengan bahasa hati. Dia jelaskan bahwa Amerika Serikat tidak dapat diteror dan segera bangkit. Mereka yang melakukan serangan akan mendapat balasan yang setimpal.

Bush kemudian menceritakan rencananya. Dia menjalankan rencana itu secara konsisten dan penuh determinasi. Dukungan politik secara domestik dan internasional kepada Bush terus mengalir. Tidak lama setelah tragedi, Bush bahkan tercatat sebagai salah satu presiden Amerika Serikat yang paling populer dalam sejarah. Krisis justru dijadikan peluang bagi Bush untuk semakin dicintai rakyatnya.

Berdasarkan kisah Bush itu dan pengalaman Presiden Megawati sendiri, saatnya Presiden Megawati dan lingkaran terdekatnya memikirkan secara serius masalah komunikasi politik presiden. Politik pada era reformasi tidak dapat lagi dijalankan tanpa peka terhadap opini publik. Semakin hari di dunia yang semakin bebas, publik semakin kritis dan ingin presidennya mengatakan dan melakukan sesuatu.

Semoga kasus Nunukan menjadi kasus terakhir yang menunjukkan buruknya komunikasi politik Presiden Megawati. **

Mengontrol Perang Irak?

Di tengah bom keras yang jatuh di kota Baghdad, Irak, sayup-sayup terdengar suara di DPR, Indonesia. Secara resmi, pernyataan sikap DPR dibacakan bahwa DPR mengutuk keras agresi Amerika Serikat ke Irak. Selain melanggar kedaulatan hukum sebuah negara nasional, agresi itu dinilai menimbulkan tragedi kemanusiaan.

Lebih dari sekedar membuat pernyataan, DPR juga menyerukan sebuah aksi konkret. "DPR mendukung sepenuhnya langkah pemerintah yang mendesak digelar Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum PBB untuk menekan Amerika Serikat agar menghentikan agresinya ke Irak."

Lebih jauh lagi, DPR akan pula menggalang kekuatan parlemen dunia. Ketua Badan Kerja Sama antar Parlemen (BKSAP) Sabam Sirait menyatakan, "Dalam pertemuan InterParliament Organization (IPO) yang berlangsung di Chili, bulan April mendatang, kita akan bersuara lebih keras."

Memang, sudah sepantasnya lembaga terhormat seperti DPR memberikan respons negatif atas perang Irak. Namun bertindak lebih jauh dari itu seperti ingin mendesak Sidang Darurat PBB, atau menghentikan perang, apakah realistis? Apakah DPR sedang bermimpi atau sekedar menyenangkan-nyenangkan publik yang sedang marah?

Ada dua macam bentuk diplomasi. Yang satu bersifat idealistis dan yang lain realistis. Diplomasi idealistis dipenuhi sentimen moral. Diplomasi ini sangat teguh berpegang pada norma-norma dasar yang sudah menjadi kesepakatan internasional. Siapa pun yang melanggar prinsip dasar itu harus dikecam. Jika perlu, diberikan sanksi yang setimpal agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari.

Serangan Amerika Serikat atas Irak dianggap telah melanggar aneka kaidah internasional. Serangan tersebut sudah mengabaikan peran PBB. Padahal lembaga ini sudah disepakati menjadi pengawal aneka hukum dan kebiasaan internasional.

PBB hanya mengizinkan sebuah negara menyerang negara lain yang berdaulat dengan syarat. Misalnya, negara yang bersangkutan diserang terlebih dahulu atau adanya kesepakatan dan persetujuan dari PBB dalam rangka mencegah keburukan yang lebih besar.

Kedua prinsip itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Amerika Serikat. Secara unilateral, Amerika Serikat memimpin sendiri serangan dengan membawa serta sekutunya yang sepele saja. Menurut diplomasi yang idealistis, serangan Amerika Serikat itu jika dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang dapat diikuti negara lain.

Suatu ketika, dapat saja negara Rusia menyerang negara tetangganya untuk membentuk Uni Soviet. Atau negara Islam

tertentu menaklukkan negara Islam lainnya untuk membangun sebuah kekhalifahan modern. Jika Amerika Serikat boleh mengabaikan PBB, mengapa yang lain tidak boleh?

Bersandar pada argumen moral yang ideal itu, aksi harus dilakukan tidak penting apakah aksi itu efektif atau tidak. Namun komitmen pada apa yang ideal lebih penting ketimbang berpikir tentang hasilnya. Dari diplomasi yang idealistis seperti ini, lahir seruan untuk menghentikan perang ataupun membuat sidang darurat PBB.

Sebaliknya diplomasi realistik mempunyai filosofi dan kearifannya sendiri. Tentu diplomasi jenis ini tidak mengabaikan pentingnya elemen moral dalam membuat aksi internasional. Namun segala sesuatunya harus dikalkulasi secara rasional.

Jangan sampai kita mengembangkan sebuah harapan yang terlalu besar, sedangkan kekuatan kita sendiri tidak mampu memikulnya. Ibaratnya, jangan berlagak ingin menjadi dokter, sementara posisi kita sendiri masih sebagai pasien.

Menurut pandangan tersebut, tidak realistik kita meminta PBB melakukan sidang darurat. Kita bukan anggota Dewan Keamanan PBB. Pengaruh kita di dunia internasional sangat lemah. Tidak pula realistik meminta Amerika Serikat menghentikan serangan ke Irak. Mustahil Amerika Serikat menghentikan serangannya jika tujuannya belum tercapai. Jika PBB saja tidak mampu, negara Eropa juga tidak mampu menghentikan Amerika Serikat, apalagi Indonesia.

Diplomasi realistik menyadari sepenuhnya bahwa seruan Amerika Serikat ke Irak disandarkan pada sebuah doktrin yang kontroversial. Sejak pecahnya teror 11 September 2001, lingkaran dekat Bush mengembangkan doktrin pre-emptive strike bahwa Amerika Serikat boleh menyerang sebuah negara yang dipersepsikan sebagai ancaman sebelum negara itu mempunyai kesempatan menyerang Amerika Serikat.

Dalam persepsi Amerika Serikat, Saddam Hussein adalah ancaman terbesar di Timur Tengah. Sang diktator menguasai dan mengembangkan senjata pemusnah massal. Hanya menunggu waktu. Saddam dapat kongkalikong dengan aneka kelompok internasional untuk menghancurkan Amerika Serikat. Karena itu Saddam harus digulingkan.

Jika itu landasannya, sulit dibayangkan, Amerika Serikat menghentikan perang di tengah jalan. Nasib Presiden Bush akan buruk sekali jika dia menyetop perang tanpa tergulingnya Saddam. Dia akan dikenang sebagai presiden yang plinplan. Sulit baginya terpilih kembali pada 2004.

Lebih daripada itu, Amerika Serikat sebagai negara adidaya satu-satunya akan sangat terpukul pula. Dipersepsikan bahwa Amerika Serikat kalah perang jika berhenti sebelum jatuhnya Saddam.

Karena mustahil menyetop perang dan mustahil pula PBB mampu menghukum Amerika Serikat, diplomasi realistik mengambil aksi yang realistik pula. Mobilisasi sumber daya untuk aksi yang idealistis dan tidak realistik adalah sia-sia. Jauh lebih baik jika sumber daya itu dikerahkan untuk tujuan aksi lain yang dapat dicapai. Misalnya lebih baik membuat aksi untuk turut membangun Irak kembali setelah perang.

Namun dianggap jauh lebih realistik lagi, kita jangan terlalu banyak memberika perhatian atas perang Irak. Kita sendiri sedang berada dalam transisi demokrasi yang sangat beresiko. Begitu banyak dana dan perhatian yang dibutuhkan agar krisis di negara kita cepat selesai.

Status kita masih menjadi pasien yang membutuhkan pertolongan dokter. Amerika Serikat dan sekutunya masih kita butuhkan. Jika kita salah bertindak, Amerika Serikat dan sekutunya melakukan pembalasan, matilah kita. Misalnya Amerika Serikat meminta Jepang dan lainnya untuk menyetop hubungan ekonomi dengan Indonesia.

Bagi diplomasi yang realistis, seruan Presiden Megawati atas perang Irak itu sudah cukup. Karena itu, sekarang sebaiknya kita kembali ke dalam negeri, mengurus masalah kita sendiri. Jika argumen diplomasi realistis ini direnungkan, masih perlu kah niat DPR mengontrol perang Irak? **

Wajah Buruh Era Reformasi

TANGGAL 1 Mei diperingati sebagai hari Buruh Internasional. Para buruh, aktivis dan politisi terutama di negara Eropa Timur dan negara eks komunis, memperingati hari itu sebagai hari kemenangan kelas buruh. Bagi Indonesia sendiri, apakah 1 Mei 2003 diperingati pula sebagai hari kemenangan? Atau sebaliknya, hari itu justru menjadi momentum untuk merenungi kekalahan buruh, mengingat banyaknya penganggur dan PHK di Indonesia saat ini?

Tanggal 1 Mei merujuk kepada kongres internasional ke-2 tahun 1889. Saat itu Partai Buruh dan politisi beraliran sosialis melakukan pertemuan internasional untuk mengaplikasikan seruan Karl Marx: "Para buruh sedunia, bersatu lah!" Setelah negara komunisme rontok dan para buruh juga semakin menjadi kelas menengah, momen 1 Mei lebih diperingati sebagai parade kultural belaka, bukan lagi ritual politik kiri.

Amerika Serikat sendiri juga punya Hari Buruh, tetapi terpisah dari Hari Buruh Internasional. Di Amerika Serikat, Hari Buruh menjadi

Labor Day dan dirayakan pada Senin pertama setiap September, di era perang dingin, buruh beraliran politik kanan di Amerika Serikat memperingati Hari Buruh melalui Labor Day. Sedangkan buruh yang beraliran kiri memperingati hari Buruh melalui May Day atau Hari Buruh Internasional.

Apa yang terjadi dengan buruh kita setelah politik reformasi? Secara politik memang buruh dan serikatnya sangat bebas. Namun secara ekonomi, kehidupan buruh umumnya semakin terperosok.

Secara politik, kehidupan buruh dan serikatnya memang berubah sangat drastis sejak datangnya politik reformasi. Sebelum jatuhnya Soeharto, organisasi buruh bersifat tunggal dan korporatis. Tidak ada badan lain yang dibolehkan mewakili politik buruh kecuali SPSI. Tidak hanya buruh, pemuda, nelayan, wartawan dan lainnya juga hanya punya wadah tunggal.

Orde Baru tidak mengizinkan lahirnya pluralisme politik. Semua organisasinya ditinggalkan dan dihomogenkan. Akibatnya, SPSI yang seharusnya mewakili kepentingan buruh untuk menekan pemerintah justru lebih menjadi agen pemerintah untuk mengendalikan para buruh. Pemilihan ketua dan pengurus serikat buruh selalu dengan supervisi pemerintah. Apalagi Orde Baru juga punya pengalaman traumatis dengan PKI yang dekat dengan atribut buruh. Bukan hanya organisasinya dimonopoli, aksi politik dan industrial seperti mogok di kalangan buruh juga diharamkan. Secara politik, kegiatan mogok akan mudah sekali dilabel sebagai tunggangan PKI. Sementara secara industrial diberlakukan prinsip No Work, No Pay. Buruh yang mogok berarti tidak kerja dan tidak menerima upah pada hari itu.

Upah murah dan represi terhadap buruh tidak hanya berguna bagi konsolidasi politik otoriter dan korporatisme Orde Baru. "Penindasan" terhadap buruh itu juga berguna bagi pembangunan ekonomi. Indonesia menjadi surga bagi investor asing karena buruh murah dan tertibnya serikat buruh.

Namun, kini era reformasi sudah menjungkirbalikkan semua politik buruh. Kini yang ada tidak hanya dua atau tiga serikat pekerja. Tercatat lebih dari enam puluh organisasi buruh yang saling bersaing. Sebagian di antara organisasi itu bahkan berafiliasi kepada partai politik. Meskipun belum ada partai buruh yang serius, gelora dan atmosfer politik semakin mewarnai organisasi perburuhan.

Mogok dan demo buruh juga tidak bisa lagi diharamkan. Bahkan, mungkin sejak reformasi, mogok buruh terjadi hampir setiap minggu. Para buruh bukan hanya bebas berekspresi. Mereka juga semakin punya kekuatan untuk menekan perusahaan. Lihatlah apa yang terjadi dengan hotel berbintang lima, Shang Ri La, di Jakarta. Hotel itu sempat tutup dalam waktu lama karena konflik perburuhan.

Tingginya gelora politik buruh meninggalkan problema yang dilematis bagi buruh sendiri. Di satu sisi, mereka memiliki lingkungan politik yang kondusif untuk memperjuangkan hak-hak yang selama ini telah dilupakan. Namun di sisi lain, hal itu juga membuat investor merasa tidak nyaman. Indonesia bagi sebagian investor sudah berlalu. Di samping isu lain, seperti selundupan dan tidak tegaknya hukum, politisasi buruh turut pula membuat investor takut datang ke Indonesia.

Berbeda dengan lingkup politik, di dunia ekonomi, nasib buruh justru terpuruk. Jumlah pengangguran di Indonesia—baik yang terbuka, pencari kerja ataupun setengah terbuka—mencapai angka 40 juta lebih. Jumlah ini diproyeksikan bertambah mengingat belum masuknya investasi dalam jumlah yang signifikan. Sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sudah bekerja di luar juga banyak yang dipulangkan. Untuk kasus Malaysia saja, sudah dipulangkan lebih dari 450 ribu TKI.

Pengangguran, pemutusan hubungan kerja, dan kehilangan pekerjaan kini mengancam buruh Indonesia. Karena itu para buruh di Indonesia tidak merayakan 1 Mei 2003 itu dengan suka cita. Mereka

tidak berpesta pora sebagaimana layaknya aktivis atau pemimpin yang merayakan hari kemenangan internasional.

Sebaliknya, pada 1 Mei itu banyak serikat buruh mengancam akan turun ke jalan. Mereka juga mengecam UU Tenaga Kerja yang baru saja disahkan. Padahal, UU itu sudah diproses cukup lama. Lebih dari dua tahun sembilan bulan, UU itu mengendap diproses dan dikompromikan. Pihak pemerintah, pihak pengusaha dan pihak buruh sendiri terlibat. Yang dihasilkan akhirnya memang peraturan yang bersifat kompromis. Tentu saja tidak bisa semua pihak dipuaskan 100 persen mengingat adanya perbedaan kepentingan. Namun, ini pula yang menjadi ciri politik reformasi. Tidak ada pihak yang dibolehkan melarang pihak lain dalam ekspresi dan aspirasi politik. Sebagian serikat pekerja tetap saja dibolehkan protes, bahkan terhadap UU Tenaga Kerja yang baru disahkan itu. Politik reformasi sudah membuat politik perburuhan sangat bebas.

Tanggal 1 Mei ini menjadi momentum yang baik bagi aktivis dan pimpinan buruh untuk merenung dalam-dalam. Manuver dan mogok yang terlalu sering bisa saja membuat situasi bertambah buruk. Sementara ekonomi terus berada dalam krisis, mogok dan demo dapat juga membuat situasi semakin keruh. Apalagi jika sudah berbaur pula kepentingan buruh yang asli dengan kepentingan politik para pimpinannya. Tanggal 1 Mei ini agaknya memang harus direnungi para buruh di Indonesia dengan keprihatinan. **

Tangis Buruh di Luar Negeri

BERAPA lagi korban dari pihak buruh migran yang diperlukan agar pemerintah dan DPR cepat bertindak? Ratusan tenaga kerja wanita (TKW) itu merasa beruntung bisa kembali ke Indonesia. Isak tangis tidak lagi terbendung ketika mereka menjumpai keluarganya yang menunggu sejak lama.

Sebagian mengungkapkan mengenai siksaan yang mereka alami di luar negeri. Ada yang badannya disetrika majikan. Ada pula yang diperkosa dan digilir oleh adik, kakak serta kepala keluarga majikan. Sebagian di antara mereka berhasil lari dan mengadu ke polisi di luar negeri. Karena tidak memiliki identitas, mereka malah di penjara polisi. Tidak sedikit pula mereka yang diperkosa polisi.

Di Timur Tengah, di Malaysia, bahkan di Singapura kembali kita dengar kasus tersebut. Bahkan dalam lima tahun terakhir di Singapura, angka kematian buruh Indonesia akibat terjun bebas dari apartemen tinggi meningkat. Mereka mengalami depresi.

Para TKW dan TKI tersebut adalah wong cilik yang sering menjadi kampanye aneka partai politik dan pemimpin. Dengarlah janji berbagai calon anggota DPR. Baca pula aneka platform partai yang membawa semboyan reformasi. Tertera di dalamnya bahwa wong cilik akan diperjuangkan sebagai komitmen tertinggi partai.

Para anggota DPR itu begitu gonjang-ganjing ketika ada isu pembelian pesawat Sukhoi. Tetapi apa yang terjadi dengan kasus penderitaan para buruh migran di luar negeri tersebut? Mengapa tidak terdengar kehebohan yang sama di gedung DPR? Mengapa wong cilik itu hanya dijadikan simbol untuk kampanye?

Setelah reformasi, Indonesia memang bukan Indonesia yang dilukiskan Koes Plus pada 1970-an. Dalam lagu Kolam Susu, bumi Indonesia sangat indah dan nyaman. Dengarlah bait lagunya: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada ombak, tiada badai kau temui. Ikan dan udang menghampirimu dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

Namun kenyataannya, tidak ada ikan dan udang yang menghampiri. Banyak nelayan yang semakin sulit mencari makan. Harga solar naik. Sedangkan sewa kapal semakin mahal. Tongkat dan kayu tidak pula jadi tanaman. Sebaliknya, begitu banyak padi yang mengering dan mati akibat kurangnya curah hujan. Lain di lagu, lain di dunia nyata. Sudah pasti Indonesia tidak lagi tepat disebut tanah surga. Di negeri ini, sekarang ada sekitar 40 juta penganggur dan setengah penganggur. Dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) lebih dari 60 persen responden di seluruh Indonesia merasa bahwa ekonomi merupakan isu yang paling penting. Mereka kecewa atas situasi ekonomi yang dihasilkan Orde Reformasi.

Tetapi, hidup harus terus berjalan. Istri, anak, dan keluarga memerlukan biaya untuk makan dan sekolah. Iming-iming kerja di luar negeri menjadi pilihan. Tentu mereka berbinar-binar saat

mendengar akan mendapatkan gaji empat sampai lima kali lipat dari pekerjaan yang sama yang dilakukan di Indonesia. Dengan kelihaihan para “pedagang,” mereka berhasil dirayu untuk meninggalkan Indonesia.

Yang terjadi kemudian, mereka seolah “diekspor” layaknya barang ke luar negeri. Kepergian mereka ke luar negeri tentu menguntungkan para “pedagang” yang mendapatkan fee dari pengiriman tersebut. Bahkan, mereka juga sudah menambah devisa negara. Tetapi, bagaimana dengan perlindungan hukum bagi buruh dan tenaga kerja kecil tersebut?

Kerja di sebuah rumah tangga, apalagi di masyarakat tertutup, sepenuhnya sangat bergantung pada niat baik sang majikan. Pengawasan publik atas hal yang terjadi dalam rumah tangga sama sekali nihil.

Sangat banyak kita dengar pengalaman menyedihkan. Mereka dianggap “budak.” Sebagaimana “budak,” mereka diperlakukan seperti properti, boleh disiksa, bahkan bisa pula diperkosa. Tidak tanggung-tanggung, kadang sekeluarga pada hari yang berbeda bergantian memperkosa “sang budak” itu.

Buruh migran yang diperkosa tersebut mengadu kepada nyonya rumah tangga. Namun bukan pembelaan yang didapatkan. Mereka malah lebih disiksa. Jika mujur, mereka bisa pergi meninggalkan rumah. Ketika bekerja, surat identitas mereka ditahan majikan. Ketika lari, mereka segera ditangkap polisi akibat tidak bisa menunjukkan kartu identitas. Karena dianggap “budak,” polisi setempat merasa oke-oke saja ikut memperkosa.

Kisah seperti itu sudah kita dengar berkali-kali. Sudah pula kita dengar DPR dan pemerintah sedang mempersiapkan UU Perlindungan Buruh Migran. Terdengar pula pemerintah segera

menertibkan perusahaan yang “memperdagangkan” TKW/TKI yang tanpa perlindungan memadai. Bahkan, menteri tenaga kerja sempat menyidak (inspeksi mendadak) tempat penampungan TKW/TKI tersebut. Seperti biasa, semuanya begitu hot pada awalnya. Namun, kontrol pemerintah kemudian segera lenyap kembali ditelan awan.

Buruh dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri akan jauh lebih dilindungi jika pemerintah mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, dibuat perjanjian bilateral antara pihak pemerintah Indonesia dan pemerintah setempat tentang perlindungan buruh migran itu. Misalnya, pemerintah setempat akan membantu dan memfasilitasi aneka keperluan pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya.

Kedua, di setiap negara, terutama yang banyak TKW dan TKI-nya, pemerintah menyiapkan satu agen khusus. Agen tersebut bertugas mendata warga Indonesia yang bekerja di negara itu dan lokasinya. Secara reguler, harus pula ada kontak antara perwakilan pemerintah dan TKW/TKI tersebut. Pemerintah juga mengupayakan agar selalu terjadi kontak antara buruh migran itu dengan keluarga mereka di Indonesia. Misalnya melalui surat.

Ketiga, untuk buruh dan pekerja yang memiliki kasus hukum, perwakilan pemerintah Indonesia harus mempunyai biro konsultasi hukum. Jasa itu akan membantu mereka mendapatkan perlindungan maksimal. Bahkan, biro tersebut bisa menuntut majikan jika memang ada bukti awal bahwa mereka mencederai tenaga kerja Indonesia.

Namun, harapan itu tampaknya terlalu kita minta kepada politisi yang sedang berada di tampuk kekuasaan. Perlindungan tersebut hanya mungkin terlaksana jika sang pemimpin memang berkomitmen tinggi terhadap wong cilik. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa wong cilik hanya diperlukan untuk slogan. Malangnya nasibmu, para buruh migran. **

**BAGIAN KETIGA
MENYOROTI DINAMIKA
POLITIK DAERAH**

Menggugat Pemerintah Pusat

ADA peristiwa yang tidak biasa. Sekitar 35 anggota DPRD Maluku berkumpul di Jakarta. Mereka datang dan bersidang di Jakarta bukan saja karena Ambon sedang tidak aman. Namun mereka datang untuk menggugat pemerintah pusat. Sekitar 90% dari keberhasilan Malino II dan keamanan di Ambon, tergantung dari pemerintahan pusat, ujar Lucky Mattimury. Setelah Malino II ditandatangani, bukan rasa aman yang didapat, tetapi rentetan ketegangan dan pembunuhan kembali terjadi.

Kepada Komisi I DPR, mereka juga mengeluh tentang buruknya kinerja aparat keamanan. Di Ambon sudah ditempatkan sembilan batalyon TNI dan Polri dengan jumlah pasukan sekitar 10.000 orang. Padahal warga Ambon kurang dari tiga ratus ribu orang. Titik rawan konflik hanya berjumlah 30. Jika di setiap titik rawan ditempatkan 200 personel, masih ada 4000 pasukan lainnya.

Nyatanya, sudah tiga tahun, aparat masih tidak mampu mengendalikan kota sekecil Ambon, yang lebih kecil dibandingkan

sebuah kecamatan di Jakarta. Apa yang salah dengan pemerintah pusat?

Setidaknya ada tiga sebab mengapa pemerintah pusat terkesan lalai melindungi warga Ambon. Pertama, setelah reformasi, pemerintah pusat sendiri harus menangani krisis yang berskala nasional. Energi, perhatian, dan spirit baik pihak eksekutif, legislatif ataupun aneka partai besar dihabiskan untuk mengatasi krisis yang berdimensi nasional itu. Konflik di daerah seolah menjadi catatan kaki saja dari teks utama persoalan nasional.

Yang paling menghabiskan perhatian pemerintah pusat adalah konflik antar tokoh, antar partai dan antar lembaga yang terjadi sejak zaman Presiden Gus Dur sampai Presiden Megawati. Kasus Buloggate 1 yang melibatkan Presiden Gus Dur menjadi konflik besar pertama era reformasi. Selesai Buloggate 1, terjadi jeda sejenak. Kemudian muncul kembali Buloggate 2 yang kembali menyita seluruh energi politik.

Volume dan resiko konflik Buloggate 2 sama persis dengan Buloggate 1. Yang berbeda hanyalah siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi tergugat. Partai dan DPR kembali hiruk pikuk mengatur manuver antara pihak yang pro dan kontra. Sementara presiden dan kabinet juga terkena imbasnya.

Bersamaan dengan dua kasus besar itu, aneka masalah nasional lain juga menyita perhatian pusat. Sebut saja masalah amandemen konstitusi, privatisasi BUMN, utang luar negeri, sampai kepada masalah pergantian pimpinan di BUMN. Tidak hanya Ambon, kasus separatisme di Aceh dan Papua juga tidak mendapatkan porsi perhatian yang selayaknya.

Kedua, aparat keamanan sendiri sedang berada dalam transisi. Spirit mereka sebagai penjaga keamanan masyarakat sedang anjlok dan sedang terus mencari identitas baru. TNI tidak dapat

lagi membawahi Polri karena secara kelembagaan dua institusi ini sudah terpisah. Namun personil dua lembaga ini masih sulit dapat bekerjasama di lapangan dalam posisi yang sejajar.

Aparat polisi tidak ingin tersubordinasi di bawah tentara. Namun pada saat yang sama, kultur dominasi tentara atas polisi belum sepenuhnya hilang. Kerja sama dua lembaga ini akan banyak mengalami hambatan mental dan teknis di lapangan. Padahal untuk kasus keamanan seperti darurat sipil, dua lembaga ini harus bekerjasama di bawah gubernur.

Aparat tidak lagi bisa bertindak bebas seperti di era Orde Baru yang otoriter. Reformasi dipenuhi oleh aneka LSM dan civil society yang punya spirit anti militer dan polisi. Aneka lembaga ini super sensitif atas isu pelanggaran hak asasi manusia. Jangankan aparat kecil militer, para jenderal tinggi militer pun tidak segan diusut dan dibawa ke meja hijau untuk diadili.

Kuatnya permusuhan publik atas militer sebagai warisan politik militer di masa silam, serta populernya isu hak asasi, acapkali membuat tentara dan polisi sendiri ragu untuk bertindak cepat dan tegas. Aneka penanganan aparat keamanan menjadi lambat dan setengah hati. Jelas kondisi spirit aparat seperti ini menjadi kendala sendiri untuk menghadapi konflik primordial yang massal, emosional, yang kadang meletus dengan tiba-tiba, seperti di Ambon.

Sebenarnya pemerintah pusat sudah memberi perhatian atas Ambon seperti penerapan Darurat Sipil. Pemerintah pusat bahkan sudah pula menjadi fasilitator perdamaian untuk dan oleh masyarakat Ambon sendiri dalam Malino II. Namun dua kebijakan itu hanya sukses jika ditopang oleh aparat keamanan yang profesional. Buruknya kinerja aparat keamanan memberi kesan seolah pemerintah pusat lalai menjalankan fungsinya di Ambon.

Ketiga, kuatnya jaringan pengganggu perdamaian di Ambon. Banyak pula pihak yang diuntungkan oleh konflik berdarah di Ambon. Justru di era konflik itu, penjualan senjata gelap menikmati

keuntungan besar. Di era yang tenang dan damai, sebagai misal, di pasar gelap sebutir peluru atau sebuah senapan dijual dengan harga normal. Namun jika terjadi konflik berdarah, di pasar gelap, harga peluru dan senjata dapat dijual dua kali lipat lebih mahal. Pedagang senjata yang tidak punya komitmen pada perdamaian tentu berkepentingan agar Ambon terus bertikai.

Di samping pedagang senjata gelap, para ekstremis juga tidak nyaman dengan suasana damai. Dalam konstelasi politik seperti Ambon, di mana kekuatan Muslim dan Kristen relatif seimbang, perdamaian hanya mungkin terjadi jika ada power sharing dan equality dalam hak sosial di antara dua komunitas itu. Namun ekstremis di kedua komunitas itu acapkali tidak ingin win-win solution dan sharing. Mereka ingin dominasi, eksklusivisme, monopoli kebenaran, kemutlakan, dan totalitas. Motif ini yang mudah sekali dipicu dan dibakar.

Menjadi sulit jika para pedagang senjata gelap dan para ekstremis itu semakin berkuasa. Apalagi jika ada oknum aparat yang bermain mata dengan mereka untuk kepentingan jangka pendek. Pemerintah pusat akan banyak kendala menyelesaikan konflik Ambon jika jaringan pengganggu ini masih subur.

Kesulitan yang digambarkan di atas tidak menjadi legitimasi atas kekurangan pemerintah pusat. Bagaimanapun pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi konflik berdarah di Ambon. Semakin besar perhatian dan bantuan pusat, semakin mudah konflik di Ambon diatasi. Kedatangan rombongan DPRD Maluku ke Jakarta sudah berada di jalur yang benar. Sebuah preseden telah lahir bahwa pemerintah pusat harus terus ditekan agar tidak lalai menjaga warganya, baik yang hidup di Jakarta, di Ambon, ataupun wilayah lain. **

Jakarta Mencari Gubernur

Apakah Megawati Soekarnoputri membuat keputusan tidak terduga yang cemerlang? Ataukah ketua umum PDIP itu yang juga Presiden RI sedang melakukan sebuah blunder politik? Pertanyaan ini mengendap di banyak kepala politisi, intelektual, tokoh LSM dan khalayak lain peminat masalah pemerintahan. Dengan lugas dan tegas Megawati meminta PDIP memperjuangkan Sutiyoso agar terpilih kembali menjadi gubernur DKI Jakarta.

Keputusan Megawati ini jelas mengejutkan. Keputusan ini bertentangan dengan aspirasi PDIP Jakarta. Fraksi PDIP di DPRD itu luas diberitakan sudah mempunyai calonnya sendiri, Tarmidi Soehardjo.

Bagi para calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP, Sutiyoso bukan figur yang populer. Pers nasional dan LSM acapkali mengangkat berita soal Sutiyoso dari sisi gelapnya. Opini publik sudah sangat siap dan menunggu figur baru untuk memimpin ibu kota Jakarta. Keputusan Megawati yang ingin tetap mempertahankan Sutiyoso

sebagai gubernur DKI Jakarta, dengan sendirinya menjadi berita besar dan kontroversial.

Pro dan kontra pun terjadi. Harian Media Indonesia, Rabu 26 Juni 2002, bahkan membuat sebuah editorial untuk memahami mengapa Megawati membuat keputusan itu, yang dianggap aneh. Lahir pula spekulasi kemungkinan fraksi PDIP di DPRD Jakarta melakukan pemberontakan terselubung. Mereka memang tidak melawan Megawati secara frontal, namun mereka dapat mengalihkan suara kepada calon lain, calon selain Sutiyoso. Bagaimana kah akhir dari drama pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini?

Pro dan kontra atas keputusan Megawati berakar dari kontroversi figur Sutiyoso sendiri. Di samping banyak kekurangannya yang membuat opini publik menyerang, ia juga punya sisi kelebihan. Tampaknya sisi kelebihan itu yang dilihat Megawati, dan kebetulan sisi kelebihan itu yang kini sangat dibutuhkan menghadapi politik menjelang Agustus 2002 sampai dengan pemilu 2004.

Sisi kuat Sutiyoso ada pada masalah keamanan dan pengalamannya memimpin ibu kota DKI Jakarta. Menjelang dan ketika berlangsung Sidang Tahunan MPR Agustus 2002, segala hal dapat terjadi di Jakarta. Sangat mungkin di bulan itu, Jakarta harus menghadapi komplikasi politik akibat amendemen konstitusi mengalami jalan buntu. Melihat perkembangan terakhir amendemen, jalan buntu itu terbuka lebar.

Satu pasal yang krusial yang masih sulit dikompromikan adalah soal pemilihan presiden di putaran kedua. Banyak partai, termasuk Golkar dan PPP, menghendaki dua calon presiden yang memperoleh suara tertinggi pada putaran pertama, dipilih lagi pada putaran kedua dengan metode yang sama, yaitu pemilihan langsung oleh rakyat. Namun PDIP yang didukung antara lain oleh Utusan Golongan mengharap pemilihan kedua dilakukan saja di MPR. Di samping lebih cepat, pemilihan putaran kedua di MPR juga dinilai

menyimpan potensi bahaya yang kurang dibandingkan jika dilakukan melalui pemilihan langsung. Total jumlah kursi PDIP ditambah Utusan Golongan sudah melampaui $\frac{1}{3}$ kursi MPR. Sementara total suara Golkar dan PPP juga melampaui $\frac{1}{3}$ kursi MPR. Jika masing-masing pihak bersikeras niscaya putaran kedua pemilihan presiden tidak dapat diputuskan mengingat amandemen itu hanya sah jika didukung oleh setidaknya $\frac{2}{3}$ kursi MPR. Terjadi krisis konstitusi.

Sutiyoso lebih dipercaya memimpin Jakarta dalam situasi keamanan seperti itu. Ia berlatar belakang militer. Ia juga sudah menjadi gubernur era transisi di bawah empat presiden: Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati. Memang ada kelemahan Sutiyoso selama menjadi gubernur. Namun Sutiyoso dianggap cukup sigap belajar dari kelemahannya itu dan siap untuk tampil lebih baik.

Jakarta yang sedang dalam situasi pancaroba dianggap membutuhkan gubernur berpengalaman, dan dengan latar belakang militer. Tidak ada waktu bagi gubernur baru yang masih ingin belajar. Gubernur di Jakarta harus siap bertugas bahkan di hari pertama ia dilantik. Ini yang menyebabkan Megawati secara tegas memilih Sutiyoso, melawan semua tendensi opini publik.

Sayangnya Sutiyoso juga punya banyak kelemahan yang membuatnya sangat sulit untuk dinilai mempunyai bobot seorang gubernur berwibawa. Kelemahan dasarnya berkaitan dengan ketiadaan prestasi yang gemilang, proses hukum yang sedang dijalani, dan terlalu banyak kelompok yang menghendakinya untuk tidak terpilih kembali.

Derita kolektif publik Jakarta akan musibah banjir masih terlalu dekat untuk dilupakan. Memang bukan Sutiyoso yang menyebabkan banjir itu. Namun sebagai gubernur, Sutiyoso dianggap tidak memiliki leadership yang dapat mengurangi korban nyawa dan derita publik akibat banjir itu. Bukan pujian yang ia dapatkan karena dianggap melindungi warga Jakarta dari banjir. Sebaliknya, koalisi LSM dengan

mengatasnamakan sebagian penduduk Jakarta menuntut Sutiyoso ke pengadilan dalam class action.

Tidak ada pula kemajuan yang berarti dalam hal-hal penting di ibu kota seperti kemacetan jalan, transportasi publik yang tidak memenuhi syarat, sungai Ciliwung yang menjadi tempat sampah terpanjang di dunia, perkelahian antar warga, serta kriminalitas yang tinggi.

Sutiyoso juga kini sedang dalam proses hukum. Gugatan atas peristiwa 27 Juli 1996 terus diproses. Masih segar dalam ingatan publik betapa embrio sebuah kekuatan politik PDI di bawah Megawati saat itu sedang tumbuh sebagai alternatif dari rezim Soeharto. Tanggal 27 Juli, secara simbolik kekuatan itu dipatahkan dengan serbuan ke kantor PDI Megawati. Banyak korban yang jatuh. Saat itu Sutiyoso menjabat sebagai Pangdam Jaya yang dianggap ikut bertanggung jawab dengan keamanan Jakarta.

Apa daya, Megawati sudah mengambil keputusan. Plus minus itu tentu sudah dihitung oleh Megawati. Kini para aktivis, pimpinan dan pendukung PDIP yang serius sekalipun menjadi serba salah. Di satu sisi, mereka ingin mengamankan keputusan Megawati dan berjuang agar Sutiyoso terpilih kembali. Jika tidak terpilih, Megawati akan dipermalukan secara publik.

Di sisi lain, mereka juga ingin Jakarta bertambah baik dan membuat preseden bahwa pejabat yang berprestasi saja yang dipilih lagi untuk kedua kalinya. Sutiyoso dianggap tidak termasuk dalam kriteria itu. Niscaya ini pertarungan antara keharusan politik versus hari nurani. **

Korupsi Mempersatukan DPRD

KORUPSI sudah mempersatukan DPRD kita. Sungguhpun aneka DPRD dipisahkan oleh berbagai pulau, mereka mempraktikkan “ideologi” yang sama: korupsi. Walau tidak ada kesepakatan ataupun pertemuan berkala antara berbagai DPRD itu, mereka mampu tampil dalam skandal yang sama.

Demikianlah kita melihat, gugatan korupsi terjadi secara serentak di DPRD Sumbar, Riau, Jawa Barat, Surabaya, sampai ke Barito, Kalimantan Tengah. Wilayah lain, yang belum disebut cukup beruntung karena kasusnya belum dibongkar dan dipublikasi.

Ketua dan wakil ketua DPRD Surabaya sudah ditahan. Hal ini bermula dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Badan ini menemukan dugaan korupsi Rp 22,5 milyar. Yang lebih semarak lagi terjadi di Sumatera Barat. Semua anggota DPRD-nya menjadi tersangka. Forum Peduli Sumatera Barat melaporkan indikasi itu. Modus operandinya hampir mirip. Dana APBD digerogeti sekitar 4,6 milyar.

DPRD Riau tidak ingin ketinggalan. Semakin kaya sebuah daerah, semakin besar pula tuduhan korupsinya. Tidak tanggung-tanggung, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan APBD Rp 600 milyar. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komisi Anti Korupsi mendesak kejaksaaan tinggi segera menyelidikinya.

Ketua DPRD Barito Utara di Kalimantan Tengah mengembangkan kreasi lain. Dia tidak bermain langsung di APBD. Namun, sang ketua bertanggung jawab atas lolosnya 54.000 potong kayu liar, pada Desember 2002. DPRD Jawa Barat bermain lebih halus lagi, dengan membagi-bagikan dana Rp 25 milyar kepada semua anggota DPRD sebagai uang tanda terima kasih.

Apa yang telah terjadi dengan para wakil rakyat kita di daerah?

Kekuasaan cenderung korup. Ini ayat pertama yang harus dibaca oleh setiap perancang sistem politik. Otonomi sudah memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada daerah. Tidak ada yang salah dengan pelimpahan kekuasaan itu. Dalam negara yang plural dan luas, otonomi daerah dengan kekuasaan yang memadai memang sudah seharusnya.

DPRD menjelma menjadi penguasa tertinggi di daerah. Bahkan gubernur pun kini menjadi tawanan DPRD. Pertanggungjawaban tahunan gubernur acapkali menjadi medium DPRD untuk menunjukkan kekuasaannya. Tidak jarang terjadi praktik pemerasan agar laporan tahunan gubernur diterima.

Namun, besarnya kekuasaan itu diberikan tanpa kontrol yang memadai. Otonomi daerah dipraktikkan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan infrastrukturnya. Akibatnya, kekuasaan yang ada digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Karena DPRD itu merupakan korps dan bersifat kolegial, keputusan selalu diambil bersama. Ini fenomena menarik era reformasi. Korupsi DPRD umumnya dilakukan secara gotong royong dan berjamaah.

Empat lapis kontrol tidak dipersiapkan. Pertama, kurangnya kontrol internal di dalam DPRD. Seberapa efektif pimpinan DPRD dapat diawasi dan dikontrol oleh anggotanya. Sebaliknya, seberapa serius kerja anggota juga dapat dikontrol oleh pimpinannya? Apakah memang disediakan institusi pengontrol itu? Lalu, apakah institusi pengontrol tersebut juga dikontrol agar melaksanakan tugasnya?

Jangankan di tingkat DPRD, kontrol internal di tingkat DPR pusat juga tidak bekerja. Dewan Kehormatan di pusat tidak pernah bersidang. Kode etik DPR tidak pernah pula diterapkan. Tidak heran jika di DPRD, yang terjadi bukannya mekanisme saling kontrol, tetapi bahu membahu memperkaya diri sendiri. Anggaran daerah dimanipulasi sedemikian rupa untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan anggota DPRD sendiri.

Kedua, kontrol di tingkat partai yang juga tidak bekerja. Akibat sistem pemilu proporsional tertutup pada 1999, rakyat memilih partai. Elite partai yang menyusun rangking siapa yang akan dicalonkan dalam DPRD. Setelah terpilih, mampukah elite partai itu mengontrol dan mengevaluasi kerja wakil partainya di DPRD?

Partai sendiri memang tidak punya kekuasaan apa-apa lagi terhadap kadernya yang sudah terpilih menjadi anggota DPRD. Partai tidak dapat memecat atau me-recall anggotanya. Tidak heran, untuk kasus Basuki sendiri di Surabaya, sungguhpun dia sudah pindah partai, posisinya di DPRD tidak dapat digugat.

Ketiga, lemahnya kontrol eksternal dari publik luas atas DPRD. Akibat depolitisasi di era Orde Baru, kontrol masyarakat belum sepenuhnya tumbuh. Hanya di sebagian kota besar kontrol itu berjalan. Itu juga lebih disebabkan oleh adanya sumber daya dan leadership akademisi lokal atau tokoh LSM lokal.

Terbongkarnya kasus korupsi di DPRD Sumbar, misalnya, memang hasil kerja LSM lokal. Desakan penyelidikan korupsi di DPRD Riau juga diperankan oleh LSM lokal. Karena tidak semua kota besar—apalagi di kecamatan—punya civil society yang kuat, kerja

DPRD praktis tidak terkontrol. Jika di daerah lain kasus korupsi DPRD tidak dipublikasi, belum tentu karena DPRD di wilayah itu bersih.

Keempat, kontrol kelembagaan institusi pemerintah sendiri masih lemah. Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan memang juga mengontrol penggunaan APBD. Sebagian kasus korupsi di DPRD yang terbongkar adalah hasil kerja dua lembaga itu. Namun, seberapa efektif lembaga tersebut dalam mengevaluasi DPRD di daerah lain, dengan standar, kecepatan dan kualitas yang sama?

Belum lamanya kita dengan tradisi birokrasi modern membuat efektivitas sebuah badan pengawas sangat tergantung pada kualifikasi dan integritas pemimpinnya. Jika sang pemimpin bersih dan jujur, serta cekatan dan lihai, hasil pengawasannya sangat terasa. Namun, di lembaga yang sama, jika pemimpinnya sudah terkena virus “upeti kanan kiri oke,” segalanya dapat dinegosiasikan. Badan pengawas belum berdiri pada kekuatan sistem yang impersonal yang terjaga mutu kerjanya, terlepas siapa pun yang memimpin.

Akibat buruknya sistem pengawasan, di era DPRD yang sangat berkuasa, lahirlah berbagai manuver. It is a show time. Tidak perlu kaget. Dari Sabang sampai Merauke, DPRD mengepung kita dengan segala praktik korupsinya. **

Heboh Pemilihan Gubernur

IBARAT petinju, Mardijo belum naik ring. Sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jateng sekaligus menjadi ketua DPRD Jateng—yang berjasa membesarkan PDIP di Jateng—dia merasa inilah saatnya naik ring. “Bertinju” memperebutkan kursi gubernur.

Apalagi yang kurang? Fraksi PDIP di Jateng termasuk fraksi besar di DPRD. Mardijo juga mengaku sudah memberikan “setoran” kepada oknum partai di pusat. Dia sudah sangat siap naik ring dan menjadi pemenang.

Karena itu, dia shock tidak alang kepalang. DPP PDIP bukan saja tidak merestui kadernya itu maju untuk memperebutkan kursi gubernur Jateng. Tetapi, DPP lebih merestui gubernur sekarang, Mardiyanto, untuk menjabat sekali lagi. Bahkan, mardijo dipecat dari ketua DPRD PDIP Jateng.

Foto Mardijo di sejumlah koran persis menggambarkan ekspresi emosinya. Dia dipeluk pendukungnya, menangis tersedu-sedu. Ibarat petinju, dia merasa dikalahkan sebelum bertanding. Tidak

tanggung-tanggung, dia segera melawan keputusan pimpinan partainya di pusat. Dia pun mem-PTUN-kan DPP PDIP.

Lain di Jateng lain pula di Jatim. Jateng menjadi contoh kasus kader partai di daerah yang dipotong DPP. Sedangkan di Jatim adalah contoh kasus sebaliknya, instruksi pimpinan pusat ditelikung kadernya di daerah, di DPRD.

Gus Dur mungkin masih belum hilang rasa geramnya. Dia dengan susah payah mengupayakan kader partainya, PKB, menjadi gubernur Jatim. Tidak kepalang tanggung, dia melakukan pertemuan dengan Ketua Umum partai Golkar Akbar Tandjung. Dia juga melakukan tatap muka dengan Ketua Umum PAN Amien Rais. Upaya membangun koalisi partai untuk merebut kursi gubernur Jatim dilakukan.

Namun, Gus Dur terkejut-kejut dengan hasilnya. Jagonya kalah telak. Semula dia merasa Golkar dan PAN sudah mengadalinya atau menipunya. Namun, belakangan pihaknya menyadari bahwa ternyata banyak kader PKB di DPRD yang membelot. Sang kader tidak mengikuti instruksi pimpinan dan bermain sendiri dengan aneka kepentingannya.

Di luar Jateng dan Jatim, pemilihan gubernur acapkali heboh. Di Lampung, Jabar, NTB dan Kaltim, aneka masalah dan konflik muncul mengikuti pemilihan gubernur.

Apa yang menyebabkan pemilihan gubernur acapkali heboh? Yang membuat sistem pemilihan ini rusak karena hadirnya sebuah monster yang bahkan tidak dapat dikendalikan pimpinan partai pusat. Monster itu adalah money politics.

Bukan lagi rahasia, besarnya peran uang dalam pemilihan gubernur di banyak daerah. Jika ingin menang, sang calon harus punya investor yang siap menanamkan sejumlah uang. Namun, sang investor tidak perlu khawatir. Tanaman uang itu akan terus tumbuh

dan berbunga. Setelah sang calon jadi, selalu ada mekanisme terselubung yang membuat uang itu kembali. Kita tidak mengklaim money politics pasti terjadi dalam semua pemilihan gubernur. Namun, setidaknya dalam banyak kasus hal itu selalu terdengar.

Memang, kader partai di DPRD akan patuh pada kehendak pimpinan pusat. Namun, jika ada monster money politics itu, sang kader sangat mudah “berselingkuh.” Jangankan instruksi politik, bahkan jika sang kader di DPRD dibaiat secara agama agar patuh pada instruksi pusat, monster money politics masih mampu membujuk mereka “berselingkuh.”

Tidak heran jika ada kecenderungan gubernur yang sedang menjabat lebih berpeluang untuk terpilih kembali. Dia mungkin bukan anggota partai tertentu. Namun, dia menjadi gubernur di daerah itu sudah sekian lama. Sudah banyak sumber daya yang dikuasai. Yang paling penting, dia sudah punya jaringan investor yang siap mendukungnya untuk terpilih kembali.

Para ahli strategi partai, jika ingin menang, cenderung mendukung gubernur yang sedang menjabat. Walau gubernur itu bukan kadernya, setidaknya partai punya jasa membantunya kembali berkuasa. Bantuan partai itu dapat dihitung sebagai investasi politik. Suatu ketika, jika partai memerlukan dukungan sang gubernur, baik untuk pemilu DPR 2004 maupun pemilu presiden, tentu dia tidak akan tinggal diam. Apalagi bantuan yang diharap itu berupa finansial belaka.

Tokoh lain memang dapat dimunculkan untuk menantang gubernur yang sedang menjabat. Namun, harus dipastikan dulu calon alternatif itu punya dukungan investor yang kuat. Jika semua calon punya investor, maka investor paling besar yang akan menentukan. Begitulah hukum rimba dalam dunia monster money politics.

Tokoh partai lokal juga tidak akan takut dipecat DPP jika dia yakin akan posisi investornya. Tidak jadi masalah baginya untuk tidak menjadi anggota partai selama dia terpilih menjadi gubernur. Nasib sial akan menimpa kader partai yang baik, namun miskin dan tidak punya investor.

Situasi itu membuat ahli strategi dewan pimpinan pusat partai serba salah. Bisa saja dia ingin bersikap idealis, mendukung kader sendiri, apalagi yang sudah berjasa terhadap partai. Namun, apa gunanya dukungan itu jika sang kader sangat mudah dikalahkan lawan. Apalagi dia dikalahkan bukan secara fair, tetapi oleh peran money politics. Sementara itu, dukungan sebuah provinsi dan gubernur untuk Pemilu 2004 sangat dipentingkan.

Money politics niscaya merusak proses pelembagaan partai di daerah. Mardijo hanyalah korban kekisruhan itu. Dia dapat menangis sepuas-puasnya. Kita sebagai penonton bisa terharu menjadi-jadinya. Namun, politik punya hukum besi sendiri.

Buruknya pemilihan gubernur hanya dapat dikoreksi secara kelembagaan dengan radikal. Sebaiknya gubernur jangan lagi dipilih anggota DPRD yang segelintir itu. Tentu mudah bagi money politics merasuki jiwa anggota DPRD yang segelintir itu. Karena itu, saatnya gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Jika presiden saja sudah dipilih langsung, mengapa gubernur tidak? Dengan dipilih langsung, setidaknya akan ada jutaan pemilih bebas.

Selain itu, harus dimungkinkan munculnya calon gubernur dari kelompok independen yang tidak berpartai. Dengan begitu, tidak ada lagi kasus seperti Mardijo, yang menangis karena dikalahkan partainya sendiri sebelum bertanding. **

Membatalkan Pemilihan Gubernur

AKANKAH pemilihan gubernur di Bali dibatalkan, lalu diadakan pemilihan ulang yang kemudian dibatalkan lagi? Itu mungkin merupakan pertanyaan yang agak sinis dari banyak pihak yang kecewa atas hasil dan mekanisme pemilihan gubernur.

Perkembangan terakhir, PTUN (pengadilan tata usaha negara) memenangkan pihak penggugat pemilihan gubernur Bali. Atas dugaan terjadi money politics, berbagai pihak, terutama Bali Corruption Watch yang bekerja sama dengan ICW, meminta agar pemilihan gubernur dibatalkan. Akibat keputusan itu, tekanan publik kepada DPRD Bali semakin keras.

Adanya unsur uang di seputar pemilihan gubernur Bali sudah diakui berbagai pihak. Pihak penerima membeberkan travel check sebagai bukti. Sedangkan pihak pemberi dana sudah mengakui adanya uang tersebut. Namun, alasan pemberian uang itu berbeda. Salah satu pihak menyatakan bahwa itu adalah uang konsolidasi partai. Yang lain mengatakan bahwa itu merupakan uang pemberian "seorang ayah kepada anaknya."

Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Dia tetap mengesahkan pemilihan gubernur Bali. Keputusan PTUN, menurut Mendagri, hanya akan mengikat DPRD Bali, bukan Mendagri. Hanya DPRD Bali yang bisa membatalkan pemilihan gubernur di Bali, bukan dirinya selaku Mendagri.

Kasus di Bali hanya merupakan puncak gunung es di antara persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita. Tidak hanya di Bali dan tidak hanya yang menimpa PDIP, pada dasarnya, kita sebagai bangsa menghadapi kanker yang sama, yaitu praktik money politics. Mereka yang berada di lapangan dan harus memimpin partai kadang menghadapi dilema yang sulit untuk merespons kultur money politics tersebut.

Jika mereka tidak memainkan money politics, anggota DPRD dari partainya akan diambil partai lain melalui money politcs juga. Akibatnya, calon partainya akan dikalahkan karena sejumlah rekan separtai itu menyeberang akibat praktik money politics. Jika menginginkan calonnya menang, terpaksa rekan sepejuangan dari partai yang sama diberi uang "ala kadarnya." Dengan bekal tersebut, anggota DPRD lebih mudah melawan serangan fajar dari tokoh atau partai lain.

Namun, jika tradisi tersebut diteruskan, kualitas politik tidak kunjung beranjak baik. Akibatnya, pemilihan seorang calon bukan lagi dilakukan berdasarkan platform yang diperjuangkannya. Juga bukan disebabkan calon itu secara kualitas lebih kompeten serta berpengalaman mengelola sebuah provinsi. Jika money politics bermain, motivasi memilih anggota DPRD akan semakin ditentukan oleh besarnya dana yang disediakan investor. Siapa yang menawarkan lebih, itulah yang menang.

Tidak ada negara yang bisa tumbuh besar jika landasan motivasi dalam pemilihan pemimpinnya adalah uang. Karena itu, di negara demokrasi yang sangat matang, praktik money politics menjadi

musuh nomor wahid. Pemilihan gubernur, apalagi presiden, merupakan satu-satunya kesempatan untuk mewujudkan sirkulasi kepemimpinan secara legal dan damai. Saat itu, seharusnya pengadilan rakyat terjadi. Jika seorang gubernur berhasil, dia pasti dipilih lagi. Jika gagal, dia akan ditinggalkan.

Pemilihan tersebut juga menjadi sarana lahirnya elite baru. Sang calon pemimpin, jika memang kompeten dan dipercaya, bisa segera dipilih menjadi gubernur. Tanpa money politics, pemilu akan menjadi pasar tempat memperebutkan hati rakyat. Insentif untuk merebut hati itu merupakan kebijakan publik atau figur sang tokoh. Money politics telah mematikan keindahan pemilu. Makna pertarungan kandidat diselewengkan hanya menjadi pertarungan antara para investor.

Gambaran tersebut hanya merupakan bentuk ekstrem dari negara yang sudah dijangkiti kronis money politics. Apa yang berkembang saat ini mungkin belum sampai ke level itu. Namun jika tidak ada pencegahan sejak dini, hanya masalah waktu kita akan sampai pada tingkat keparahan yang sama. Semakin parah kultur money politics, hal itu akan semakin susah diobati.

Selain soal money politics, kisruh pemilihan gubernur di Bali, Jawa Tengah, Lampung dan lain-lain disebabkan oleh persoalan internal partai besar. Pada era otonomi daerah, pimpinan partai masih menerapkan bentuk kepemimpinan sentralistis. Dalam gaya kepemimpinan tersebut, berlaku asumsi bahwa pimpinan pusat lebih banyak mengetahui. Sebaliknya, pemimpin partai di daerah menjadi anak manis, mengikuti saja keinginan pimpinan partai pusat.

Gaya demikian memang sangat mudah diterapkan pada era Orde Baru. Namun pada era reformasi, pemimpin lokal di daerah sudah terlalu pintar, liar, bebas dan tidak loyal. Mereka merasa berada dalam kultur otonomi daerah. Pemerintah pusat tidak bisa lagi menjadi seperti dulu karena sudah ada kewenangan daerah.

Mereka juga berperilaku seolah-olah pimpinan partai pusat tidak bisa bersikap seperti dulu karena sudah ada pemimpin partai daerah.

Seandainya pusat tetap memaksa, yang akan terjadi adalah pembangkangan kader partai di daerah. Jika berani, pembangkangan tersebut akan terlihat terang benderang. Mereka memilih calon lain seperti yang terjadi di Lampung dan Palembang. Atau, mereka seolah patuh, namun kemudian membongkar "sebuah kesepakatan." Dengan wajah yang seolah lugu, pimpinan partai pusat dipermalukan.

Kisruh pemilihan gubernur tersebut juga menggambarkan semakin rendahnya legitimasi DPRD untuk memilih gubernur. Hasil yang sah dari sidang DPRD tidak lagi sepenuhnya dipercayai. Pemerintah juga tidak percaya terhadap hasil pemilihan gubernur oleh DPRD Lampung. Kini gantian, masyarakat tidak percaya terhadap kasus Bali.

Jumlah anggota DPRD memang terlalu sedikit, sedangkan kekuasaannya begitu besar. Kondisi tersebut membuat mereka rawan terkena "serangan fajar" atau money politics. Sejak otonomi daerah, anggota DPRD mengenal "musim panen." Musim itu datang jika ada pertanggungjawaban gubernur. Lebih panen lagi jika ada pemilihan gubernur. Banyak anggota DPRD yang memang menyediakan diri untuk terkena "serangan fajar." Mendukung teman separtai kadang tidak mendapatkan "berkah" apa-apa. Mereka tidak segan mendukung pihak lawan jika ada "berkahnya."

Kasus Bali mendesakkan kebutuhan akan perlunya pemimpin di daerah dipilih secara langsung. Pemilihan langsung itu harus secepatnya diterapkan. Tentu hal tersebut hanya mungkin terlaksana setelah ada payung hukum yang baru bagi pemilihan gubernur.¹ **

1. Tulisan ini dibuat sebelum berlangsungnya pemilihan langsung Gubernur atau Bupati. Semenjak tahun 2005, pemilihan langsung kepala daerah mulai dilakukan.

Mengatasi Gejolak Papua

LAIN di Aceh lain di Papua. Gerakan separatisme di Aceh diselesaikan dengan operasi terpadu. Elemen penting operasi terpadu adalah operasi militer. Tetapi, potensi separatisme di Papua belum perlu solusi militer. Mungkin potensi separatisme ini dapat diatasi hanya dengan pemekaran wilayah. Papua yang satu dipecah menjadi tiga provinsi. Dengan pecahnya provinsi, lebih sulit muncul gerakan separatisme yang menyatukan keseluruhan Papua.

Namun, pemekaran provinsi di Papua ternyata bukan hal mudah. Terjadi konflik horizontal yang meluas. Rakyat Papua menggunakan pakaian adat dan membawa panah beracun turun ke jalan. Pihak yang pro dan kontra pemekaran tidak berdiskusi atau berdebat di koran, tetapi saling memanah. Akibatnya, banyak yang terluka dan ada pula yang tewas.

Perkembangan terakhir, lebih dari seribu mahasiswa melancarkan aksi protes di Jayapura. Tidak hanya di Jayapura, mahasiswa Papua di provinsi lain, seperti di Yogyakarta juga melakukan unjuk

rasa yang sama. Mereka memprotes pemekaran provinsi Papua. Menurut mereka, pemekaran itu tidak perlu ditunda, tetapi langsung dibatalkan saja.

Ketua DPR Akbar Tandjung membuat pernyataan tidak kalah garang. Dia meminta presiden datang ke Timika, ke Papua. Menurut Akbar, saatnya presiden berdialog dengan pemimpin setempat dan menenangkan situasi. Tokoh yang lain menimpali. Konflik horizontal di Papua berpotensi sangat buruk.

Sungguhpun datang dari ras Melanesia yang sama, Papua terdiri atas lebih dari 250 suku. Jika terjadi perang suku, konflik akan sangat emosional dan berdarah.

Tentu menjadi pertanyaan bagi semua pihak, mengapa isu pemekaran provinsi saja dapat memicu konflik yang luas? Bukankah kita juga punya provinsi baru hasil pemekaran, seperti Banten, Bangka Belitung, dan Gorontalo. Tidak ada gejolak di sana.

Kasus Papua memang agak khusus. Sejak jauh hari, tanah Papua memang menyimpan potensi konflik dan kemarahan yang sangat atas pemerintah pusat. Pemimpin lokal dan adat sangat kecewa dengan pembangunan di sana. Penduduk tetap miskin, sementara pendatang dan warga asing yang mencari nafkah di Papua justru kaya raya. Kekecewaan ini, dengan sedikit doktrinasi, mudah menjadi gerakan separatisme. Berbagai variabel yang ada di Papua menunjang gerakan separatisme itu.

Pertama, Papua adalah tanah yang kaya. Jika Aceh punya minyak, Papua, terutama di wilayah Freeport, punya emas yang amat tersohor. Penduduk dan pemimpin adat setempat merasa dapat berdiri sendiri secara ekonomi. Jika merdeka, Papua tidak perlu memberikan dana ke pusat. Kesejahteraan penduduk akan lebih mudah dan cepat ditingkatkan.

Secara fisik, Papua juga merasa berbeda dengan penduduk Indonesia umumnya. Sebagai ras Melanesia, rambutnya keriting, kulitnya hitam, berbeda dengan umumnya orang Melayu. Ditambah lagi dengan agama yang dipeluknya, secara fisik dan batin, mereka merasa terpisah dari mayoritas penduduk Indonesia. Jarak ras dan agama ini semakin mendorong separatisme.

Mereka merasa juga lebih mudah mendapatkan dukungan internasional. Gerakan separatisme Aceh lebih sulit karena adanya aura Islam. Dunia internasional yang kini dipimpin negeri Barat tidak terlalu suka dengan gerakan berbau Islam. Sementara Papua terlepas dari sindrom agama Islam. Jika lobi internasional berjalan, mereka yakin separatisme di Papua akan mendapatkan pengakuan internasional.

Demikianlah sejak Orde Baru gerakan Papua merdeka sudah lahir. Dikenal OPM (Organisasi Papua Merdeka) sejenis GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Lobi internasional juga sudah dijalin walau belum sekuat lobi Aceh merdeka ataupun Timor merdeka. Konteks politik ini yang membuat pemekaran provinsi dianggap cara memecah politik Papua dan melemahkan secara sistematis aspirasi Papua merdeka.

Persoalannya, pemerintah pusat ragu-ragu dan belum satu suara dalam mengatasi potensi konflik di Papua. Presiden Habibie muncul dengan wacana pemekaran provinsi. Wilayah Papua yang begitu besar, 55 persen dari seluruh wilayah Indonesia, dipecah menjadi tiga provinsi. Namun, justru Habibie sendiri yang mengurungkan niat. UU No.45 Tahun 1999 ini nyaris dimasukkan di laci.

Presiden Abdurrahman Wahid muncul dengan citra yang lebih responsif. Dia bahkan ikut membiayai kongres rakyat Papua. Dia pula yang kemudian aktif mengubah nama Provinsi Irian jaya menjadi Provinsi Papua. Kebijakan ini kemudian diikuti Presiden Megawati di masa awalnya. Otonomi khusus untuk Papua diberikan. Lebih dari

itu, Papua dibuatkan institusi khusus bernama MRP (majelis Rakyat Papua). MRP ini menyerupai MPR sebelum dibonsai. MRP dapat memveto keputusan gubernur, membatalkan perda, dan menyetujui atau tidak menyetujui pemekaran provinsi.

Namun, justru di bawah Presiden Megawati sendiri, lahir Inpres 2003 yang mengembalikan semua itu. MRP tidak kunjung dibentuk. Inpres Presiden justru meminta percepatan pemekaran Papua menjadi tiga provinsi. Akibat dukungan presiden melalui Inpres itu, pemimpin lokal mendeklarasikan provinsi baru.

Keragu-raguan dan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah turut memicu gejolak di Papua. Jika memang pemekaran provinsi yang dipilih, demi NKRI, dan mempermudah mengatasi isu separatisme, pemekaran itu mesti diterapkan secara konsisten dan tegas. Namun, tentu saja, batas provinsi harus benar-benar memperhitungkan kondisi geografis, kekayaan alam dan sosiologis setempat.

Otonomi khusus diberikan kepada semua provinsi yang sudah dimekarkan. Tetapi, untuk lembaga MRP harus ada revisi yang radikal. MRP jangan terlalu berkuasa sehingga mampu memveto keputusan gubernur. MRP disamakan saja fungsinya dengan DPRD, tetapi MRP berasal dari perwakilan adat dan suku, seperti konsep DPD di tingkat pusat. Bedanya, MRP punya wewenang yang sejajar dengan DPRD.

Menggabungkan pemekaran wilayah dan otonomi khusus yang direvisi mungkin jalan tengah yang aman dan nyaman, baik bagi publik Papua ataupun pemerintah pusat yang ingin menjaga NKRI.

**

DPD, Forum Petualang Politik?

LUAS diberitakan kemungkinan Provinsi Papua tidak memiliki wakil di DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sampai batas waktu yang ditentukan, tokoh yang mendaftar untuk bersaing merebut kursi DPD tidak kunjung mencapai jumlah minimal. Kasus Papua, ditambah dengan kasus di provinsi lain, membuat KPU (Komisi Pemilihan Umum) memundurkan batas waktu pendaftaran.

Berbagai alasan dikemukakan. Yang paling teknis, mereka meributkan sulitnya persyaratan pendaftaran bagi kondisi geografis Papua. Mengumpulkan seribu – apalagi dua ribu – fotokopi dukungan dari kalangan penduduk Papua minta ampun susah. Jarak satu wilayah dengan wilayah lain sangat jauh dan dirintangi oleh aneka sungai, gunung dan hutan.

Yang lain alasannya lebih politis. Mereka merasa sudah kecewa dengan aneka rencana politik pemerintah pusat. Apalagi, menurut mereka, kewenangan DPD sangat terbatas. Buat apa susah-susah ikut pemilihan jika tidak banyak pula yang bisa dibuat melalui DPD.

Beda di Papua, beda pula di provinsi yang lain. Di Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya, peminat politisi untuk merebut kursi DPD sangat hot. Namun, disinyalir mereka yang ikut mendaftar adalah politisi lama. Sang politisi diduga hanya ingin menggunakan kendaraan DPD untuk kembali berpengaruh dalam politik nasional. Konsep DPD sebagai forum politik daerah dianggap akan dikudeta di lapangan, menjadi kendaraan para petualang untuk kembali berbicara di panggung nasional.

DPD memang sudah menjadi problem sejak awal dilahirkan. Ibarat bayi, DPD ini lahir sungsang, hasil kompromi banyak kekuatan dan perspektif politik. Ketika reformasi bergulir, muncul dua perspektif yang saling bertolak belakang untuk menangani politik di daerah. Di satu sisi, wacana negara federalisme didengung-dengungkan. Di sisi lain, wacana yang anti federalisme dan kukuh pada NKRI juga tidak kalah seru diperjuangkan. Lahirnya DPD adalah jalan tengah dua pertarungan itu.

Wacana federalisme meyakini bahwa Indonesia dapat mengubah dirinya lebih efektif jika menjadi negara federal. Wilayah Indonesia sangat luas. Penduduk di Indonesia juga sangat beragam. Negara lain yang memiliki karakter serupa dengan Indonesia, seperti Amerika Serikat, menjadi negara federal.

Menurut wacana ini, dengan menjadi negara federal, daerah dan provinsi lebih memiliki keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Daerah juga dapat memperjuangkan kepentingannya secara maksimal dalam percaturan politik nasional. Seperti Amerika Serikat, setiap provinsi akan diwakili senator. Sang senator di parlemen akan memperjuangkan kepentingan daerahnya. Di Amerika Serikat bahkan menjadi senator lebih berkuasa dan bergengsi ketimbang menjadi anggota House of Representative (DPR).

Namun, wacana federalisme ini segera digilas oleh kekuatan yang anti. Menurut pengikutnya, federalisme untuk kasus Indonesia hanya

memperkuat daerah dan melemahkan kendali pemerintah pusat. Melalui federalisme, pusat akan semakin susah mempengaruhi politik daerah. Apa jadinya jika kekuatan di daerah itu berkembang menjadi kekuatan separatis, yang ingin memisahkan diri?

Pihak yang anti federalisme langsung saja terbayang kisah pergolakan daerah di era Orde Lama. Apalagi, tidak lama setelah reformasi, Timor Timur sudah pula lepas dari pangkuan NKRI. Seberapa banyak lagi provinsi yang akan lepas jika kita bereksperimen dengan wacana federalisme.

Pihak ini mengakui perlunya daerah diwakili secara lebih kuat di parlemen. Namun, memberikan kekuasaan kepada politis daerah seperti senator di Amerika Serikat justru akan membuat politik nasional dikuasai oleh sentimen kedaerahan dan primordial. Politik daerah dianggap belum mencapai kultur politik yang sehat. Parlemen dikhawatirkan nanti menjadi forum pertarungan primordial antara pusat versus daerah dan kepentingan daerah yang satu versus daerah lainnya.

Dalam amandemen konstitusi, akhirnya pertarungan wacana itu berakhir dengan konsep DPD. Disepakati bahwa parlemen memerlukan institusi (kamar) tambahan untuk politik daerah. Utusan Daerah di MPR dianggap tidak lagi memadai. Namun, kerangka besarnya harus dalam perangkat NKRI. Karena masih dikhawatirkan ada separatisme dan pergolakan daerah, DPD yang mewakili politik daerah tidak boleh terlalu kuat.

Kemudian dirancang konsep weak bicameral. Memang ada DPD, di luar DPR, namun kewenangan DPD tidak sama dengan kewenangan DPR. DPD hanya boleh mengajukan dan turut membahas undang-undang. Namun, itu hanya terbatas untuk isu yang berhubungan dengan daerah. Mengenai mekanisme pengambilan keputusan untuk menggoalkan sebuah UU, DPD tidak ikut campur. Bahkan, jumlah

DPD juga dibatasi. Sebanyak-banyaknya jumlah anggota DPD, ia tetap tidak boleh lebih daripada sepertiga jumlah total anggota DPR.

Siapa yang boleh menjadi DPD? Kompromi sekali lagi dibuat. Saat itu konsep Utusan Golongan juga mulai digugat. Mereka yang pro-Utusan Golongan mengatakan pentingnya parlemen mewakili anggota yang bukan berasal dari partai politik. Tidak semua putra-putri terbaik bangsa bersedia menjadi anggota partai politik. Padahal, sumbangsih mereka di parlemen dibutuhkan.

Akibatnya, proses ini ditampung dalam konsep DPD. Jika keanggotaan DPR berasal dari partai politik, keanggotaan DPD bersifat perorangan. DPD dipersiapkan untuk individu yang tidak berkecimpung dalam partai politik. Dalam perkembangan selanjutnya, individu itu memobilisasi sendiri dukungan buatnya dengan tidak menggunakan kendaraan partai politik.

Bagi situasi di Papua dan Maluku, tentu saja sangat sulit bagi seorang individu, tanpa dukungan jaringan partai politik, menggalang dukungan seribu atau dua ribu KTP. Secara teknis saja, prasyarat itu sudah mengurangi minat politisi berebut kursi DPD di daerah yang sulit. Apalagi jika mereka memiliki persepsi yang buruk tentang DPD sebagai lembaga kelas dua di parlemen. DPD bisa saja akhirnya memang dapat jatuh ke tangan politisi yang kuat jaringannya, namun sebenarnya tidak tertarik memperjuangkan politik di daerah yang diwakilinya. **

Kasus Pelantikan Gubernur Sumsel

PEMILIHAN gubernur kembali heboh. Kini yang menjadi “korbannya” adalah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Saat itu para tamu undangan sudah datang menuju gedung pelantikan. Pendukung dan keluarga gubernur dan wakil gubernur terpilih, Syahrial-Mahyudin, bersiap-siap untuk segera menjadi penguasa tertinggi eksekutif di provinsi itu. Namun, terbetik berita bahwa pelantikan ditunda. Untuk mengisi kevakuman kekuasaan, Mendagri memperpanjang masa jabatan gubernur lama, H. Rosihan Arsyad, untuk waktu yang belum ditentukan.

Sumsel pun heboh. Komunitas politik nasional juga memperhatikan dinamika politik lokal ikut heboh. Apa gerangan di balik semua ini? Keterangan resmi dari pihak Mendagri hanya masalah yang sangat teknis semata, bahwa Keppres dari Presiden Megawati belum turun. Tetapi, mengapa Keppres belum turun dan kapan turunnya, tidak ada jawaban pasti.

Berbondong-bondong anggota DPRD Sumsel menghadap Mendagri untuk meminta penjelasan. DPRD setempat sudah secara resmi menetapkan gubernur baru sebagai gubernur terpilih. Pemilihan juga dianggap sah. Tidak ada gugatan resmi ke PTUN terhadap hasil pemilihan, seperti dalam kasus Bali, misalnya. Tidak ada pula anggota DPRD yang membeberkan politik uang seperti di Bali. Tetapi, mengapa pelantikan yang dijadwalkan ditunda? Akankah nasib Sumsel seperti Lampung, yang berbulan-bulan tanpa dijabat oleh gubernur terpilih karena tidak kunjung dilantik?

Kehebohan pemilihan dan pelantikan gubernur di Sumsel disebabkan oleh tiga hal penting. Pertama, buruknya komunikasi politik pemerintah pusat. Dengan praduga positif tentu kita menduga ada hal besar yang menyebabkan ditundanya pelantikan gubernur terpilih. Mustahil penundaan ini hanya masalah teknis semata, misalnya ada keterlambatan format surat, dan sebagainya.

Namun, seharusnya ada penjelasan yang memadai mengapa pelantikan itu ditunda. Jika memang ada alasan substansial, penundaan itu dapat dipahami. Perlu pula dijelaskan berapa lama penundaan itu. Atau, apakah akan ada pemilihan gubernur ulang, misalnya.

Kita mendengar bahwa ada cacat prosedur dalam pemilihan gubernur itu. Kompetisi antara calon gubernur di Sumsel memang sangat ketat, hanya selisih satu suara. Terdengar bahwa ada anggota DPRD yang sakit, yang mewakilkan suara kepada anaknya. Terdengar pula berita adanya kemungkinan politik uang di balik pembangkangan suara DPRD untuk tidak mendukung calon resmi dari partai.

Persoalannya, alasan itu tidak diangkat oleh Mendagri. Seandainya pun itu yang menjadi alasan, apakah alasan itu sah untuk menunda, apalagi jika nanti sampai membatalkan pemilihan

gubernur. Karena buruknya komunikasi politik pemerintah pusat, publik mencari-cari sendiri apa yang menjadi alasan. Rumor dan gosip politik berkembang, yang ujungnya justru merusak reputasi dan kredibilitas Presiden Megawati sendiri.

Kedua, terkesan adanya standar ganda dalam kebijakan pemerintah pusat. Pemilihan dan pelantikan gubernur di Sumsel segera diperbandingkan dengan kasus Bali. Kedua pemilihan itu sudah disahkan DPRD setempat. Kasus Bali bahkan lebih heboh dan vulgar. Ada putusan PTUN yang meminta pelantikan ditunda. Bahkan, ada pula anggota DPRD Bali yang menunjukkan cek Rp 50 juta sebagai bagian dari money politics.

Namun untuk kasus Bali, pemerintah tetap melantik gubernur sesuai jadwal. Dikatakan bahwa hanya DPRD setempat yang dapat mengubah hasil pemilihan gubernur. Lalu ditanyakan, sekarang mengapa kasus Sumsel tidak diperlakukan sama? DPRD Sumsel juga tidak mengubah keputusannya dalam memilih gubernur. Presiden Megawati melalui Mendagri akibatnya dituduh menerapkan standar ganda.

Sangat bahaya jika pemerintah pusat tidak dapat menunjukkan kebijakan standar yang diterapkan di semua provinsi. Yang akhirnya tampak kepada publik adalah adanya inkonsistensi, kontradiksi, dan selera subyektif penguasa dalam melantik atau tidak melantik gubernur terpilih.

Ketiga, yang lebih parah, akibat kegagalan komunikasi politik yang sehat, yang berkembang adalah supremasi selera politik penguasa sebagai penentu kebijakan. Publik pun menghubungkan kasus Sumsel dan Jawa Tengah, dengan Bali dan Lampung.

Di Lampung, calon resmi PDIP kalah. Pemenangnya tidak dilantik. Di Jawa Tengah, calon resmi PDIP menang. Pemenangnya dilantik. Di Sumsel, calon resmi PDIP kalah lagi. Pemenangnya tidak dilantik. Di Bali, calon resmi PDIP menang. Pemenangnya dilantik. Jika logika

ini diurut, disimpulkan bahwa pemerintah pusat melantik gubernur berdasarkan selera politik subyektif saja. ini membahayakan bangunan politik rasional dan modern.

Tuduhan miring di atas belum tentu benar. Namun buruknya komunikasi politik pemerintah pusat dan tidak adanya penjelasan yang memadai, yang masuk akal, dengan mudah mengundang interpretasi buruk seperti itu. Sayangnya, yang menjadi korban justru citra Presiden Megawati sendiri.

Tidak heran jika di kalangan tokoh PDIP sendiri, otokritik mengenai kasus pemilihan gubernur Sumsel sudah terdengar. Roy B.B. Janis, misalnya, meminta pemerintah pusat jangan menjadi alat partai, bahkan jangan menjadi alat PDIP sekalipun. Setelah DPRD mengesahkan hasil pemilihan gubernur, seharusnya pertarungan partai politik selesai. Pemerintah harus bertindak mandiri dari pertarungan partai.

Memang ada lubang menganga dalam aturan hukum mengenai pelantikan gubernur. Tidak ada kriteria operasional, atas dasar apa presiden boleh menunda pelantikan, dan berapa lama penundaan itu diperbolehkan. Lalu badan mana pula yang berwenang mengawasi dan mengontrol presiden jika dia lalai dalam melantik gubernur yang sudah disahkan DPRD itu.

Dengan aturan yang amburadul dan buruknya komunikasi politik, provinsi mana lagi yang akan menjadi korban berikutnya? **

**BAGIAN KEEMPAT
MENYOROTI DINAMIKA
POLITIK ELITE**

DENNY J.A

PKB Digandeng Poros Tengah?

BAGI komunitas politik Islam khususnya, ada dua peristiwa yang akan ikut membentuk landscape politik nasional sampai tahun 2004. Pertama, disepakatinya Cholil Bisri dari kubu PKB Kuningan untuk mengisi wakil ketua MPR yang kosong. Keputusan itu seketika disambut sorak sorai oleh PKB Kuningan pimpinan Alwi Shihab. Sebaliknya, keputusan itu dirasakan sebagai musibah dan “penghianatan” kepada PKB Batutulis, pimpinan Matori Abdul Djali.

Kedua, terjadinya pertemuan para tokoh di rumah Amien Rais. Yang hadir antara lain, tokoh partai dari PPP, PBB, PK, PAN, ormas Islam seperti ICMI, MUI, Kahmi dan tokoh Islam lainnya yang tidak berpartai. Aneka spekulasi pun merebak. Pertemuan itu dianggap embrio dari sebuah kaukus Politik Islam. Atau pertemuan itu dapat menjadi semacam Poros Tengah jilid kedua.

Poros Tengah jilid pertama berhasil mendudukkan Gus Dur sebagai presiden dan Amien Rais sebagai ketua MPR. Akankah Poros Tengah jilid kedua ini bersama-sama punya calon presiden, wakil

presiden dan ketua MPRnya sendiri? Akankah PKB versi Kuningan kembali digandeng oleh Poros Tengah, sehingga kekuatan politik komunitas Islam bersatu melawan PDIP yang nasional dan dianggap “sekuler?”

Dua peristiwa di atas, yang seolah terpisah, dapat saja saling berhubungan dalam peta politik dan tujuan politik yang lebih makro. Sangat mungkin NU kini menjadi rebutan kelompok Poros Tengah dan PDIP. Kemana komunitas NU berpihak sangat menentukan apakah PDIP atau koalisi Poros Tengah yang akan unggul dalam pertarungan politik, terutama pemilihan presiden 2004 nanti. Ini tentu dengan asumsi NU sendiri cukup solid sebagai satu entitas politik dan tidak terpecah belah.

Kemana suara NU akan mengalir juga sangat ditentukan oleh bagaimana kursi wakil ketua MPR itu diselesaikan. Sejak ditinggal oleh Matori karena menjadi menteri, kursi wakil ketua MPR kosong. Persoalan menjadi rumit karena lahir dua PKB yang saling mengklaim sebagai PKB yang sah. Dua PKB itu sudah pula punya calonnya masing-masing untuk mengisi kursi lowong jatah PKB itu.

Sudah cukup lama pimpinan MPR menghadapi dilemma, PKB mana yang berhak? Jika dilihat dari tata tertib MPR, memang solusinya sederhana. Pasal 27 tatib MPR hanya mengatakan bahwa anggota fraksi yang bersangkutan yang berhak mengajukan nama calon wakil ketua MPR. Karena mayoritas anggota fraksi PKB di MPR sekarang ini datang dari PKB Kuningan, dengan sendirinya berdasarkan tatib MPR, PKB Kuningan yang berhak.

Namun dilihat dari sisi historisnya, PKB Kuningan punya cacat. Justru cacat politik itu yang menyebabkan lahirnya PKB Batutulis. PKB Kuningan adalah kubu politik dengan patron Gus Dur. Sedangkan Gus Dur pernah membekukan MPR/DPR. Adalah Matori Abdul Djalil yang menolak perintah Gus Dur. Selaku ketua umum PKB saat itu, dengan seluruh resikonya, Matori pasang badan dan hadir

dalam Sidang Istimewa MPR. Bahkan Matori secara resmi mengakui pemecatan Gus Dur dan pengangkatan presiden baru Megawati Soekarno Putri.

Secara politik, sesungguhnya PKB Matori yang lebih sejalan dengan aura politik paska Dekrit Presiden Gus Dur. Namun kelemahannya, PKB Matori tidak didukung oleh anggota MPR dan DPR yang memadai. Untuk membentuk fraksi MPR saja, anggota PKB yang berafiliasi dengan Matori tidak mencukupi.

Situasi menjadi serba salah bagi pimpinan MPR. Apa daya, Matori kini merasa dikorbankan. Ketika sidang Istimewa berlangsung di tahun 2001, ia dipuji dan didukung. Namun ketikan peta politik mulai berubah, ia merasa kembali "dicampakkan". Calon pilihannya, baik untuk wakil ketua MPR dan pimpinan fraksi DPR tidak ditoleh.

Dua pilihan yang kini tersedia buat Matori sama sulitnya. Pilihan fatwa MA memang bisa ia tempuh. Namun fatwa MA tidak punya kekuatan hukum. Apalagi MA secara hirarkis berada di bawah MPR. Bagaimana mungkin MA memberikan instruksi kepada atasannya sendiri di MPR? Sementara pilihan lain adalah pengadilan. Tetapi pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Sangatlah beresiko jika keputusan pengadilan belum tetap, sementara pemilu sudah dekat.

MPR sendiri sebenarnya sangat bersikeras. Jika pimpinan MPR saat ini berkomitmen untuk menunggu hasil pengadilan, kursi wakil ketua MPR itu dapat dikosongkan. Dapat dikemukakan bahwa PKB yang sah harus terlebih dahulu diputuskan secara hukum oleh pengadilan yang berwenang. Sebelum ada keputusan dari pengadilan, tatib MPR tidak dapat dilaksanakan.

Namun pimpinan MPR, minus wakil dari PDIP, sudah mengambil keputusan sebelum ada keputusan pengadilan. Akibatnya berkembang spekulasi adanya pertimbangan politik dibalik keputusan pimpinan MPR untuk kembali membangun Poros Tengah jilid kedua, di mana PKB versi Kuningan akan dirangkul.

Secara legal formal, pengangkatan Cholil Bisri sebagai wakil ketua MPR masih dapat diperdebatkan karena belum ada putusan pengadilan. Namun secara politik, pengangkatan itu jelas membuat Megawati dan PDIP dalam posisi sulit. Jika ia merestui Cholil Bisri, melalui fraksi PDIP di MPR, tentu Matori merasa ditinggalkan oleh Megawati dan PDIP. Padahal Matori dan kelompoknya adalah kekuatan yang setia mendukung Megawati dan PDIP.

Namun jika Megawati dan PDIP menolak pengangkatan itu dengan alasan menunggu keputusan pengadilan, akibatnya Megawati dan PDIP akan berhadapan dengan NU. Bagaimanapun Cholil Bisri adalah tokoh darah biru yang cukup disegani NU. Tidak bisa ditolak NU adalah kekuatan ormas Islam terbesar di Indonesia. Siapa yang akan didukung atau dilawan oleh NU sulit untuk menjadi presiden, apalagi jika pemilihan langsung.

NU dan PKB tampaknya sekali lagi akan menjadi rebutan kekuasaan politik. Jika segalanya berjalan lancar, politik menjelang tahun 2004, akan mengerucut pada pertarungan dua calon presiden terkuat: Megawati dan Amien Rais. Kekuatan utama Megawati bertumpu pada komunitas politik nasionalis. Sedangkan Amien Rais bertumpu kepada politik Islam dalam koalisi longgar Poros Tengah.

Posisi NU dan PKB berada ditengah, dan menjadi layaknya "gadis perawan" yang akan diperebutkan. Poros Tengah tentu berkepentingan jika NU memihak mereka. PDIP juga berkepentingan yang sama.

Untuk komunitas NU, boleh jadi PKB Kuningan akan lebih didukung oleh pesantren. Akibatnya, PKB Kuningan akan lebih bernilai secara politik. Dalam konstruksi seperti ini PKB Matori akan dilupakan, kecuali jika ada manuver yang sangat brilian dari Matori di waktu dekat. Jika tidak, ini akan menjadi akhir politik Matori. Begitulah politik. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan. **

Intelektual Mendirikan Partai

POLITIK era reformasi menampilkan satu sisi dinamika yang menarik. Para intelektual melibatkan diri secara langsung dalam politik, ikut mendirikan partai. Prof. Dr. Ryaas Rasyid bersama Dr. Andi Malarangeng menggodok sebuah partai yang berlandaskan demokrasi dan kebangsaan. Sebelumnya, Dr. Syahrir sudah berancang-ancang pula mendirikan partai dan komunitas Perhimpunan Indonesia Baru yang sudah punya banyak cabang di aneka provinsi.

Jika berhasil, Dr. Syahrir dapat mengikuti Fernando Henrique Cardoso, yang juga seorang ekonom, yang kemudian menjadi presiden Brazil sejak tahun 1995. Ryaas Rasyid atau Andi Malarangeng mungkin dapat seperti Vaclav Havel, intelektual yang menjadi presiden Czech Republik sampai sekarang.

Mengapa para intelektual ini mendirikan partai? Bagaimana prospek partai mereka kelak?

Pasar politik Indonesia tentu masih selalu terbuka untuk lahirnya partai baru. Kekecewaan publik yang meluas atas kiprah partai politik yang kini berkuasa semakin hari semakin besar. Orientasi partai sudah lebih kepada konsolidasi kekuasaan, bukan lagi kepada aspirasi publik dan pendidikan politik. Semakin ada jarak yang lebar antara perilaku partai dan harapan pemilih yang dulu diwakilinya. Survei yang dilakukan Harian Kompas di awal Juli 2001 menunjukkan lebih dari 50% responden kecewa bahkan terhadap PDIP yang dulu dianggap sebagai wakil kalangan reformis.

Sejak reformasi empat tahun lalu, kondisi obyektif kita bahkan banyak yang tambah memprihatinkan. Politik sangat tidak stabil. Presiden sempat diganti tiga kali dalam waktu empat tahun. Sementara koalisi antar partai begitu mudah berubah dalam hitungan bulan. Suatu ketika Poros Tengah bersatu dengan Golkar dan PKB melawan PDIP. Akibatnya, Megawati yang menjadi ketua umum pemenang pemilu dapat dikalahkan oleh Gus Dur yang suaranya hanya 1/3 suara PDIP.

Belum lama Gus Dur menjadi presiden, koalisi partai kembali berubah dan gantian menghantam Gus Dur. Kali ini Poros Tengah bersatu dengan PDIP dan Golkar melawan PKB. Hasilnya, Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur. Menjelang pemilu 2004, koalisi agaknya kembali berubah dan meruncing di antara polarisasi dua tokoh: Amien Rais versus Megawati.

Publik tidak merasakan apa yang menjadi basis dan komitmen dari ganti pasang koalisi itu. Yang kasat mata, ujung dari sirkus partai politik itu adalah pergantian kekuasaan atau survival kekuasaan. Resikonya, politik nasional selalu gunjang ganjing. Kondisi seperti itu tentu tidak kondusif bagi upaya economic recovery guna mengatasi krisis.

Menghadapi semakin konservatifnya partai yang ada, para intelektual punya pilihan respon yang beragam. Pertama, para intelektual itu menjauh bahkan henggang dari partai. Ini dilakukan

oleh Faizal Basri dan kawan-kawan yang memilih keluar dari Partai Amanat Nasional. Akibatnya, semakin ada jarak yang jauh antara realitas politik partai dan dunia intelektual. Semakin pula intelektual tidak mampu mempengaruhi kehidupan partai karena tidak lagi mempunyai kaki di dunia kepartaian.

Kedua, para intelektual itu mendekati dan masuk ke partai. Ini didasari oleh pandangan bahwa partai adalah satu-satunya kendaraan untuk memperebutkan pemerintahan di eksekutif ataupun di legislatif. Jika intelektual tidak masuk ke partai, maka partai akan semakin dikuasai oleh orientasi politik jangka pendek. Demi kepentingan yang lebih besar sang intelektual itu bagi "perawan yang masuk ke sarang penyamun". Sang perawan berharap merubah para penyamun. Demikianlah stereotype sebagian intelektual atas dunia kepartaian, yang tentu saja tidak seluruhnya benar.

Persoalannya seberapa besar intelektual itu dapat mempengaruhi partai yang sudah mapan itu? Sang intelektual mungkin saja hanya menjadi pemeran pembantu. Lebih jauh lagi, justru sang intelektual itu hanya dapat memberi justifikasi ilmiah dan akademik bagi impuls primitif partai yang hanya hendak memperbesar kekuasaan. Yang terjadi akibatnya, bukan "perawan" merubah penyamun tetapi penyamun yang mengkader "perawan" untuk menjadi penyamun yang lebih canggih.

Ketiga, para intelektual justru membangun partainya sendiri. Mereka sendiri yang memimpin partai, yang menentukan platform partai, yang merekrut dan memilih pimpinan, serta membuat dan menjalankan strategi. Ini sebuah terobosan baru. Dr. Syahrir, Ryaas Rasyid dan Andi Malarangeng berada dalam barisan ini. Jika upaya ini berhasil, tentu mereka membuat inovasi yang signifikan bagi kehidupan partai, dan bulat lonjongnya politik Indonesia.

Bagaimana kah prospek partai intelektual ini? Kendala paling utama bagi mereka adalah komunalisme politik. Yang dihadapi

oleh para intelektual ini bukanlah pemilih rasional yang liberal dan independen. Mayoritas pemilih Indonesia adalah komunitas primordial.

Pemilih beragama Islam sudah tersegmentasi dalam komunitas NU Muhammadiyah, santri di luar NU dan Muhammadiyah, serta Islam formal dan abangan. Komunitas NU sudah punya PKB, PPP dan aneka partai warga NU lainnya. Muhammadiyah sudah punya PAN, PBB, PK, PPP dan Partai Islam modern lain. Sementara bagi santri lainnya juga sudah tersedia partai Islam yang berbeda. Islam formal dan abangan yang nasionalistik sudah punya PDIP dan Golkar. Dua partai terakhir ini juga pilihan kalangan modern perkotaan, golongan minoritas serta keluarga birokrat.

PDIP ditambah Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB akan terus ikut pemilu 2004. Total suara yang diraih oleh enam partai besar di tahun 1999 sudah lebih dari 90% dari kursi yang diperebutkan (di luar TNI/Polri). Suara mereka tentu akan naik dan turun namun sangat mungkin perpindahan pemilih terjadi di antara enam partai itu sendiri. Sementara dua puluhan partai lainnya, termasuk partai kaum intelektual ini yang akan mengambil sisa suara. Jika kondisi tidak berubah banyak, bisa mendapatkan suara sekitar 5% saja di DPR itu sudah prestasi bagi partai intelektual. Namun ini berarti partai kaum intelektual sudah harus bersiap menjadi partai gurem.

Kecil dalam perolehan kursi, tetapi besar dalam wacana yang didengungkannya, serta cemerlang dalam gagasan. Mungkin ini yang akan menjadi trademark partai intelektual. Mereka akan mengulangi karakter PSI di tahun 1950-an, partai cabe rawit yang mungil tetapi pedas dalam dunia ide. Mampukah para intelektual ini menjungkir balikkan prediksi ini? **

Prospek Akbar Tandjung

KOSA kata baru diperkenalkan dalam politik Indonesia di era reformasi: “mosi tidak percaya.” Istilah ini sebenarnya berasal dari sistem politik parlementer untuk mendongkel dan mengganti perdana menteri. Namun di Indonesia saat ini, istilah itu dipakai untuk menonaktifkan Akbar Tandjung dari ketua DPR.

Puluhan penandatanganan mosi tidak percaya atas Akbar Tandjung sudah menyerahkan tuntutan secara resmi. Mereka berasal dari berbagai partai politik, antara lain, PDIP, PKB dan PAN. Gerakan ini dimotori oleh politisi muda: Dwi Ria Latifa, Firman Jaya Daeli dan Sasono Yusuf. Sebagaimana lazimnya di dunia politik, politisi muda memang lebih digerakkan oleh idealisme, cita-cita luhur, moral publik dan etika dalam tidak tanduknya.

Argumen moral hanyalah salah satu saja dari ekspresi kepentingan politik. Ada pula argumen yang tidak kalah kuatnya, yaitu argumen

hukum yang legal dan formal. Masing-masing argumen itu punya pendukungnya sendiri. Sebagian kepentingan politik memang dapat direpresentasikan melalui argumen moral ataupun argumen hukum. Namun tidak jarang pula, argumen itu hanyalah retorika yang digunakan untuk menutupi kepentingan politik lain yang lebih disembunyikan.

Argumen moral dalam kasus Akbar Tandjung mewakili kepentingan politik yang ingin menjaga citra lembaga DPR. Menurut argumen ini, sangat sayang jika lembaga sebesar dan sepenting DPR terganggu citranya hanya karena posisi hukum ketuanya.

Bagaimana lembaga ini mendapatkan respek publik jika ketuanya adalah seorang terpidana kasus korupsi, walau status itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap? Bagaimana DPR dapat dipercaya publik sebagai pembuat aturan hukum, jika ketuanya sendiri melanggar hukum?

Ketika posisi Akbar Tandjung masih tersangka, gerakan moral ini sudah mulai bergerak untuk melengserkannya dari jabatan ketua DPR. Ketika pengadilan negeri menjatuhkan vonis bersalah tiga tahun kepada Akbar Tandjung, upaya melengserkan Akbar semakin kuat. gerakan moral menganggap tuntutananya cukup moderat karena mereka tidak meminta DPR memecat Akbar Tandjung. Mereka hanya meminta Akbar Tandjung di non-aktifkan sambil menunggu keputusan hukum atas dirinya berkekuatan hukum tetap.

Jika Akbar Tandjung non aktif, minimal persoalan Akbar Tandjung akan ditanggung sendiri olehnya. Tidak seperti sekarang, lembaga DPR menjadi ikut pula menanggung beban kasus Akbar Tandjung. Padahal lembaga DPR tidak berhubungan sama sekali dengan kasus korupsi yang dituduhkan kepada Akbar Tandjung pribadi. DPR terlalu penting untuk disandera oleh hanya pribadi Akbar Tandjung.

Menurut pandangan ini, non aktifnya Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR akan menjadi preseden dan tradisi baik dunia politik. Para

elite akan mendapatkan contoh betapa masalah moral, etika lebih dikedepankan ketimbang perhitungan kepentingan politik jangka pendek.

Namun argumen hukum mempunyai tuntutan yang sama sekali berbeda. Bagi mereka, secara moral, Akbar Tandjung belum tentu lebih buruk daripada bapak dan ibu yang sedang berkuasa. Di era korupsi yang sedemikian marak, selalu terbuka kemungkinan ada tokoh lain yang masih duduk di kekuasaan, yang mungkin saja lebih berpenyakit moral. Itu hanya ketidakberuntungannya saja bahwa kasus Bulog dibongkar lebih dahulu dari, misalnya, kasus BI yang memakan uang negara ratusan trilyun rupiah.

Menurut argumen jenis ini, moral jangan dijadikan rujukan politik. Apalagi negara kita tidak berdiri di atas supremasi moral, tetapi supremasi hukum. Aturan hukum itu saja yang seharusnya dijadikan landasan bertindak. Secara hukum, Akbar Tandjung dianggap belum tentu bersalah. Keputusan pengadilan negeri yang menjatuhkan tiga tahun masih mungkin dibatalkan oleh pengadilan tinggi, atau oleh Mahkamah Agung. Contohnya, Gubernur BI yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri ternyata dibebaskan oleh pengadilan tinggi.

Apalagi secara hukum, tidak ada aturan yang mengharuskan Akbar Tandjung non aktif sebagai ketua DPR. Tidak ada aturan itu di tatib DPR. Tidak ada pula aturan itu di berbagai undang-undang atau TAP MPR. Maka hak Akbar Tandjung untuk tetap bertahan sebagai ketua DPR harus dihormati sebagai hak pribadinya yang dilindungi hukum. Alasan moral yang relatif itu tidak dapat menggeser aturan hukum yang legal dan formal.

Argumen hukum ini diyakini oleh pendukung Akbar Tandjung. Namun banyak pula yang menggunakan argumen hukum untuk menutupi kepentingan politik lain. Para politisi senior di luar Golkar bagaimanapun masih membutuhkan dukungan Golkar.

Para ahli strategi dan ideologi di PDIP misalnya, tetap merasa Golkar adalah partner politik yang paling dapat diandalkan. PDIP dan Golkar dianggap sejalan dengan paham kebangsaan yang sama. Jika Golkar menarik dukungannya kepada PDIP, akibatnya PDIP semakin tergantung kepada PPP, Partai Islam yang punya ideologi berbeda.

Politisi senior di PPP juga tetap berkepentingan dengan dukungan Golkar. Sama halnya dengan politisi senior di PBB. Ketika terjadi voting pansus Buloggate jilid 2 untuk meneliti aliran dana Bulog dari tangan Akbar Tandjung, PPP dan PBB berdiri di belakang Akbar Tandjung dan Golkar. Isu yang berkembang, yang tidak pernah kita tahu kebenarannya, Golkar dan Akbar Tandjung memegang kartu truf aliran dana, yang mungkin melibatkan sejumlah tokoh PPP dan PBB.

PKB versi Alwi Shihab juga berkepentingan dengan dukungan Golkar dan Akbar Tandjung. PKB yang bermasalah memerlukan dukungan politik Golkar. Ada PKB Alwi Shihab. Ada PKB Matori. Jika kasus ini tidak selesai, ada kemungkinan dua PKB ini tidak dapat ikut pemilu. Jika PKB mengambil sikap yang terlalu frontal atas Golkar dan Akbar Tandjung. PKB akan kehilangan dukungan politik yang ia perlukan untuk perjuangan survival partai sendiri.

Begitu banyak kepentingan politik di luar Golkar yang tidak ingin frontal dengan Golkar dan Akbar Tandjung. Kepentingan ini juga menggunakan alasan dan argumen hukum sebagai retorikanya. Argumen moral yang disponsori politisi muda akhirnya membentur tembok besar kepentingan politik riil para bos dan pimpinan partai besar. Tunduk kepada kepentingan yang riil merupakan hukum besi politik, baik di era orde baru, ataupun di era reformasi. Itulah yang kita saksikan dalam gerakan menuntut mundur Akbar Tandjung. **

Man Of The Year 2002

SIAPAKAH yang layak dinobatkan sebagai The Man of The Year 2002, atau The Persons of The Year 2002 di Indonesia? Akan halnya untuk skala dunia, Majalah Times menobatkan tiga wanita sebagai The Persons of The Year 2002. Mereka adalah Sharron Watkins, Collen Rowley, dan Chyntia Cooper. Tiga wanita ini di tahun 2002 menjadi The Whistle Blowers, menjadi pembocor dari buruknya kinerja organisasi besar bisnis dan politik.

Sharron Watkins adalah wakil presiden dari perusahaan besar Enron. Ia menulis surat memo kepada pimpinannya bahwa cara perusahaan membuat laporan keuangan sangat tidak layak dan telah menipu publik luas. Sedangkan Chyntia Cooper membongkar kejahatan bisnis perusahaan besar lainnya World.Com.

Sementara Collen Rowley adalah staf dari FBI. Ia juga menulis sebuah memo kepada Direktur FBI Robert Mueller yang kemudian menggemparkan publik. Bahwa jauh hari sebelum Tragedi 11 September, menurut memo itu, sudah ada petunjuk untuk

menginvestigasi Zacarias Mussaoui. Namun petunjuk itu tidak diperhatikan. Kini diketahui bahwa Zacarias Mussaoui menjadi pelaku kunci Tragedi 11 September 2001.

Bagaimana dengan Indonesia. Atas peristiwa panjang di tahun 2002, siapa yang paling menjadi pusat berita? Dan siapa yang paling berjasa meletakkan sebuah pondasi baru atau membongkar kasus penting yang mempengaruhi hidup orang banyak?

Tentu setiap pengamat ataupun lembaga penelitian dapat berbeda dalam menetapkan The Men of The Year 2002 untuk Indonesia. Saya sendiri menetapkan tiga tokoh yang layak mendapatkan predikat itu atas jasa dan kerja besarnya di tahu 2002. Pertama, I Made Mangku Pastika yang membongkar jaringan teroris di Indonesia. Kedua, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin upaya perdamaian di Aceh. Ketiga, bukan tokoh tetapi lembaga KPKPN yang berhasil membuat malu banyak pejabat yang bertendensi korupsi.

Pastika akan selalu dikenang. Stabilitas politik di Indonesia di masa datang, sebagian disebabkan oleh kerja Pastika membongkar jaringan terorisme. Bom di Bali yang membunuh lebih dari 180 nyawa buat Indonesia semakin dikenal sebagai surga para teroris. Banyak pihak meragukan kemampuan Polri untuk mengusut tuntas pelaku. Sejak dulu bom sudah meledak di berbagai wilayah Indonesia, namun publik selalu gagal diyakinkan mengenai jaringan pelaku.

Pastika membuat dua hal penting. Pertama, secara induktif, berdasarkan data di lapangan, tim yang dipimpinnya berhasil melacak sebuah jaringan berbahaya. Ia memulai investigasi dengan mengumpulkan mesin mobil yang digunakan untuk meledakkan bom. Secara bertahap, dengan bantuan teknologi modern, ia pun menemukan pemilik mobil. Awal terbongkarnya jaringan terorisme di Indonesia dimulai. Jemaah Islamiyah yang selama ini hanya

menjadi wacana, di tangan Pastika, mulai dapat dikonkritkan sebagai kelompok tertuduh.

Kedua, di samping menemukan dan merangkai data, Pastika bersama tim juga melawan opini publik. Berbagai pakar dan senior Pastika sendiri menyatakan bahwa mustahil bom itu dibuat di Indonesia. Banyak pula pakar yang mengaitkan bom yang meledak itu sejenis mikro nuklir. Ini berarti industri negara asing terlibat. Mustahil aktivis Jemaah Islamiyah mampu membuat bom itu.

Data yang benar akan dibuktikan di pengadilan. Namun dalam opini publik, Pastika mampu meyakinkan penemuannya. Pastika tetap konsisten dengan temuannya yang induktif dan menolak spekulasi teoritik ataupun konspirasi abstrak yang tidak bisa diverifikasi saat ini.

Sementara Menko Polkam Bambang Yudhoyono layak diberikan penghargaan atas leadershipnya mengenai Aceh. Sudah lebih dari 25 tahun usia konflik di Aceh. Indonesia sudah berganti empat presiden. Namun kekerasan di Aceh tidak kunjung selesai. Politisi dan pimpinan militer garis keras semakin tidak sabar. Penumpasan GAM dengan senjata dan kekerasan menjadi pilihan yang cepat dan sesuai dengan emosi publik luas saat ini.

Namun Menko Polkam berhasil meyakinkan Presiden Megawati untuk tetap memilih jalan damai. Kini pilihan ini dijalankan secara lebih cerdas dengan melibatkan dunia internasional. Akibatnya dalam pandangan opini publik, pihak Jakarta menempuh segala cara untuk damai di Aceh. Jika damai tidak juga terjadi, publik akan mudah menyalahkan GAM.

Pada saat yang sama Menko Polkam memainkan kartu internasional untuk menekan GAM. Difasilitasi Henri Dunant Center dan berbagai negara asing, GAM terpojok dan tidak lagi mempunyai pilihan lain kecuali sepakat untuk memulai penghentian permusuhan.

Menko Polkam sudah pula membuat jadwal tahap damai berikutnya, dan mampu memobilisasi dukungan militer, pemerintah dan opini publik.

Proses menuju damai di Aceh memang masih panjang. Masih ada proses demiliterisasi, sampai kesepakatan menemukan format politik Aceh masa depan. Namun kesepakatan 9 Desember 2002 yang dipimpin oleh Menko Polkam adalah pondasi terkuat dari segala upaya damai yang pernah ada dalam sejarah Aceh.

Sedangkan KPKPN, dengan pimpinan Yusuf Syakir, juga berhasil merebut kepercayaan publik. Di era reformasi, hampir semua lembaga pemerintahan tidak lagi dipercayai publik. Mulai dari lembaga presiden, DPR, sampai yudikatif dianggap gagal menjalankan amanat reformasi. KPKPN menjadi perkecualian.

Dengan bantuan publikasi pers, pejabat yang berbohong mengenai hartanya, atau yang sungkan melaporkan hartanya segera menjadi musuh publik. Pada awalnya, banyak anggota MPR/DPR yang enggan menyerahkan laporan harta kekayaannya. Namun desakan yang luas dari KPKPN di bantu oleh pers, membuat anggota MPR/DPR itu menyerah. Dipermalukannya Jaksa A Rahman dalam laporan kekayaan juga menjadi preseden baik bagi kejujuran dalam laporan kekayaan pejabat publik.

Dilaporkannya kekayaan pribadi pejabat publik menjadi langkah awal yang pasti bagi pemberantasan korupsi. Karena adanya keharusan laporan itu, para pejabat publik akan semakin berhati-hati untuk korupsi. Tentu ini sebuah tradisi baru dan penting untuk sebuah negara yang sangat korup.

I Made Pastika, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan KPKPN menutup tahun 2002 dengan prestasi berharga. Mereka layak menyandang kehormatan sebagai The Persons and The Organization of The Year 2002. **

Laksamana vs. Amien Rais

TAHUN 2003 masih sangat dibuka oleh kasus yang sangat panas, yakni kasus Laksamana Sukardi versus Amien Rais. Kasus tersebut sangat mungkin menjadi hot issue yang paling top sepanjang 2003, jika kasus itu gagal dituntaskan melalui kompromi elite.

Pengacara yang disewa Laksamana berupaya agar kasus tersebut hanya menjadi persoalan pribadi Laksamana versus pribadi Amien. Namun bagi banyak pihak, kasus itu terlalu penting pula untuk diselesaikan secara baik-baik melalui kompromi elite. Sudah begitu banyak konflik yang selesai di belakang meja. Namun publik menjadi tidak belajar dan mengambil hikmah dari konflik tersebut.

Banyak yang berkeinginan agar kasus itu bisa masuk ke pengadilan dan berakhir dengan menang atau kalah. Tidak penting siapa yang menang atau kalah, publik akan belajar banyak.

Jika Amien benar atau menang, publik akan mengetahui kejadian yang sebenarnya di balik aneka privatisasi. Sudah terlalu lama menjadi gosip soal adanya perburuan rente dan KKN di Balik segala

bentuk privatisasi. Akibatnya proyek privatisasi bukan lagi menjadi program untuk kepentingan publik dan bangsa. Sebagai gantinya, privatisasi menjadi sapi perah untuk kantong pejabat pribadi atau partai politik.

Sebaliknya, jika Laksamana menang, publik juga akan mengajari para pemimpinnya untuk menghemat komentar. Tidak hanya Amien, tetapi juga pejabat lain akan berhati-hati membuat serangan. Seketika, serangan itu bisa dianggap mencemarkan nama baik. Si pelaku akan dihukum dan karir politiknya terganggu.

Kita belum tahu siapa yang benar dan yang menang. Bahkan, kita juga belum tahu apakah kasus tersebut akan sampai ke pengadilan atau keburu diganjal kompromi elite. Yang kita tahu, setidaknya ada dua isu besar yang membuat konflik itu menjadi konflik politik.

Konflik pertama, isu yang berhubungan dengan solusi atas BUMN. Dengan segera, solusi tersebut membagi publik dalam dua kelompok yang berkonflik. Solusi pertama adalah jalan privatisasi. Menurut solusi itu, dalam proses menjadi negara modern, sebaiknya negara semakin sedikit menguasai aneka usaha. Biarkan lah swasta mengambil alih. Privatisasi menjadi metode pengalihan pemilikan negara kepada swasta.

Jika swasta menjadi pemilik sebuah usaha, efisiensi dan profit oriented pihak swasta justru akan menyehatkan perusahaan tersebut. Semakin perusahaan itu efisien dan untung, negara juga semakin diuntungkan. Sebab negara memperoleh pajak yang semakin besar. Jika dikuasai negara, perusahaan itu cenderung dijadikan sapi perah bagi politisi dan birokrat. Akibatnya, perusahaan yang sebelumnya sehat dan untung, perlahan menjadi tidak efisien dan disubsidi.

Solusi privatisasi tersebut adalah murni berpikir dalam kerangka ekonomi. Metode itu tidak membedakan antara perusahaan yang strategis bagi publik serta keamanan negara dan yang tidak. Metode itu juga tidak mempedulikan apakah pemilik baru tersebut merupakan orang asing atau pengusaha domestik.

Namun, solusi privatisasi tersebut segera ditentang jenis solusi lain. Penentangannya adalah solusi korporatisasi. Sebagaimana target privatisasi, solusi korporatisasi juga menginginkan efisiensi sebuah perusahaan negara. Namun, jalan keluarnya, saham mayoritas harus tetap dikuasai pemerintah. Yang dialihkan kepada pihak swasta hanya sistem dan manajemennya.

Berbeda dengan privatisasi, korporatisasi lebih sensitif terhadap dimensi politik dan keamanan sebuah perusahaan. Misalnya, Indosat yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dianggap sangat strategis bagi keamanan negara. Dengan menguasai jaringan telekomunikasi, tidak ada jaminan pihak asing untuk tidak mengoptimalkan perannya dalam menyadap informasi penting negara.

Apalagi, pihak yang pro terhadap korporatisasi tersebut mencurigai adanya isu KKN di balik privatisasi Indosat. Secara publik diklaim bahwa Indosat dijual dengan harga di atas harga pasar. Namun menurut penelitian seksama, para ekonom juga mempunyai argumen sebaliknya. Yakni dengan melihat lisensi yang terjual bersama Indosat, harga yang dipatok justru sangat murah.

Konflik menjadi lebih panas dengan hadirnya komentar Gus Dur. Dicatat oleh Detik.Com, Gus Dur berkomentar bahwa 7% penjualan Indosat diberikan kepada PDIP untuk Pemilu 2004. Walau semua pihak sudah terbiasa dengan komentar Gus Dur yang kadang diralatnya kembali, komentar tersebut menambah pelik suasana. Tidak pelak lagi, kelompok yang selama ini diam bisa turut meramaikan suhu politik.

Konflik jenis kedua di balik Indosat adalah isu yang berhubungan dengan kompetisi politik. Banyak yang menilai, konflik Laksamana versus Amien hanya merupakan warming-up bagi kompetisi politik yang sebenarnya pada 2004: Megawati versus Amien Rais sebagai calon presiden (capres).

Laksamana diduga hanya menjalankan “pembukaan gambit kuda” dalam permainan catur. Jika pengadilan menjatuhkan vonis tertentu kepada Amien, niscaya dia akan cacat hukum. Hasil tersebut akan menyulitkan dirinya maju sebagai calon presiden yang bersih pada 2004.

Sebaliknya, jika Amien berhasil membongkar KKN Laksamana pribadi yang terkena. Publik akan mudah mengasosiasikan dengan PDIP dan kemudian Megawati. Apalagi, komentar Gus Dur soal 7% hasil penjualan Indosat itu sudah menjadi bumbu penyedap. Langkah permulaan tersebut akan cukup menentukan pemenang kompetisi, setidaknya dalam opini publik.

Sebelum kasus Laksamana versus Amien, ada kasus Fraksi Reformasi yang mengadukan Laksamana ke polisi. Sebelumnya, ada kasus AM Fatwa versus Permadi SH. Semua kasus itu berujung pada pengelompokan politik yang sama: rombongan Amien di PAN versus kontingen Megawati di PDIP.

Pemilu 2004 masih jauh. Namun tembakan pertama sebuah pertandingan maraton politik, tampaknya sudah dimulai. **

Kaukus Penyelamatan Bangsa?

Di depan kalangan pers, sejumlah anggota DPR mendeklarasikan sebuah kaukus untuk penyelamatan bangsa. Kaukus ini terdiri dari anggota DPR dari lintas fraksi. Entah disengaja atau tidak, banyak dari mereka yang merupakan “tokoh” di partainya masing-masing.

Ada Marwah Daud Ibrahim, yang menyempal dari partai Golkar. Berbeda dengan kecenderungan kawan-kawan separtai, Marwah menyempal meminta ketua umumnya sendiri nonaktif sebagai ketua DPR. Ada juga Meliono Suwondo dari PDIP. Juga berbeda dengan kelompok di partainya, Suwondo bahkan membongkar praktik ampol dan korupsi di kalangan partainya sendiri. Ada pula Alvin Lie. Ketika fraksinya menerima UU Penyiaran, ia menyempal dengan memberikan catatan kritis.

Di tengah situasi politik saat ini, gerakan seperti ini tampak terasa segar. Namun harus diakui, magnitudo gerakan ini tidak mudah mengubah pakem politik era reformasi yang semakin tidak jelas arahnya.

Publik dan pers menyambut luas kaukus ini untuk alasan yang sangat sederhana. Tahun 2003 dibuka dengan aneka kejadian yang tidak lagi memperlihatkan tanggung jawab pemimpin atas apa yang diputuskannya. Pemerintah eksekutif dan DPR saling menyalahkan untuk kesepakatan dan prosedur yang sudah mereka putuskan sendiri.

Pertama, kasus kenaikan harga. Segera setelah matahari membuka tahun 2003, harga listrik, telepon dan BBM naik. Kenaikan harga BBM, dengan sendirinya memacu kenaikan harga barang lainnya. Padahal ekonomi masih dalam situasi buruk. Jumlah pengangguran sudah lebih dari 40 juta manusia. Investasi yang masuk bahkan semakin berkurang. Sementara sudah banyak perusahaan besar yang henggang ke negeri lain.

Isu kenaikan harga dengan segera mengalami politisasi. Mahasiswa baik karena kehendak sendiri ataupun mobilisasi kembali turun ke jalan di berbagai kota. Isu penurunan Megawati dan Hamzah Haz semakin sering terdengar.

Kita tidak mendengar ada penjelasan yang elegan dari pemerintah untuk mengambil tanggung jawab dan memberikan penjelasan. Yang terjadi kemudian tindakan saling menyalahkan. Pemerintah menyalahkan DPR yang memberikan persetujuan. Kenaikan itu adalah implementasi dari anggaran belanja negara yang sudah disepakati bersama. Dalam masalah anggaran, DPR dianggap lebih memiliki otoritas. Jika ingin menunda, atau membatalkan kenaikan, pemerintah meminta DPR mengambil inisiatif.

Sebaliknya, anggota DPR ramai-ramai pula membela diri. Mereka mengakui telah menyetujui pengurangan beban anggaran negara. Namun itu dilakukan harus dengan cara yang berbeda. Sebagian menyatakan, cara yang disepakati DPR bukan mengurangi subsidi tiga jenis barang utama sekaligus, tetapi dengan cara menagih utang para konglomerat hitam. Sebagian lagi menyatakan, yang

dipersoalkan bukan kenaikan harga, tetapi masalah waktu dan besaran kenaikannya. Semua lepas tangan.

Di saat pemerintah dalam kesulitan mempertahankan posisinya, tidak tanggung-tanggung, ketua MPR Amien Rais membuat manuver. Ia menuntut pemerintah untuk menunda kenaikan harga. Dengan sendirinya, Amien Rais melahirkan pro kontra.

Yang pro menyatakan Amien Rais jeli menyuarakan kepedihan masyarakatnya dan membuat aksi. Namun yang kontra melihat betapa Amien Rais mengail di air keruh. Bukankah Amien Rais juga anggota DPR yang juga sudah setuju dengan pengurangan subsidi.

Belum selesai permainan sirkus para elite atas isu kenaikan harga, kasus Indosat juga semakin tajam. Kini para anggota DPR sedang bersiap untuk interpelasi. Mungkin akan dibentuk sebuah panitia khusus untuk menyelidiki aneka kecurigaan selama ini. Apakah benar, misalnya, penjualan Indosat itu membahayakan keamanan negara? Apakah benar pula bahwa ada praktik KKN sebesar 9% yang diambil PDIP?

Siapa yang harus bertanggung jawab atas divestasi Indosat? Kembali pemerintah dan DPR saling menyalahkan. Pihak pemerintah menyatakan bahwa semua prosedur dan keharusan divestasi diperintahkan oleh MPR sendiri. Pemerintah tinggal mengeksekusinya saja. semua prosedur, termasuk penglihatan DPR sudah pula ditempuh. Divestasi ini berproses sejak lama. Mengapa baru di ujung saja terjadi ribut-ribut?

Pemerintah kembali mencurigai adanya politisasi tokoh MPR yang sengaja hendak memojokkan Laksamana Sukardi. Sasaran sebenarnya adalah PDIP, atau bahkan Taufiq Kiemas, atau bahkan Megawati. Isu KKN di balik Indosat memang tidak untuk menjatuhkan Megawati Soekarnoputri. Namun isu itu cukup untuk membuatnya cacat secara politik, yang dapat memperkecil peluangnya untuk terpilih kembali sebagai presiden.

Sementara sebagian anggota DPR, dan ketua MPR sendiri, secara hiperbolis memainkan isu seolah negara sudah tergadaikan. Mereka mengakui menyetujui privatisasi secara prinsip, namun BUMN mana yang harus dijual dan kepada pihak siapa harus benar-benar dipikirkan. Tindakan Menteri BUMN mereka klaim bukan termasuk yang disepakati oleh MPR/DPR.

Sungguh jarang terdengar anggota DPR yang menyalahkan diri sendiri. Setelah sekian lama, mengapa tidak kunjung terbentuk UU Privatisasi dan BUMN. Dalam undang-undang itu diatur secara detail kriteria dan prosedur divestasi. Kehadiran UU Privatisasi dan BUMN jelas akan memperkecil ruang kontroversi dan permainan sirkus para elite untuk saling menyalahkan. Adalah juga kesalahan DPR seharusnya, mengapa setelah empat tahun reformasi, UU yang dimaksud tidak kunjung terbentuk?

Dalam konteks sirkus elite seperti di atas, terbentuknya kaukus penyelamatan bangsa disambut dengan hangat. Aura moral terasa dalam kaukus itu. Persoalannya, seberapa efektif kaukus itu mampu mengubah tradisi politik mainstream?

Dilihat dari jumlah, mereka hanya segelintir, kurang dari 10% total anggota DPR. Padahal segala perbedaan di DPR diselesaikan melalui voting. Jumlah sangat penting untuk menggoalkan sebuah kebijakan di DPR. Mereka akan mudah dikalahkan dalam pengambilan keputusan.

Namun kaukus ini agaknya harus dilihat tidak dalam kerangka kalah dan menang. Suara minoritas kritis dan moralis tetap diperlukan. Walau kalah dalam pertarungan riil politik, setidaknya spirit yang mereka bawa terus hidup. Kemenangan spirit itu hanya terjadi jika publik mulai melihat kerja mereka di dunia nyata, dan keberanian mereka kelak memikul resiko demi sebuah idealisme politik. Ataukah kita harus siap-siap kecewa lagi dengan kiprah kaukus ini? **

Megawati di Ujung Tanduk?

“DEMI masa depan ekonomi Indonesia, saya memilih kebijakan yang tidak populis. Saya tahu kebijakan ini membuat saya tidak populer. Tetapi dalam jangka panjang, ekonomi kita bertambah buruk,” kata Megawati.

Di hadapan pengikutnya di Bali, presiden menjawab kritik keras yang ditujukan kepada dirinya. Walau pernyataan itu diucapkan di kalangan terbatas PDIP, Megawati hendak merespons politik nasional. Protes di berbagai daerah makin marak akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, listrik dan telepon sekaligus.

Seketika, pernyataan Megawati tersebut menjadi public discourse. Masyarakat politik menjadi terbelah menjadi pro dan kontra. Politik 2003 kini gonjang ganjing. Sebagian kalangan menganggap Megawati berada di ujung tanduk. Akan jatuh kah dia di tahun ini? Sebaliknya, sebagian lagi justru menganggap bahwa Megawati bertambah kuat setelah seluruh aksi protes itu selesai dengan sendirinya.

Pandangan yang kontra melihat bahwa pernyataan Megawati tersebut terlalu berani. Dia dianggap terlalu rigid secara politik dan memaksakan diri dengan pendirian semula untuk tetap menaikkan harga BBM, listrik dan telepon. Menurut pandangan ini, Megawati boleh rigid dan kukuh jika negara sedang berada dalam puncak popularitas, berkondisi normal dan elite politik bersatu mendukungnya.

Padahal kondisi politik itu kini tidak dimiliki Megawati. Dia sekarang tidak lagi populer. Menurut jajak pendapat Kompas, setelah 1,5 tahun memerintah, ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintahannya meningkat 70 persen. Megawati sekarang bukan merupakan Megawati 1997 yang dielu-elukan.

Juga, menurut pandangan tersebut, situasi belum normal. Indonesia masih berada dalam transisi. Isu politik dan ekonomi jalin menjalin yang membuat segala persoalan semakin dramatis. Apalagi, saat ini Megawati tidak hanya diserang kasus BBM, listrik dan telepon. Dia juga sedang diterjang kasus release and discharge atas masalah konglomerat hitam.

Publik luas tentu tidak tekun mendengar bahwa release and discharge itu merupakan kebijakan warisan Presiden Habibie. Yang ditangkap publik, pemerintah terlalu toleran atas utang konglomerat hitam. Sementara itu pemerintah tega terhadap wong cilik yang semakin menderita atas kenaikan harga. Situasi semakin tidak normal dengan adanya kasus privatisasi Indosat. Aneka isu dan gosip dialamatkan kepada Laksamana Sukardi. Namun, semua tahu bahwa dia hanya menjadi sasaran antara menuju PDIP, Taufiq Kiemas, dan akhirnya Megawati. Muncul isu bahwa kedaulatan negara sedang dijual demi komisi yang akan jatuh ke kalangan seputar kekuasaan. Tidak peduli apakah tuduhan tersebut benar atau salah, publik luas sudah menjadi rumput kering yang mudah dibakar.

Elite politik pun sudah tidak lagi bulat mendukung Megawati. Tinggal setahun lagi negara ini menuju Pemilu 2004 yang memilih

presiden secara langsung. Tahun 2003 menjadi konsolidasi para elite untuk terus bersaing dan saling memukul. Megawati sebagai presiden dan "juara bertahan" dengan sendirinya akan menjadi sasaran utama serta target empuk.

Dalam situasi politik seperti itu, menurut pandangan tersebut, Megawati seharusnya tidak mengambil kebijakan yang tidak populer. Dia akan dijadikan bulan-bulanan lawan politiknya. Yang paling buruk, dia akan dijatuhkan sebelum 2004.

Yang kurang buruk, Megawati tetap bertahan. Namun secara politik dia sudah cacat. Kemarahan publik terhadapnya akan di mobilisasi sedemikian rupa sehingga akumulasi dan klimaks.

sebaliknya, pihak yang pro justru mendorong Megawati untuk tetap bertahan dengan kebijakan tidak populisnya. Menurut pandangan ini, seorang pemimpin kadang membutuhkan kebijakan tidak populer demi kepentingan jangka panjang ekonomi bangsanya. Pengurangan subsidi secara teknis ekonomis adalah langkah yang tepat dan dari sisi ekonomi jelas kebijakan Megawati itu dapat dibenarkan.

Persoalan politik yang timbul akibat kebijakan BBM, listrik dan telepon, menurut pandangan tersebut, masih bisa dihadapi. Setiap protes mempunyai daur hidup sendiri. Demonstrasi itu sangat mahal. Siapa yang dapat bertahan berminggu-minggu menyediakan logistik bagi demonstran? Apalagi, para mahasiswa, ibu rumah tangga, dan kaum profesional itu harus meninggalkan pekerjaannya demi berdemo.

Jika Megawati mencabut kebijakannya, hal itu justru terkesan buruk, bahwa kebijakan soal BBM, listrik dan telepon tersebut tidak dipersiapkan secara matang. Mudah sekali sebuah kebijakan dicabut. Muncul kesan Megawati sebagai pemimpin yang lemah, yang mudah ditekan, yang tidak pernah melawan dan mengarahkan kehendak

massa. Dia akan selalu tunduk pada sesuatu yang populer, meskipun belum tentu tepat.

Citra Megawati sebagai pemimpin yang berpendirian sangat kukuh juga akan sirna. Selama ini, sudah terbentuk citra bahwa dia memang lambat membuat keputusan. Namun, sekali keputusannya dibuat, secara konsisten keputusan tersebut dipertahankan. Sekali menteri diangkat, menteri itu tidak akan dia reshuffle. Sekali kebijakan diambil, kebijakan tersebut akan terus dia bela.

Menurut pandangan ini, yang harus dilakukan Megawati bukanlah mengubah kebijakan. Tetapi, sosialisasi kompensasi atas kebijakan tersebut. Pemerintah sudah berniat memberikan kompensasi berupa keringanan pajak bagi pengusaha. Pemerintah juga memberikan kompensasi dalam bantuan pendidikan, kesehatan dan sembako murah bagi kalangan miskin. Public relations atas kebijakan tersebut perlu di-blow up, bukan membatalkan kebijakan BBM, listrik dan telepon.

Pro dan kontra terus bergulir. Jika DPR mendesak pemerintah mencabut kebijakan atas BBM, listrik dan telepon, Megawati akan berada sendiri di tepi jurang. Namun, jika DPR mendukung kebijakan tersebut, dia justru bertambah kuat secara politik. DPR kini sangat menentukan apakah ia ingin menolong atau memojokkan Megawati.

**

Menggoyang Presiden Megawati

"MEREKA-mereka yang hari-hari ini ingin melakukan kekerasan, provokasi dan sebagainya, saya ingin tantang. Berani kah mereka secara adil dan fair untuk tampil di pemilu 2004. Itu namanya jantan." Kalimat itu disampaikan Megawati dalam sebuah pidato politiknya di hadapan 1000 massa pendukungnya, pada acara HUT PDIP di Jakarta.

Tantangan Megawati itu adalah respon paling keras dan paling mutakhir atas gerakan menggoyang Megawati-Hamzah Haz. Pemerintah sudah menunda kenaikan tarif telepon. Harga BBM dan listrik juga sudah disesuaikan pemerintah. Namun aksi protes masyarakat tidak kunjung reda. Mahasiswa tetap turun ke jalan. Tidak hanya berteriak, mereka juga membakar poster Megawati.

Para ibu terus militan dalam demonstrasi. Sementara para petualang politik, yang ditantang Megawati, semakin terkonsolidasi. Kini tuntutan aksi protes sudah bergeser. Tema utama bukan lagi pembatalan sepenuhnya BBM, listrik dan telepon, tetapi sudah

menuju pada tuntutan lengsernya Megawati-Hamzah. Ide Presidium Nasional sebagai lembaga pengganti Megawati-Hamzah semakin didengung-dengungkan.

Secara hukum dan politik, Megawati kini berada dalam posisi yang beruntung. Konstitusi UUD 45 yang sudah diamandemen melindunginya. Sementara kekuatan politik utama juga secara rasional menolak untuk menjatuhkan Megawati sebelum pemilu 2004. Dapat diduga, melalui waktu, aksi protes ini akan padam dengan sendirinya karena kehabisan energi dan dukungan.

Menurut UUD 45 yang sudah diamandemen, seorang presiden mungkin saja membuat sebuah kebijakan yang buruk, tidak hanya buat karir politiknya, tetapi mungkin buat rakyatnya. Tetapi kebijakan itu sah diambil sebagai pilihan politik yang memang menjadi wewenang seorang presiden. Seburuk apapun kebijakan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menurunkan presiden di tengah jalan.

Konstitusi yang sudah diamandemen memberi syarat bahwa presiden hanya dapat dijatuhkan jika melanggar hukum. Mengikuti tradisi impeachment di Amerika Serikat, ada empat pelanggaran hukum yang dapat menjatuhkan presiden: treason, bribery, other high crimes dan misdemeanor. Dalam bahasa Indonesia, pelanggaran itu adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, kriminalitas tingkat tinggi, dan perbuatan tercela.

Sebuah kebijakan politik, seperti kenaikan BBM, listrik dan telepon tidak termasuk ke dalam empat kategori itu.

Keuntungan lain dari amandemen UUD 45 bagi Megawati adalah terbaginya kekuasaan MPR. Saat ini MPR tidak dapat lagi sendirian memecat presiden. MPR hasil amandemen sudah menggariskan bahwa MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Sudah diperkenalkan lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah ini yang ikut berwenang menentukan apakah presiden layak untuk dipecat. Jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan unsur pelanggaran hukum, maka MPR tidak diperkenankan memecat presiden.

Nasib Megawati berbeda dengan Gus Dur. Ketika menjadi presiden, Gus Dur masih dalam kontrol UUD 45 yang lama, yang belum diamandemen. Saat itu wewenang memecat presiden sepenuhnya berada dalam wewenang MPR (dan DPR. Tidak perlu ada verifikasi melanggar hukum dari lembaga seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Jika Megawati bersikeras dengan kebijakannya dan tidak hendak mengundurkan diri, tidak ada yang dapat dilakukan kekuatan politik lain. Jangankan para demonstran di jalan, MPR pun tidak bisa memecatnya. UUD 45 yang sudah diamandemen membuat nasib kepresidenan Megawati aman sampai pemilu 2004, sejauh Megawati tidak melakukan pelanggaran hukum.

Di samping dilindungi konstitusi, posisi Presiden Megawati juga dilindungi oleh kekuatan politik utama. Di era demokrasi, elite utama yang bertarung dalam kekuasaan adalah pemimpin partai besar. Hanya melalui kendaraan partai politik, politisi dapat menjadi penguasa baru.

Pemimpin partai besar berkepentingan agar Megawati tidak jatuh sebelum pemilu 2004. Mereka mempertahankan Megawati bukan karena mereka cinta Megawati, tetapi justru karena mereka melindungi kepentingan politik dan ambisi mereka sendiri. Tentu mereka punya ambisi untuk menjadi presiden dan menggantikan Megawati. Namun mekanisme yang paling aman, elegan, dan memperoleh legitimasi internasional adalah pemilu 2004.

Paling jauh yang akan ditempuh elite partai saat ini hanyalah membusukkan citra Megawati. Mereka berkepentingan agar

kemarahan atas Megawati terus membara dan memuncak sampai tahun 2004. Klimaksnya, publik tidak lagi memilih Megawati menjadi presiden setelah 2004. Skenario ini hanya dapat berjalan jika Megawati tetap di singgasana kepresidenan sampai pemilu 2004.

Hanya segelintir elite politik yang berharap Megawati dan Hamzah Haz jatuh secara serentak sebelum pemilu 2004, atau bahkan di tahun 2003. Mereka menyimpan ambisi untuk menggantikan Megawati melalui apa yang disebut Presidium Nasional atau Dewan Presidium.

Segelintir elite ini datang dari kalangan yang beragam. Sebagian mungkin tidak lagi mempercayai pemilu. Berarti mereka juga tidak mempercayai demokrasi. Mustahil demokrasi dapat tegak tanpa penghormatan kepada pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan.

Sebagian dari mereka mungkin hanyalah politisi kelas dua. Mereka takut kalah dalam pemilu, dan umumnya mereka memang bukan tokoh yang populer. Mereka mungkin pernah punya partai namun tidak dapat suara dalam pemilu 1999. Mungkin mereka sudah dapat mengukur kekuatannya sendiri dan bakal menjadi pecundang jika ikut bertarung dalam pemilu 2004.

Akibatnya jalan pintas menjatuhkan presiden menjadi pilihan politik yang rasional bagi mereka. Mereka tidak peduli dengan tradisi bahwa presiden hanya boleh diganti melalui pemilu, kecuali jika presiden itu melanggar hukum tingkat tinggi. **

Akhir Politik Gus Dur?

APAKAH ini merupakan pertanda bahwa karir politik Gus Dur di pentas nasional segera berakhir? Demikianlah spekulasi yang berkembang di kalangan elite yang mengikuti perkembangan di Mukernas PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Organ NU secara aklamasi tidak mencalonkan Gus Dur sebagai presiden untuk dinobatkan PKB. Sebaliknya, mereka justru mencalonkan ketua umum NU sendiri, Hasyim Muzadi.

Kita teringat, tiga tahun silam, sosok Gus Dur sangat dominan tidak hanya di PKB, tetapi juga di NU. Selain pernah menjabat ketua umum NU, dia dikenal "berdarah biru." Banyak kiai berpengaruh, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang pernah menjadi murid setia ayah dan kakeknya.

Popularitas Gus Dur di kalangan publik membuatnya tidak hanya menjadi kebanggaan NU, tetapi sekaligus sebagai jimatnya. Bahkan, banyak yang percaya bahwa dia memiliki level spiritualitas setingkat wali. Di dadanya konon bersemayam seratus malaikat. Aneka nuansa

kultural ini semakin melegitimasi dia sebagai sosok yang tidak terlawan di NU, apalagi di PKB.

Ketika ditinggalkan kawan-kawan politiknya, Gus Dur memang jatuh sebagai presiden. Namun baik PKB maupun NU masih sangat kuat berdiri di belakangnya. Sampai saat ini, PKB masih loyal kepada Gus Dur. Para pemimpin terasnya, kecuali beberapa masih secara terbuka ingin agar dia menjadi calon presiden PKB. Namun, mengapa NU mulai meninggalkan dia? Apakah peran Gus Dur selaku politikus segera berakhir karena tidak lagi didukung oleh segmen politiknya di NU?

Tersedia aneka alasan untuk menjelaskan fenomena NU yang hanya mencalonkan Hasyim sebagai presiden. Alasan yang ada sudah mencampur baur, mulai alasan yang netral akademis, spekulasi, well-informed, sampai subyektivitas dalam rangka politisasi.

Tidak dicalonkannya Gus Dur oleh organ NU di satu sisi dianggap hanya merupakan manuver politik biasa. Manuver itu tidak berhubungan dengan turun atau tidaknya pamor politik Gus Dur di kalangan NU. Manuver tersebut dibuat semata-mata untuk merespons kemungkinan langkah lawan politik.

Kendala undang-undang atau konstitusi juga dijadikan alasan. Konstitusi menyatakan bahwa presiden dan wapres harus mampu secara rohani serta jasmani melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Namun. Definisi mampu secara rohani dan jasmani tersebut tidak jelas. Semua pakar hukum tata negara bisa berbeda pendapat, apakah kondisi Gus Dur saat ini bisa dikategorikan tidak mampu secara jasmani?

Karena ketidakjelasan tersebut, diharapkan UU Pemilihan Presiden (Pilpres) bisa mendetailkannya. Pada level UU itu, pihak NU dan PKB harus memasang kuda-kuda. Sangat mungkin UU akan mengatur secara detail dan tegas sehingga Gus Dur didiskualifikasi.

Misalnya, UU mengatur bahwa calon harus bisa membaca agar dapat mengecek sendiri dokumen yang dia tanda tangani.

Karena PKB berposisi hanya sebagai partai kecil di parlemen, koalisi partai untuk bersepakat tentang syarat fisik tersebut sangat mudah dilakukan. Bahkan pesaing Gus Dur di NU atau PKB juga bisa meminta partai lain untuk menyingkirkannya melalui UU Pilpres. Untuk secara frontal menafikan Gus Dur, mungkin mereka takut atau merasa kalah populer. Toh, ada jalan belakang. Gus Dur bisa dihalangi melalui kesepakatan di UU bahwa hanya yang bisa membaca yang dapat menjadi calon.

Menghadapi kemungkinan tersebut, wajar jika NU juga membuat manuver. NU sebagai lembaga yang berwibawa serta bertanggung jawab harus membuat respons yang tepat dengan menambah pilihan bagi PKB. Jika Gus Dur memang terhalang UU, toh sudah ada Hasyim.

Kemungkinan lain, NU juga menghitung kekuatan PKB. Sangat mungkin kenyataan politik menunjukkan bahwa suara PKB di DPR sama dengan pada 1999, atau bahkan lebih sedikit. Sebagai partai kecil tidak realistis jika PKB dengan calon presiden. Daripada bersaing dengan capres lain dan kalah, lebih baik menjadi Wapres partai lain dan menang.

Jika Wapres yang akan diincar PKB, jelas Gus Dur bukan orangnya. Sulit membayangkan dia bersedia menjadi wakil presiden bagi tokoh dari partai lain. Itu juga berarti bahwa dia turun pangkat. Mantan presiden kok mau menjadi wakil presiden. Berbeda dengan Hasyim. Walau awalnya beliau dicalonkan sebagai presiden, jika situasi politik tidak memungkinkan, deal politik baru bisa segera dibuat.

Pengusungan Hasyim sekali lagi tidak berhubungan dengan naik atau turunnya pamor politik Gus Dur. Itu dilakukan semata-mata untuk merespons dinamika politik yang mungkin terjadi. NU dan

PKB juga harus bersiap dengan skenario orang nomor dua, karena Gus Dur hanya untuk nomor satu.

Kemungkinan lain, pamor politik Gus Dur di kalangan NU, bahkan di PKB sendiri, memang telah merosot. Ibarat matahari, dia sudah melewati siklus puncaknya ketika menjadi presiden. Kini dia berada dalam proses menuju sunset, matahari yang tenggelam. NU dan PKB terlalu besar untuk dikorbankan tenggelam bersama Gus Dur.

Banyak hal yang membuat dia tenggelam. Di luar PKB dan NU, hampir tidak ada lagi pihak yang menganggap dia sebagai bapak bangsa. Aneka wibawa dan kelebihan yang beliau miliki hancur lebur setelah menjadi presiden. Kawan dan partner politik yang membantu dengan mudah sekali dia khianati dan jatuhkan dari kementerian. Citra dia sebagai tokoh yang bersih dan sederhana juga pupus akibat merebaknya gosip money politics dalam pemerintahannya.

Aktivis demokrasi dan HAM serta rekan-rekan pers pengagumnya juga meninggalkan Gus Dur ketika dia terlalu berani membekukan MPR/DPR yang dipilih secara demokratis. Padahal yang dipilih rakyat saat itu adalah anggota DPR/MPR. Presiden saat itu tidak dipilih langsung oleh rakyat. Politik juga gonjang-ganjing karena kegemaran Gus Dur membuat pernyataan kontroversial.

Namun semua pemaparan tersebut tentu merupakan spekulasi teoretis mereka yang berada di luar NU dan PKB. Yang sebenarnya terjadi mungkin bisa jauh lebih kabur dan multidimensi. Selamat Mukernas buat PKB! **

Kembalinya Akbar Tandjung?

HARI ini, Kamis, 29 Januari 2004, menurut Bagir Manan, para Hakim Agung akan bermusyawarah. Mereka akan menentukan vonis atau kasasi Akbar Tandjung. Kelima Hakim Agung itu dikabarkan sudah membaca perkara Akbar dan masing-masing sudah membuat kesimpulan. Namun, musyawarah mungkin dapat mengubah kesimpulan yang merah menjadi putih atau putih menjadi merah.

Ini mungkin peristiwa politik awal 2004 yang paling besar. Para Hakim Agung memang hanya memutuskan Akbar Tandjung bersalah atau bebas. Namun, efek politik putusan Mahkamah Agung itu sungguh berbeda bukan hanya bagi Golkar, tetapi bagi politik Indonesia pasca pemilu 2004. Apakah pentas politik nasional kelak masih akan bersama Akbar Tandjung sebagai salah satu tokohnya, atau Akbar Tandjung sudah tenggelam, itu sangat bergantung pada isi putusan Mahkamah Agung.

Mampukah Akbar Tandjung menjadi the comeback kid untuk politik Indonesia? The comeback kid ini istilah yang diperuntukkan

bagi Bill Clinton, presiden Amerika Serikat. Kuatnya stamina dan kelihaihan Clinton dalam berpolitik membuat lawan politiknya selalu gagal mengalahkannya. Sebaliknya, dia terus mampu bertahan dan bahkan tampil sebagai pemenang.

Diukur dari pertimbangan murni politik, memang tidak banyak politisi yang punya stamina dan leadership seperti Akbar. Dia memimpin Golkar di era yang paling sulit. Ketika reformasi sedang marak-maraknya, Golkar menjadi salah satu lembaga yang paling banyak dihujat. Selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, Golkar dianggap ikut berjasa menopang kekuasaannya. Ketika Soeharto turun, publik ingin menurunkan Golkar.

Beberapa kali Golkar diminta publik luas untuk dibubarkan. Sekali waktu, partai ini sungguh-sungguh dibawa ke pengadilan untuk diproses secara hukum agar dapat dibubarkan. Bahkan, Presiden Gus Dur sempat pula membubarkan Partai Golkar melalui dekritnya yang kesohor. Namun, Golkar tidak kunjung padam, bahkan kini bertambah populer.

Puncak kemarahan terhadap Golkar dan Akbar Tandjung adalah skandal Bulog 2. Jika skandal Bulog 1 sudah menjatuhkan Gus Dur dari presiden, skandal Bulog 2 sudah disetel pula untuk menjatuhkan Akbar. Seandainya saat itu yang memimpin Golkar dan DPR bukan Akbar, niscaya tokoh itu sudah lama terjungkal – bukan hanya dari kursi ketua umum Golkar, tetapi juga dari kursi ketua DPR.

Apa yang membuat Akbar begitu kukuh, setidaknya bagi komunitas dan pimpinan Golkar? Setidaknya, ada tiga variabel. Pertama, ada rasa sungkan dan hormat di kalangan Golkar terhadap Akbar. Dalam skandal Bulog 2 itu, mereka meyakini Akbar sudah menyelamatkan partai. Penyelamatan dia lakukan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Akbar sudah pasang badan dan berjasa bagi partai lebih dari pada tokoh lainnya saat ini.

Seandainya Akbar ingin mengorbankan partai, itu mudah saja baginya. Namun, dia tertib dengan skenario yang aman bagi Golkar. Untuk itu, dia rela menjadi tumbal. Bukan hanya dana, keringat dan waktu yang dia berikan untuk membela partainya dalam kasus ini. Namun, citra dan penderitaan keluarganya ikut pula dia tanggung.

Kedua, berbeda dengan pemimpin teras Golkar lainnya, Akbar paling sering pergi ke daerah. Dia melakukan turba (turun ke bawah), menjumpai kader dan anggotanya di aneka wilayah. Kantor dan rumahnya juga terbuka untuk didatangi aneka simpatisan dan tokoh Golkar. Waktu, tenaga, dan pikiran dia sediakan untuk silaturahmi yang merakyat itu.

Tidak heran, kegiatan turba itu membuat Akbar semakin dikenal dan mengakar di kalangan DPD. Ikatan emosional atau komando struktural kepemimpinan terhadap Akbar semakin erat. Apalagi untuk kultur politik Indonesia yang masih didominasi hubungan pribadi dan kultur informal, silaturahmi Akbar itu sangat efektif. Dia pun mampu mengonsolidasi dukungan internal di tingkat pusat.

Ketiga, Akbar juga termasuk pimpinan yang berpengalaman dalam kehidupan organisasi. Dia mungkin tidak secerdas Nurcholis Majid secara intelektual. Namun, jelas dia lebih cerdas dari pada umumnya politisi dan pemimpin sekarang ini untuk urusan sosial. Kecerdasan sosial itu yang menjadi modal Akbar dalam membina jaringan dan memperluas basis pendukung.

Tidak banyak pemimpin yang berpengalaman di dunia pemerintahan seperti Akbar. Pemimpin partai politik lain masih terhitung baru dalam dunia birokrasi. Baik Megawati, Amien Rais, Gus Dur, ataupun Hamzah Haz belum lama menjadi pejabat. Tetapi Akbar sudah malang melintang di dunia itu sejak era Orde Baru. Dia merayap mulai dari ketua KNPI, menteri, sampai akhirnya kini menjadi ketua DPR.

Pengalaman birokrasi itu tentu hal yang sangat mahal. Aneka kiat, trik, intrik, konspirasi, ataupun negosiasi, kompromi dan publikasi

sudah sangat dia kuasai. Pengalaman birokratis itu bahkan menjadi keuntungan komparatifnya yang paling menonjol dibandingkan pemimpin partai lainnya.

Akankah Akbar benar-benar menjadi the comeback kid dalam politik Indonesia? Setelah Pemilu 2004, akan kah dia menjadi presiden Indonesia, atau wakil presiden, atau the king maker yang menentukan siapa presiden terpilih? Tentu prediksi ke arah itu masih sulit dibuat. Dalam politik, apalagi politik Indonesia, situasi politik berjungkir balik karena sebuah peristiwa atau kasus, yang tidak pernah diduga, yang hanya berlangsung satu hari.

Yang jelas, putusan MA mengenai kasusnya akan menjadi penentu utama. Jika MA memutuskan Akbar bersalah, apalagi minta Akbar untuk langsung dieksekusi, karir politiknya akan redup. Dia akan menjadi matahari yang sedang memasuki senja. Namun jika MA membebaskannya karena alasan yang masuk akal, Akbar segera menjadi the comeback kid.

Dengan putusan bebas MA, misalnya, dia segera merebut kursi konvensi Golkar. Akbar pun bebas memilih, menjadi calon presiden atau wakil presiden bagi calon lain yang lebih populer. Inilah masa kritis bagi dia. Masa depan karir politiknya ternyata bukan di tangan rakyat banyak, tetapi ketuk palu Mahkamah Agung. **

SBY Dikucilkan dari Kabinet?

MEDIA massa cukup heboh memberitakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang “dikucilkan” dari kabinet. Bagi media massa, ini isu yang seksi, apalagi menjelang pemilu. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana pula cara mengatasi masalah itu?

Sejak reformasi, pemerintahan yang terbentuk disebut kabinet pelangi. Presiden dari partai tertentu berada di pucuk pemerintahan. Yang menjadi wapres dan menterinya datang dari tokoh aneka partai. Banyaknya partai yang ikut dalam gerbong kabinet tersebut membuat pemerintahan eksekutif menjadi berwarna-warni seperti pelangi. Di dunia barat sana, pemerintahan atau perkumpulan politik dengan segmen parpol yang beragam sering juga disebut rainbow coalition.

Awalnya, kabinet pelangi memang diterima sebagai kenyataan politik yang tidak terhindari. Saat itu, presiden diangkat oleh MPR. Tidak ada satu pun partai yang memperoleh suara mayoritas. Untuk menjatuhkan atau mengangkat presiden karena dukungan banyak

partai. Gus Dur naik menjadi presiden karena dukungan banyak partai. Dia jatuh juga karena dilawan banyak partai. Hal yang sama terjadi dengan Megawati.

Karena banyak partai yang berjasa dan untuk menjaga dukungan mayoritas parlemen, kabinet Megawati “terpaksa” mengulangi warna kabinet Gus Dur yang berpelangi. PDIP ada di puncak kekuasaan, wakilnya dari PPP. Di kementerian ada pula tokoh Golkar, PAN, PKB (versi Matori), PBB dan beberapa purnawirawan.

Konsep kabinet pelangi itu tampak cantik pada mulanya. Namun, segera dapat diduga, di ujung pemerintahan, terutama menghadapi pemilu berikutnya, muncul komplikasi. Penyebabnya sederhana, banyak menteri yang potensial, terutama bukan dari partai presiden, juga akan menjadi calon presiden. Inilah konstruksi unik kabinet pelangi. Menteri dapat menjadi bawahan presiden sekaligus calon kompetitor untuk pemilu berikutnya.

Situasi ini baru pertama kali dialami dalam sejarah Indonesia. Belum ada rujukan dan preseden mengenai apa yang akan dilakukan. Jika secara resmi sang menteri sudah mencalonkan diri, tentu saja aturan utamanya jelas. Sang menteri harus mundur dari kabinet. Tetapi, bagaimana jika sang menteri masih belum memutuskan untuk maju sebagai capres? Atau masih ragu-ragu? Atau masih wait and see?

Sang menteri dalam konteks ini bisa siapa saja. bahkan, kasus ini dapat pula terulang pada 2009, 2014, selama corak kabinetnya masih kabinet pelangi.

Berdasar segi aturan ketatanegaraan formal, tidak ada masalah yang problematis. Menurut konstitusi, presiden memiliki hak prerogatif. Dengan hak itu, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan kabinet. Bahkan untuk

tindakannya itu, presiden tidak perlu meminta persetujuan parlemen, wakil presiden, atau menteri yang bersangkutan.

Berdasarkan hak sama, presiden dapat menambah kekuasaan dan tugas bagi menterinya. Atau sebaliknya, karena pertimbangan khusus, presiden juga dapat mengurangi kewenangan menterinya. Sesuai dengan prinsip konstitusi, pada akhir masa jabatannya, presiden akan mempertanggungjawabkan semua kebijakannya kepada MPR atau kepada rakyat langsung.

Menurut kaca mata sang menteri, hak dan kewajiban juga sudah jelas. Selama dia menjadi menteri, selama itu pula secara etika dia harus loyal kepada presiden selaku atasannya. Namun menteri tersebut tentu juga mempunyai hak untuk mengembangkan karirnya. Menjadi calon presiden adalah hak dan sekaligus tantangan. Dalam berbagai macam pernyataan publik, SBY sadar akan komplikasi itu. Berulang-ulang, dia mengucapkan bahwa dia akan ikut aturan dan memegang teguh prinsip. Sekali dia mencalonkan diri secara formal sebagai presiden, tanpa diminta dia akan mundur dari kabinet.

Semua itu normal dan wajar saja. situasi menjadi agak panas karena persoalan tersebut digoreng media massa. Tentunya, media massa memiliki kepentingan memberitakan kasus tersebut untuk publik. Dari segi sensai, kasus itu juga dapat dianggap hot issue. Berita media massa justru membuat situasi agak pelik. Persoalannya, yang tersisa kemudian bukan lagi persoalan legal formal atau prinsip manajemen dalam birokrasi. Yang kemudian berkembang adalah persoalan psikologis dan komunikasi pihak SBY dan presiden yang terganggu.

Komplikasi kabinet pelangi itu sebenarnya dapat diminimalkan jika terbina hubungan komunikasi yang baik. Inisiatif dapat datang dari siapa saja. presiden dapat mengambil inisiatif. Atau SBY sendiri yang mengambil langkah recovery?

Jika presiden bertemu SBY empat mata, atau juga ditemani pihak lain, masalah itu akan selesai. SBY dapat menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Dia dapat berterus terang akan maju sebagai calon presiden atau wakil presiden setelah pemilu legislatif. Awal April atau awal Mei, misalnya, dia secara resmi akan mundur. Namun, sebelum mundur, dia akan bekerja seperti biasa, loyal, dan menyelesaikan tugas yang memang berada dalam kewenangannya.

Sebaliknya, Megawati dapat pula menjelaskan alasan kebijakannya. Dia dapat mengatakan, demi kelanjutan dan kesinambungan program pemilu, dia hanya ingin melibatkan para menteri yang apolitis untuk program pemilu. Tidak ada masalah pribadi di sana. Semuanya dibuat berdasarkan kalkulasi rasional sesuai dengan prinsip birokrasi modern. Tentu lebih baik jika kenyataan itu dijelaskan jauh hari sebelum tugas itu diberikan kepada Bambang Kesowo dan Hendropriyono.

Melalui pertemuan itu, Megawati dan SBY tidak hanya menyelesaikan persoalan komunikasi antara mereka berdua. Yang jauh lebih penting, mereka membuat sebuah preseden bagi kasus selanjutnya. Pastinya, itu akan terjadi lagi dalam kabinet pelangi, baik pada 2009 atau 2014.

Masalah yang akan dihadapi bangsa Indonesia sudah begitu banyak. Komunikasi yang terjaga dan terbina antar tokoh politik mungkin tidak menyelesaikan semua masalah yang ada. Tetapi, setidaknya, komunikasi yang baik itu tidak akan menambah masalah baru. **

**BAGIAN KELIMA
MENYOROTI KONFLIK DAN
TERORISME**

Darurat Militer di Ambon?

Setelah gerakan reformasi, Ambon mungkin menjadi wilayah yang paling merana. Di saat wilayah lain menikmati kebebasan politik dan eforia reformasi, Ambon justru bersimbah darah dan air mata. Tidak lama setelah gerakan reformasi, aneka tragedi berlangsung di tanah ini. Kini ribuan warga Ambon, termasuk anak-anak yang tidak berdosa, sudah terbunuh.

Konflik horizontal antara komunitas Muslim dan Kristen acapkali terjadi. Tidak terhitung sudah kerugian yang ditimbulkannya. Tidak hanya rumah ibadah, bangunan publik yang dihancurkan, juga tidak hanya ratusan nyawa yang melayang, namun rasa amarah, ketakutan, teror, kesedihan dan putus asa bergabung menjadi satu. Ambon berubah menjadi ladang permusuhan dan konflik agama yang menyedihkan.

Belum selesai konflik horizontal, muncul pula konflik vertikal. Ini konflik antara pemerintahan daerah yang didukung pemerintahan pusat melawan gerakan separatisme. Bendera RMS (Republik Maluku

Selatan) berkibar memperingati ulang tahunnya yang ke 52. Setelah reformasi, di April 2002, bendera kelompok ini masih berkibar di langit Ambon. Konflik vertikal memperparah aura permusuhan dan ancaman di tanah Ambon.

Merenungi darah dan air mata di Ambon, lahir berbagai pertanyaan. Perlu kah diterapkan Darurat Militer di Ambon? Harus kah militer menjadi komando langsung dari tegaknya tertib politik di Ambon? Apa yang menjadi sebab lamanya dan dalamnya konflik yang terjadi di Ambon? Apa solusi yang paling realistis atas aneka tragedi di Ambon?

Sebagaimana yang banyak terjadi di wilayah lain di Indonesia, Ambon menjadi saksi dari apa yang disebut the divided society. Masyarakat Indonesia, termasuk Ambon, tidak hanya plural dari segi agama. Namun kita adalah masyarakat yang terbelah, punya banyak pengalaman panjang dengan konflik primordial.

Selama era Orde Baru, aneka konflik primordial ini tersembunyi. Orde Baru, dengan kontrol yang tersentralistis dan aparat keamanan yang represif, berhasil membuat primordial reda. Orde Baru juga melarang debat publik soal SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan). Namun sesungguhnya, konflik itu tidak benar-benar selesai. Konflik itu tidak hanya hilang di atas permukaan saja.

Ketika Orde Baru tumbang, tumbang pula kekuasaan represifnya. Kontrol aparat keamanan atas masyarakat juga hilang. Akibatnya aneka potensi konflik primordial kembali terbuka. Melalui sebuah picu persoalan atau provokasi, dan mobilisasi permusuhan, potensi konflik itu dapat meletus dan membakar kemarahan massal.

Di berbagai daerah, konflik horizontal primordial berlangsung. Namun di daerah lain, konflik primordial itu cepat selesai. Ambon menjadi kasus khusus. Di samping lama selesai, konflik di Ambon juga diperparah oleh munculnya kembali isu gerakan separatisme RMS. Konflik horizontal atau vertikal bergabung menjadi satu.

Jenis konflik seperti ini hanya mungkin terjadi jika berbagai elit yang berpengaruh di pemerintahan lokal ikut bermain. Potensi konflik yang ada justru dijadikan elit lokal ikut bermain. Potensi konflik yang ada justru dijadikan elit lokal itu sebagai sumber daya untuk saling memperebutkan baik jabatan politik ataupun ekonomi. Berbeda dengan daerah lain, konflik elit lokal di Ambon lebih menonjol dan lebih tajam.

Darurat sipil sudah diberlakukan sejak tahun 2000 oleh Presiden GusDursaat itu. Namun, alih-alih menegakkan tertib sipil, masyarakat justru semakin terjatuh ke dalam rasa takut. Korban pembunuhan masih saja terjadi. Yang menjadi rumit, aparat keamanan dicurigai ikut menjadi partisan. Aparat keamanan bukan saja terpecah untuk ikut dalam konflik komunal itu. Namun aparat keamanan diduga ikut terlibat dalam kegiatan provokasi yang membuat konflik justru semakin parah.

Serangan ke desa Soya, Ambon, akhir April 2002, telah menewaskan sekitar 12 penduduk. Serangan itu dinilai sangat canggih dan dicurigai dilakukan oleh oknum aparat keamanan. Ini jelas tuduhan yang belum tentu benar. Namun seperti banyak diberitakan media massa, opini publik cenderung mempercayainya. Keterlibatan aparat lalu dihubungkan dengan suksesi kepemimpinan lokal di Ambon.

Pemerintah jelas gagal memberikan fungsi utamanya untuk melindungi warga negara. Terbukti sudah sekitar tiga tahun, warga negara tidak terlindungi dari aneka pembunuhan dan rasa takut. Di negara demokrasi yang normal, jika darurat sipil tidak lagi memadai, maka tensi dinaikkan menjadi darurat militer. Komando militer yang mengambil alih kekuasaan di daerah. Gubernur dan Kapolda hanya membantu.

Darurat militer tentu akan lebih mengekang kebebasan sipil demi tegaknya kembali tertib masyarakat secara cepat. Pengekangan

kebebasan ini memang lazim bahkan di negara demokrasi matang sekalipun. Alasannya karena situasi emergency dan hanya diperlukan secara sementara saja. Setelah selesai era bahaya, situasi berangsur dikembalikan ke kondisi normal berikut dengan kebebasan politiknya.

Namun darurat militer membutuhkan aparat keamanan, terutama militer, yang memang profesional. Aparat itu harus tunduk kepada kepentingan publik luas untuk menegakkan kembali tertib hukum masyarakat. Aparat tidak partisan, tidak memihak secara politik kepada salah satu pihak yang bertikai. Aparat juga tidak menjadi alat politik dari politisi tertentu untuk tujuan jangka pendeknya. Dan aparat juga punya kompetensi teknis untuk melaksanakan tugas.

Sayangnya justru persyaratan itu yang sulit dimiliki aparat keamanan di Ambon. Sebagian masyarakat setempat menolak darurat militer. Dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam konflik Ambon yang hingga saat ini tidak dibuktikan memberi kesulitan bagi darurat militer sebagai sebuah solusi konflik. Inilah salah satu dilema dalam sejumlah konflik di Indonesia: dugaan keterlibatan aparat keamanan. Situasi seperti ini menghilangkan kepercayaan masyarakat di daerah konflik kepada aparat keamanan sebagai penengah pertikaian atau konflik. Inilah satu kenyataan di era reformasi. **

Darurat Militer untuk Aceh?

PADA awal Juli 2002, Menhan Matori Abdul Djalil mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan darurat militer di Aceh. Respon pemerintah yang keras ini berkaitan dengan aneka aksi teror yang dicurigai dilakukan oleh GAM. Aksi teror antara lain pembakaran 26 gedung sekolah madrasah di Aceh, penculikan atlet dan karyawan Exxon Mobil, pembunuhan anggota DPRD lokal dan pemotongan tiang-tiang listrik.

Keinginan pemerintah melindungi warga negara dari aneka aksi teror tentu layak didukung. Namun dalam konteks Aceh, memilih darurat militer atau darurat sipil sebagai solusinya patut dipertanyakan.

Pergolakan di Aceh sudah berlangsung begitu lama. Pada mulanya, sejarah mencatat bahwa Aceh bukan daerah teroris dan tidak pula mempunyai aspirasi untuk merdeka, memisahkan diri dengan Indonesia. Sebaliknya, Aceh justru menjadi pendukung dan modal utama kemerdekaan dan kesatuan Republik Indonesia.

Tiga bulan setelah Indonesia merdeka, di bulan Oktober 1945, bahkan para pemimpin dan masyarakat di Aceh membuat maklumat. Inti dari maklumat itu menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah perang suci. Maklumat juga menyerukan rakyat Aceh untuk mematuhi pemimpin Republik Indonesia demi kepentingan negara, agama, dan bangsa.

Tiga tahun setelah kemerdekaan, di tahun 1948, Aceh bahkan menyumbangkan dua pesawat kepada pemerintah RI pusat. Di tahun 1949, sekali lagi Aceh menyumbangkan dana sebesar 250.000 dolar Amerika Serikat untuk Angkatan Bersenjata RI (cikal bakal TNI). Aceh juga memberi sumbangan 250.000 dolar lainnya untuk digunakan oleh pemerintah pusat RI.

Namun secara perlahan pemimpin Aceh merasa bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Terutama di era Orde Baru, mereka menyaksikan Aceh hanya menjadi sapi perahan. Kekayaan alam Aceh, yang terutama berasal dari minyak, sebagian besar diangkut ke pusat. Sementara rakyat Aceh di tanah penuh minyak itu justru hidup dalam kemiskinan. Apalagi terjadi pula kesenjangan mencolok antara penduduk asli Aceh dengan warga pendatang yang bekerja di aneka ladang minyak.

Aneka kekecewaan rakyat Aceh tidak direspon dengan kebijakan politik dan ekonomi yang lebih adil. Sebaliknya, kekecewaan itu ditumpas dengan pendekatan militer. Sebagian dari mereka menyaksikan betapa terjadi aneka pembantaian terhadap pemimpin dan aktivis yang protes terhadap keadaan. Tokoh karismatik dan ulama yang sangat dicintai juga terbunuh, seperti Tengku Bantaqiah. Kekecewaan kolektif ini yang kemudian menjadi lahan subur bagi aspirasi kemerdekaan Aceh.

Apalagi Gam sudah pula berdiri dengan struktur organisasi yang kokoh, bahkan memiliki kantor sampai di luar negeri. GAM pula yang terus menghidup-hidupkan aspirasi kemerdekaan Aceh dan meyakinkan betapa Aceh akan terus terpuruk di bawah "penindasan" pemerintah pusat, yang mereka sebut "kolonialisme Jawa."

Setidaknya ada tiga elemen yang membuat aspirasi kemerdekaan Aceh terus meluas. Pertama, Aceh adalah wilayah yang sangat kaya minyak. Jika Aceh merdeka diyakini Aceh dapat membuat penduduknya sekaya Brunei Darusalam. Jika merdeka, tidak ada lagi kekayaan yang harus diberikan kepada pemerintah pusat. Kedua, secara etnik dan agama, penduduk Aceh relatif homogen. Kultur Aceh sangat dalam dipengaruhi oleh agama Islam. Mereka pun merasa bebas untuk membentuk Negara Islam jika berpisah dengan Indonesia. Ketiga, luka akibat kekerasan fisik melawan aparat keamanan sudah cukup parah. Luka kolektif itu dengan mudah diprovokasi menjadi perlawanan terhadap pemerintah pusat.

Dengan mengemukakan tinjauan histori di atas, minimal kita teringat akan kompleksitas dan akar ekonomi politik dari ketidakpuasan rakyat Aceh. Namun ini tidak berarti kita harus membiarkan meluasnya aspirasi kemerdekaan Aceh dan bersikap lunak atas aksi teror GAM.

Tentu saja keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh segenap warga yang mencintai negara. Prinsip melindungi teritori sebuah negara adalah pedoman yang juga dibenarkan oleh politik modern yang demokratis. Tidak ada kompromi dan tidak ada toleransi bagi pihak yang ingin memisahkan diri, apalagi pihak separatis yang bersenjata.

Persoalannya, apakah darurat militer atau darurat sipil itu tidak tepat untuk diterapkan di Aceh saat ini? Indonesia tidak kekurangan bukti bahwa kekecewaan yang berakar dari persoalan ekonomi dan politik tidak pernah tuntas dan selesai dengan pendekatan militer. Untuk karakter etnik sekeras Aceh, pendekatan militer justru dapat membangkitkan perlawanan rakyat yang lebih keras lagi, baik yang terbuka ataupun tersembunyi.

DOM (Daerah Operasi Militer) pernah diterapkan di Aceh selama 10 tahun (1989-1999). Sekitar 5000 nyawa sudah melayang.

Akibatnya bukan perlawanan GAM reda. GAM justru bertambah populer. Bahkan Belanda juga pernah menerapkan aksi militer di Aceh di tahun 1873. Sekitar 7000 pejuang Aceh tewas. Namun perlawanan rakyat Aceh tidak berhenti. Perang Aceh diakui Belanda sebagai perang terberat di wilayah Nusantara.

Tidak efektifnya pendekatan militer sudah pula kita saksikan di Timor Timur. Aneka operasi militer pernah diterapkan di Timor Timur. Aspirasi separatisme bukannya menyusut tetapi justru meluas. Melalui referendum kita ketahui, akhirnya mayoritas Timor Timur memilih untuk berpisah dengan Indonesia. Kekecewaan mereka justru bertambah lebar karena pendekatan militeristik dalam memecahkan ketidakpuasan yang akarnya adalah persoalan ekonomi dan politik.

Pemerintah pusat agaknya mesti lebih bersabar dalam menangani kasus Aceh. Pemberian otonomi khusus sudah menjadi solusi yang terbaik. Karena kekhususannya, Aceh sudah mendapatkan hak khusus, seperti penerapan syariat Islam. Sudah pula ada kemajuan dalam distribusi kekayaan alam Aceh yang lebih besar bagi pemerintah daerah Aceh sendiri. Pemda setempat masih perlu diberikan waktu untuk secara efektif menyelesaikan masalah di wilayahnya.

Yang perlu lebih dilakukan adalah memperkuat pemda setempat untuk menyelesaikan persoalan di wilayahnya, dengan memobilisasi dukungan warga setempat, sambil memberikan aksi yang keras hanya kepada pihak separatis bersenjata saja. hanya karena nyamuk yang hinggap di sebuah semak tidak perlu seluruh rawa dibombardir.

**

Poso Kembali Bergolak

KOMISI C dalam Sidang Tahunan MPR 2002 memberikan rekomendasi kepada Presiden RI, agar lebih serius menangani daerah konflik, antara lain Poso. Menko Kesra Jusuf Kalla, baru saja mengunjungi Poso, untuk mengevaluasi kesepakatan damai Malino.

Namun, hanya hitungan hari, kerusuhan Poso kembali terjadi. Diberitakan ratusan rumah dibakar, lima penduduk ditemukan tewas dan lebih dari seribu warga mengungsi. Suasana Poso kembali mencekam dan seperti kota mati. Jika seluruh korban dan kerugian kerusuhan dihitung sejak tiga tahun lalu, berarti sudah lebih dari 580 nyawa yang melayang, lebih dari 8000 rumah yang terbakar. Tercatat pula lebih dari 27 mesjid, 55 gereja dan sebuah pura yang ikut ludes dimakan api.

Apa yang terjadi di Poso? Mengapa untuk kota sekecil itu, keamanan gagal ditegakkan? Hiruk pikuk dalam pertarungan amandemen konstitusi di ST MPR 2002 seolah sama sekali terpisah dari kehidupan mereka yang kian mencekam.

Pemimpin informal dua komunitas agama yang bertikai, dengan caranya sendiri-sendiri sudah mencoba menjalin kerukunan. Gerakan dari akar rumput itu didukung oleh banyak pihak yang bertikai. Pihak keamanan sudah pula mencoba menggandakan tenaga dan fasilitas keamanan. Bantuan personil didatangkan dari pusat. Daerah yang rawan konflik dijaga. Kedamaian dirasakan. Namun tidak lama rasa damai itu berlangsung, kerusuhan kembali terjadi.

Di cari cara lain untuk menegakkan rasa aman. Yang monumental adalah resolusi konflik yang dibawa oleh Jusuf Kalla. Beserta timnya, Jusuf Kalla memperkenalkan metode resolusi konflik yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Malino. Dalam metode ini, pihak yang berkonflik dikumpulkan dalam satu meja secara bertahap. Lalu mereka sendiri merumuskan apa yang menjadi penyebab konflik. Lebih dari itu, mereka bertekad untuk saling memaafkan dan menemukan solusi bersama untuk damai.

Peran pemerintah dibatasi hanya sebagai fasilitator pertemuan sekaligus penyandang dana. Pemerintah berupaya agar pihak yang datang di meja perundingan benar-benar representasi dari komunitas yang bertikai, dari kedua belah pihak. Juga dipastikan bahwa ada tindakan nyata setelah kesepakatan damai dibuat. Misalnya, ada periode untuk penyerahan senjata. Ada masa sosialisasi damai ke masing-masing komunitas. Ada pula kesepakatan untuk menghukum siapa saja yang terbukti melanggar resolusi damai.

Secara konseptual dan di tas kertas, Deklarasi Malino ini cukup sempurna. Diberitakan pula betapa kedua belah pihak yang konflik acapkali saling berpelukan, untuk saling memaafkan dengan berurai airmata. Dua komunitas yang berkonflik tidak jarang kemudian demo bersama untuk menunjukkan telah terjadinya kedamaian. Publik luas memuji resolusi konflik Malino. Jusuf Kalla mendapatkan respek dan penghormatan publik atas inisiatif dan determinasinya.

Namun ternyata Deklarasi Malino pun tidak juga berhasil. Pertumpahan darah kembali terjadi. Pembakaran rumah kembali meluas.

Ada dua penjelasan umum atas terus berkobarnya kerusuhan di Poso. Pertama, sumbu agama sudah terbakar. Penduduk yang sangat dalam tergores secara batin oleh agama ikut pula terbakar. Setiap kali konflik terjadi, komunitas yang terlibat selalu mengikuti garis agama, antara komunitas Kristen melawan komunitas Islam.

Konflik dua komunitas ini tidak saling mengalahkan, namun jelas saling melukai yang semakin hari semakin dalam. Terbakarnya sentimen agama ini bertumpang tindih dengan konflik kekerasan yang ikut menyuburkan dendam kolektif. Sebuah keluarga yang tadinya netral misalnya, menemukan anaknya dicincang di hadapannya sendiri, dengan aneka pekikan agama tertentu secara massal. Peristiwa ini sendiri sudah membuat keluarga itu menjadi pejuang true believer dengan motivasi membalas dendam dan semangat agama pula.

Lingkaran kekerasan dengan sentimen agama ini terus terjadi dan melibatkan korban dalam jumlah yang semakin besar. Semakin besar korban yang terlibat, semakin besar pula pihak yang ingin balas dendam, dan ikut menceburkan diri dalam konflik kolektif.

Begitu dalam pembelahan konflik primordial ini, para tokoh dan aparat yang tadinya diharap menjadi penengah, akhirnya juga ikut menjadi partisan. Tentara atau tokoh agama, atau polisi, misalnya, melihat sendiri betapa handai taulan atau keluarganya ikut dibantai oleh komunitas tertentu. Seketika, tokoh yang bersangkutan tidak lagi peduli dengan atribut formalnya, lalu ikut memperkuat barisan konflik. Maka dikenal ada tentara Kristen dan tentara Islam. Polisi Kristen dan polisi Islam. Begitu hebatnya pembelahan primordial ini sehingga tidak lagi memberikan ruang bagi kelompok penengah.

Namun jika memang agama yang menjadi sumbu konflik, mengapa konflik itu baru dimulai bulan Desember 1998? Bukankah penganut agama yang sama sudah hidup di situ sejak puluhan tahun lalu? Mengapa baru pasca reformasi, konflik horizontal yang komunal itu meluas di Poso?

Tentu ada aktor nasional dan aktor lokal yang ikut memicu konflik komunal ini. Krisis ekonomi yang terjadi sebelum gerakan reformasi tahun 1998 membuat masyarakat seperti rumput kering yang siap dibakar. Sementara absennya pemerintahan yang kuat di daerah membuat kekecewaan massal lebih mudah diekspresikan. Sementara banyak pula aktor politik nasional ataupun lokal yang memanfaatkan situasi untuk pertarungan politik. Perebutan jabatan bupati antara komunitas itu juga terjadi. Cukup dengan satu kasus provokasi bernuansa agama, konflik komunal pun dapat dipicu.

Berlarut-larutnya konflik horizontal ini, tidak bisa tidak, harus dialamatkan pertama kali kepada aparat keamanan. Solidaritas, wibawa, kesiapan, profesionalisasi aparat keamanan ini yang sangat menentukan apakah konflik komunal itu selesai, tersembunyi atau meluas. Bergolaknya kembali Poso adalah cermin lemahnya aparat keamanan. Aparat kita ternyata masih lebih pintar berpolitik seperti diperlihatkan dalam ST MPR 2002, daripada menjalankan tugas pokoknya sebagai penjaga keamanan masyarakat. **

Babak Baru Konflik Aceh

KONFLIK di Aceh potensial memasuki babak baru dengan nuansa persoalan yang baru pula. Hal itu bermula dari pernyataan Menko Polkam tentang Hasan Tiro. Tokoh utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu, menurut Menko Polkam, bukan lagi warga negara Indonesia, tetapi warga negara Swedia. Melalui jalurnya, Menko Polkam memastikan bahwa fakta baru ini bukan bagian dari perang opini publik, tetapi kenyataan yang sebenarnya.

Fakta baru ini niscaya dapat mengurangi legitimasi politik Hasan Tiro secara signifikan di mata publik Aceh atau pun publik luas Indonesia. Sekarang bola sepenuhnya berada di tangan Menko Polkam. Jika fakta baru ini dapat dia kelola dengan baik, GAM akan lebih mudah dilumpuhkan. Penanganan konflik Aceh akan menjadi kisah sukses pemerintahan Megawati sebelum Pemilu 2004.

Sebelum muncul fakta baru mengenai kewarganegaraan Hasan Tiro selaku tokoh utama GAM, perasaan publik yang kritis di Aceh

atau pun di Indonesia pada umumnya bercampur aduk. Tidak mudah pula bagi kita untuk merekomendasikan sebuah kebijakan yang adil bagi semua.

Di satu sisi, kita pahami bahwa gerakan separatisme Aceh bukan gerakan protes biasa. Di alam demokrasi, gerakan protes memang dapat ditoleransi. Namun gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dengan induk negara nasionalnya, bahkan di negara demokrasi sekalipun, tidak dapat ditoleransi. Apalagi jika gerakan itu sudah mulai menggunakan senjata dan kekerasan.

Di Amerika Serikat, misalnya, ada gerakan kultus agama David Koresh pada 1990-an. Gerakan ini bahkan belum dalam tahap memisahkan diri dari negara induk Amerika Serikat. Apa yang dilakukan gerakan ini hanyalah menumpuk senjata untuk menghadapi sergapan polisi negara bagian atau pun federal.

Hanya, dalam konteks penumpukan senjata secara ilegal, markas David Koresh sudah diserbu pemerintah Amerika Serikat dengan menggunakan kekerasan. Markas itu akhirnya terbakar dan David Koresh, bersama aktivis lain, dinyatakan mati terbakar pula. Publik di Amerika Serikat dapat menerima kasus penggerebekan dan penumpasan polisional atau militeristik atas David Koresh.

Lain di Amerika Serikat lain di Aceh. Terhadap gerakan separatisme di Aceh, publik di Indonesia tetap sulit bersikap. Selama ini masih ada persepsi bahwa kasus GAM di Aceh itu hanyalah persoalan internal di antara sesama anak bangsa sendiri akibat kebijakan pemerintah Republik Indonesia pusat yang memang keterlaluan. Sungguhpun kita tidak simpati atas gerakan separatisme, kita terharu atas penderitaan yang mereka alami.

Itulah sebabnya mengapa GAM dapat bertahan lebih dari 25 tahun. Daya tahan GAM hanya mungkin jika memang didukung publiknya sendiri yang secara pekat merasakan ketidakadilan pemerintah yang sama. Melalui perang gerilya, polisi dan tentara

Indonesia sulit memisahkan mana tentara GAM dan mana penduduk yang mendukung GAM.

Tidak heran banyak aparat keamanan yang frustrasi. Akibatnya satu desa di Aceh diluluhlantakkan. Kemarahan penduduk atas pemerintah Pusat semakin tinggi. Sebaliknya simpati atas GAM semakin tinggi pula. Akibatnya publik selalu menolak diterapkannya darurat militer atau darurat sipil yang akan lebih membuat Aceh menderita.

Namun, fakta baru mengenai Hasan Tiro dan GAM dapat mengubah banyak hal. Publik luas yang selama ini hanya menjadi silent majority, yang tidak bersikap atas konflik Aceh, dapat menjadi kelompok anti GAM dan anti Hasan Tiro yang efektif. Persoalan GAM tidak akan lagi dilihat sebagai konflik sesama anak bangsa karena ketidakadilan pemerintah pusat. Karena Hasan Tiro sudah menjadi warga negara asing. GAM akan dilihat sebagai campur tangan asing atas kedaulatan Indonesia.

Kerja selanjutnya dari Menko Polkam dan Pemerintahan Megawati adalah membangun citra baru atas konflik Aceh. Harus terus menerus dikampanyekan bahwa Hasan Tiro bukan warga negara Indonesia lagi. GAM dengan sendirinya menjadi mesin kekuatan asing yang telah menyebabkan ratusan ribu rakyat Aceh menderita. Separatisme di Aceh telah dimasuki unsur asing.

Publik di Indonesia, sebagaimana dengan publik di Amerika Serikat dan di Jerman, dikenal sangat kental warna kebangsaan dan patriotismenya. Sekali publik menangkap adanya kekuatan asing atau warga asing yang secara sengaja ingin ikut mengobok-obok kedaulatan Republik Indonesia, mereka akan menyatukan barisan untuk mendukung pemerintah Republik Indonesia menghadapi serangan itu.

Dua gerakan dapat dikoordinasi Menko Polkam sekaligus. Pertama, memunculkan sentimen anti GAM dan anti Hasan Tiro di kalangan rakyat Aceh sendiri. Para tokoh informal Aceh, mulai ulama, para cerdik cendikia, pengusaha, hingga LSM Aceh, terus menerus diajak terlibat mengatasi GAM. Ibarat ikan, GAM akan kehilangan air tempatnya hidup. Kewarganegaraan Hasan Tiro selaku warga asing punya potensi untuk menimbulkan antipati publik Aceh atasnya.

Kedua, Menko Polkam harus pula menyiapkan tindakan kepolisian dan militer yang keras dan cepat untuk menghentikan sayap militer GAM. Aparat keamanan Indonesia yang ditugaskan di Aceh harus menjadi mesin aksi polisional atau militeristik yang profesional dengan sasaran yang terpilih, terukur dan mematikan. Dengan begitu, serangan bersenjata atas sayap militer GAM dapat berlangsung secepat mungkin dengan korban sesedikit mungkin.

Namun, di sisi lain, pemerintah harus juga menawarkan amnesti atau pengampunan massal kepada anggota GAM yang ingin kembali ke pangkuan Indonesia. Hal yang sama dilakukan pemerintah Republik Indonesia ketika menghadapi PRRI pada 1950-an. Tawaran amnesti itu dapat menjadi pancing bagi aktivis GAM yang ragu-ragu dan masih cinta kepada NKRI.

Jika kasus Aceh ini dapat diatasi, niscaya Menko Polkam beserta jajarannya dan pemerintah Megawati sendiri akan mempunyai kisah sukses. Di bawah administrasinya, GAM yang sudah berakar 25 tahun dapat dicabut dari tanah dan hati publik Aceh. Selesai atau tidaknya kasus Aceh, niscaya penting bukan saja untuk publik Aceh dan Indonesia, tetapi karir politik Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya dalam menghadapi pemilihan presiden langsung pada 2009. **

Setahun Tragedi 11 September

SETAHUN sudah tragedi 11 September yang meluluhlantakkan gedung WTC dan Pentagon serta merenggut lebih dari 4000 nyawa. Efek dari peristiwa itu masih terus terasa dan memberikan komplikasi bukan hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga Indonesia.

Di Amerika Serikat, tragedi itu dikenang secara istimewa. Kongres Amerika Serikat bahkan bersidang khusus untuk memperingatinya. Amerika Serikat sedang menyiapkan serangan baru pula ke Irak. Resiko jatuhnya korban warga negara Amerika Serikat dalam jumlah massal jika ada serangan baru dianggap sebagai kemewahan. Apa boleh buat, Irak kini menanggung beban sebagai calon korban berikutnya dari serangan militer Amerika Serikat –setelah Afganistan—sebagai akibat peristiwa 11 September.

Sementara itu, di Indonesia, setahun tragedi 11 September membuat posisi negeri ini semakin tidak mudah. Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta menutup kantornya pada hari itu. Sedangkan dalam peredaran internasional, sudah pula terbentuk citra bahwa Indonesia menjadi surga dan sarang terorisme internasional.

Setahun setelah tragedi 11 September berlalu, peristiwa tersebut semakin tampil sebagai pedang bermata dua. Satu mata mempunyai efek yang positif bagi Amerika Serikat, dunia dan Indonesia. Sedangkan mata lainnya justru berdampak negatif. Bagaimana kah sebaiknya Indonesia merespons tragedi itu?

Efek positif tragedi 11 September terjadi jika yang terbentuk kemudian adalah perang global melawan terorisme dan politik kekerasan yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat sendiri. Sebagai negara adikuasa satu-satunya di dunia sekarang ini, Amerika Serikat akan menggunakan seluruh sumber dayanya untuk sukses memimpin perang global terhadap terorisme. Sumber daya itu bukan hanya yang bersifat militer, tetapi juga ekonomi, diplomasi dan politik.

Politik kekerasan dan teror bukan hanya menjadi musuh Amerika Serikat, tetapi juga musuh bersama pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia. Berbagai kekuatan politik, baik yang sekuler maupun yang berbasis agama tertentu, acapkali menjadi terorisme sebagai alat mencapai tujuan. Mereka mungkin sedemikian terasing dari prosedur untuk mempengaruhi kebijakan secara demokratis melalui parlemen atau pemilu yang damai. Lewat politik kekerasan itu, mereka berbicara dalam menyampaikan pesannya.

Indonesia sendiri mengalami aneka aksi teror, mulai Aceh sampai Papua. Jakarta selaku ibu kota negara juga tidak aman dari aksi teror. Aneka bom meledak, bukan hanya di pusat perbelanjaan tetapi juga di tempat ibadah dan perumahan. Tidak pernah terungkap secara pasti apakah aksi ini teror individual atau adakah jaringan yang luas di balik aksi teror yang seolah sporadis itu. Namun, sangat nyata, perang global melawan terorisme yang dipimpin Amerika Serikat memberikan energi ekstra kepada Indonesia sendiri untuk mengatasi terorisme domestik.

Setelah 11 September, Amerika Serikat sangat berkepentingan agar perang global melawan terorisme menjadi wacana internasional. Sejak jatuhnya komunisme pada 1990-an, kebijakan luar negeri Amerika Serikat kehilangan fokus. Tidak ada target dan misi yang jelas atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tragedi 11 September memberikan arah baru politik luar negeri kepada Amerika Serikat. Posisi terorisme di abad ke-21 akan sama dengan komunisme pasca-Perang Dunia II. Terorisme akan dijadikan musuh bersama, di mana Amerika Serikat bersedia memberikan bantuan dana sampai militer agar terorisme ini dapat dikalahkan sebagaimana komunisme dikalahkan di ujung abad ke-21.

Amerika Serikat akan all out menjadi the true believer bagi perang "suci" ini. Tragedi 11 September adalah peristiwa yang mengguncangkan pusat syaraf kolektif publik Amerika Serikat. Memang korban yang jatuh dari pihak Amerika Serikat pada Perang Dunia II, perang Vietnam dan perang Korea jauh lebih banyak. Namun, korban warga negara Amerika Serikat itu jatuh di negara orang. Sedangkan pada peristiwa 11 September, korban warga negara Amerika Serikat tersebut jatuh di negaranya sendiri.

Gedung WTC yang luluh lantak itu tidak lain dan tidak bukan adalah simbol keperkasaan kapitalisme Amerika Serikat. Sedangkan gedung Pentagon yang ikut hancur adalah simbol keperkasaan militer Amerika Serikat. Simbol itu telah dijadikan abu justru di kandangnya sendiri. Yang menghancurkan bukan pula negara adikuasa dengan peralatan nuklir super modern. Namun, yang menghancurkan itu hanyalah kelompok swasta dengan peralatannya sendiri. Kombinasi itu semakin memberikan energi kepada Amerika Serikat untuk memimpin perang "suci" melawan terorisme. Dunia, termasuk Indonesia, niscaya diuntungkan.

Namun, Amerika Serikat bukanlah satu-satunya pemain handal di lapangan internasional. Banyak juga kekuatan lain yang bermain

yang dengan sengaja ataupun tidak mendistorsikan arti penting tragedi 11 September. Pada titik ini, relevan kita berbicara soal sisi negatif akibat tragedi 11 September itu.

Pihak lain memberikan interpretasi terjadinya "the clash of civilizations" antara peradaban Kristen yang dipimpin Amerika Serikat melawan kekuatan Islam yang telah bangkit. Tragedi 11 September dianggap hanyalah picu yang ditanggung Amerika Serikat untuk menghancurkan dunia Islam. Pihak ini menginterpretasikan, setelah Afganistan direbut, giliran berikutnya adalah Irak, Iran dan dunia Arab lain. Dominasi Kristen internasional kembali ditegakkan.

Lebih jauh dari itu, tragedi 11 September bahkan dianggap diciptakan secara terselubung oleh faksi militer garis keras Amerika Serikat sendiri, yang bekerja sama dengan kepentingan Israel. Melalui tragedi 11 September, militer dan berkepentingan Israel memiliki alasan untuk menguasai dan menyerang dunia Islam. Israel berkepentingan dengan skenario tersebut, terutama untuk tetap menguasai Palestina.

Interpretasi jenis ini jelas sangat merugikan, bukan hanya Amerika Serikat, tetapi juga dunia dan Indonesia sendiri. Amerika Serikat akan rugi karena akan terus mendapatkan perlawanan dari komunitas Islam garis keras. Dunia akan rugi karena ini memicu konflik global berdasarkan sentimen agama. Sedangkan Indonesia juga rugi karena Indonesia butuh Amerika Serikat di satu sisi, sementara di sisi lain dihuni oleh komunitas Islam garis keras.

Ditutupnya Kantor Kedubes Amerika Serikat di hari setahun tragedi 11 September serta wacana Indonesia sebagai sarang dan surga terorisme internasional adalah efek negatif yang kini menjadi beban pemerintah Indonesia. Agaknya, kita memang harus lebih kreatif merespons tragedi 11 September.

Karena itu, tragedi 11 September harus dihindari dari perspektif the clash of civilizations. Sebaliknya, tragedi itu mesti dikenang

sebagai monumen perang global melawan politik kekerasan, di dunia ataupun di negeri sendiri. **

Al Qaidah di Indonesia?

SUDAH saatnya pemerintah dan DPR merampungkan UU penanggulangan terorisme. Sudah saatnya pula, civil society di Indonesia membuat, katakanlah "Terrorism Watch." Lembaga yang membuat database, mendokumentasi, menganalisis, serta memantau aneka kegiatan terorisme yang beroperasi di Indonesia.

Gumpalan ide ini secara spontan bermunculan setelah membaca berita koran Rabu 25 September 2002. Hampir semua koran penting hari itu memuat jumpa pers Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Di hadapan banyak tokoh Islam, Dubes Amerika Serikat itu memang sudah mengklarifikasi. Menurut dia, pemerintah Amerika Serikat tidak pernah menuduh tokoh Islam atau ormas Islam Indonesia sebagai agen terorisme internasional. Mayoritas komunitas Islam di Indonesia adalah muslim yang moderat.

Tetapi pada saat yang sama, Dubes Amerika Serikat justru mempertegas keberadaan jaringan terorisme internasional di Indonesia. Berdasarkan data CIA, menurut Dubes, jaringan Al

Qaidah memang beroperasi di Indonesia. Jaringan ini bukan saja membahayakan Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara.

Sebelumnya, sudah ramai diberitakan tentang tertangkapnya Al Faruq, warga Kuwait, di Indonesia. Al Faruq bukan saja dituduh menjadi salah satu pemimpin jaringan AL Qaidah untuk Asia Tenggara. Namun yang membuat was-was, Time memberitakan bahwa tokoh ini terlibat dalam dua kali upaya pembunuhan terhadap Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri.

Di kalangan banyak pihak di Indonesia, pembicaraan dan pengumuman Dubes Amerika Serikat itu memberikan perasaan mendua. Lega di satu sisi, namun khawatir di sisi lainnya.

Lega karena dia dapat meredam, atau setidaknya mereduksi, ketegangan yang dirasakan terutama oleh pihak "tertuduh." Walaupun belum dibuktikan bersalah, aneka berita pers sudah mengidentifikasi Abu Bakar Ba'asyir, beserta organisasinya akan dilabel sebagai teroris internasional oleh Amerika Serikat. Sudah lama tokoh ini menjadi incaran dunia internasional.

Tidak kurang dari pimpinan senior Singapura Lee Kwan Yew yang mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi sarang terorisme. Berbagai kekerasan yang terjadi di negara itu, bahkan juga di Malaysia, kemudian dikaitkan dengan Abu Bakar Ba'asyir selaku pemimpin spiritualnya. Tidak tanggung-tanggung, Ba'asyir bahkan dianggap menjadi motor bagi proposal berdirinya negara Islam Raya, meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Al Faruq yang tertangkap itu juga dikaitkan dengan Ba'asyir.

Pengumuman Dubes Amerika Serikat mampu meredakan ketegangan itu. Terlepas apakah pengumuman Dubes Amerika Serikat itu bagian dari diplomasi atau justru manuver khusus, setidaknya, opini publik akan yakin bahwa Abu Bakar Ba'asyir dan jaringan Islam domestiknya bukanlah agen terorisme internasional.

Tokoh ini tentu dapat pula lega bisa lepas dari pengadilan pers secara tidak fair.

Namun, pengumuman Dubes Amerika Serikat itu juga justru menambah kekhawatiran. Kehadiran Al Qaidah di Indonesia justru diperkuat dan dikonfirmasi. Opini publik sudah terlanjur percaya bahwa Al Qaidah adalah jaringan terorisme yang sangat lihai dan menghalalkan kekerasan. Walau belum ada bukti hukum yang kuat, Al Qaidah ini dituduh pemerintah Amerika Serikat meledakkan WTC dan Pentagon.

Peristiwa ini dikenang sejarah sebagai aksi terorisme paling lihai yang menyebabkan terbunuhnya 4.000 warga. Jika Amerika Serikat sebagai negara paling canggih saja dapat diobok-obok, apalagi Indonesia.

Kondisi Indonesia pascareformasi sejak lama dianggap menjadi surga bagi pelarian terorisme internasional. Kebebasan politik yang ada karena reformasi dan kelemahan aparat keamanan sangat mendukung jaringan terorisme internasional untuk meluas di Indonesia.

Di Indonesia, berbeda dengan negara yang otoriter, polisi tidak dapat menangkap orang begitu saja tanpa pendahuluan bukti yang kuat. hak Asasi semakin dihormati. Polisi maupun tentara mulai takut dituduh melanggar hak asasi. Bahkan ancaman yang sudah diumumkan oleh publik untuk menyapu (sweeping) warga Amerika Serikat di Indonesia dibiarkan saja karena ancaman masih dianggap sebagai wacana.

Di sini, orang bebas memakai kaus bertuliskan Osama Bin Laden. Bahkan, di MPR, politisi juga bebas memperjuangkan Piagam Jakarta yang mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya di konstitusi. Kebebasan seperti ini tentu saja bukan hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi terorisme internasional.

Apalagi kondisi aparat keamanan kita kini sangat lemah. Aparat keamanan mengalami demoralisasi akibat terus dihujat sebagai antek Orde Baru yang pernah menindas rakyat. Mereka juga mengalami persoalan dengan koordinasi dan kompetensi teknis.

Konflik horizontal yang tidak kunjung selesai di Ambon dan Poso salah satunya juga disebabkan oleh aparat keamanan. Kasus Aceh yang ingin merdeka sejak 25 tahun lalu juga tidak kunjung tertangani karena salah satunya kelemahan aparat keamanan. Kelengahan dan kelemahan aparat keamanan model seperti ini tentu juga menjadi surga bagi terorisme internasional untuk terus tumbuh dan menguat.

Pengumuman Dubes Amerika Serikat itu dan aneka berita pers internasional sebelumnya, harus menjadi sejenis wake-up call bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jika benar Al Qaidah itu ada di Indonesia, sebelum gerakan ini meluas dan menguat, harus ada tindakan pencegahan dan represi sistematis hal ini dapat dimulai dengan diundangkannya Undang-undang Penanggulangan Terorisme, terutama untuk menjarang pelaku yang punya dimensi internasional (warga asing) dan mencegah aksi terorisme itu sendiri.

Pemerintah harus pula membentuk satuan keamanan khusus yang profesional untuk mencegah dan menanggulangi terorisme. Mustahil pemerintah dapat bekerja sendirian. Civil society juga dapat berkoalisi membentuk Terrorism Watch untuk menumbuhkan solidaritas antiterorisme dan keberanian menghadapi aksi teror.

Bahkan Abu Bakar Ba'asyir dan jaringan Islamnya di Indonesia dapat menyumbang banyak bagi gerakan antiterorisme dan politik kekerasan di Indonesia. Mereka dapat dimulai dengan mengeluarkan pendapat atau menyatakan sikap penolakan terhadap penggunaan label Islam dalam banyak aksi kekerasan. **

Menangkap Abu Bakar Ba'asyir?

SETELAH Tragedi Bali, pemerintah Indonesia berada di bawah tekanan untuk bertindak tegas terhadap jaringan teroris lokal seperti Jemaah Islamiyah. Dunia internasional semakin menekan pemerintah Indonesia. Tidak kurang dari George Bush, pemerintah Australia dan Manila membuat pernyataan bahwa Al Qaidah dan jaringan teroris lokal berada di belakang bom di Bali.

Mereka lebih eksplisit lagi meminta Presiden Megawati segera bertindak terhadap jaringan Islam garis keras di Indonesia. Mengabaikan peringatan internasional dianggap akan melemahkan Indonesia sendiri. Apalagi di duga, bom serupa di bali sangat mungkin diulang di wilayah lain di Indonesia.

Tekanan ini semakin nyata berkaitan dengan rencana penangkapan dan pemeriksaan Abu bakar Ba'asyir, tokoh yang oleh kalangan Barat dipercayai sebagai pemimpin Jemaah Islamiyah. Para pengikut Ba'asyir memberi respons keras. Mereka mengancam, jika Ba'asyir ditangkap tanpa bukti yang cukup, mereka akan

melaksanakan bom bunuh diri. Berulang-ulang mereka minta agar Presiden Megawati tidak terjebak dalam skenario global.

Selama menjadi presiden, Tragedi Bali niscaya menjadi kasus yang terberat dihadapi Megawati, setidaknya ada tiga alasan.

Pertama, Tragedi bali menjadi tontonan internasional. Kinerja Megawati mengungkap kasus itu akan dievaluasi tidak hanya oleh masyarakat domestik, tetapi juga oleh dunia internasional. Kesalahan Megawati dalam bertindak seketika juga akan menjadi kecaman internasional yang tidak akan ia lupakan seumur hidup.

Tragedi Bali sudah terlanjur menjadi ikon politik dunia. Setelah peledakan WTC 11 September 2001, Tragedi bali adalah aksi terorisme yang terbesar. Kejadian itu juga terjadi di sebuah negara mayoritas Islam, yang oleh opini dunia sudah diklaim sebagai sarang terorisme. Banyak negara berkepentingan agar pelaku peledakan ditangkap secepatnya.

Dunia sudah mempunyai referensi penanganan terorisme model Amerika Serikat untuk Tragedi 11 September. Terlepas dari kelemahannya, penanganan Amerika Serikat dianggap sangat berhasil, dan menggambarkan kepemimpinan yang kuat. Amerika Serikat bukan saja berhasil mengidentifikasi pelaku adalah Al Qaidah, yang dipercaya oleh publik luas. Namun Amerika Serikat berhasil pula menjadikan terorisme sebagai isu global dan mengganti pemerintahan Taliban di Afganistan. Itu semua dilakukan Presiden Bush dalam waktu yang tepat, dengan tegas dan penuh determinasi.

Akan sangat kontras sekali, jika Presiden Megawati menghasilkan impresi yang sebaliknya. Misalnya, ia menunjukkan sikap yang pasif, ragu-ragu, mengulur waktu, dan jarang berbicara kepada publik mengenai krisis itu. Tidak hanya komunitas politik domestik yang akan mengecamkannya, namun juga publik dunia.

Kedua, yang membuat Tragedi Bali bertambah berat karena Presiden Megawati berlomba dengan waktu. Tragedi Bali bukan jenis kasus kriminal di mana publik dapat mentolerir jangka waktu investigasi. Publik butuh solusi yang cepat dan tegas. Keterlambatan mencari pelaku peledakan dapat berakibat fatal.

Di satu sisi, ketiadaan kesimpulan resmi pemerintah soal pelaku akan menguatkan aneka isu dan rumor yang sudah berlangsung di masyarakat. Sekelompok komunitas berkampanye seolah CIA berada di belakang Tragedi Bali. Sekelompok lain menuding beberapa elemen TNI/Polri sendiri yang memancing di air keruh. Jauh lebih banyak lagi, pihak yang menuduh Islam garis keras yang menjadi pelaku utama. Berbagai isu ini terus meluas melalui percakapan informal sampai dengan komentar melalui SMS.

Semakin lama pelaku Tragedi Bali itu terungkap, semakin masyarakat saling menuding di antara mereka sendiri. Jelas ini kondisi politik yang tidak sehat. Kondisi ini bukan saja dapat berujung dengan semakin buruknya trust dan harmoni masyarakat. Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat mengundang tindakan main hakim sendiri dari sekelompok masyarakat.

Ketiga, yang paling membuat Tragedi Bali sangat berat bagi Megawati justru karena kondisi aparat keamanan Indonesia sendiri, khususnya kepolisian. Secara formal dan legal, pengusutan Tragedi Bali itu menjadi wilayah yurisdiksi polisi. Sejak reformasi polisi sudah dipisah dari TNI. Kemampuan koordinasi polisi dengan pihak intelijen, serta kapabilitasnya dalam menginvestigasi kasus yang rumit seperti terorisme, masih sangat diragukan.

Berbagai kasus bom di Jakarta dan di daerah lain, sampai sekarang belum juga terbongkar. Yang berkembang kemudian adalah teknik mencari kambing hitam, mencari pelaku seadanya untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat. Celaknya, kambing hitam itu tidak dapat diberlakukan terhadap Tragedi Bali, karena ia ditonton publik dan pemerintahan dunia.

Dalam kondisi seperti ini, Presiden Megawati menghadapi dilema terbesar sepanjang karir politiknya. Di satu sisi, ia ingin memenuhi tuntutan internasional, untuk bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku Tragedi Bali. Kebijakan terhadap komunitas Islam garis keras ingin pula ia jalankan.

Namun di sisi lain, Megawati sudah terbiasa dengan cara berpikir legal dan formal. Ia masih kekurangan bukti hukum untuk menyeret siapapun yang akan dituduh sebagai pelaku. Apa jadinya jika ia bertindak cepat namun karena kekurangan data, tersangka itu harus dilepas dan berganti menuntut balik Megawati. Bukankah justru Megawati akan menjadi cercaan dan tertawaan dunia?

Semua jalan kini menjadi buntu kecuali jika polisi memang menemukan bukti yang kuat pelaku Tragedi Bali. Sementara jika Megawati terus menunggu sampai ditemukannya bukti awal yang cukup, ada kemungkinan kasus ini dalam waktu setahun belum tentu terungkap. Akibatnya, dunia internasional, terutama Amerika Serikat melihat Megawati bukan sebagai partner yang ideal dalam melawan terorisme global.

Dalam kondisi seperti itu, tokoh militer yang kuat dapat mengambil-alih kekuasaan dari tangan Megawati, seperti di Pakistan. Sang tokoh militer lalu menyatakan perang terhadap terorisme, serta menangkap kelompok Islam garis keras. Amerika Serikat mungkin mendukung kudeta militer itu demi proyek anti terorisme globalnya.

Megawati dan kelompoknya tentu tidak ingin itu terjadi. Dengan pertimbangan di atas, dapat kita pastikan suasana sedang tidak menguntungkan Ba'asyir dan politik Islam garis keras. Tragedi Bali agaknya menjadi awal bagi musim pacleklik gerakan Islam garis keras di Indonesia. **

Jejak Al Qaidah di Bali?

SUDAH lebih dari sepuluh hari ledakan bom di Bali. Pemerintah belum juga menemukan pelakunya. Sudah begitu banyak saksi yang didengar pendapatnya. Sudah banyak pula penyisiran lokasi dilakukan untuk menemukan aneka bukti. Namun sejauh ini, belum ada yang dapat dijadikan tersangka Tragedi Bali. Memang Abu Bakar Ba'asyir sudah ditahan. Namun sang ustad ditahan karena kasus yang lain, bukan dalam kaitannya dengan Tragedi Bali.

Pada saat yang sama opini internasional justru semakin mengental. Berhari-hari Tragedi Bali menjadi headline tidak hanya di New York Time, Washington Post, dan CNN, namun menjadi cover story pula dari majalah sekelas Time Magazine. Umumnya opini internasional itu semakin keras dengan tuduhan yang semakin mengerucut. Al Qaidah, beserta jaringan lokalnya berada di belakang Bom Bali. Lebih maju lagi, Hambali, dituduh operator Al Qaidah di Asia Tenggara dan menjadi pelaku utama.

Tetapi opini publik domestik tidak serta merta meyakini opini internasional tersebut. Jauh lebih banyak publik yang bersikap wait and see, pasif, bahkan skeptis atas analisa internasional itu. Pemerintah Indonesia terjepit di tengah.

Tiga hal yang membuat opini internasional mencurigai Al Qaidah di Bali. Pertama, mereka begitu yakin Al Qaidah akan bangkit kembali dan balas dendam setelah digempur di Afganistan. Serangan atas gedung WTC dan Pentagon 11 September 2001, dianggap hanya langkah awal. Mereka yakin serangan Al Qaidah berikutnya terhadap kepentingan Amerika Serikat akan lebih mematikan.

Serangan 11 September bahkan dianggap sebagai serangan terakhir yang menggunakan senjata konvensional di Amerika Serikat. Di masa datang, teroris mungkin meledakkan bom pemusnah massal yang dapat membunuh separuh penduduk Amerika Serikat. Tidak heran jika sampai kini Amerika Serikat paling khawatir dengan senjata pemusnah massal, jenis nuklir ataupun senjata biologis.

Upaya Amerika Serikat menyerang Irak juga disebabkan oleh keinginan Amerika Serikat mengontrol bahan perusak massal itu. Seandainya Irak berhasil membangun pabrik bom nuklir atau bom biologis, tidak ada yang dapat menjamin senjata itu tidak digunakan, terutama untuk menyerang Amerika Serikat. Apalagi di tengah mental pejabat dunia ketiga yang umumnya korup. Senjata pemusnah massal itu dapat diperjualbelikan kepada kelompok teroris.

Namun sebelum mendapatkan senjata perusak massal, Al Qaidah dituduh hanya menyerang sasaran lunak yang lebih mudah, seperti aneka tempat hiburan. Jika memang warga Amerika Serikat belum dapat dijadikan target, setidaknya warga sekutu Amerika Serikat yang dijadikan sasaran seperti Australia. Tragedi Bali dianggap pemanasan dan salah satu serangan beruntun Al Qaidah dalam skala

mikro, sebelum serangan sesungguhnya yang akan jauh lebih besar dan mematikan atas kepentingan Amerika Serikat sendiri.

Kedua, mereka begitu yakin jaringan Al Qaidah terus tumbuh. Memang benar kamp pelatihan dan pusat mereka di Afganistan sudah dihancurkan. Namun organisasi itu terus bergerak melalui sel-sel yang tertutup dan desentralistis. Karena Afganistan tidak lagi nyaman, pemimpin dan aktivis Al Qaidah itu kemudian mengungsi ke tempat yang lebih memberikan jaminan.

Asia Tenggara, terutama Indonesia, menurut cara berpikir ini layak untuk disusupi. Indonesia bahkan dianggap sebagai titik terlemah di Asia Tenggara. Di Indonesia, ada lebih dari 15.000 pulau yang saling terpencil. Kondisi itu memudahkan tim terorisme untuk menyusup dari berbagai pintu yang tidak resmi.

Aparat keamanan begitu mudah disogok oleh pendatang gelap (teroris) untuk mendapatkan kartu identitas palsu. Sementara krisis ekonomi dan konflik horizontal yang luas adalah lahan yang baik untuk rekrutmen dan pelatihan terorisme. Ledakan bom Bali adalah puncak gunung es dari fenomena tersembunyi itu.

Ketiga, pemerintah Amerika Serikat juga perlu membuat garis batas yang tegas soal posisi negara demokrasi dan yang bukan, atau pelanggar HAM dan yang anti HAM. Garis batas itu adalah posisi yang eksplisit dari pemerintah atas terorisme. Dalam cara yang ekstrem, Presiden Bush hanya ada dua pilihan bagi negara-negara lain dalam perang melawan terorisme: bersama Amerika Serikat atau bersama kekuatan terorisme. Tidak ada jalan tengah.

Bom Bali dijadikan titik masuk Amerika Serikat menekan Indonesia untuk lebih serius menghadapi terorisme, yang sudah mereka bayangkan terkait jaringan global Al Qaidah.

Di aras domestik, pada saat yang sama begitu banyak cendekiawan yang sulit mempercayai Al Qaidah dan jaringan lokalnya terlibat dalam Tragedi Bali, jika dilihat dari dua alasan: motif dan korban.

Dari segi motif, aksi terorisme adalah aksi yang rasional, bukan aksi spontan atau aksi emosional. Mereka melakukan aksi teror pasti dengan motif tertentu yang menguntungkan perjuangan mereka. Jika benar Al Qaidah dan jaringannya merusak Bali dan Indonesia, mereka melakukan tindakan yang menyusahkan organisasi mereka sendiri. Peledakan Bali itu menjadi bunuh diri politik yang sulit dipahami.

Sebelum Tragedi Bali, di mana-mana dinyatakan bahwa Indonesia adalah sarang terorisme. Dinyatakan pula bahwa Al Qaidah memimpin jaringannya di Asia Tenggara dari Indonesia. Mengapa pula mereka harus meledakkan wilayah di sebuah negara yang selama ini menjadi surga mereka sendiri? Dengan adanya Bom Bali, bukankah keberadaan mereka akan dikonfirmasi? Itu sama dengan mereka memberikan peluru kepada musuh untuk minta ditembak. Mungkinkah sebuah jaringan profesional seperti Al Qaidah berpikir senaif itu?

Kedua, analisa dapat juga dilihat dari korban. Seandainya Al Qaidah yang bergerak mengapa yang ditargetkannya pengunjung Australia? Padahal efeknya jauh lebih dahsyat, dan sesuai dengan target mereka sendiri, jika yang mereka hancurkan itu adalah kepentingan Amerika Serikat. Begitu banyak tempat di seluruh dunia untuk memburu warga Amerika Serikat, dengan kerja yang relatif sama kerasnya atau sama mudahnya dengan upaya peledakan di Bali.

Setelah hari kesepuluh Tragedi Bali, semakin terasa jurang yang lebar antara opini yang berkembang di dunia internasional dan domestik. Dua-duanya mempunyai argumen yang sama kuatnya walau saling bertolak belakang. Kontradiksi opini internasional dan domestik itu sangat mengganggu kerja pemerintah. Jika tidak

ditemukan data pembuktian yang keras mengenai siapa pelaku peledakan, pemerintah RI akan terus terombang-ambing. Ataukah pemerintah akhirnya harus berkesimpulan seperti ini: "pelaku bom di Bali mungkin Al Qaidah, namun mungkin juga tidak." **

Terorisme di Pundak DPR

AKANKAH DPR bersikap lunak dan lembek atas terorisme, sehingga jaringan terorisme di Indonesia semakin sulit ditumpas? Suara sumbang atas kerja pemerintah melawan terorisme mulai terdengar di kalangan anggota DPR. Kalangan Islam garis keras dan aneka kelompok LSM juga bersikap sangat kritis. Akankah perang atas terorisme di Indonesia melemah seiring dengan hiruk pikuk elit politik yang sulit bersetuju soal agenda terorisme?

Luasnya dampak bom di Bali menyadarkan betapa ketegasan dan kecepatan menumpas terorisme harus menjadi prioritas. Tidak ada gunanya kebebasan yang kita peroleh di era reformasi jika kita merasa was-was dan tidak aman akibat hantu terorisme.

Namun terjadi perbedaan yang sangat signifikan mengenai strategi menghadapi terorisme. Bagaimana seharusnya terorisme itu diberantas? Kelompok mana yang seharusnya menjadi sasaran? Apa instrumen hukum yang harus digunakan? Semakin hari elit politik semakin berbeda soal yang lebih teknis itu. Dapat kita gambarkan

setidaknya ada tiga kelompok yang selama ini berbeda dan terlibat dalam pro dan kontra. Pertama, pemerintah eksekutif. Kedua, kelompok Islam garis keras. Ketiga, kelompok LSM.

Setelah Tragedi Bali, pemerintah sudah mengambil sikap yang tegas. Yang pertama kali dilakukan pemerintah adalah inovasi di tingkat hukum dan kelembagaan. Ada empat kebijakan dasar yang sudah diambil pemerintah dan semuanya kontroversial. Pemerintah menerbitkan Perpu Pemberantasan Terorisme dan Perpu yang memberlakukan aturan darurat itu bagi pengusutan Tragedi Bali. Kemudian menyusul pula diterbitkan Instruksi Presiden yang memberikan kewenangan Menko Polkam menjadi komando utama perang melawan terorisme. Mendampingi Menko Polkam, BIN diberikan pula mandat sebagai koordinator intelijen melalui Instruksi Presiden lainnya.

Strategi yang dibuat pemerintah adalah strategi masa darurat. Aneka prinsip umum hukum tata negara dan pidana dilanggar. Pelanggaran itu dianggap dapat dibenarkan menggunakan rasionalitas suasana darurat setelah Tragedi Bali. Tanpa perlu lewat sidang pleno DPR, pemerintah menerapkan Perpu. Tanpa perlu mengikuti prinsip hukum pidana, pemerintah menyatakan aturan hukum itu berlaku surut. Alat bukti seperti laporan intelijen yang dikuatkan hakim, sudah cukup pula untuk menangkap seseorang.

Di era kebebasan, strategi darurat pemerintah itu dengan sendiri melahirkan reaksi yang beragam. Sebagian setuju dengan langkah pemerintah demi tercapainya keamanan dan kenyamanan. Terorisme yang tidak biasa harus juga dihadapi dengan strategi yang tidak biasa pula. Namun tidak kalah banyak pihak yang menentang. Berbagai instrumen itu dianggap pedang bermata dua, yang juga dapat membuat pemerintah kembali menjadi semi otoritarian. Pasal karet dari Perpu itu dapat pula digunakan untuk menangkap oposisi politik.

Kelompok Islam garis keras menjadi komunitas pertama yang menentang secara lantang sekali. Mereka melihat setelah Tragedi Bali, Abu Bakar Ba'asyir ditangkap pemerintah. Kegelisahan menebar di kalangan ini bahwa ada skenario pemerintah yang ingin menumpas gerakan Islam garis keras dengan manuver Tragedi Bali. Kegelisahan ini menjadi-jadi setelah Indonesia ikut mendukung dimasukkannya Jama'ah Islamiyah sebagai kelompok teroris versi PBB.

Opini di kalangan Islam garis keras pun terbentuk. Mereka menganggap pemerintah RI melalui strategi perang atas terorisme sudah tunduk dengan skenario Amerika Serikat. Padahal di kalangan ini, kebencian atas Amerika Serikat begitu tinggi. Agama Islam dan simbolnya seringkali dijadikan provokasi kemarahan kolektif atas pemerintah Amerika Serikat.

Sejak lama kelompok ini menganalisis ada perang global yang ingin melumpuhkan kelompok Islam garis keras di seluruh dunia. Celakanya, Amerika Serikat, yang kini menjadi satu-satunya polisi dunia, dicurigai justru menjadi pelaku utama perang atas komunitas Islam. Padahal menurut mereka, justru Amerika Serikat lah yang harus dilabel sebagai negara teror. Dukungan super power ini kepada Israel yang menghancurkan Palestina adalah bukti teror yang sebenarnya.

Dengan persepsi seperti di atas, pemerintah akan sulit sekali mendapatkan dukungan kalangan Islam garis keras untuk perang bersama melawan terorisme. Sebaliknya, kelompok ini justru akan melawan karena menganggap pemerintah RI sudah menjadi kaki tangan "Setan Besar" Amerika Serikat.

Kelompok lain yang menentang agenda pemerintah adalah koalisi longgar LSM pro reformasi. Penentangan kelompok ini atas agenda terorisme pemerintah sama kerasnya dengan kelompok Islam garis keras, namun untuk alasan yang berbeda. Bagi koalisi LSM ini, prinsip demokrasi dan hak asasi adalah harga mati yang tidak boleh ditawar. Prinsip ini jangan dilanggar untuk alasan yang tidak valid.

Menurut mereka, terjadinya teror di Indonesia bukan karena kekosongan hukum atau tidak memadainya KUHP dan KUHP. Aksi teror terjadi akibat kelemahan aparat keamanan sendiri. Perpu Pemberantasan Terorisme dianggap obat untuk penyakit yang salah. Perpu itu dinilai berpotensi pula membuat negara menjadi otoriter.

Kelompok ini menyetujui pembaharuan hukum untuk menanggulangi terorisme. Namun itu harus dilakukan tetap dalam bentuk undang-undang yang melibatkan DPR sebagai wakil rakyat. Sedangkan substansi yang perlu diambil untuk inovasi hukum melawan terorisme cukup dengan meratifikasi aneka aturan terorisme internasional.

Penerapan hukum atas warga negara juga tidak dianggap konsisten. Abu Bakar Ba'asyir yang tua renta diambil secara paksa. Sementara Syamsul Nursalim, koruptor kelas kakap dibiarkan bersantai di Singapura, tanpa berani diutak-atik. Hukum sekedar dijadikan alat politik bukan ekspresi the rule of law.

Tiga kelompok yang berbeda itu kini bertemu di Senayan. DPR kini terjepit di tengah. Siapa yang harus didengar DPR? Pemerintah eksekutif, Islam garis keras atau koalisi longgar LSM? Harus kah Perpu Pemberantasan Terorisme disahkan sebagai UU, atau justru harus ditolak?

Sangat dikhawatirkan jika demi politik jangka pendek, DPR salah mengambil posisi politik. Atau DPR berlarut larut dalam ketidakpastian dan kebimbangan bersikap. Sementara aksi terorisme di tanah air terus berlanjut. * *

Akhir Islam Radikal?

AKANKAH Tragedi Bali menjadi awal berakhirnya kiprah politik Islam radikal di Indonesia? Pertanyaan ini menggema di banyak pihak yang sangat peduli dan terganggu dengan kehadiran Islam radikal. Indikasi ke arah pelumpuhan politik kalangan ini memang semakin tampak.

Laskar Jihad sudah dibubarkan, sementara pimpinan tertingginya Jafar Umar Thalib sedang diproses pengadilan. Laskar Front Pembela Islam juga sudah dibubarkan, sementara pimpinan tertingginya, Habib Rizieq menjadi tahanan kota. Ustad Abu Bakar Ba'asyir kini mendekam dalam tahanan polisi untuk segera diproses di pengadilan. Mereka memang tidak terkait dengan bom di Bali, namun terkena efek Tragedi Bali.

Pengusutan polisi atas Tragedi Bali mendapatkan fakta yang cenderung memojokkan gerakan Islam radikal itu. Pengakuan Amrozi memberi indikasi ke arah keterlibatan jaringan Jama'ah Islamiyah. Kelompok yang selama ini hanya menjadi wacana secara

perlahan-lahan semakin kongkret dibuktikan keberadaannya. Yang kini menjadi buronan Tragedi Bali adalah mereka yang sejak lama sudah dikaitkan oleh opini publik dengan Jaringan Islamiyah. Namun akan kah Islam radikal menghilang?

Kembalinya Islam radikal adalah buah dari gerakan reformasi. Sebelum reformasi, di bawah kekuasaan Presiden Soeharto yang otoriter, gerakan Islam radikal hanya bergerak di bawah tanah. Namun di era kebebasan, Islam radikal dengan gagah muncul ke permukaan. Sebagian dari mereka ikut perang di Ambon dan di Poso. Sebagian ikut menghancurkan tempat hiburan secara terang-terangan. Sebagian lagi ingin memonopoli ruang publik dengan cara mensomasi kelompok yang ingin menampilkan Islam dengan wajah lain.

Sungguhpun reformasi menjadi awal kelahiran Islam radika1, namun nilai-nilai yang mereka perjuangkan bertentangan secara diametral dengan cita-cita demokrasi yang sekuler. Tetapi jumlah pengikut dan elit pimpinan Islam radika1 terus bertambah. Sungguhpun mereka kini tidak diuntungkan oleh Tragedi Bali, namun sulit membayangkan Islam Radikal itu akan memudar di tanah air.

Ada lima alasan mengapa Islam radika1 akan terus hadir, terlepas apapun tuduhan dan represi yang sedang dibebankan ke kelompok ini. Pertama, kelompok ini hidup dalam sebuah utopia. Mereka diinspirasi oleh datangnya sebuah zaman yang sangat ideal. Di era awal Jawa dahulu, misalnya, utopia itu berupa kedatangan ratu adil.

Untuk kasus Islam radikal, yang secara formal legalistik ingin menerapkan syariat Islam di dunia publik, tentu utopianya tampil dalam lentuk agama pula. Bisa jadi utopia itu adalah terbentuknya Negara Islam Raya, meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, Brunei dan Australia. Bisa jadi utopia itu lebih fokus lagi seperti akan diterapkannya syariat Islam di berbagai kabupaten Indonesia. Berbagai tuduhan menempatkan Islam radikal di Indonesia

memiliki utopia sejenis itu. Represi eksternal dari masyarakat ataupun negara saja tidak akan mampu mengikis the power of faith dari utopia itu.

Kedua, kelompok radikal di mana saja, dan di agama mana saja, sudah cenderung mempunyai gambaran dunia yang sederhana. Dunia dianggap hanya terdiri dari hitam dan putih. Bagi mereka, tidak ada wilayah abu-abu. Mereka mewakili suara Tuhan. Sementara pihak yang berbeda dianggap mewakili kekuatan setan. Jika dulu, kata "Mereka" ditujukan kepada kelompok kafir yang berbeda agama. Kini "Setan Dunia" itu ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutunya.

Mereka selalu merasa musuh besar itu terus mengintai dan ingin menyingkirkan mereka. Justru dengan world view semacam ini, maka komunitas Islam radikal akan terus tumbuh pula. Selama musuh besar itu ada, selama itu pula mereka bersedia berkorban nyawa. Mereka akan terus loyal kepada doktrin agama yang radikal, walau pemerintah sedang memburu dan ingin membasmi mereka.

Ketiga, peer group atau elit yang berpengaruh di komunitas ini terus menerus memproduksi pengikut Islam garis keras. Interpretasi secara keras terhadap agama sangat mereka hayati. Mereka yang mendapatkan penghargaan dan pujian adalah mereka yang berhasil melakukan purifikasi ajaran. Semakin murni doktrin yang mereka praktekkan, semakin cemerlang pula posisi anggota itu dalam struktur elit komunitas. Karena kontrol dari peer group, penganut Islam radikal akan terus bermunculan. terlepas bagaimanapun kondisi lingkungan politik menemukannya.

Keempat, mereka juga memiliki daya tahan yang luar biasa. Jika terjadi malapetaka. ataupun penangkapan atas tokoh penting organisasi itu, selalu ada tafsir yang membesarkan hati mereka sendiri. Segala penderitaan ditafsir sebagai cobaan bagi yang beriman. Semakin tinggi imannya, akan semakin besar cobaannya. Upaya penangkapan tokoh Islam radikal, dengan enteng mereka

anggap sebuah ujian dan cobaan duniawi saja. tanpa mengurangi militansi terhadap doktrin agama. Karena itu mereka menolak untuk menyingkir dari dunia publik kecuali jika itu hanya untuk taktik politik sementara di lapangan.

Kelima. walau jumlahnya sedikit, mereka “bersuara” nyaring, sehingga kehadiran mereka sangat terasa. Tidak heran jika gerakan Islam radikal itu seperti mempunyai seribu nyawa yang tidak kunjung mati. Yang membuat mereka nyaring seringkali adalah pilihan politik kekerasan. Tidak jarang. kekerasan menjadi bagian doktriner dari keyakinan mereka.

Tidak hanya di kalangan Islam, politik kekerasan juga ditemukan dan dipercayai oleh kelompok radikal dari kalangan agama dan ideologi lain. Tidak perlu pula merasa heran, jika mereka dapat terlibat dalam pembunuhan missal, namun dengan sikap yang rileks dan santai saja. Bahkan hukuman mati tidak mereka takuti. Mereka meyakini bahwa seandainya pun mati, itu adalah cara mati terhormat, mati syahid.

Tragedi Bali memang telah memukul gerakan Islam radikal di tanah air. Pemerintah dapat saja menjadikan Tragedi Bali sebagai momentum untuk “membasmi” Islam garis keras. Namun gerakan itu akan terus hidup walau hanya diyakini oleh segelintir orang.

Di Indonesia. memang Islam mainstream berasal dari warga NU dan Muhammadiyah yang anti politik kekerasan. Jelas itu menjadi tugas utama Islam mainstream untuk menghadapi Islam radikal dalam perang wacana secara internal dalam tafsir Islam sendiri. Yang paling mampu mengikis Islam radikal adalah tokoh Islam juga, namun dari barisan mainstream dan moderat. * *

Damai di Aceh?

UNTUK pertama kalinya, Presiden Megawati bermalam di Aceh. Ia menyempatkan diri sujud syukur di masjid bersama para pejabat dari Jakarta dan pimpinan serta unsur masyarakat Aceh. Pada kesempatan itu Megawati mengungkapkan bahwa masalah Aceh akan selesai dalam waktu dua tahun.

Namun, akan kah damai benar-benar menetap di Aceh? Pertanyaan ini diajukan banyak orang dengan harap-harap cemas. Perasaan di hati sangat berharap agar damai itu benar-benar terjadi. Namun akal pikiran dan pengalaman menunjukkan betapa proses damai itu tidak mudah. dan dikhawatirkan kembali gagal.

Sudah terlalu lama Aceh merasa ditipu oleh pemerintah pusat. Sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Abdurrahman Wahid dan kini Megawati Soekarnoputri, begitu banyak janji yang diumbar. Namun satu persatu janji itu diingkari. Terakhir kali adalah janji Megawati. Jika kelak ia yang menjadi pemimpin, menurut Megawati,

maka darah akan berhenti mengalir di Aceh. Kenyataannya, pembunuhan dan kekerasan di Aceh terus berlangsung.

Konflik di Aceh sudah pula mengakar. Sudah banyak pula pihak dan oknum yang justru diuntungkan oleh konflik. Mereka yang bersenjata, oknum dari militer, polisi ataupun dari Gerakan Aceh Merdeka, justru dapat menjual "jasa keamanan" di era konflik. Makin parah konflik yang terjadi, makin mahal pula "jasa keamanan" itu. Tidak terhitung para bandit dan bos serta mafia ganja. Di era konflik, hukum belum benar-benar efektif. Kondisi konflik justru membuat mereka leluasa bertransaksi di pasar gelap.

Benarkah damai akan datang di Aceh? Dari sisi ilmu politik, dapat dijawab bahwa damai akan datang di Aceh jika terpenuhinya dua syarat. Pertama, demiliterisasi antara pihak yang bertikai berlangsung secara sukses. Konflik panjang yang mengakar di Aceh, yang diwariskan turun-temurun, tentu tidak dapat diselesaikan dalam satu kali kesepakatan. Suasana damai hanya mungkin dicapai setelah melalui berbagai tahapan resolusi konflik yang sukses.

Tahap pertama yang terpenting adalah berubahnya metode perjuangan. Semula, senjata berbicara. Kehendak politik dinyatakan melalui tembakan, bom, sabotase, pembunuhan dan penyiksaan. Melalui demiliterisasi, perbedaan dipindahkan areanya dari jalanan ke meja perundingan. Bukan lagi senapan yang berbicara, tetapi argumen, dan kesediaan berkompromi.

Demiliterisasi hanya sukses jika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersedia meletakkan senjata. Ini berarti harus ada perubahan yang sangat radikal di tubuh GAM sendiri. Sebuah organisasi yang sudah banyak kehilangan anggota dan pimpinan karena terbunuh, yang memang dilahirkan untuk memanggul senjata, tiba-tiba kini diharuskan melucuti senjatanya sendiri.

Jika damai yang diinginkan, GAM dipaksa untuk berubah menjadi sebagaimana layaknya Lembaga Swadaya Masyarakat. GAM tentu tetap dapat mempengaruhi politik Aceh dan membentuk opini masyarakat. Namun semuanya dilakukan tanpa kekerasan.

GAM hanya mungkin meletakkan senjata jika mereka percaya bahwa mereka sedang tidak ditipu atau dijejek. Harus sudah terbangun dulu adanya saling kepercayaan, trust building. Sangat sulit berharap GAM tiba-tiba langsung percaya kepada pemerintah RI dan militer, yang dalam persepsi mereka sejak dulu sudah menipu. Kehadiran lembaga internasional menjadi syarat mutlak. Lembaga internasional itu menjadi penjamin bahwa GAM akan aman-aman saja jika meletakkan senjata. Dunia internasional akan menghancurkan wibawa pemerintah RI jika pemerintah RI mengkhianati kesepakatan.

Zone wilayah damai diperluas. Tentara dan polisi RI juga dibatasi peran dan manuvernya. Dibentuk badan baru yang lebih tinggi yang disebut Joint Security Commission. Badan ini akan mengevaluasi keamanan dan memberikan penilaian atas pelanggaran damai. Tidak hanya Indonesia, badan itu juga ikut dikontrol oleh GAM dan dunia internasional.

Jika tahap demiliterisasi ini sukses, tahap selanjutnya dari upaya damai dapat dilaksanakan. Demiliterisasi semata tentu tidak cukup. Untuk menuju damai yang stabil dibutuhkan tahap kedua, yaitu kesepakatan format politik. Kedua belah pihak harus benar-benar sepakat mengenai format politik untuk Aceh di masa depan. Apakah Aceh yang disepakati itu berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ataukah Aceh yang dimaksud adalah Aceh yang merdeka? Ataukah akan ada referendum yang membiarkan rakyat Aceh memilih?

Pembicaraan mengenai format politik Aceh di masa depan mungkin merupakan bagian yang paling sulit dan sensitif. Seolah sulit sekali mencari kompromi atas dua kepentingan yang berbeda. Indonesia menginginkan Aceh kembali dalam pangkuan NKRI.

Sebagian rakyat Aceh, yang diwakili GAM ingin Aceh merdeka. Dua tuntutan itu bertentangan. Siapa yang harus mengalah?

Sungguhpun bertentangan, namun tetap ada kesamaan fundamental pada keduanya. Berbagai pihak sebenarnya punya muara yang sama, Aceh yang makmur, damai dan sejahtera. Ketenangan masyarakat Aceh yang berdaulat dan berkeadilan adalah tujuan tertinggi. Persoalannya kemudian format politik apa yang paling realistis untuk mencapai Aceh yang makmur sentosa dan adil itu?

Aceh merdeka jelas tidak realistis. Upaya ini ditentang tidak hanya oleh Indonesia. Dunia internasional juga tidak mendukung upaya itu. Referendum juga tidak realistis. Sulit dibayangkan pemerintah Indonesia bersedia menjalankan, referendum secara damai, dengan resiko kehilangan Aceh.

Yang paling realistis adalah pemberian otonomi khusus yang seluas-luasnya bagi Aceh. UU otonomi khusus NAD saat ini dapat dimodifikasi. Jelas pimpinan dan aktivis GAM harus mendapatkan amnesti dan pengampunan. Mereka secara otomatis harus dianggap sebagai warga negara biasa yang terhormat, dan tidak diburu untuk dipenjara. Lebih dari itu, aktivis dan pimpinan GAM dibolehkan bertarung dalam pemilu lokal untuk menjadi anggota DPRD, bupati bahkan gubernur.

Sudah terlalu lama Aceh menderita. Sudah begitu banyak anak-anak menjadi yatim. Sudah terlalu besar jumlah wanita yang menjadi janda. Sejak tahun 1976, sudah lebih dari 12.000 penduduk yang mati. Apalagi yang dicari?*

Aceh Ingin Merdeka?

MEREKA yang masih mendambakan proses damai berlangsung di Aceh, kini mesti siap-siap untuk kecewa. Selasa, 8 April 2003 lalu, kontak senjata kembali terjadi. Dilaporkan sembilan tewas. Bahkan peluru tetap meletus di desa Polu Kenari yang sudah diresmikan sebagai zona damai.

Kantor JSC (Joint Security Committee) sebenarnya sudah tersebar di delapan kabupaten Aceh. Kantor ini beranggotakan tiga unsur, baik dari pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) selaku pihak yang bertikai, ataupun dari Henry Dunant Center dan pengawas internasional selaku mediator. Kantor ini bukannya disambut dengan penuh harapan oleh penduduk setempat. Sebaliknya, kantor JSC ada yang dibakar massa, ada pula yang dipaksa penduduk untuk ditutup.

Seperti biasa, saling silang dan saling tuduh terjadi antara pihak keamanan Indonesia dengan pimpinan GAM. Pihak keamanan menyatakan bahwa 9 orang yang tewas itu adalah aktivis GAM. Massa yang marah kepada JSC disebabkan oleh kekecewaan

penduduk karena JSC tidak banyak dapat berbuat menghadapi GAM yang memeras penduduk.

Sebaliknya, GAM memberikan tuduhan yang berlawanan. Yang tewas itu, menurut pihak GAM adalah penduduk sipil. Sementara massa yang ngamuk dianggap adalah orang-orang suruhan pihak keamanan Indonesia sendiri untuk menyudutkan GAM.

Mengapa proses damai yang didambakan itu kini berada di ujung tanduk? Padahal baru saja lima bulan proses kesepakatan penghentian permusuhan ditanda tangani di Jenewa. Masih segar dalam ingatan, betapa penduduk di Aceh ataupun di Jakarta, sudah sujud syukur. Mereka membuat pesta syukuran bahwa akhirnya proses damai akan terwujud. Di masjid-masjid, penduduk berdoa dan menangis. Banyak pula cuplikan yang menggambarkan betapa tentara dan polisi Indonesia berangkulan dengan pimpinan GAM.

Secara konseptual, rencana damai itu sudah tersusun sedemikian rapih dan meyakinkan. Ada tahapan trust building dimana masing-masing pihak menghentikan kontak senjata dan memulai era untuk saling percaya menuju perdamaian. Ada tahapan demiliterisasi bagi kedua belah pihak. GAM menggudangkan senjata dan tentara Indonesia ditarik bertahap dari Aceh untuk digantikan oleh polisi.

Sebagai pengawas perdamaian, sudah dibentuk lembaga yang berisi tiga perwakilan. Wakil pemerintah RI, GAM dan pihak asing duduk dalam lembaga ini. Lembaga ini pula yang berwenang memberikan hukuman kepada pihak yang melakukan pelanggaran atas kesepakatan damai.

Lalu ada tahapan all inclusive dialog. Semua unsur masyarakat di Aceh diberikan hak dan kebebasan untuk mendiskusikan masa depan politik Aceh. Pemerintah Indonesia bersedia memberikan otonomi seluas-luasnya sejauh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudah pula direncanakan bantuan kemanusiaan, pembangunan ekonomi dan rekonsiliasi. Disadari bahwa pendekatan legal formal saja tidak pernah memadai untuk menyelesaikan kasus Aceh. Perlu pendekatan yang komprehensif, untuk menangani kasus keamanan, keadilan, ekonomi dan kebebasan untuk merancang propinsi mereka sendiri secara otonom. Luka-luka lama antara pemerintah Jakarta dan penduduk Aceh akan diobati melalui rekonsiliasi.

Namun rencana yang sangat rasional dan penuh elemen moral itu agaknya hanya berusia lima bulan. Aceh kembali ke situasi lama, dimana darah, air mata, kematian, dan penderitaan bercampur baur. Baik pemerintah Indonesia maupun GAM memiliki interpretasi yang berbeda mengapa perdamaian terancam gagal.

Pihak pemerintah tentu menyalahkan GAM berada di balik kegagalan proses damai. Garis keras masih mendominasi GAM. Bukan otonomi khusus yang hendak diperjuangkan, GAM masih terus menghidup-hidupkan kehendak Aceh merdeka. Proses damai justru dijadikan momentum dan konsolidasi kekuatan untuk memperbesar kemungkinan Aceh Merdeka.

Ada banyak alasan mengapa aspirasi kemerdekaan itu terus tumbuh. Penderitaan yang lama dan panjang penduduk setempat secara kolektif telah membangkitkan identitas berupa munculnya nasionalisme lokal. Aspirasi tertinggi dari aspirasi lokal adalah kemerdekaan. Itu juga terjadi di Uni Sovyet dan Yugoslavia. Akibatnya, reformasi politik di kedua negara itu justru diikuti oleh pecahnya negara ke dalam beberapa negara yang lebih kecil.

Ditambah lagi, ada keyakinan di kalangan petinggi GAM, bahwa jika Aceh merdeka, Aceh akan sekaya Brunei Darusalam. Minyak bertumpuk di Aceh tanpa perlu lagi disetor ke pemerintah pusat. Sementara kultur dan agama penduduk Aceh sangat homogen. Mereka bisa mendirikan negara Islam atau apapun tanpa perlu konsultasi kepada pihak manapun di luar Aceh.

Kemarahan dan kebencian terhadap pemerintah pusat juga sudah sedemikian tinggi. Pemerintah Indonesia bahkan pemerintah daerah Aceh sendiri yang satu aspirasi dengan pusat, dianggap kolonialisme orang Jawa. Proses damai yang dilancarkan pemerintah di bawah Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono akibatnya hanya ditunggangi untuk tujuan yang berbeda.

Kasad bahkan menyebut angka. Sejak perjanjian damai, jumlah aparat yang direkrut menjadi tentara GAM menaik. Bahkan jumlah pucuk senjata yang mereka punyai juga bertambah. Jelas ini dianggap berbahaya. GAM bertambah kuat sementara aspirasinya masih ingin Aceh Merdeka.

Sementara pihak GAM dan kalangan LSM yang kritis justru mengkritik pemerintah berada di balik kegagalan proses damai. Menurut mereka, pemerintah gagal mengawasi perilaku oknum garis keras yang sengaja memobilisasi milisi untuk mengacaukan proses damai. Oknum garis keras justru mendapatkan keuntungan dengan situasi konflik. Mereka tetap bisa “menjual” jasa keamanan dengan harga tinggi jika situasi Aceh tetap konfliktual.

Sementara proses damai dianggap pihak kritis ini berhenti dalam bentuk slogan, organisasi dan rencana. Perbaikan ekonomi secara kongkret dan signifikan, bahkan peningkatan rasa aman penduduk setempat belum terasa. Ada atau tidaknya proses damai, akibatnya tidak terlalu dirasakan bedanya. Upaya damai yang optimal dari Menko Polkam kurang didukung oleh pihak lain yang terkait.

Masalah Aceh memang lebih rumit dan lebih kompleks daripada yang banyak kita duga. Meskipun presiden sudah berganti berkali-kali, namun nasib Aceh masih terus tidak menentu. **

Menjepit Gerakan Aceh Merdeka

GERAKAN Aceh Merdeka kini memasuki fase tersulit. Patriotisme dan sentimen nasionalisme kini tengah membakar para pengambil keputusan di Jakarta. Presiden Megawati sendiri sudah memerintahkan TNI dan Polri untuk siaga menumpas GAM, jika memang perundingan damai gagal. Wakil Presiden Hamzah Haz juga bernada sama.

Gubernur Aceh sendiri berulang-ulang menyatakan bahwa serangan militer bukan hal tabu. Apalagi para petinggi TNI dan Polri yang sejak dulu memang sudah berkeinginan menumpas GAM secara tuntas dan tegas. Bagi mereka keberadaan gerakan separatisme yang bersenjata haram hukumnya. Sementara pimpinan DPR, pimpinan MPR, anggota DPR yang vokal menyatakan dukungan atas serangan militer yang sama ke Aceh.

Memang ada kalangan cendekiawan, agamawan ataupun intelektual yang bersuara beda. Mereka tentu anti perang dan anti serangan militer. Budayawan, cendekiawan ataupun intelektual,

dimana saja, selalu menolak pendekatan kekerasan. Namun tokoh seperti Syafe'i Maarif dan Nurcholish Madjid tetap berkobar nasionalismenya dan menyatakan bahwa tuntutan Aceh Merdeka tidak bisa ditoleransi.

Garis keras di tubuh pemerintahan mengharapkan terjadinya amandemen secara radikal atas kesepakatan penghentian permusuhan itu. Selama ini ada beberapa kalimat yang multi tafsir. Pihak Jakarta dan GAM memiliki pemahaman yang beda atas isi kesepakatan yang sama.

Misalnya, soal otonomi khusus sebagai tahap awal kesepakatan. Pihak Jakarta memahami bahwa otonomi khusus itu akan dimodifikasi lagi tetapi tetap dalam kerangka Aceh di bawah NKRI. Sementara pihak GAM memahaminya bahwa otonomi khusus itu sebagai awal untuk Aceh Merdeka, jika memang itu dipilih oleh mayoritas rakyat Aceh sendiri.

Karena beda tafsir yang parah ini, amandemen atas isi perjanjian akan segera dipaksakan pihak Jakarta. Dalam amandemen itu otonomi khusus seharusnya dituliskan secara tegas tidak hanya sebagai starting point tetapi juga ending point. Secara jelas harus ditulis bahwa yang akan didiskusikan dalam masa penghentian permusuhan hanyalah modifikasi atas otonomi khusus itu. Pihak Jakarta, misalnya, membuka diri bagi amnesti massal untuk GAM. Pihak Jakarta, mungkin pula, membolehkan pimpinan dan aktivis GAM menjadi pemimpin Aceh sejauh dipilih secara demokratis. Namun itu semua dalam kerangka NKRI.

Memang diatur bahwa ada all inclusive dialog dan pemilu di Aceh. Tetapi dalam amandemen seharusnya secara tegas dinyatakan bahwa itu bukan referendum rakyat Aceh untuk memilih merdeka atau bersama NKRI, sebagaimana di Timor Timur. Pemilu yang dimaksud adalah pemilu nasional tahun 2004. Dan all inclusive dialog

yang dimaksud adalah perbincangan seputar modifikasi otonomi khusus belaka.

Amandemen kesepakatan perlu pula mengatur secara tegas sejumlah larangan yang diberlakukan di Aceh. Misalnya, dilarang untuk menyuburkan dan menyebarkan aspirasi Aceh Merdeka. Propaganda, doktrinasi dan kampanye Aceh Merdeka seharusnya tidak dianggap hak demokratis rakyat Aceh, tetapi sebuah penghianatan terhadap negara.

Harus pula ada larangan bagi rakyat Aceh untuk menyimpan dan menggunakan senjata. Rakyat Aceh sama dengan rakyat Indonesia di teritori lainnya. Mereka tidak boleh bersenjata dalam rangka sebuah perjuangan politik. Hanya polisi dan tentara yang diizinkan sebuah negara modern untuk menjaga keamanan publik dengan senjata. Penertiban senjata oleh aparat keamanan Indonesia tidak harus dilihat sebagai perampasan hak, tetapi penertiban hukum.

Ada pula larangan untuk memungut pajak. Di semua teritori RI, yang berhak memungut pajak kepada warga negara hanya aparat pemerintah RI yang sah. GAM ataupun oknum lainnya tidak boleh memiliki hak itu. Jika GAM memaksa pengusaha, perusahaan atau rakyat biasa menyumbang secara paksa, itu harus ditafsir sebagai perampokan.

Dalam amandemen perjanjian itu pula harus ditegaskan wewenang polisi RI yang tidak dapat diambil alih oleh mediator apapun. Proses damai dan aneka tahapannya boleh terus berlanjut. Namun polisi RI, dimana saja di wilayah Indonesia, termasuk di Aceh, tetap bertugas menegakkan hukum. Semua pelanggaran atas hukum Indonesia akan ditindak tanpa perkecualian.

Jika jalan damai melalui amandemen seperti di atas terjadi, NKRI akan aman. GAM akan mati karena dililit oleh tegasnya bahasa dan prinsip perjanjian itu. Namun GAM akan mati secara damai.

Sangat mungkin GAM menolak amandemen yang radikal di atas. Maka penolakan GAM harus ditafsirkan sebagai penolakan atas proses damai menuju NKRI. Tanpa amandemen yang keras seperti di atas, proses damai hanyalah manuver untuk konsolidasi kekuatan untuk Aceh Merdeka.

Berarti GAM sendiri yang memilih solusi militer. Di semua negara demokrasi modern, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat, tidak ada tempat bagi gerakan separatisme. Apalagi jika gerakan itu sudah bersenjata dan memungut pajak pula. Mereka yang ingin separatis secara damai, mungkin cukup ditangkap polisi dan dihukum. Namun jika gerakan bersenjata, penumpasan militer pun dibenarkan.

Namun tentu saja, serangan militer itu necessary but not sufficient, diperlukan tapi tidak cukup. Jika amandemen perjanjian di atas ditolak, di samping serangan militer perlu cara lain. Aceh hanya mungkin dimenangkan jika ia tidak hanya ditaklukkan secara militer, tetapi direbut pula hati dan pikirannya. Di samping kemenangan militer, harus pula dipikirkan bagaimana cara memenangkan the heart and the minds rakyat Aceh. Pemerintah RI sudah mulai harus melibatkan civil society Aceh sendiri yang secara tulus dan ikhlas berkampanye soal NKRI dan bendera merah putih pula. **

Ketegasan Buat Aceh ?

TIGA tahun dari sekarang, apa yang akan terjadi dengan Aceh? Akankah Aceh menjadi negara muda yang merdeka dan terpisah dari Indonesia seperti halnya Timor Timur? Ataukah Aceh sedang membangun kerangka otonomi khusus yang sangat luas, tetapi tetap berada dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Ataukah Aceh tetap dipenuhi konflik, labil, dan tidak tentu arah seperti sekarang?

Pertanyaan tersebut akan ditentukan pada dua hari lagi. Rencananya, Jumat 25 April di Jenewa akan diselenggarakan pertemuan JCM (Joint Council Meeting). Sesuai aturan kesepakatan, JCM merupakan forum tertinggi. Dalam JCM, wakil pemerintah Republik Indonesia, GAM dan unsur luar negeri yang diwakili HDC terlibat.

Banyak pihak yang pro NKRI meminta agar JCM itu mengatur secara tegas bahwa ujung proses damai tersebut merupakan otonomi khusus buat Aceh. Otonomi tentu bisa dimodifikasi seluas-luasnya,

tetapi tetap dalam kerangka NKRI. Tanpa Amandemen radikal dan tegas itu, kita hanya berputar-putar dari satu perjanjian ke perjanjian berikutnya.

Namun, dua hari sebelum pertemuan tertinggi di JCM terselenggara, pihak GAM menunjukkan indikasi mengkhawatirkan. Menurut Tengku Kamaruzaman, salah seorang juru runding GAM dalam pertemuan di Jenewa besok, GAM akan menolak bicara soal politik. GAM tidak mau membahas, misalnya, apakah ujung perundingan tersebut menyepakati Aceh tetap berada dalam NKRI atau tidak.

Masalah politik, menurut dia, harus dibicarakan pada waktunya, ketika situasi sudah kondusif. Saat ini pihak GAM hanya bersedia berbicara soal evaluasi teknis atas berlakunya lima bulan penghentian permusuhan (COHA). Menurut Kamaruzaman, GAM hanya bersedia membicarakan aneka kendala yang ada selama ini menurut GAM.

Sepintas respons GAM terasa positif. Dalam negosiasi masalah yang panas, substansi yang menjadi konflik memang layak dibicarakan belakangan. Secara bertahap kedua pihak yang bertikai sebaiknya membicarakan dulu hal-hal yang sudah bisa disepakati. Sedangkan puncak konflik akan didekati dan dibicarakan kemudian. Ibarat makan bubur panas, sebaiknya yang disendok dan dikunyah adalah bagian pinggirnya dulu. Pelan-pelan, barulah sendok mengarah ke tengah ke pusat panasnya bubur.

Namun, jika kehendak GAM diikuti, pihak GAM akan sangat diuntungkan, sedangkan pihak Indonesia akan sangat dirugikan. Semakin terkatung-katungnya ending point atau hasil akhir kesepakatan, GAM semakin bisa berkonsolidasi. Tidak mengherankan, GAM hanya ingin menegaskan soal otonomi khusus sebagai starting point. Sedangkan ending point-nya, sesuai kesepakatan masih terbuka bagi GAM untuk merdeka.

Itulah yang selama ini terjadi. Ketika penghentian permusuhan dilakukan, menurut pihak TNI, GAM justru bertambah kuat. Personel militer dan pucuk senjatanya bertambah. Sementara itu, GAM masih menginginkan Aceh merdeka. Dan menurut GAM, hal itu tidak menentang isi perjanjian.

Sebaliknya bagi Indonesia, jika substansi konflik tidak dibicarakan, negara ini akan dikalahkan waktu. Jika kehendak GAM untuk tidak membicarakan politik diikuti, Indonesia hanya menumpuk beban.

Situasi nasional membuat Indonesia tidak bisa berlama-lama tanpa ketegasan terhadap kasus Aceh. Tahun depan mulai Januari sampai Oktober 2004, praktis politik nasional tidak bisa diganggu. Saat itu, kita sedang melaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR sekaligus memilih presiden secara langsung untuk pertama kali. Tidak ada partai, bahkan pemerintah, yang mau mengambil risiko besar saat itu.

Jika masalah Aceh tahun ini masih terkatung-katung, hampir bisa dipastikan bahwa pada 2004, masalah Aceh semakin terkatung-katung. Untuk kepentingan nasional, mau tidak mau, masalah Aceh harus diselesaikan pada tahun ini juga.

Jika memang jalan damai akan dicoba, tidak bisa tidak, solusi damai tersebut harus efisien dan langsung ke inti permasalahan. Politik justru harus dibicarakan saat itu juga di JCM. Berbeda dengan GAM, Indonesia justru harus berbicara politik, harus berbicara ending point dan harus berbicara prinsip negara berdaulat di seluruh teritori Indonesia yang tidak bisa dikompromikan.

Saya membayangkan, pihak Indonesia mendesak JCM menyetujui paket perdamaian, seperti ini misalnya. Pertama, proses damai memberikan wewenang kepada GAM untuk mengusulkan modifikasi seluas-luasnya atas otonomi khusus. Namun, tidak bisa ditawarkan lagi GAM juga harus setuju bahwa NKRI tetap menjadi payung bagi Aceh.

Tidak ada lagi seruan Aceh Merdeka. Tidak ada lagi kemungkinan referendum.

Kedua, GAM diberi wewenang untuk mengubah diri menjadi kekuatan politik resmi di Aceh. Namun jelas pula bahwa GAM dilarang menumpuk dan mempunyai senjata. Semua kekuatan politik di Indonesia, bahkan partai besar dan partai paling berkuasa, memang tidak diizinkan memanggul senjata. Jelas pula, GAM dilarang memungut pajak dari rakyat. Sebab kewenangan itu ada pada pemerintah Republik Indonesia yang sah.

Ketiga diberikan amnesti masal kepada semua tokoh GAM. Bahkan mereka yang sudah pindah warga negara diberi pilihan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia dan dimungkinkan menjadi gubernur Aceh. Namun, jelas pula bahwa aspirasi Aceh merdeka tidak lagi dianggap bagian dari hak asasi, tetapi merupakan kejahatan terhadap negara. Harus diatur juga bahwa pemakaian istilah GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada waktunya akan dilarang.

Indonesia sebenarnya sudah memberikan semua yang mungkin diberikan oleh sebuah negara yang berdaulat. Aceh ingin menjalankan syariat Islam? Itu sudah diberikan. Aceh ingin menguasai lebih banyak hasil minyak buminya sendiri? Itu juga sudah dilakukan. Aceh ingin pihak asing terlibat dalam proses damai? Itu juga sudah dilakukan.

Namun, tentu saja mustahil Indonesia juga memberikan keinginan Aceh untuk merdeka. Jika kemerdekaan juga diberikan, Indonesia bertindak bunuh diri. Pada waktunya, wilayah lain mulai Papua, Maluku dan sebagainya akan menuntut hal yang sama.

Saatnya pemerintah berlaku sangat tegas soal Aceh. JCM harus dijadikan forum terakhir bagi solusi damai tersebut. Itu pun dilakukan jika GAM setuju terhadap amandemen perjanjian secara radikal bahwa ujung semua proses damai adalah otonomi khusus yang dimodifikasi dalam naungan NKRI * *

Tujuh Tentara yang Gugur

PERKEMBANGAN terakhir di Aceh, tujuh tentara gugur dalam pertempuran di Matang Kumbang, Bireun. Selama lebih dari dua puluh hari berlangsungnya operasi terpadu, ini merupakan peristiwa yang paling banyak memakan korban dari pihak tentara. Saat itu, mereka mengejar anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang lari ke daerah perbukitan. Wilayah itu memang sangat dikenali oleh aktivis GAM. Tentara Indonesia yang mengejar dijebak dan ditembaki dengan senjata mesin ringan dan GLM (granat lontar).

Kepala kita pun tertunduk. Setiap kali kita mendengar tewasnya tentara di Aceh, setiap kali pula kita nyanyikan lagu Gugur Bunga di dalam hati. Secara konseptual, operasi terpadu di Aceh sudah selesai. Baik secara politik maupun secara moral, GAM memang harus ditundukkan secepat-cepatnya.

Aneka strategi sudah pula dirumuskan. Bukan hanya diterapkan operasi keamanan, operasi kemanusiaan, penegakan hukum dan pemberdayaan pemerintah daerah. Politik diplomasi pun disiapkan

untuk memburu pemimpin GAM di luar negeri. Bahkan, sudah pula disiapkan amnesti bagi aktivis ataupun pemimpin GAM yang menyerahkan diri. Dalam tataran gagasan, tidak ada lagi yang belum dirumuskan.

Namun secara operasional, aneka gagasan itu ternyata tidak mudah diwujudkan. Yang sudah selesai dirumuskan di tingkat gagasan memerlukan operator lapangan. Para tentara itu menjadi tiang utama untuk mewujudkan aneka gagasan tersebut. .

Secara konseptual, tidak ada lagi keraguan mengenai perlunya pemerintah Indonesia melumpuhkan GAM secepat-cepatnya. Baik secara politik maupun moral, tindak tanduk GAM memang sudah dapat diklasifikasi untuk ditumpas sampai ke akar-akarnya. Seandainya GAM itu ada di Amerika Serikat, Eropa, ataupun negara demokrasi lainnya. pemerintah setempat pun akan mengambil kebijakan yang sama, memburu GAM sampai ke sumbernya.

Kesalahan GAM terbesar, ia tidak mengambil format politik dalam bentuk aksi protes yang non-kekerasan. Seandainya GAM itu hanyalah gerakan politik protes, ia akan didukung secara kuat sekali oleh berbagai elemen publik Indonesia. Bahkan, dunia internasional akan pula jatuh hati. Banyak contoh gerakan protes yang sangat sukses seperti civil rights movement di Amerika Serikat, di mana kulit hitam menuntut keadilan dan perlakuan yang sama.

Dengan memilih gerakan separatisme bersenjata, GAM sebenarnya sudah menggali kuburnya sendiri. Apalagi GAM sudah memiliki struktur pemerintahan dan sudah pula punya bendera sendiri. GAM berlaku selayaknya negara dalam negara. Negara yang ingin berdaulat, di mana pun di dunia ini, tidak akan pernah toleran terhadap gerakan politik bersenjata. Sekali GAM diberi angin, segera muncul aneka gerakan politik bersenjata lainnya. Dengan segera, negara itu pun akan hancur lebur.

Pemilihan format gerakan bersenjata dan separatisme juga menjadi obat yang salah bagi diagnosis yang mungkin benar. Kekecewaan publik Aceh terhadap pemerintah adalah kekecewaan atas kebijakan atau atas pelaksana kebijakan itu di Aceh. Koreksi yang harus dilakukan juga koreksi kebijakan pemerintah. Atau sekaligus juga koreksi atas figur atau tokoh pemerintahan daerah Aceh.

Negara Indonesia tidak bersalah. Yang bersalah mungkin pemerintahannya saat itu. Jangan negara Indonesiannya yang digugat dengan cara memisahkan diri dalam gerakan separatisme. Pemerintahnya yang seharusnya digugat. Dan itu justru lebih maksimal serta lebih mendapatkan dukungan luas jika dilakukan melalui aksi protes terhadap kebijakan pemerintah.

Selain memilih gerakan separatisme bersenjata, kesalahan lain GAM adalah meminta hal yang mustahil diberikan oleh sebuah negara berdaulat. Yang paling jauh bisa diberikan Indonesia kepada Aceh adalah otonomi khusus yang seluas-luasnya. Syariat Islam sudah diberikan. Pada saat di semua provinsi lain berlaku hukum nasional yang sama, hanya Aceh yang diberi perkecualian. Amnesti masal bagi GAM juga sudah ditawarkan. Bahkan, GAM juga diberi hak menjadi politisi daerahnya seperti gubernur jika memang dipilih dalam pemilihan umum yang sah.

Dialog dengan damai untuk mewujudkan tawaran tertinggi dari pemerintah sudah disediakan. Pemerintah bahkan sudah membuka diri untuk membiarkan dialog itu berlangsung di luar negeri. Bahkan, sudah dilibatkan pula mediator internasional. Tidak ada lagi tawaran yang lebih tinggi yang dapat diberikan oleh pemerintah berdaulat seperti yang sudah disodorkan pemerintah. Namun, GAM menutup tawaran itu karena meminta hal yang lebih tinggi, yang mustahil diberikan pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keutuhan negaranya.

Kini alasan menumpas GAM semakin bertambah dengan alasan moral. Dalam perlawanannya, GAM tidak lagi peduli kepada

kepentingan publik, bahkan terhadap kondisi rakyat Aceh sendiri, yang ia klaim ingin diperjuangkan. Ratusan sekolah dibakar. Puluhan ribu murid kehilangan tempat belajar. Aksi ini bahkan mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah sakit, semestinya dilindungi karena dibutuhkan rakyat sipil yang tidak tahu-menahu soal perang.

Alasan moral itu bertambah lagi dengan melihat pilihan politik pemimpin tertinggi GAM sendiri. Hasan Tiro dan lain sebagainya bukanlah Che Guevara yang berjuang bersama rakyatnya. Che Guevara berjuang masuk-keluar hutan. Dia juga mengambil resiko terbunuh di hutan, sebagaimana para pengikut setianya. Dia turut merasakan kurangnya logistik dan ketidaknyamanan perang.

Sebaliknya, Hasan Tiro dan pemimpin tertinggi GAM lainnya memilih menjadi warga negara asing. Ketika pengikutnya di Aceh keluar-masuk hutan, Hasan Tiro hidup dengan nyaman di negara orang. Dia sudah menjadi warga negara Swedia yang dilindungi hukum nasional Swedia. Akibat manuver politiknya, begitu banyak rakyat Aceh yang mati dan menderita. Namun, dia dan pemimpin teras GAM lainnya – dengan nyaman – terus mengembangkan aneka wacana Aceh merdeka.

Yang sudah tuntas secara konseptual di atas memerlukan garda terdepan di lapangan untuk mewujudkannya. Para tentara itu memikul tugas menumpas GAM sampai ke akar-akarnya. Di Bireun, Matang Kumbang, mereka sudah mengejar GAM. Tujuh tentara tewas. Hormat . kita berikan setinggi-tingginya kepada para tentara itu. Lebih dari kita semua, mereka telah memberikan nyawanya bagi terjaganya NKRI. * *

Teror Bom Mengguncang Jakarta

REFORMASI ternyata tidak hanya membawa demokrasi dan kebebasan. Reformasi di Indonesia ternyata juga diisi oleh bom dan teror. Terakhir, sebuah bom berkekuatan besar meledak di Hotel Marriot.

Publik luas mungkin semakin merasa tidak nyaman. Menduga-duga, mungkin suatu ketika ada bom susulan. Jika bom itu tidak meledak di hotel, mungkin di mal, mungkin di rumah ibadah, mungkin di jembatan besar, mungkin di restoran dan sebagainya. Ketidaknyamanan inilah yang persisnya ingin diciptakan kelompok teroris itu.

Padahal, dalam setahun ini, masalah keamanan sudah semakin tertata. Aneka kerusuhan di daerah yang disebabkan konflik horizontal (agama, etnis, penduduk asli versus pendatang) sudah semakin bisa ditangani. Kita tidak lagi mendengar munculnya kerusuhan primordial berdarah di aneka wilayah Republik Indonesia. Gerakan separatisme juga sedikit banyak mulai terkontrol. Benar

di Aceh, kasus ini belum selesai. Namun, di Aceh pun keamanan semakin terjaga.

Kasus bom Bali juga memasuki tahap akhir. Pelaku utamanya sudah ditangkap dan diadili. Pengusutan atas bom Bali bahkan mendapat pujian internasional. I Made Pastika dinobatkan Majalah Time sebagai the newsmaker, bahkan pahlawan Asia tahun 2002. Menjelang Pemilu 2004, kondisi politik dan keamanan semakin stabil. Bom yang melanda Hotel Marriot seolah menghancurkan citra itu semua. Seperti rumah kartu, citra keamanan kita ambruk seperti ditiup angin kencang.

Tidak ada yang salah pada persiapan dan kesiapan jajaran Menko Polkam dalam menangani masalah keamanan. Ini hanya nasib buruk. Jaringan teroris mengacaukan semuanya. Bukan hanya pemerintah yang baru seperti Indonesia yang dapat dikacaukan teroris. Bahkan, di Negara superpower seperti Amerika Serikat, pusat kedigdayaan militer dan puncak keberhasilan pemerintahan, toh tetap bisa diperdaya oleh kelompok teroris.

Dari sisi kebijakan dan infrastruktur banyak hal yang sudah ditata untuk menghadapi gerakan teroris. Dari sisi hukum sudah disiapkan undang-undang terorisme. Pihak keamanan diberi keleluasaan untuk menginvestigasi pelaku atau tertuduh terorisme dibandingkan dengan yang diatur dalam hukum acara pidana biasa. Disiapkan pula infrastruktur undang-undang money laundering untuk membongkar kemungkinan pendanaan terorisme dari luar negeri.

Sudah pula dibentuk tim khusus penanggulangan terorisme di bawah Menko Polkam. Dibentuk desk yang secara khusus memantau perkara terorisme, dengan jaringan pemerintahan yang lengkap, meliputi aneka departemen terkait. Menko Polkam sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono, dikenal sangat kompeten menjadi dirjen dari aksi penanggulangan terorisme.

Kepolisian kita sudah pula mempunyai pengalaman menggulung jaringan terorisme. Atas nama hukum, memang belum bisa kita pastikan apakah Amrozi, Imam Samudera dan kawan-kawan benar-benar master-mind di balik bom Bali dan kekerasan lainnya. Namun setidaknya semakin terungkap adanya gerakan bawah tanah yang membenarkan bagi tujuan politik, bahkan agama. Persoalannya, memang pasukan keamanan tidak bisa diharapkan siap dua puluh empat jam di semua lokasi penting. Terlalu banyak hotel internasional yang perlu diawasi. Terlalu banyak bandar udara di seluruh Indonesia yang harus dikawal. Terlalu banyak masjid, gereja dan rumah ibadah yang mesti dilindungi. Terlalu banyak tempat hiburan yang perlu dijaga. Mustahil semua itu dapat dilakukan aparat keamanan yang sumber dayanya terbatas.

Justru di titik ini pula, kelompok teroris itu beraksi. Selalu pasti ada kelengahan di salah satu titik lokasi. Ketika semua mata menuju Sidang Tahunan MPR, ketika aparat keamanan difokuskan kepada Lembaga MPR itu, ternyata bom justru meledak di sebuah hotel swasta. Selalu ada kejutan dalam aksi terorisme itu. Jangankan pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah Amerika Serikat pun, tidak menduga gedung Pentagon dapat menjadi sasaran teroris dalam tragedi 11 September 2001.

Siapa pelaku bom Marriot itu? Apakah ada hubungannya dengan bom di Bali? Sampai saat ini, informasi yang kita punya belum cukup untuk mengambil kesimpulan apapun. Sebelum ada bukti yang konkret di lapangan, berdasarkan penelitian yang ketat dan ilmiah, sebaiknya aneka spekulasi tidak dinyatakan. Spekulasi bahkan dapat membuat situasi politik semakin buruk, panas dan tidak pasti.

Namun, secara makro, setidaknya, dapat disusun beberapa skenario berdasarkan pihak yang dirugikan. Pertanyaannya siapa yang paling dirugikan oleh bom Marriot itu? Pihak yang dirugikan ini paling mungkin menjadi sasaran teroris. Sementara itu pelaku teroris sangat mungkin adalah musuh pihak yang dirugikan tersebut.

Ada empat skenario mengenai pihak yang dirugikan. Pertama, targetnya adalah pemerintahan Megawati. Bom Marriot ini ingin memberi citra pemerintahan Megawati yang tidak kompeten. Dengan meledaknya bom di berbagai tempat, apalagi jika ada susulan, mudah sekali menjadikan pemerintahan Megawati sebagai sasaran tembak. Bidikannya kemudian adalah peluang Megawati sendiri untuk terpilih kembali sebagai presiden 2004 semakin kecil.

Kedua, targetnya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Sejak Reformasi, keamanan dalam negeri memang menjadi tanggung jawab polisi. Dalam praktik, banyak sekali "ruang-ruang basah" yang dinikmati oknum polisi karena kewenangan baru itu. Mungkin, ada pula pihak yang tidak suka terhadap kewenangan baru Polri tersebut. Dengan diguncang-guncangnya keamanan, kewibawaan polisi dilukai.

Ketiga targetnya adalah kepentingan Amerika Serikat. Hotel Marriot masih diasosiasikan dengan Amerika Serikat. Sejak lama memang ada jaringan internasional yang ingin mengganggu seluruh kepentingan Amerika Serikat di manapun. Peledakan Hotel Marriot dapat saja untuk memenuhi target tersebut.

Keempat, targetnya adalah kelompok Islam garis keras. Hampir dapat dipastikan, publik mudah sekali percaya bahwa pelaku pengeboman itu datang dari kalangan radikal keagamaan. Bisa saja, mereka yang ingin mempertahankan citra itu justru yang menjadi pelaku pengeboman. Hotel Marriot sengaja dipilih agar lebih mudah mengkambinghitamkan kelompok radikal keagamaan itu. Padahal, pelakunya belum tentu mereka.

Sekali lagi, segala hal masih mungkin. Yang jelas, siapa pun yang menjadi pelaku, mereka layak menjadi the common enemy number one. * *

Pro Kontra Terhadap ISA

SETELAH bom meledak lagi di Marriot, akan kah payung hukum memerangi terorisme diubah? Misalnya, hukum dibuat lebih memberikan keleluasaan kepada aparat keamanan untuk melakukan pre-emptive strike atau tindakan pencegahan dengan menghancurkan terlebih dahulu basis dan calon pelaku teroris? Terorisme bukan kejahatan biasa. Harus kah mereka dihadapi dengan aturan hukum yang juga tidak biasa?

Rasa takut dan paranoia yang melanda sebagian masyarakat setelah bom meledak memang belum setinggi di Amerika Serikat. Setelah tragedi 11 September 2001, kecemasan begitu menghantui banyak penduduk Amerika Serikat. Ketika masuk gedung tinggi, mereka ingin keluar secepatnya karena khawatir gedung itu dibom. Ketika lewat jembatan yang besar dan panjang, mereka ngebut sebisanya. Mereka khawatir jembatan itu dipasangi granat.

Bahkan, sempat pula mereka takut membuka surat dan kotak yang dikirim ke alamat rumah. Mereka khawatir di dalamnya ada

virus anthrax. Kekhawatiran ini mulai sembuh setelah pemerintah Amerika Serikat secara tegas membuat kebijakan baru mengenai keamanan dalam negeri. Perang melawan terorisme menjadi program utama sepenting melawan komunisme pada 1960-an. Dikembangkanlah doktrin pre-emptive strike untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat.

Di kalangan penanggungjawab keamanan di Indonesia, mulai pula terpikir untuk mengembangkan doktrin hukum yang lebih memadai untuk melawan terorisme. ISA (Internal Security Acts) atau undang-undang keamanan dalam negeri yang hidup di Malaysia dan Singapura mulai dilirik.

Undang-undang serupa di Malaysia yang berlaku sampai sekarang dapat dijadikan perbandingan. ISA berasal dari UU darurat di era kolonial Inggris, sekitar 1948, untuk menghadapi pemberontakan komunisme. Ketika Malaysia merdeka, aturan itu dimodifikasi seperlunya, namun tetap dipertahankan.

Sejak 1960-an sampai 2003, lebih dari 40 tahun, legitimasi hukum yang keras itu berubah-ubah. Setelah komunisme surut, ISA diberlakukan untuk menjaga kerukunan, isu agama, dan etnis. Malaysia pada 1960-an dan 1970-an diramaikan oleh konflik agama dan etnis. ISA dijadikan instrumen untuk membungkam aneka kerusuhan horizontal itu.

Namun kini, setelah tragedi 11 September 2003, ISA memperoleh legitimasi untuk memerangi terorisme. Jaringan yang rapi, kenekatan, serta kekerasan yang dibawa kelompok teroris dianggap hanya efektif dicegah melalui ISA. Pemerintah Barat, terutama Amerika Serikat, pada mulanya sangat kritis terhadap berlakunya ISA itu. Namun setelah tragedi 11 September 2003, walau tidak tegas, Amerika Serikat justru menyenangi ISA. Bahkan, Amerika Serikat mungkin berharap aturan serupa diterapkan di wilayah lain yang terancam terorisme.

Memang banyak yang kontroversial soal ISA. Misalnya, pihak keamanan dapat menangkap siapa saja yang diyakini membahayakan keamanan negara. Penangkapan itu tidak perlu dijustifikasi oleh hakim atau pengadilan. Lama penangkapan dapat diperpanjang sampai 60 hari. Bahkan, jika memang diperlukan, menteri dalam negeri dapat memperpanjang masa penahanan itu demi kepentingan interogasi.

Selama masa tahanan, sang tertuduh itu tidak diberi hak untuk mempunyai pendamping atau pembela hukum. Bahkan, ia juga bisa dijauhkan dari keluarganya. Semua itu menjadi “tetek-bengek” yang dikalahkan oleh kepentingan yang seolah-oleh lebih besar, seperti menjaga keamanan negara.

Titik rawan ISA karena ia diberlakukan secara umum. Akibatnya, bukan hanya teroris yang efektif dibekuk dan dicegah. Tokoh oposisi acap kali pula dijaring boleh ISA itu. Tanpa kontrol yang memadai dari publik, ISA memang rawan disalahgunakan.

Jika memang ISA model Malaysia dan Singapura ingin diterapkan, tentu harus ada modifikasi radikal. Kemungkinan kesewenangan dalam ISA itu dicegah sekeras mungkin. ISA pun mungkin hanya boleh digunakan untuk aksi yang diklasifikasi sebagai terorisme. Oposisi politik tanpa kekerasan tidak boleh dijaring melalui ISA.

Lalu, bagaimana dengan penangkapan calon pelaku teroris sebelum proses pengadilan? Bolehkah hal itu dilakukan demi efektivitas pencegahan terorisme? Memang ada dilema dalam aturan itu. Di satu sisi, tanpa proses pengadilan, membuat aparat dapat bekerja lebih cepat. Keamanan mungkin lebih dapat dilindungi. Namun di sisi lain, siapa yang dapat mengontrol kesewenangan di lapangan?

Di sisi lain, kita sudah pula memiliki UU Terorisme Tahun 2003. Bahkan, di kalangan pendekar hak asasi, UU ini dianggap sudah menyimpang jauh. Padahal, UU ini belum apa-apa dibandingkan ISA dari sisi kekerasannya. Misalnya, dikritik mengenai kemudahan alat bukti dalam UU Terorisme. Alat bukti elektronik dan intelijen dimungkinkan sebagai bahan awal. Sejauh disetujui hakim, alat bukti itu sudah dapat digunakan untuk menangkap.

Sebaliknya, di kalangan pemimpin aparat keamanan, UU Terorisme 2003 itu masih tidak memadai. Berdasarkan UU itu, data di lapangan berdasarkan laporan intelijen belum dapat digunakan. Padahal, jika bisa digunakan, mungkin jaringan itu sudah dapat diringkus sebelum mereka sempat megebom aneka tempat. Mulai terdengar suara agar UU ini direvisi untuk mendekati prinsip yang terdapat dalam ISA itu.

Pro dan kontra terjadi. Semua pihak ingin memberantas terorisme. Namun, terjadi tarik-menarik yang kuat sekali, bukan hanya antara aparat keamanan dan pendekar hak asasi. Di kalangan pemerintah, tampaknya juga terjadi perbedaan pendapat.

Sementara itu, masih banyak kader teroris yang belum tertangkap. Diduga, masih banyak pula bahan peledak yang belum diketahui tempat persembunyiannya. Serangan bom susulan selalu terbuka terjadi di mana saja. Bom bunuh diri sudah pula "diimpor" ke Indonesia. Demi rasa aman, semua pihak harus kembali merenung. Harus dicari formula yang tepat agar ada payung hukum yang lebih membuat aparat keamanan leluasa bergerak agar dapat mencegah aksi terorisme.

Di era rawan seperti sekarang, prinsip kebebasan dan hak asasi dapat saja dikalahkan sejauh ada alasan rasional yang sangat kuat. Apalagi jika penyimpangan itu dilakukan hanya untuk penumpasan terorisme. **

Menangkap Alumni Afganistan

BAIK di Indonesia ataupun Pakistan rupanya sedang terjadi demam “penangkapan”. Pemerintah Pakistan menangkap berbagai tertuduh teroris. Di samping asal Malaysia, tertangkap pula warga Indonesia. Gungung Rusman Gunawan, 27 tahun, yang tertangkap ternyata adalah adiknya Hambali, yang tersohor itu.

Di Indonesia, hal yang sama terjadi. Tiba-tiba beberapa aktivis masjid hilang mendadak. Setelah sang korban melapor kepada aneka pihak, mulai dari Kontras sampai MUI, terdengar kabar bahwa mereka berada dalam tahanan polisi. Sama dengan Pakistan, kasusnya menyangkut penumpasan terorisme.

Yang menyatukan kasus Indonesia dan Pakistan ternyata Afganistan. Begitu banyak para tertuduh yang ditangkap ternyata pernah ke Afganistan, alias Alumni Afganistan. Apakah memang “Afganistan” sudah menjadi “sekolah” bagi pelaku teror? Apakah memang status alumni Afganistan cara termudah untuk mengenali calon-calon pelaku terorisme?

Setelah bom meledak di Bali, apalagi setelah bom meledak di Hotel Marriott, strategi pemerintah menanggulangi terorisme menjadi lebih keras. Pemerintah tidak hanya mengusut pelaku teror yang sudah terjadi. Pemerintah juga melakukan pencegahan terhadap teror. Penangkapan menjadi modus operandi paling mudah untuk pencegahan.

Amerika Serikat lah yang pada mulanya mempopulerkan istilah pencegahan terorisme secara kontroversial. Dalam bahasa aslinya disebut pre-emptive strike. Inti dari doktrin ini adalah prinsip bahwa sebelum teroris menyerang teritori Amerika Serikat, basis teroris dan negara yang melindunginya harus diserang duluan. Dengan kata lain perang terhadap terorisme harus dilakukan di basis para teroris itu sendiri. Terlalu besar resikonya jika pemerintah Amerika Serikat bergerak hanya setelah aksi terorisme terjadi. Sebagaimana dikatakan sejumlah senator dan anggota konggres Amerika Serikat, "Daripada kita bertempur dengan pelaku teroris di sepanjang jalan-jalan di kota Amerika Serikat, lebih baik kita bertempur dengan mereka di negara mereka sendiri."

Doktrin ini lahir setelah Amerika Serikat mengalami tragedi 11 September 2001, di mana ribuan nyawa warga sipil menjadi korban aksi para teroris. Doktrin ini dilahirkan oleh kelompok Neo-konservatif dalam lingkaran pemerintahan Presiden Bush. Afganistan boleh disebut sebagai aksi anak kandung pertama dari doktrin ini. Hasilnya pemerintahan Taliban diganti dan Pusat Al-Qaeda yang diyakini berkongsi dengan penguasa Taliban dihancurkan. Giliran berikutnya adalah Irak.

Pemerintah Indonesia mungkin menerapkan konsep pre-emptive strike itu untuk kasus yang jauh lebih kecil dan domestik. Sejak lama intelijen memberikan sinyal bahwa masih ada ratusan bahan peledak tersembunyi di tempat yang belum diketahui. Masih tercium adanya jaringan yang ingin untuk bereaksi kembali.

Karena tidak ingin mengulangi “kecolongan” seperti di Bali dan Marriott, polisi pun bergerak melakukan “pre-emptive strike.” Soal prosedur atau hukum dapat didiskusikan belakangan. Tetapi yang penting para calon pelaku dicituk dulu sebelum bom meledak. Dari “mulut” mereka yang ditangkap, memang terbongkar penyimpanan bahan peledak dan lebih dari 2000 butir peluru. Dari bahan itu sendiri, setidaknya sejumlah rencana pengeboman dapat dihindari.

Persoalannya kemudian, bagaimana jika terjadi salah tangkap? Siapa yang mengontrol kemungkinan kesalahan tangkap? Bukankah laporan intelijen bisa salah? Jangankan intelijen Indonesia, intelijen yang canggih di Inggris dan Amerika Serikat saja dapat memberikan data yang salah, seperti kasus “data bom massal” di Irak. Ini yang menjadi pangkal pro dan kontra.

UU penanggulangan terorisme yang menjadi aturan main sudah lama dikritik. Bagi aparat keamanan, UU yang ada tidak memberikan keleluasaan untuk pencegahan terorisme. Untuk menangkap, dibutuhkan dulu keputusan hakim. Langkah ini memang dibuat untuk mengakomodasi tuntutan HAM. Seseorang tidak boleh semena-mena ditangkap, tanpa bukti yang cukup. Adalah pihak ketiga yang memverifikasi apakah bukti itu cukup, bukan intelijen itu sendiri, atau polisi. Pihak ketiga yang dianggap punya otoritas adalah hakim.

Revisi sedang diajukan terhadap ketentuan UU ini. Dari aneka pikiran yang berkembang di masyarakat, ada yang mengusulkan penambahan kewenangan penangkapan. Memang intel semata tidak boleh menangkap. Tetapi bagaimana jika pimpinan tertinggi polisi diberi kewenangan menangkap, tanpa perlu verifikasi dari hakim? Jika ada kasus salah tangkap, kapolri bertanggung jawab dan mengganti kerugian.

Bukankah terorisme bukan tindakan kriminal biasa? Aksi itu punya organisasi yang rapih dan rahasia. Menghadapi aksi ini,

prosesnya harus lebih cepat. Toh proses yang cepat itu hanya untuk penanggulangan terorisme saja, bukan isu lainnya.

Revisi lain, yang datang dari pihak pemerintah sendiri adalah menangkap “perencana” dan “penggerak” tindakan terorisme. Walau aksi teror itu belum terjadi, untuk berbagai alasan, sang perencana dan penggerak sudah bisa dipidana. Lengkapnya bunyi draft revisi itu, “ Ancaman pidana tiga sampai lima belas tahun bagi yang merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, kendati tindakan teror itu belum terjadi.”

Seperti biasa, gagasan revisi ini juga mendapatkan tantangan dari pakar atau aktivis HAM. Aparat keamanan mungkin melihat Amerika Serikat. Dulu Amerika Serikat juga sangat peduli HAM, PBB, dan hukum internasional. Namun setelah Tragedi 11 September, yang utama bagi mereka bagaimana agar terorisme dapat dilenyapkan secepatnya. Jika kadang-kadang HAM diabaikan, atau PBB ditelikung, itu pun ditempuh. * *

Satu Tahun Bom Bali

SATU tahun sudah bom meledak di Bali. Satu tahun pula perang terhadap terorisme secara resmi sudah dikobarkan. Mengikuti alur dalam pembukuan akuntansi, saatnya program anti teror di Indonesia diaudit. Setelah setahun, perlu dinilai, perolehan apa dari perang melawan terorisme itu yang dapat dikategorikan sebagai surplus. Kejadian apa pula dalam setahun itu yang dapat dianggap defisit. Lalu, secara makro dapat dihitung, setelah setahun bom Bali, apakah penumpasan terorisme dapat dianggap “laba” atau justru “rugi”.

Selama lima tahun reformasi, bom Bali menjadi peristiwa yang paling heboh. Ia heboh bukan saja karena banyaknya korban yang tewas dalam satu peristiwa. Ia juga heboh bukan hanya karena banyaknya warga asing yang terbunuh di bumi Indonesia. Isu bom Bali jauh lebih seksi karena adanya kontroversi jaringan terorisme dengan ambisi yang sangat besar.

Berulang-ulang dinyatakan, sedang tumbuh sebuah kekuatan yang ingin menegakkan negara Islam di seluruh wilayah Asia Tenggara. Tidak hanya Indonesia yang akan “di-Islamkan”, namun juga Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Bahkan, Australia juga disebut-sebut akan dicaplok oleh jaringan itu. Tidak tanggung-tanggung pula, disebut-sebut bahwa jaringan yang berada di belakang bom Bali punya kaitan dengan A1-Qaidah di Timur Tengah.

Tidak pernah kita tahu seberapa benar tuduhan itu. Namun opini publik yang terbentuk, baik melalui media maupun bisik-bisik di bawah permukaan, sudah sedemikian terpolarisasi. Bom Bali, akibatnya, mendapat perhatian yang luar biasa, emosional, mengerikan bagi satu pihak, namun juga “menjanjikan” bagi pihak lain.

Setelah setahun bom Bali, banyak perkembangan yang dapat kita kategorikan “surplus”. Karena bom Bali, perlahan ditemukan jaringan terorisme yang meledakkan beberapa tempat secara terencana. Tidak penting benar apakah jaringan ini bernama Jamaah Islamiyah atau bukan. Juga tidak penting apakah jaringan ini benar-benar ingin menegakkan negara Islam di Asia Tenggara. Bahkan, tidak penting apakah jaringan ini memang punya kaitan dengan Al Qaidah dan Usamah Bin Laden.

Yang penting jaringan ini sudah terbongkar, ditangkap, diadili dan ditahan. Secara meyakinkan, pengadilan membuktikan keterlibatan tokoh yang ditangkap. Dari para pelaku, dapat dilacak berbagai aksi teror sebelumnya. Dari pelaku, dapat diketahui pula aksi teror berikutnya yang direncanakan.

Memang banyak yang skeptis bahwa yang tertangkap itu hanya agen kecil. Yang penting menurut mereka adalah mastermind-nya aktor intelektualnya. Selama aktor intelektualnya itu tidak tertangkap dan terungkap, selama itu pula sang aktor intelektual dapat menciptakan agen kecil lain untuk meledakkan wilayah lain.

Namun untuk dunia terorisme, yang bergerak di bawah permukaan, tidak pernah ada kata pasti, siapa yang menjadi aktor intelektual itu. Mencari aktor intelektual sama seperti mencari hantu, serba misteri. Setidaknya walau yang tertangkap hanya agen kecil tetapi dari mereka publik luas di Indonesia sudah teryakinkan memang ada jaringan terorisme itu.

Perkembangan lain yang penting adalah ditangkapnya “ikan besar” Hambali. Tokoh ini nyaris menjadi legenda, sejenis Usamah Bin Laden di Asia. Banyak yang meyakini dengan tertangkapnya Hambali, jaringan terorisme akan lumpuh. Hambali dianggap memainkan peran sentral yang menghubungkan pemilik dana dengan pelaku lapangan.

Tidak penting benar siapa Hambali sebenarnya. Pihak Barat, misalnya menuding Hambali sebagai operator Jamaah Islamiyah yang ingin menegakkan imperium Islam melalui aksi teror. Sebaliknya pihak yang anti Amerika Serikat mengklaim Hambali adalah agen CIA yang lama dibina Amerika Serikat sendiri.

Penangkapan Hambali oleh Amerika Serikat juga melahirkan pro dan kontra. Pihak Amerika Serikat meyakini bahwa Hambali perlu dikendalikan pemerintah Amerika Serikat sendiri karena diduga terlibat serangan WTC 11 September. Dari dia akan dikorek keterangan lain, terutama menghadapi serangan susulan melawan Amerika Serikat. Pihak yang anti Amerika Serikat mengembangkan teori sebaliknya. Menurut mereka, Hambali diamankan Amerika Serikat agar jejaknya sebagai “boneka” Amerika Serikat tidak terungkap.

Yang penting dari penangkapan itu, siapapun Hambali, berkurang sudah operator terorisme yang begitu ditakutkan. Yang perlu dicegah kemudian adalah kaderisasi yang cepat di kalangan pelaku teror. Jangan sampai terjadi “mati satu tumbuh seribu”.

Namun, setahun setelah bom Bali, ada pula perkembangan yang dapat dianggap “defisit” atau memprihatinkan. Amerika Serikat semakin tidak populer di dunia muslim, termasuk di Indonesia. Berdasar jajak pendapat lembaga profesional, publik luas di negara muslim justru semakin “tidak suka” kepada Amerika Serikat. Ini berita buruk, tidak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi perang melawan terorisme. Amerika Serikat, sang pemimpin yang sedang mengendalikan perang global melawan terorisme, semakin tidak disukai.

Tentu ada kesalahan dalam strategi Amerika Serikat menghadapi terorisme. Arogansi Amerika Serikat, terutama menyerang Irak secara unilateral, menyumbang banyak kepada kemarahan “dunia muslim”. Sikap Amerika Serikat yang tampak selalu melindungi Israel dalam konflik dengan Palestina juga menambah amunisi kemarahan kepadanya. Jika ingin berhasil menumpas terorisme, Amerika Serikat harus mencari cara agar leadership-nya dalam perang global itu justru semakin disukai, semakin dicintai, semakin dihormati.

Perkembangan lain yang buruk adalah diimpornya “bom bunuh diri” ke Indonesia. Tidak diketahui apakah pengebom Hotel Marriot itu mati karena kecelakaan atau bunuh diri. Namun, di dunia terorisme “bunuh diri” sudah dianggap biasa sejauh itu dilakukan sambil menghancurkan kekuatan “musuh”. Bahkan, oleh sebagian kecil kalangan, ini dianggap “jihad” yang akan mendapat balasan “surga”.

Terorisme, akibatnya semakin susah dilacak dan dilawan. Sang pelaku tidak perlu menyerang sasaran militer. Hanya ingin efek publikasi dan serangan atas warga atau kepentingan Amerika Serikat yang dianggap “negara kafir”, bom segera meledak bersama dengan tubuhnya sendiri. Israel kewalahan menghadapi bom bunuh diri. Pemerintah Indonesia juga akan kewalahan jika bom bunuh diri semakin luas.

Dihitung-hitung secara sekilas, setelah setahun bom Bali, “pembukuan” perang melawan terorisme di Indonesia masih “surplus”. Walau masih ada sisi minusnya, namun sisi plus jauh lebih strategis. **

Amien Rais Terbentur Segmentasi Politik

PEMILIHAN presiden tahun 2004 masih dua tahun lagi. Namun, Amien Rais sudah diusung sebagai calon presiden. Partai Amanat Nasional baru saja menyelesaikan pertemuan partai tingkat nasional. Siapa yang akan dijadikan calon presiden partai ini tidak lagi ada kontroversi. Figur Amien Rais terlalu dominan di kalangan komunitas PAN. Bagi pimpinan partai, kerja berikutnya hanya mencari pasangan wakil presiden untuk memperkuat peluang Amien.

Tidak dibantah bahwa Amien Rais adalah salah satu tokoh politik yang paling populer di seantero negeri. Aneka posisi politik dan agama sudah dijabatnya. Dia pernah duduk di Dewan Pakar ICMI, ketua PP Muhammadiyah, ketua umum PAN dan ketua MPR Jabatan yang informal pun disandanginya sebagai pimpinan reformasi 1998 dan the king maker yang mengangkat dan menjatuhkan presiden. Memang hanya jabatan presiden yang belum diraihnya.

Bagaimana prospek Amien Rais sebagai calon presiden dan apa kekuatan politik serta hambatannya?

Jarang ada tokoh politik yang memiliki kapasitas leadership selengkap Amien Rais. Beberapa elemen terpenting leadership pada dirinya justru sangat menonjol. Amien memiliki personal courage yang sudah teruji. Keberanian mengambil resiko demi sebuah cita-cita politik sangat penting bagi pemimpin negara, apalagi dalam situasi transisi.

Keberanian Amien Rais sudah ditunjukkan sejak era Soeharto. Ketika Soeharto berkuasa seperti raja yang tidak terbantahkan, Amien Rais sudah menggulirkan isu pergantian pimpinan nasional. Keberaniannya lebih teruji lagi di ujung kekuasaan Soeharto. Para pemimpin Islam saat itu juga sudah siap berkompromi dengan Soeharto, membiarkan Soeharto memimpin sendiri proses reformasi. Tetapi, Amien Rais bersikeras. Baginya tidak ada kompromi lagi dengan Soeharto.

Selain itu, Amien Ras juga memiliki kemahiran komunikasi politik tingkat tinggi. Amien sangat lihai membentuk opini publik atau mengangkat sebuah isu untuk menjadi perhatian nasional. Amien pun cukup teruji integritasnya. Sudah empat tahun usia reformasi, tidak ada isu KKN yang menerpa Amien Rais. .

Akan tetapi selain sisi baik, Amien Rais juga memiliki kekurangan yang sangat mendasar. Tetapi kekurangan ini lebih bersifat struktural, bukan cacat pribadi Amien Rais. Kekurangan Amien Rais adalah terfragmentasinya segmen politik para pemilih. Masyarakat politik Indonesia bukanlah komunitas homogen yang mudah bersatu di bawah satu tokoh politik. Masing-masing segmen itu memiliki tokohnya sendiri. Amien Rais hanya ditokohkan dalam satu segmen politik, tetapi tidak di segmen politik lain.

Secara umum dapat dipetakan bahwa 85 persen dari komunitas pemilih datang dari kalangan Islam. persoalannya, dalam komunitas Islam itu ada fragmentasi yang beragam. Pertama, ada segmen Islam politik yang minoritas. Mereka adalah komunitas Islam yang tidak saja

taat dalam ritual agama, melainkan juga diinspirasi oleh politik Islam. Isu tentang Negara Islam atau Piagam Jakarta yang mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya sangat populer dalam komunitas ini. Kedua, ada segmen Islam mainstream. Istilah ini merujuk kepada kaum santri yang taat ritual, namun tidak terinspirasi oleh politik Islam. Mereka selama ini nyaman hidup dalam keberagaman Pancasila. Ide Negara Islam atau Piagam Jakarta tidak populer dalam komunitas ini. Sebagian besar komunitas Islam mainstream ini ada di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Ketiga, ada Islam abangan. Istilah ini merujuk kepada mereka yang secara formal beragama Islam. Namun, kelompok ini lebih menampilkan gaya hidup sekuler. Kelompok ini bukan saja tidak memperjuangkan Negara Islam dan Piagam Jakarta. Sebaliknya, kelompok ini justru bersedia bertarung agar Negara Islam dan Piagam Jakarta tidak pernah berdiri di Indonesia. Kalangan Islam abangan ini punya aspirasi politik yang sama dengan kelompok agama minoritas dan liberal.

Tiga segmen politik Islam di atas memiliki cita-cita politik yang berbeda. Wajar pula jika mereka menyalurkan aspirasi politik kepada partai dan tokoh yang berbeda. Islam politik lebih pas bersandar kepada partai seperti PPP dan PBB. Islam mainstream terbagi dua. Yang Muhammadiyah lebih kepada PAN. Sementara yang NU lebih berat kepada PKB. Islam abangan sangat jelas lebih memihak kepada PDI Perjuangan (PDIP).

Konstruksi seperti ini jelas sangat tidak menguntungkan Amien Rais. Dari ketiga segmen itu, populasi pemilih Amien Rais datang dari Islam mainstream saja. Itu pun terbagi lagi, hanya yang Muhammadiyah yang menjadi pendukung Amien Rais. Sementara itu, Islam mainstream yang NU bahkan menjadi musuh Amien Rais mengingat peran yang dimainkan dalam menjatuhkan Gus Dur.

Sementara komunitas dari Islam abangan yang nasionalis sudah punya calonnya sendiri. Jelas, bagi pendukung PDIP ini, suara mereka

akan diberikan kepada Megawati. Amien Rais bagi komunitas ini adalah rival terberat yang justru harus dikalahkan. Mustahil bagi Amien Rais untuk dapat terpilih menjadi presiden jika dia masih terisolasi hanya dalam komunitas PAN dan Muhammadiyah saja.

Tidak heran jika para pemikir politik di belakang Amien Rais mencoba mencari calon wakil presiden pendamping dari kalangan NU atau nasionalis. Tentu itu dengan harapan agar duet itu kelak dapat memperbanyak suara buat Amien Rais. Calon wakil presiden diharapkan dapat membawa Amien Rais keluar dari isolasi di Muhammadiyah.

Tetapi, justru di titik ini letak permasalahannya. Bagi dua komunitas ini, Amien Rais boleh saja lebih gemilang sebagai politisi secara individual. Namun komunitas NU merasa lebih besar daripada Muhammadiyah. Komunitas nasionalis juga merasa lebih luas cakupan pemilihnya ketimbang Muhammadiyah.

Mereka akan menolak jika tokoh terbaik mereka hanya dijadikan orang kedua di belakang Amien Rais. Jika ingin bekerja sama, justru Amien Rais yang menurut mereka harus menjadi orang kedua. Sedangkan orang pertamanya, calon presiden, harus datang dari tokoh paling populer di kalangan NU atau kalangan nasionalis.

Amien Rais sungguh tidak beruntung. Dia dapat begitu sukses jika hanya menjadi the king maker atau menjadi orang kedua (wakil presiden). Namun, untuk menjadi seorang presiden, Amien dikalahkan oleh segmen politik Indonesia yang cenderung terfragmentasi. Sayang, sangat disayang. * *

Sentimen Anti pemilu

REFORMASI belum melampaui rotasi pemilu kedua. Namun, daftar keluhan atas situasi kehidupan publik makin panjang. Korupsi bertambah liar dan telanjang. Publik terkena demam dan hobi menurunkan presiden di tengah jalan. Sudah tumbuh pula semangat anti partai politik yang kian mengental.

Di kalangan yang radikal, ekspresi kekecewaan muncul dalam aneka bentuk. Muncul ide presidium nasional. Tokoh-tokoh terbaik dari berbagai kalangan: sipil atau militer, Islam atau agama lain, pengusaha dan buruh, partai dan non partai, akan duduk bersama dalam presidium tersebut. Tokoh-tokoh ini naik ke pentas kekuasaan tidak lewat pemilu, tetapi lewat revolusi, mengganti penguasa sekarang.

Namun, bagaimana memilih tokoh yang satu, bukan tokoh lainnya, untuk berkuasa? Siapa yang memberikan mandat kepada para revolusioner itu? Juga tidak ada jawaban yang menenteramkan.

Solusi lain yang ditawarkan adalah potong satu generasi. Elite yang kini berkuasa dianggap sudah bersentuhan dengan kultur Orde Baru terlalu lama. Siapa pun yang akan dipilih lagi di antara mereka – bahkan melalui pemilu yang sangat demokratis sekalipun – akan tetap terpilih politisi buruk.

Solusinya, menurut kalangan ini, satu generasi yang kini berkuasa, semuanya digantikan tidak melalui pemilu oleh generasi yang lebih muda, yang lebih segar, yang lebih bersih dari kultur Orde Baru. Siapa yang harus menggantikan yang berkuasa di antara sekian banyak calon- calon penguasa generasi muda? Siapa yang memberi mereka mandat untuk memotong satu generasi? Tidak ada jawaban yang pasti.

Dalam bentuk yang lebih lembut, solusi lain yang ditawarkan ialah golput. Publik ramai-ramai diminta memboikot pemilu. Apa gunanya pemilu jika hanya memilih satu beruang di antara kumpulan beruang lain yang sama berbahaya dan korup? Bagi kalangan ini, parpol sudah tidak dapat dipercaya.

Selain tumbuh kemarahan di kalangan radikal, tetap ada kelompok rasional yang lebih punya persepsi positif. Kalangan tersebut menyadari bahwa membangun demokrasi itu seperti menanam pohon kelapa. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk menikmati buahnya.

Dalam proses yang panjang, ada masa transisi yang labil, yang kadang memuakkan. Namun, komitmen pada demokrasi akan memudahkan aneka pihak melampauinya.

Tidak ada demokrasi jika tidak ada pemilu. Pergantian kekuasaan dan sirkulasi elite hanya, menjadi sah jika dilakukan melalui pemilu. Hanya melalui pemilu, rakyat secara serentak berbicara dan memilih. Pergantian kekuasaan akan menjadi refleksi kehendak rakyat banyak

selaku pemegang kedaulatan, bukan kehendak orang per orang atau kelompok kecil revolusioner saja.

Harus pula disyukuri, setelah empat tahun reformasi kita memiliki RUU Pemilu yang jauh lebih baik. Pertama, RUU tersebut merupakan sistem pemilihan proporsional dengan daftar terbuka. Dalam sistem baru, pemilih memang masih memilih partai. Namun, pemilih juga akan memilih tokoh di partai itu yang disukainya. Dalam satu partai yang sama, beberapa tokoh saling bersaing agar dipilih publik luas.

Mekanisme tersebut membuat mereka akan bersaing pula mencari tahu aspirasi publik luas, membuat jaringan, dan menyentuh kepentingan pemilih. Akibatnya, publik akan lebih mengenal wakilnya. Aspirasi publik juga akan lebih terwakili.

Di masa silam, pengurus partai yang menentukan siapa yang akan menjadi wakil partai di parlemen. Publik luas hanya memilih partai. Akibatnya, sang wakil rakyat hanya berhutang budi kepada elite partai, bukan kepada pemilihnya. Tidak heran jika banyak kasus wakil rakyat tidak saling mengenal dengan pemilihnya. Bagaimana kepentingan pemilih itu dapat diperjuangkan di parlemen jika sang wakil tidak tahu dan tidak kenal siapa pemilihnya.

Perubahan besar dari sistem proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka memang masih meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah. Hal ini berkaitan dengan teknikalitas dan efisiensi pemilihan di lapangan.

Jika basis pemilihan provinsi, lalu ada sekitar 40 parpol yang ikut dan masing-masing partai menyerahkan nama 50 tokoh, ada 2.000 tokoh yang akan dipilih oleh publik luas. Jika kecepatan membaca dan menimbang publik satu menit untuk 20 tokoh, dibutuhkan waktu 100 menit atau satu setengah jam bagi satu pemilih untuk mencoblos. Antre mencoblos akan terlalu lama. Jelas ini tidak efisien.

Kemajuan lain yang dibawa UU yang baru adalah kontrol keuangan. Uang adalah susunya politik. Partai dengan jumlah uang yang sangat besar tentu mempunyai peluang yang sangat besar pula untuk melakukan sosialisasi. Penyumbang dana yang besar juga mempunyai peluang untuk mengontrol partai.

Akibatnya, jika partai itu menang, ia akan berutang budi kepada penyumbang besar dan mendistorsikan kepentingan publik. Karena itulah, dana partai dan kampanye harus dibatasi dan dikontrol.

Di masa silam, penyumbang dana tidak perlu diidentifikasi secara detail. Yang mencolok adalah kasus di PPP. Begitu banyak dana yang tertulis sumbangan dari hamba Allah. Padahal, partai politik bukanlah masjid yang penyumbangnya bersifat sukarela dan tulus ikhlas. Sumbangan buat partai mempunyai kepentingan yang juga bersifat politik.

Saat ini, aturan identifikasi penyumbang lebih detail. Siapa yang menyumbang dan batasannya diatur. UU itu juga menyertakan ketentuan hukuman pidana bagi yang melanggarnya.

Sementara itu, aturan financial disclosure atas pejabat publik melalui KPKPN sudah mulai mentradisi. Teknik patgulipat soal dana kampanye akan semakin sulit dilakukan. Belajar dari pengalaman, pemilu mendatang akan lebih terkontrol dari segi money politics walau tentu tidak bisa bersih sama sekali.

Namun, aturan baru soal dana kampanye masih meninggalkan lubang-lubang yang dapat dimanipulasi. Sumbangan di bawah lima juta rupiah tidak perlu diidentifikasi. Dapat diduga, pada pemilu 2004, akan begitu banyak penyumbang di bawah angka lima juta rupiah. Seorang pengusaha yang menyumbang 10 miliar rupiah, misalnya, dapat memecah sumbangannya menjadi 4.000 nama fiktif, masing-masing dua setengah juta rupiah.

Jika memang demokrasi yang menjadi pantai harapan, tidak bisa tidak, pemilu harus dihormati, sedikit dipuja, dan terus diperbaiki

kualitasnya. Spirit anti pemilu yang kini mengental di kalangan kelompok radikal tidak akan membawa kita ke mana-mana, kecuali ke jurang otoriterisme. * *

Menyeleksi Calon Presiden

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Presiden tengah disempurnakan oleh pemerintah dan DPR. Paling tidak ada dua hal yang membuat kita harus berhati-hati merumuskan mekanisme dan tata cara pemilihan presiden.

Pertama, Indonesia punya sejarah yang buruk mengenai presiden. Semua presiden kita dijatuhkan di tengah jalan atau berakhir dengan buruk. Di luar negeri, Indonesia dikenal sebagai tempat yang paling tidak nyaman menjadi presiden. Menjadi presiden di Indonesia seolah hanya dipuja di masa awal. Lalu, di masa akhir dikutuk dan dicerca. Sang presiden kemudian menikmati masa pensiun, tetapi tidak dalam posisi yang terhormat.

Kedua, untuk yang pertama, presiden di Indonesia dipilih secara langsung. Peristiwa pemilihan presiden oleh rakyat banyak akan menjadi peristiwa yang pertama. Pengalaman pertama selalu penuh uji coba dan kemungkinan salah. Jika uji coba itu tidak dipersiapkan dengan baik, seluruh bangsa akan terkena resikonya.

Apa yang harus dilakukan dalam RUU Pemilihan Presiden agar yang kelak terpilih menjadi presiden benar-benar putra atau putri terbaik bangsa?

Amerika Serikat mempunyai tradisi pemilihan presiden langsung yang acap kali menjadi model. Sudah puluhan kali presiden di negara tersebut dipilih dan diganti melalui pemilu. Berdasarkan pengalaman Amerika Serikat, akan terjadi tiga perubahan mendasar dalam politik Indonesia jika presiden dipilih secara langsung.

Pertama, ketua umum partai politik tidak lagi penting. Calon presiden tidak harus – dan biasanya bukan – ketua umum partai politik. Di Amerika Serikat, misalnya, calon presiden umumnya adalah mantan gubernur yang pernah memimpin sebuah negara bagian. Atau, sang calon adalah wakil presiden yang juga berpengalaman dengan lekak-lekuk birokrasi pemerintahan. Bisa jadi, sang calon adalah mantan tokoh militer yang sudah menjadi purnawirawan. Dalam tugas di ketentaraan, leadership sang calon sudah teruji.

Dalam pemilihan presiden langsung, partai bertugas menjanging calon presiden yang potensial. Partai membuka kemungkinan calon seluas-luasnya. Masing-masing partai membuat mekanisme seleksi sendiri. Mereka yang akhirnya dicalonkan partai adalah tokoh yang sudah “babak belur” dan lulus dari berbagai proses seleksi.

Sang calon tidak harus pengurus partai. Bahkan, sang calon tidak pula harus anggota partai. Setelah perang dunia kedua, misalnya, Eisenhower, pahlawan perang dunia kedua yang tidak berpartai, dicalonkan oleh Partai Republik. Lalu, dia memenangkan pemilihan dan Partai Republik ikut berkuasa.

Di Indonesia, agaknya, Golkar akan memulai tradisi partai seperti di Amerika Serikat. Ada problem di Golkar yang kemudian dapat menjadi blessing in disguise. Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung bermasalah secara hukum. Sangat berat bagi Golkar jika memaksakan ketua umumnya maju sebagai calon presiden.

Itu akan terjadi jika Golkar memang membuka kemungkinan mencalonkan putra-putri terbaik bangsa. Selain kapabel, tentu sang calon harus juga diketahui integritasnya dan diterima masyarakat politik secara luas. Melalui waktu, langkah Golkar akan diikuti oleh aneka partai besar lain karena memang mekanisme demikian yang paling berpeluang untuk menang dan mendapatkan calon terbaik.

Kedua, jika memang ingin presiden yang berkualitas, harus ada proses seleksi yang panjang. Debat publik, kritik oleh pers, serangan saingan politik, dan penelanjangan track record sang calon oleh berbagai pihak perlu dilakukan. Melalui penyaringan ketat, lama dan berlapis, publik menjadi benar-benar mengenal calon presidennya secara utuh.

Melalui proses yang panjang itu, publik tahu daya tahan emosi sang calon. Tidak semua tokoh populer punya daya tahan dan kematangan emosi. Melalui proses panjang, tidak akan pula pernah ada presiden yang terpilih tanpa kemampuan intelektual memadai. Memang intelektualitas bukan segalanya. Tetapi harus tetap ada kemampuan intelektual yang minimal agar sang calon punya visi dan arah masa depan bangsa ini. Tanpa visi yang jelas dari seorang presiden, negara dapat terombang-ambing dan kabinet dapat terpecah belah karena tidak ada pijakan.

Saatnya setiap partai membuat proses seleksi yang panjang sebelum memutuskan siapa calon presidennya. Bersikap asal mudah saja, seperti mencalonkan ketua umumnya sebagai presiden, adalah politik gaya lama. Hal itu hanya cocok untuk sistem pemerintahan parlementer. Namun, sistem presidensialisme yang dianut secara hampir penuh melalui amandemen keempat memaksa partai membuat terobosan baru jika calonnya ingin menang.

Ketiga, yang juga perlu dipikirkan adalah prasyarat pencalonan presiden dalam sistem multipartai. Amerika Serikat yang menganut sistem dua partai tidak mempunyai masalah seperti di Indonesia. Paling banyak calon presiden yang muncul di Amerika Serikat hanya tiga orang. Dua calon berasal dari partai besar dan satu calon

independen. Tetapi, bagaimana dengan Indonesia yang punya puluhan partai politik?

Sebagian meminta ada pembatasan. Hanya lima partai terbesar yang boleh punya calon presiden. Atau hanya partai dan gabungan partai yang memperoleh minimal 20 persen suara di DPR yang boleh punya calon. Pemikiran ini dilandasi oleh keinginan agar presiden yang terpilih kelak sangat kuat. Mustahil presiden akan kuat jika ia tidak punya dukungan minimal di DPR

Namun, ada pula pemikiran sebaliknya. Partai besar di DPR belum tentu punya calon presiden yang layak. Sementara partai kecil di DPR sangat mungkin punya calon yang lebih laku dijual. Di DPR, publik memilih partai walau dalam sistem proporsional terbuka. Tetapi, dalam pemilihan presiden, bukankah publik memilih tokoh? Mengapa pemilihan presiden harus dikaitkan dengan hasil pemilu DPR? Bukankah pembatasan itu akan mengecilkan kemungkinan bahwa yang kelak menjadi presiden RI benar-benar putra atau putri terbaik bangsa?

Tiga prinsip di atas harus benar-benar diakomodasi secara tepat di dalam UU Pemilihan Presiden, baik untuk pemilu 2004 maupun pemilu selanjutnya. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara yang para presidennya selalu "dikubur hidup-hidup" atau dijatuhkan di tengah jalan. * *

Bursa Calon Presiden

HASIL paling nyata dari gerakan reformasi 1998 ialah bursa calon presiden. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia sejak 1945, hampir 60 tahun lalu, calon presiden datang dari kalangan yang sangat beragam. Lihatlah nama-nama yang semakin sering disebut akan memasuki pertarungan atau minimal diharapkan untuk maju dalam Pilpres.

Dari kalangan pemimpin partai politik, ada Megawati, Amien Rais dan Hamzah Haz. Dari kalangan purnawirawan militer, disebut-sebut Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar dan Wiranto. Dari kalangan cendekiawan dan agamawan, terdapat nama Nurcholish Madjid, Sjahrir, Ryas Rasyid, Hasyim Muzadi. Tidak ketinggalan pula kalangan pengusaha, seperti Surya Paloh, Aburizal Bakrie serta Yusuf Kalla.

Reformasi politik sejak 1998 sudah mengejawantah secara konkret dalam kompetisi elite secara terbuka. Berbagai elite baru yang selama ini tidak masuk perpolitikan nasional dapat

menggunakan partai baru sebagai kendaraan untuk bertarung. Sementara, konvensi Golkar harus diakui memberikan dinamika tersendiri untuk rekrutmen calon presiden. Melalui partai besar dan mapan seperti Golkar, elite baru dalam politik nasional juga dapat muncul.

Siapakah yang akhirnya memenangkan pertarungan dan menjadi presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung? Akankah Indonesia untuk kali pertama dipimpin presiden dari kalangan pengusaha atau akademisi? Mungkinkah ada sirkulasi elite dalam kepemimpinan nasional di mana pendatang baru yang justru memenangkan pemilihan presiden? Akankah presiden baru pada 2004 mampu membuat demokrasi di Indonesia lebih stabil?

Berbagai pertanyaan di atas sangat penting untuk diketahui. Namun saat ini semuanya masih terlalu dini untuk diprediksi. Sampai pemilihan presiden 2004 mungkin April, Juni, atau September, segala hal dapat terjadi. Apalagi untuk politik transisi di Indonesia. Segala hal dapat berubah walau dalam hitungan hari. Tetapi setidaknya dapat diprediksi dua pola besar yang akan terjadi dalam pertarungan presiden itu.

Pertama, pertarungan terhebat 2004 bukan Megawati vs. Amien Rais seperti yang banyak diduga. Jika dilihat dari semata-mata politik individual, memang Megawati dan Amien yang kini paling menonjol. Persoalannya pertarungan presiden bukan hanya pertarungan antar tokoh. Pertarungan yang sebenarnya adalah pertarungan antar jaringan politik. Suka atau tidak, jaringan terkuat saat ini ada pada PDIP dan Golkar. Siapapun yang dicalonkan PDIP dan siapapun yang dicalonkan Golkar segera menjadi dua calon terbesar.

PDIP diuntungkan oleh posisinya sebagai juara bertahan. Sebagai presiden, Megawati sudah diuntungkan oleh posisinya sendiri. Dalam sejarah pemilihan presiden langsung Amerika Serikat, umumnya presiden yang ada akan terpilih kembali untuk kali kedua, kecuali jika sang presiden membuat kesalahan besar.

Sebagai incumbent, tanpa disadari Megawati sudah mulai berkampanye walau tidak dimaksudkan untuk berkampanye. Dia tampil hampir setiap hari di koran dan televisi. Namanya semakin lama semakin dikenal ke seantero publik Indonesia, bahkan ke pelosok daerah. Jaringan birokrasi dan masyarakat semakin lama juga semakin kokoh mengitari PDIP selaku the ruling party.

Sementara itu Golkar adalah partai dengan jaringan ke daerah yang paling solid. Partai ini berkuasa sejak zaman Orde Baru selama puluhan tahun. Era reformasi hanya menginterupsi partai ini untuk tidak menjadi yang terbesar. Golkar masih menjadi yang kedua terbesar. Tetapi, karena akar yang lama, untuk hal SDM dan jaringan, Partai Golkar bahkan melampaui PDIP.

Dua partai ini PDIP dan Golkar, juga diuntungkan oleh platform partai kebangsaan yang diperjuangkannya. Uang akan berpengaruh sangat besar bagi kampanye. Pemilik uang, umumnya non pri dan pedagang, ingin dilindungi oleh platform kebangsaan. Militer dan polisi –yang aktif dan yang purnawirawan – juga lebih nyaman jika platform kebangsaan yang menguasai pemerintahan. Dukungan kuat dari pusat kekuasaan di luar sana juga jauh lebih mudah diraih dua partai ini.

Partai lain hanya menjadi kuda hitam. Hanya jika PDIP dan Golkar memiliki masalah yang besar, dan hanya jika calon presiden dan wakil presiden di luar dua partai ini begitu mempesona, PDIP dan Golkar dapat dikalahkan. Namun, peluang itu sangat kecil. Para ahli strategi politik di PDIP ataupun Golkar dengan sendirinya secara maksimal akan menutup semua lubang yang masih ada.

Kedua, hampir pasti, tokoh dari komunitas Islam akan diperebutkan tetapi untuk posisi wakil presiden. Jika calon PDIP dan Golkar yang bertarung, penentu pemenangnya adalah komunitas Islam di luar komunitas kebangsaan. Siapa yang didukung secara solid oleh komunitas ini, dialah yang akan menang.

Cara paling mudah mendapatkan dukungan itu adalah mendudukan tokoh populer dari komunitas Islam sebagai calon wakil presiden. Tiga nama akan ramai direbutkan sebagai wakil presiden. Hasyim Muzadi mungkin berada di peringkat atas. Penyebabnya, kiai ini mengepalai komunitas NU yang jumlah anggotanya terbesar di Indonesia. Apalagi, jika diresdai kiai langitan, dengan membawa Hasyim, baik PDIP ataupun Golkar akan membawa pula jutaan pengikut NU.

Nama lain yang akan direbutkan adalah Syafi'i Ma'arif. Seperti halnya Hasyim, Syafi'i memimpin Muhammadiyah. Jumlah anggota dan komunitas Muhammadiyah di Indonesia, bahkan di dunia, hanya kalah dari NU. Jika menarik Hasyim sangar sulit, apalagi jika PKB juga punya calon presiden sendiri, Syafi'i akan menjadi pilihan berikutnya.

Namun, Indonesia terlalu luas. PDIP dan Golkar terlalu kecil untuk menguasai Indonesia sendirian. Agar tidak kesulitan dalam mendominasi DPR, capres Golkar dan PDIP membutuhkan dukungan satu sama lain, Bahkan, ditambah dengan PKB, tiga partai ini dapat membuat sebuah konfederasi pasca pemilihan presiden. Karena itu, dalam pertarungan pemilihan presiden nanti, dua partai ini harus menganggapnya sebagai pertarungan dua kakak adik yang menggunakan platform kebangsaan yang sama. * *

Upaya Menjegal Megawati?

BAGAIMANAKAH cara menjegal Megawati paling mudah agar ia tidak terpilih kembali menjadi presiden di tahun 2004? Yang paling mudah adalah melalui Undang-Undang Pemilihan Presiden. Tidak perlu susah-susah mencari calon presiden alternatif. Para lawan Megawati cukup membuat kesepakatan dalam syarat menjadi presiden. Misalnya, disepakati bahwa calon presiden Indonesia minimal bergelar sarjana. Seketika Presiden Megawati dinilai tidak memenuhi persyaratan dan didiskualifikasi dari pencalonan.

Skenario di atas dapat saja menjadi kenyataan. Partai Golkar didukung oleh Fraksi reformasi menginginkan calon presiden RI kelak haruslah bergelar minimal sarjana. Sementara PDIP sedang berjuang habis-habisan agar persyaratan sarjana itu tidak menjadi ketentuan dalam UU Pemilihan Presiden. Sementara PPP tidak berpihak, atau kanan-kiri oke. Minimal SMA boleh, minimal sarjana juga boleh.

Persoalannya, konstitusi sendiri membuka peluang bagi manuver penentuan syarat calon presiden. Pasal 6 UUD 45 yang sudah diamandemen hanya mengatur garis besar saja. Calon presiden harus warga negara Indonesia asli yang tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri. Calon presiden juga tidak pernah mengkhianati negara. Di samping itu, calon presiden sehat jasmani dan rohani agar dapat menjalankan tugasnya.

Di luar ketentuan itu, tidak ada pedoman lain. Pasal 6 ayat 2 hanya mengatakan bahwa persyaratan menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan konstitusi sama sekali tidak mengatur, misalnya, apakah calon presiden harus berusia minimal 40 tahun, misalnya? Konstitusi juga tidak mengatur soal agama calon presiden.

Konstitusi pun tidak mengatur mengenai pendidikan minimal calon presiden Apakah, misalnya, calon presiden boleh saja hanya tamat SD? Ataukah harus pula tamat SMP dan SMA? Atau itu juga tidak cukup, sehingga calon presiden minimal bergelar sarjana?

Karena konstitusi mendelegasikan kewenangan itu kepada undang-undang, maka aneka manuver politik mungkin saja terjadi di DPR untuk menyusun persyaratan calon presiden. Apapun batas pendidikan minimal yang kelak diputuskan oleh DPR, baik melalui lobi, musyawarah atau voting tidak ada prinsip konstitusi yang dilanggar.

Tidak heran syarat minimal sarjana kini mendadak sontak menjadi pertarungan yang hot dan seru. Konsekuensi pertarungan itu sangat besar, yaitu tersingkir atau tidaknya Presiden Megawati untuk kembali menjadi calon presiden di tahun 2004 kelak. Ternyata untuk mengalahkan Megawati agar tidak terpilih lagi cukup melalui syarat pendidikan minimal di UU Pemilihan Presiden.

Berdasarkan pertimbangan yang rasional, memang terjadi pro dan kontra soal persyaratan minimal itu. Memang semua pihak, baik PDIP ataupun partai lainnya, baik pendukung Megawati atau

lawannya, sepakat bahwa harus ada batas minimal pendidikan bagi calon presiden.

Pihak PDIP sendiri mengajukan batas minimal itu SMA saja. Alasan yang sering dikemukakan bahwa kita ini ingin menjangkau calon presiden, bukan calon rektor sebuah universitas atau menjangkau ilmuwan. Bagi seorang calon presiden yang terpenting adalah sikap moral dan kenegarawannya. Syarat pendidikan juga penting. tetapi cukup SMA saja.

Pihak PDIP mengajukan pula bukti. Jenjang pendidikan pemimpin partai tidak berjalan lurus dengan kesuksesan partai itu dalam mendapatkan dukungan politik. Lihatlah, misalnya, PBB dan PAN dipimpin oleh professor doctor. Yang satu dipimpin oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Yang satu lagi dipimpin oleh Prof. Dr. Amien Rais. Toh dua partai itu hanya mendapatkan suara masing-masing hanya 2% dan 8%. Bahkan banyak pula partai lain seperti yang dipimpin oleh Dr. Sri Bintang Pamungkas atau Dr. Deliar Noer, yang semuanya mendapatkan gelar doktor di luar negeri. Toh partai mereka menjadi partai gurem saja.

Sebaliknya, pemimpin yang gelarnya hanya S₁, lebih rendah dari professor doktor, seperti Akbar Tandjung, mampu membuat Golkar menjadi partai nomor 2. Bahkan Megawati yang tidak bergelar sarjana, mampu mengantarkan PDIP menjadi partai terbesar.

Di lihat dari hirarki strata pendidikan, jelas Megawati di bawah Akbar Tandjung dan di bawah Amien Rais serta Yusril. Namun dilihat dari besarnya partai yang berhasil mendapatkan suara di DPR, partai Megawati (yang hanya tamat SMA) di atas partai Akbar Tandjung (yang bergelar SI), dan di atas partai Yusril serta Amien Rais (yang bergelar profesor doktor). Berangkat dari kenyataan itu, bagi PDIP tidak ada hubungannya antara sukses politik seorang tokoh dengan strata pendidikan.

Sebaliknya pihak yang kontra argumen di atas menyatakan bahwa kualifikasi menjadi presiden RI jelas berbeda dengan kualifikasi menjadi pimpinan partai. Indonesia negara yang sangat luas dan kompleks. Ia butuh pemimpin yang punya kualifikasi intelektual tertentu. Jika persyaratan calon presiden hanya tamat SMA, kasihan rakyat Indonesia. Menjadi pegawai sebuah perusahaan saja seringkali disyaratkan minimal bergelar SI. Apalagi menjadi presiden untuk Indonesia.

Pro dan kontra menjadi semakin hot dan rumit jika kepentingan politik juga bermain. Pendukung Megawati tentu mati-matian berupaya agar persyaratan cukup minimal SMA saja. Sementara para lawan Megawati yang ingin mengalahkan Megawati tidak melalui pemilu, mati- matian pula berupaya agar syarat pendidikan itu minimal sarjana.

Mungkin kompromi akhirnya dibuat. Misalnya, persyaratan minimal pendidikan buat calon presiden tetap SMA. Namun PDIP diminta mengalah untuk hal lain dalam UU Pemilihan Presiden itu. Inilah praktek yang biasa dalam politik DPR * *

Kontroversi UU Pemilu Presiden

UU Pemilu Presiden baru saja disahkan DPR. Hasil akhirnya, berbagai kompromi tingkat tinggi antar parpol terjadi. Seberapa banyak dari kita yang terkecoh dengan perdebatan hangat atas pasal krusial di kalangan partai itu sebelumnya?

Awalnya, mereka yang awam, menduga RUU Pemilu Presiden ini akan deadlock. Berbagai parpol besar tampak saling bertentangan. Seolah mereka sedang memperjuangkan sebuah prinsip yang akan dipertahankan sampai titik darah penghabisan.

Berbagai partai menyatakan seorang presiden minimal harus sarjana. Tantangan ke depan membutuhkan kapabilitas presiden untuk memahami dan memberikan arah perjalanan bangsa. Hanya tamat SMA dianggap tidak cukup. Seolah jika presiden hanya tamat SMA, negeri ini akan hancur baur.

Tidak kalah semangatnya, berbagai partai lain mengajukan syarat yang terkesan sangat moralis. Seorang terdakwa yang terkena dakwaan hukuman minimal lima tahun penjara dilarang menjadi

presiden. Berbagai argumen juga dikemukakan. Seolah jika presiden seorang terdakwa, Indonesia juga akan terus terkena krisis.

Tidak ingin kalah garang, berbagai partai yang lain memasang kriteria yang lebih tinggi lagi. Calon presiden harus dicalonkan oleh partai atau gabungan partai yang minimal punya kursi 20 persen dalam Pemilu 2004. Seolah jika nanti ada calon dari partai kecil, Indonesia akan jungkir balik.

Jika semua tuntutan di atas dipenuhi, niscaya begitu banyak calon presiden yang sudah dikalahkan sebelum pemilu. Megawati segera tersingkir karena tidak memenuhi syarat pendidikan. Akbar Tandjung selesai pula karir politiknya karena kriteria terdakwa. Sementara, Amien Rais akan sulit sekali mencari koalisi lebih dari 20 persen untuk mendukung dirinya.

Kini semuanya terang benderang. Aneka syarat yang diperdebatkan itu ternyata bukanlah prinsip, tetapi sekadar kiat biasa dalam rangka menaikkan posisi bargaining. Ternyata, partai yang punya calon presiden bersedia untuk saling memuluskan kompetitornya, asal "jago" mereka juga dimuluskan menuju pencalonan presiden.

Pihak PDIP, misalnya, rela menghapus syarat terdakwa dan syarat 20 persen, asal syarat minimal sarjana juga dihapus. Sebaliknya, pihak Golkar juga rela menghapuskan syarat sarjana dan minimal 20 persen jika syarat terdakwa juga dihapus.

Demikian pula PAN, yang rela menghapuskan syarat terdakwa dan minimal sarjana, asal syarat 20 persen juga dibuang. UU Pemilu Presiden akhirnya memuluskan baik Megawati, Akbar Tandjung, maupun Amien Rais.

Kompromi memang prosedur yang biasa dalam politik. DPR tidak bisa disangkal adalah forum politik. Jika anggota DPR berkompromi

sebagai prosedur untuk mengesahkan RUU atau untuk mencapai kesepakatan, itu sah-sah saja. Namun, tentu saja tetap harus ada kontrol dan batas untuk membedakan mana kompromi yang masih bisa diterima, mana kompromi yang bermasalah. Sejauh kompromi itu tidak melanggar aturan konstitusi dan juga dipraktekkan di negara demokrasi lain, kompromi itu wajar saja.

Untuk syarat minimal SMA bagi calon presiden, misalnya, oke-oke saja. Memang tidak ada satu pasal pun di konstitusi yang mensyaratkan bahwa calon presiden harus minimal sarjana. Bahkan di Amerika Serikat, minimal pendidikan tidak menjadi syarat presiden pula. Untuk dukungan politik, level pendidikan agaknya tidak terlalu signifikan. Partai di Indonesia yang dipimpin profesor doktor (PAN dan PBB) hanya menduduki nomor 5 dan 6 dalam Pemilu 1999. Partai yang dipimpin sarjana (Golkar) paling jauh hanya duduk di nomor 2. Sedangkan partai yang dipimpin tamatan SMA (PDIP) justru mendapat dukungan paling banyak.

Apalagi, banyak calon pemimpin di Indonesia yang tidak sarjana, tetapi kapabilitas intelektual dan politiknya tidak diragukan. Misalnya Soedjatmoko, Adam Malik, Sutan Sjahrir, dan Agus Salim. Mereka dikenal bahkan sebagai intelektual dan politisi kelas satu. Kompromi untuk syarat pendidikan memang seharusnya tidak bermasalah.

Bagaimana kompromi atas syarat larangan terdakwa menjadi calon? Secara moral dan etik mungkin kompromi ini lebih berat. Namun, dari perspektif hukum murni dan politik, tidak ada masalah pula bagi terdakwa untuk menjadi calon presiden. Di UUD 1945 memang juga tidak ada pasal yang melarang terdakwa atau mengurangi hak politik mereka yang belum punya keputusan hukum tetap.

Apalagi, ada pula contoh di Thailand. PM Thailand saat ini, Thaksin, juga seorang terdakwa. Ketika maju menjadi calon perdana menteri, dia sudah dijatuhi hukuman pidana tingkat pertama. Namun, karena tidak dilarang, dia terus maju dalam pemilihan perdana menteri.

Di luar dugaan, dia justru terpilih. Setelah menjadi PM, pengadilan tinggi membebaskannya.

Jika Thailand boleh punya calon terdakwa, mengapa Indonesia tidak boleh? Toh, akhirnya, kata putus ada di tangan rakyat sendiri yang akan memilih calon itu secara langsung. Adalah kesadaran rakyat itu sendiri yang menentukan, apakah nanti yang terpilih seorang profesor doktor ataukah hanya tamat SMA, seorang guru moral bangsa, ataukah seorang terdakwa.

Jika ada masalah krusial di UU Pemilu Presiden, itu merupakan kesepakatan untuk membatasi hak partai politik peserta pemilu. Pasal 6 A ayat 2 jelas-jelas menyatakan bahwa "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu". Pasal ini tidak bisa ditafsir lain bahwa semua partai yang disahkan sebagai peserta pemilu, boleh sendirian, tanpa bergabung dengan partai manapun, untuk mengajukan calon presiden. Tidak peduli berapa pun perolehan suara partai itu dalam pemilu.

UU Pemilu Presiden sudah mengebiri hak partai itu. Menurut UU, jika partai itu, misalnya, hanya memperoleh kurang dari 3 persen kursi, ia dilarang mengajukan calon sendirian. Ia harus mengajak partai lain agar gabungannya menjadi lebih dari 3 persen. Ini tampak sepele jika dilihat dari dukungan politik partai kecil itu. Namun, dilihat dari hukum tata negara, itu justru masalah besar karena pelanggaran konstitusi sudah terjadi. * *

Presiden dari Purnawirawan?

REFORMASI baru berusia empat tahun. Namun, aspirasi politik publik luas sudah berubah cepat sekali. Empat tahun lalu, publik begitu anti Ode Baru. Publik juga sangat sentimen terhadap tentara. Namun, empat tahun kemudian, kita menjumpai public mood yang sama sekali berbeda. Muncul kembali kerinduan kepada “nuansa” Orde Baru. Para purnawirawan juga semakin populer sebagai calon presiden.

Survei berbagai lembaga menunjukkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon presiden favorit. Dia menempel ketat sekali popularitas Megawati Soekarnoputri. Untuk beberapa survei dengan segmen perkotaan, Yudhoyono bahkan melampaui Megawati.

Amien Rais juga punya perhitungan yang positif terhadap tokoh dari kalangan tentara. Dia memang belum memutuskan siapa yang kelak mendampingi sebagai calon presiden. Namun, kriteria sudah dipasang. Amien menginginkan wakilnya datang dari kalangan

tentara. Dia ogah pendamping sipil. Konvensi Partai Golkar juga menunjukkan gejala yang sama. Di samping Akbar Tandjung dan Surya Paloh, nama Wiranto dan Prabowo ikut mencuat.

Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini menandakan kerinduan publik luas akan tokoh yang bisa menjamin stabilitas politik? Apakah ini pertanda pula ketidakmampuan pemimpin sipil?

Menarik untuk mengamati data yang ditemukan oleh Lembaga Survei Indonesia. Lembaga ini baru saja melakukan penelitian di seluruh Indonesia, kecuali di Aceh yang sedang darurat militer. Sampel yang diambil adalah sampel nasional, berasal dari 220 desa dan kota. Mereka adalah miniatur pemilih Indonesia dalam pemilu presiden di tahun 2004 kelak.

Responden ditanya, siapa presiden yang dipilihnya jika pemilu dilaksanakan hari ini? Kepada mereka yang tidak menjawab ditanya lagi, siapa presiden yang menurutnya pantas? Yudhoyono melejit ke atas, meninggalkan hampir semua ketua umum dan patron partai besar. Hanya Megawati yang masih melampaui Yudhoyono.

Apa yang membuat Yudhoyono begitu populer? Berbeda dengan calon lain, Yudhoyono tidak punya kendaraan partai politik. Dia bukan ketua umum atau patron partai besar. Beberapa analisis dapat dibuat. Posisi Yudhoyono sebagai Menko Polkam memberikan pentas yang sangat strategis. Dalam posisi itu, dia selalu menjadi pusat berita. Apalagi situasi politik nasional sedang naik turun, penuh peristiwa dramatis. Yudhoyono acapkali menjadi sumber acuan. Pernyataannya segera menjadi headline dan kutipan.

Di masa tugasnya sebagai Menko Polkam, tiba-tiba bom meledak di Bali. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang Indonesia, namun juga dunia. Begitu banyak warga asing yang ikut terbunuh. Megawati segera membentuk tim pengendali terorisme. Yudhoyono menjadi komandannya.

Emosi massa begitu tercekam oleh tragedi Bali. Yudhoyono tampil di pusat emosi massa itu dan segera menjadi perhatian utama. Dengan diringkus secara cepat “komplotan” terorisme bom Bali, Yudhoyono semakin harum.

Disusul oleh kasus Aceh, Papua, bom Marriot, Yudhoyono semakin menjadi berita. Apalagi dia juga punya bakat khusus dalam komunikasi politik. Tampilannya yang santun, terpelajar, moderat dan mengesankan punya solusi segera membangkitkan simpati. Yudhoyono mengisi situasi kevakuman juru bicara pemerintah, yang tidak dimainkan Megawati.

Amien tidak ingin ketinggalan “jurus silat”. Segera dia umumkan bahwa dirinya mencari calon wakil Presiden dari kalangan tentara. Amien membaca bahwa pemilih Indonesia datang dari lapisan yang beragam. Semata menampilkan diri sebagai tokoh Islam sulit baginya untuk juga bersaing dengan tokoh nasionalis.

Sebagai tokoh Islam, Amien memiliki keterbatasan. Jika Gus Dur atau tokoh PKB mencalonkan diri, hampir pasti suara komunitas NU tidak akan memilih Amien. Segmen pemilih Islam di luar NU juga tidak solid di belakangnya. Dia harus pula bersaing dengan tokoh Islam lain, seperti Hamzah Haz. Sebagai tokoh Hamzah Haz tidak boleh diabaikan. Di samping ketua umum partai dengan nuansa Islam terbesar, PPP dia juga wakil presiden.

Di samping Hamzah, ada pula Yusril. Di samping Yusril, ada pula Nurcholish Madjid. Begitu banyak “kue” komunitas Islam yang harus dibagi. Sementara itu, komunitas nasional dan kebangsaan tidak kalah banyaknya. Agar suara Amien bertambah, dia ingin ambil juga “kue” dari kalangan kebangsaan itu, setidaknya sebagian saja. Caranya, tidak lain dan tidak bukan, dengan menggandeng tokoh tentara. Bagaimanapun sudah menjadi citra bahwa tentara mewakili gambaran “nasionalis”, “pro-NKRI”, “pro-Pancasila”, dan “pro-stabilitas”.

Mengapa kalangan purnawirawan kini menjadi populer. Sebagian, tentu saja, disebabkan oleh kapasitas individu tokoh yang bersangkutan. Sebagian lagi disebabkan oleh jalannya orde reformasi. Masa transisi yang menjatuhkan Orde Baru tidak datang dengan mudah. Begitu banyak konflik horizontal dan konflik vertikal yang terjadi.

Berbagai kerusuhan yang melibatkan sentimen agama, etnis, suku pendatang versus penduduk asli, sudah menelan nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik vertikal tidak kalah buasnya. Timor Timur sudah lepas. Aceh terus menuntut merdeka sampai sekarang. Papua tidak ketinggalan, mengikuti jejak Gerakan Aceh Merdeka. Investor asing enggan datang jika politik tidak stabil. Tanpa datangnya investasi, pengangguran semakin bertambah.

Pengalaman ini membuat publik merasa bahwa demokrasi saja tidak cukup. Mereka juga merindukan stabilitas. Mereka juga menginginkan kenyamanan. Dalam bahasa salah satu capres, mereka ingin KTA (kenyang, tenang dan aman). Mereka dapatkan suasana itu di era Orde Baru. Tidak heran kini muncul kembali gejala "kerinduan" pada sistem stabilitas Orde Baru. Demam SARS berjangkit. Namun SARS disini singkatan dari Saya Amat Rindu Soeharto.

Figur purnawirawan lebih menjanjikan kerinduan akan stabilitas itu. Namun tentu saja, pemilu presiden masih sembilan bulan lagi. Bahkan, dalam sehari, segala hal dapat terjadi di dunia politik. Apalagi dalam rentang Sembilan bulan itu. Momentum kini ada di tangan para purnawirawan. Namun, jika tidak ditata, momentum itu dapat pergi kembali. * *

Ical, Surya Paloh, dan Kalla

HASIL sementara konvensi Partai Golkar menunjukkan dominasi kalangan pengusaha. Di antara enam besar yang acapkali dimajukan DPD I, muncul tiga nama pengusaha yang acapkali berada pada rangking atas. Mereka adalah Aburizal Bakrie-biasa disapa Ical-, Surya Paloh dan Jusuf Kalla. Bahkan Wiranto dan Akbar Tandjung berada di bawah urutan para pengusaha itu.

Akankah Indonesia berbeda, jika kelak yang menjadi presiden 2004 adalah pengusaha? Di luar negeri, pengusaha yang menjadi pimpinan pemerintahan sudah biasa. Tidak perlu jauh-jauh, di Thailand, perdana menteri yang sedang menjabat juga pengusaha besar. Thaksin Shinawatra lima tahun lalu seorang pengusaha murni, yang tidak banyak terlibat politik. Dalam waktu singkat, dia memasuki politik dan langsung menjadi perdana menteri Thailand.

Di Eropa, tepatnya di Italia, ada pula pengusaha Silvio Berlusconi. Sepanjang karirnya, dia dikenal sebagai pengusaha besar media. Mungkin dia termasuk tokoh yang terkaya di bisnis itu. Kini dia menjadi perdana menteri. Di Amerika Serikat, tidak sedikit pula

pengusaha yang meramaikan bursa pemilihan presiden. Ross Perot dan Steve Forbes, untuk menyebut beberapa nama, menghiasi berita surat kabar, betapa mereka ingin membawa spirit entrepreneurship swasta untuk mengelola pemerintahan.

Demokrasi memperkenalkan kompetisi bebas untuk merebut pucuk pemerintahan. Perekrutan bursa calon presiden menjadi sedemikian terbuka. Tidak hanya sumber konvensional yang digali, seperti tokoh di pemerintahan atau militer. Dunia usaha ternyata juga mulai menjadi ladang perekrutan calon presiden.

Pengusaha Aburizal Bakrie tidak terlalu ambisius untuk menjadi presiden. Seandainya dia diminta untuk menjadi wakil presiden atau penanggung jawab ekonomi di kabinet mendatang, agaknya tawaran itu masih dia terima. Hal yang sama juga tercium dari Jusuf Kalla. Jika secara resmi dia memenangkan konvensi Partai Golkar, lalu diminta hanya menjadi wakil presiden dari Presiden Megawati, agaknya lamaran itu juga tidak ditolak.

Namun, Surya Paloh mengambil langkah berbeda. Bagi Surya Paloh, pilihan hanyalah menjadi calon presiden atau tidak sama sekali. Dia adalah tokoh pertama dari kalangan pengusaha yang sudah secara resmi dan terbuka menyatakan pencalonannya. Sangat unik, dia menyatakan pencalonan tidak dihadapan pers atau di depan rapat partai. Pencalonan resmi Surya Paloh dinyatakan di hadapan karyawan sendiri yang sengaja dikumpulkan dari berbagai kota.

Saya teringat jauh hari sebelum konvensi Golkar dimulai. Ratusan karyawannya berkumpul di halaman. Dimulai lah dialog calon presiden Surya Paloh dengan karyawannya. Aneka pertanyaan dan pernyataan, mulai yang optimis hingga kekhawatiran, diungkapkan. Ada yang bertanya bagaimana nasib perusahaan nanti jika sang pemimpin dan pemilik jadi presiden? Ada pula yang bertanya apakah perusahaan akan dijual untuk membiayai kampanye.

Itu jelas kultur baru yang hanya mungkin dibawa oleh gerakan reformasi. Keterbukaan tidak hanya menyentuh politik nasional

secara makro, namun sudah pula masuk ke unit perusahaan. Pertemuan aneka karyawan dari berbagai anak perusahaan bukan membahas masalah UMR atau SDM. Mereka berkumpul untuk mengantarkan dan berdoa bersama karena pemilik perusahaan akan menjadi calon presiden.

Jika menjadi presiden, akan kah pengusaha memberikan gaya leadership yang berbeda? Saya teringat buku penting yang ditulis oleh David Osborne. Judulnya sangat panjang *Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit Is Transforming Public Sector*. Bagi mahasiswa pascasarjana bidang public policy atau public administration, buku Osborne itu menjadi bacaan wajib.

Secara meyakinkan, buku tersebut menganjurkan agar pemerintahan dikelola selayaknya pengelolaan sebuah perusahaan swasta yang sudah go-public. Berbagai prinsip dan kiat yang membuat sebuah perusahaan swasta yang sudah maju dan efisien harus pula menjadi platform pemerintahan modern. Apa yang ditulis Osborne kini sudah banyak diterapkan dalam pemerintahan negara modern.

Seorang pengusaha yang sukses tentu sudah sangat terbiasa dengan prinsip tersebut. Mustahil pengusaha besar itu sukses jika tidak bersandar pada asas profesionalitas yang modern. Lain halnya jika pengusaha itu hanya dikarbit melalui koneksi yang KKN. Ketika kompetensi menjadi terbuka, sang pengusaha dengan sendirinya akan hancur.

Yang mahal dari calon presiden pengusaha itu kapabilitasnya dalam memasukkan spirit entrepreneurship swasta ke tubuh pemerintahan. Dibandingkan dengan calon presiden dari sektor lain, kemampuan pengusaha dalam entrepreneurship itu lebih unggul. Jika konsisten diterapkan dalam pemerintahan, pengusaha dapat membawa perubahan bentuk pemerintahan secara signifikan.

Persoalannya dalam politik ada begitu banyak variabel. Apalagi untuk terpilih menjadi presiden, dibutuhkan apa yang disebut *political acceptability*. Sang kandidat boleh saja sangat tinggi kapabilitas dan integritas pribadinya. Sang kandidat mungkin saja punya konsep yang dapat mengubah negara dalam sekejap. Namun, jika rakyat banyak tidak mengenalnya, dia tidak bakal terpilih.

Bagi calon pengusaha yang serius untuk menjadi presiden, tantangan terbesarnya adalah dikenal, kemudian disukai rakyat banyak. Mereka selama ini mungkin sering disebut di koran atau televisi. Mereka mungkin sering pula masuk ke komunitas elite. Namun, mayoritas pemilih berada di pedesaan. Popularitas mereka saat ini dengan sendirinya sudah tertinggal jauh dari presiden atau wakil presiden yang kini sedang berkuasa. Ketertinggalan itu hanya dapat dikejar, bahkan dilampaui, jika sang calon punya mesin politik yang sangat masif dan efektif.

Belum dapat kita prediksi, apakah nanti pengusaha seperti Surya Paloh, Aburizal Bakrie atau Jusuf Kalla dapat benar-benar menjadi presiden. Bahkan belum dapat kita prediksi apakah nanti Golkar mencalonkan salah satu di antara mereka dalam konvensi partai Februari 2004.

Namun yang perlu dicatat, pencalonan mereka setidaknya membuat Pemilihan Presiden Indonesia 2004 bertambah seru. * *

Kerusuhan Buleleng Menjelang Pemilu

KONFLIK dan kekerasan di Buleleng memberikan sinyal bahwa Pemilu 2004 mungkin berdarah. Bentrok pendukung PDIP dan Golkar di Buleleng tidak hanya berakhir dengan tewasnya dua korban. Puluhan warga setempat juga ikut mengungsi. Luka sosial masyarakat setempat hanya bisa sembuh dalam waktu lama. Hubungan partai politik menjadi tegang.

Jika pendukung PDIP dan Golkar saja bisa bentrok, apalagi dengan pendukung antar partai lainnya. Dilihat dari sisi platform partai, dua partai tersebut nyaris seragam. Keduanya sama-sama merupakan partai plural dan kebangsaan, seperti kakak beradik. Padahal, begitu banyak partai peserta pemilu saat ini yang berbeda, bahkan bertentangan dari sisi platform. Potensi konflik antar partai yang berbeda tersebut berarti lebih besar.

Jika di Bali saja bisa bentrok, apalagi di wilayah lain. Bali termasuk pulau dengan penduduk yang relatif homogen dilihat dari sisi agama, ras dan status ekonominya. Solidaritas di Bali juga lebih

kuat karena mayoritas masyarakat menghayati agama serta tradisi yang sama. Sedangkan di wilayah lain, perbedaan agama, etnis, ras dan kekayaan jauh lebih mencolok. Berarti, wilayah lain membuka kemungkinan konflik yang lebih besar dibandingkan Bali.

Itulah yang kita khawatirkan. Jika bernasib buruk, kualitas Pemilu 2004 bisa sangat merosot. Misalnya, pada hari pemilu, aneka bentrok pendukung partai terjadi di banyak tempat. Di aneka wilayah, pemilu ditunda atau diulang karena terjadi kerusuhan. Legitimasi pemilu dipersoalkan berbagai pihak. Politik Indonesia pasca-Pemilu 2004 sangat mungkin lebih goyah.

Ada alasan untuk optimis. Namun banyak pula alasan untuk pesimistis terhadap Pemilu 2004. Yang membuat pesimistis, publik luas di level akar rumput (grass-root) memang sangat rawan diprovokasi. Berbagai persoalan menumpuk di segmen tersebut, sehingga membuat mereka seperti rumput kering. Sedikit saja ada hawa panas, seluruh rumput itu mudah terbakar.

Mereka saat ini semakin sulit secara ekonomi. Jumlah pengangguran atau setengah pengangguran semakin banyak. Barang-barang semakin tidak terjangkau. Pada saat yang sama, mereka menyaksikan merajalelanya korupsi di kalangan pemerintahan. Sedikit banyak mereka tahu banyaknya konglomerat hitam yang lepas dari jerat hukum. Rasa ketidakadilan, tidak berdaya, sekaligus dizalimi membuat mereka nekat.

Pada saat yang sama, akar rumput tersebut juga rawan dengan sentimen agama. Provokasi yang menyerang agama tertentu atau merasa diserang pemeluk agama lain mudah membangkitkan solidaritas kekerasan. Sekali isu agama terbakar, terbakar pula keseluruhan mereka dalam konflik yang liar. Ambon, Poso, Mataram, dan berbagai tempat yang lainnya menjadi saksi hidup bahwa setelah reformasi kekerasan yang bersentimen agama itu sangat mudah untuk disulut.

Tidak hanya sentimen agama, sentimen antara pribumi dan non pribumi juga rawan. Dalam banyak kejadian, non pribumi sering menjadi atau dijadikan kambing hitam. Penyebab kemarahan adalah hal yang lain. Namun ujungnya pertokoan dan perumahan non pribumi menjadi sasaran amukan. Peristiwa atau tragedi Mei di Jakarta 1998 merupakan contoh amuk massa dengan korban non pribumi.

Konflik antara pendatang dan penduduk asli tidak kalah garang. Penduduk asli merasa sudah berdiam di wilayah itu sejak nenek moyang mereka. Namun mereka melihat pendatang baru yang justru lebih makmur. Tidak hanya lebih makmur, bahkan pendatang baru berkelompok di antara sesama mereka dan menomorduakan penduduk asli. Dengan sedikit kipasan saja api segera menyala dan membumihanguskan wilayah tersebut. Konflik di Sampit dan wilayah lainnya merupakan contoh konkret kekerasan pendatang versus penduduk asli.

Celakanya, tidak hanya akar rumput yang rawan provokasi. Kalangan elit Indonesia juga gemar memprovokasi, baik sengaja maupun tidak. Dalam rangka memperkuat barisan politik dan memperlemahkan lawan, tidak sungkan-sungkan elit mempermainkan sentimen agama. Agama Islam yang suci sering dijadikan 'kuda tunggangan' untuk memukul lawan politik.

Misalnya, perkembangan terakhir adalah adanya koalisi berbagai partai Islam untuk menjegal Megawati Soekarnoputri. Sebenarnya, koalisi antar partai merupakan hal yang biasa dan sah saja. Menjegal tokoh tertentu secara sah melalui pemilu juga lumrah-lumrah saja. Wajar jika ada sejumlah tokoh yang ingin menjegal Megawati agar tidak terpilih kembali. Sama sahnya, misalnya, kumpulan tokoh itu ingin mengalahkan Amien Rais.

Persoalannya, mengapa koalisi tersebut harus menggunakan sentimen agama Islam sebagai basis koalisi? Bukankah sudah

diketahui bahwa sentimen agama sangat rawan memunculkan konflik? Tanpa disadari, para elite juga terpancing untuk memprovokasi potensi konflik di kalangan akar rumput.

Penyakit lain kalangan elite tersebut adalah belum terbiasa dengan kultur kekalahan. Padahal, dalam pemilu, pasti ada yang menang dan yang kalah. Lihatlah hal yang dikerjakan para pemimpin partai yang tidak lulus verifikasi Departemen Kehakiman. Mereka tidak menerima hal itu secara legawa. Sebaliknya, mereka mengadukan menteri Kehakiman ke polisi. Ada pula yang membawa masalah tersebut sampai ke Mahkamah Konstitusi.

Lihat pula yang terjadi dalam persaingan kepemimpinan internal partai. Pihak yang kalah tidak bersedia menerima pihak yang menang. Yang terjadi kemudian adalah munculnya pengurus kembar. Tidak jarang muncul pula partai kembar. Setelah lewat pengadilan, nama baru diubah dan tetap dibuat mirip-mirip. Tidak tanggung-tanggung, elite tersebut juga tidak sungkan-sungkan memobilisasi akar rumput untuk memperkuat posisinya.

Lapangan politik kita saat ini memang sangar sulit. Kalangan akar rumputnya rawan konflik dan mudah diprovokasi. Sementara itu, elitnya gemar berkonflik dan gemar memprovokasi. Pemilu bisa menjadi panggung semua keburukan itu. Pemilu 2004 terancam berdarah.

Namun kita masih mempunyai alasan untuk optimis. Bukankah pemilu 1999 berlangsung secara damai? Bukankah Carter Center mengklaim bahwa Pemilu sangat absah? Kita masih mempunyai alasan untuk optimistis bahwa pemilu 2004 akan sepi dari kekerasan. Hal itu bisa terjadi jika elite yang berpengaruh pada 2004, sebagaimana pada 1999, bisa menerima siapapun yang kalah dan yang menang. **

Komplikasi Pemilu di Aceh

MENURUT jadwal, darurat militer di Aceh akan berakhir pada 19 November 2003. Tetapi sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan akan memperpanjang kembali darurat militer itu untuk jangka waktu empat sampai enam bulan. Terbuka kemungkinan, darurat militer di Aceh berakhir sebelum pemilu legislatif pada April 2004. Namun, mungkin pula darurat militer masih diterapkan di Aceh ketika pemilu nasional berlangsung. Situasi di Aceh dapat menjadi sangat unik, menyelenggarakan pemilu di bawah kondisi darurat militer.

Apa daya, sejak lama Aceh memang berbeda dengan provinsi lain. Di provinsi lain kini mereka sibuk berbenah diri. Aneka partai baru dan lama, berbagai tokoh lokal maupun nasional sedang mempersiapkan kampanye. Pemilu menjadi mekanisme sirkulasi elite dan perubahan di provinsi masing-masing.

Namun, di Aceh pemilu agaknya hanya numpang lewat. Di sana, situasi masih tidak normal, masih di bawah darurat militer. Di banyak

desa, kegiatan dikontrol sangat ketat. Bagaimana mungkin elite lokal dan publik setempat dapat berkampanye secara damai jika persoalan Aceh merdeka dan NKRI saja masih menjadi persoalan.

Di Aceh, memang saat ini sangat jarang terdengar serangan militer dari GAM terhadap tempat vital. Berbeda dengan sebelumnya, ratusan sekolah sempat dibakar oleh kelompok ini. Pasifnya serangan GAM itu bisa berarti banyak.

Di satu sisi, mungkin GAM memang sudah dilumpuhkan. Memang GAM masih hidup, tetapi sudah terpencar-pencar dalam satuan kecil dan lemah. Pasifnya serangan GAM dapat diartikan sebagai semakin lemah dan semakin tidak signifikannya GAM sebagai kekuatan militer dan politik.

Namun di sisi lain, pasifnya GAM dapat pula diartikan sebagai taktik dan strategi yang sengaja dilakukan. GAM mengulur waktu. Ketika pemerintah lengah, sekali lagi GAM melakukan konsolidasi dan kaderisasi. Kemungkinan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa masih sedikitnya senjata yang direbut militer Indonesia. Senjata GAM belum dilucuti secara signifikan. Masih sangat banyak senjata GAM yang ditumpuk di suatu tempat dan siap digunakan lagi jika situasi kondusif.

Kenyataan pula bahwa belum banyak gembong GAM yang tertangkap. Mereka mungkin sengaja bersembunyi dan membiarkan anggota biasa dan pimpinan kelas terinya ditahan. Para Gembong GAM ini masih bertenaga. Jika memungkinkan, secara cepat mereka dapat kembali melebarkan jaringan dan membuat susah tegaknya NKRI di Tanah Rencong.

GAM mungkin sudah lemah, tetapi GAM mungkin pula masih kuat dan bersembunyi. Justru karena ketidakpastian itu, pemilu di Aceh memiliki komplikasi. Apalagi Pemilu 2004 berlangsung sangat lama. tidak hanya ada pemilu DPR pada April, tetapi juga pemilu

presiden babak pertama pada Juli dan pemilu presiden babak kedua pada September. Pemilu presiden baru diketahui pada Oktober 2004. Sedangkan kampanye pemilu DPR sudah dimulai pada Maret 2004. Hampir sepanjang 2004, Indonesia disibukkan oleh pemilu.

Dalam kondisi di atas, semua pilihan pemilu menjadi sulit dan bermasalah. Pilihan pertama, pemilu diselenggarakan di Aceh dan darurat militer dicabut jauh hari sebelumnya. Berarti situasi Aceh dinormalkan kembali untuk waktu sekitar satu tahun lamanya. Melalui pemilu itu, memang rakyat Aceh akan ikut memilih wakilnya. Namun, apa yang terjadi jika dalam waktu setahun itu, GAM punya kesempatan emas untuk konsolidasi.

Dalam situasi normal, tentu publik, tokoh dan elite di Aceh punya kebebasan berkampanye. Kontrol atas manuver politik dan aneka pertemuan dikendurkan seperti yang terjadi di provinsi lain yang normal. Dalam situasi GAM yang masih ingin besar dan kekuatannya belum lumpuh, masa setahun normal itu menjadi lahan empuk GAM untuk kembali memperkokoh diri.

Pilihan kedua, darurat militer diteruskan dan pemilu tidak diselenggarakan di Aceh. GAM akan dikikis sehabis-habisnya tanpa interupsi. Ketika provinsi lain sibuk pemilu, tentara dan polisi mengejar aktivis dan tokoh GAM sampai ke sarang-sarangnya. Setelah pemilu usai, GAM akan kian lemah.

Tetapi, akibat buruknya, pemilu nasional kehilangan legitimasi. Bahkan pemilu itu tidak dapat diklaim mewakili seluruh rakyat Indonesia jika jelas-jelas ada satu provinsi yang tidak ikut pemilu. Di samping itu Aceh akan semakin terpinggirkan. Penduduk Aceh semakin merasa tidak ikut memilih pemimpin nasionalnya. Bahkan tidak ada pula sirkulasi elite politik lokal di Aceh karena tidak ada pemilu bagi DPRD provinsi dan kabupaten. Situasi ini justru dapat membuat Aceh tambah terpuruk.

Pilihan ketiga, pemilu dilaksanakan di Aceh dan darurat militer juga terus diberlakukan. Pemerintah ingin kedua-duanya. Pemilu dilaksanakan agar klaim pemilu bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pemilu di semua provinsi. Darurat militer juga diterapkan agar tidak memberi ruang bagi GAM untuk memanfaatkan situasi pemilu yang sangat lama.

Persoalannya, Aceh menjadi kasus unik dalam wacana pemilu di dunia demokratis. Bagaimana mungkin ada pemilu di bawah laras senjata? Bukankah itu dua hal yang saling berkontradiksi? Pemilu mengandaikan kebebasan dan kebolehan untuk membuat manuver? Sementara darurat militer justru keabsahan untuk mengekang dan keabsahan untuk tidak menjalankan hak asasi warga negara.

Jalan tengahnya mungkin pembagian teritori di Aceh. Di provinsi lain, dipisahkan dulu mana wilayah yang aman dan mana wilayah yang rawan. Untuk wilayah yang aman, pemilu dilaksanakan seperti biasa, tanpa darurat militer. Untuk wilayah yang rawan, harus ada kontrol yang ketat dari pihak militer. Tidak perlu menerapkan darurat militer di wilayah rawan itu, tetapi cukup menggunakan payung hukum UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam UU ini, khususnya pasal 14 ayat 3, diatur kewenangan presiden mengerahkan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata. Ini mungkin kompromi yang optimal.**

Pemain Baru Pemilu 2004

SEBERAPA jauh para pemain baru. dalam Pemilu 2004 nanti menjadi pemain utama dan mempengaruhi secara signifikan kultur pemerintahan selanjutnya? Ini pertanyaan terpenting setelah mengikuti pengumuman KPU (Komisi Pemilihan Umum), Selasa 2 Desember, KPU mengumumkan sementara 12 partai politik peserta pemilu. Separuh dari partai adalah pemain baru, setidaknya partai dengan nama baru.

Partai peserta Pemilu 2004 akan jauh lebih sedikit. Berbeda dengan Pemilu 1999 yang jumlahnya mencapai 48 partai, pada Pemilu 2004 jumlahnya mungkin hanya belasan atau dua puluhan partai. Seleksi pada pemilu kali ini memang jauh lebih ketat. Partai hanya boleh mengikuti pemilu jika pendukung riilnya banyak. Oleh undang-undang, pendukung riil itu dihitung dengan jumlah kepengurusan minimal di $\frac{2}{3}$ jumlah seluruh provinsi. Di setiap provinsi itu, harus ada pula kepengurusan lengkap partai di minimal $\frac{2}{3}$ kabupaten. Di setiap kepengurusan, disyaratkan pula terdaftar minimal 1.000

anggota yang dibuktikan dengan KTA (kartu tanda anggota). Setiap kepengurusan harus pula memiliki kantor sekretariat sendiri.

Dengan kriteria seketat itu, tidak heran jumlah partai yang lolos verifikasi faktual KPU akan sedikit saja. Dari daftar partai yang akan diluluskan KPU sebagai peserta pemilu, banyak pula pemain baru. Seberapa besar newcomers ini akan menyegarkan politik Indonesia? Atau sebaliknya, mereka tidak bisa diperhitungkan karena popularitas mereka juga ala kadarnya?

Semua pemain baru, semua partai politik baru mungkin memimpin Indonesia seperti Turki. Pada pemilu terakhir, Turki mengalami "gempa bumi" politik. Partai besar di Turki berguguran, bahkan tidak lolos threshold. Sedangkan partai baru pimpinan Erdogan langsung melesat dan menjadi partai mayoritas di parlemen.

Partai politik yang tidak melewati threshold di Turki langsung digugurkan. Kursi yang diperoleh partai yang tidak lolos juga digugurkan. Threshold dalam pemilu Turki sangat tinggi, 10 persen. Akibatnya, partai yang lolos threshold memperoleh semua kursi yang ditinggalkan partai yang tidak lolos threshold

Melalui mekanisme seperti itu, partai baru pimpinan Erdogan semakin perkasa. Secara riil, partai baru itu hanya memperoleh suara kurang dari 50 persen. Tetapi karena hanya dua partai yang lolos threshold dengan perhitungan yang disepakati, partai Erdogan akhirnya berkuasa mutlak. Partai baru itu hampir menguasai lebih dari separuh kursi parlemen.

Menjadi perdebatan yang tidak kunjung habis di Turki, mengapa partai baru langsung gagah perkasa menjadi partai terbesar dalam sejarah Turki modern. Banyak alasan dikemukakan. Antara lain, meluasnya ketidakpuasan publik akibat buruknya prestasi ekonomi pemerintah. Pada saat yang sama, partai baru pimpinan Erdogan sangat berhasil menarik sentimen pemilih. Walau dikenal luas

sebagai partai Islam, partai Erdogan lebih muncul dengan isu sekuler, seperti kesejahteraan. Baik pemilih Islam religius ataupun pemilih Islam sekuler yang mayoritas merasa lebih nyaman menjatuhkan pilihan kepada partai baru itu.

Mungkinkah partai baru dan pemain baru dalam pemilu Indonesia 2004 bernasib baik seperti partai Erdogan di Turki? Bukankah partai baru punya harapan baru. Bukankah pemain baru punya idealisme baru? Kehadiran mereka dominan di dunia politik sangat mungkin memberikan penyegaran. Mereka juga mungkin belum terpolusikan oleh politik elite pemerintahan yang semakin korup.

Namun, sayang sekali. Dengan seluruh hormat kepada pemain baru itu, Indonesia bukan Turki. Berdasarkan aneka jajak pendapat, terutama LSI 2003, partai baru itu hanya menjadi partai gurem. Peluang mereka untuk dominan, atau masuk enam besar sangat sulit. Bahkan untuk lolos threshold 3 persen saja, mereka butuh perjuangan teramat keras.

Lahan politik Indonesia jauh lebih sulit. Teritori Indonesia begitu luas, dari Aceh sampai Papua. Jumlah pemilih kita 145 juta. Pemilih ini berdiam di ribuan desa dan kota. Sebagian pemilih punya hambatan transportasi dan komunikasi. Sangat sulit menjangkau mereka.

Sulit bagi partai baru dan pemain baru untuk penetrasi segmen pemilih yang besar itu. Nama partai baru itu belum dikenal. Butuh waktu lama, dana sangat besar dan mobilisasi sangat masif bagi partai baru untuk dikenal oleh setidaknya 50 persen pemilih saja. Jika nama partai belum pernah didengar pemilih, bagaimana mungkin partai itu akan dipilih?

Jika suara partai baru dan pemain baru sangat kecil, tidak banyak pula yang dapat mereka sumbangkan. Sebagai tokoh atau partai, boleh saja mereka memiliki ide sangat cemerlang. Boleh saja mereka memiliki inisiatif tinggi. Namun dalam politik nasional, apalagi di

Parlemen, jumlah akan berbicara. Dalam voting apapun isi yang divotingkan, suara besar akan mengalahkan suara kecil.

Jika sulit berharap dari partai baru, bisakah kita berharap pada partai reformis? Sejak 1999, aneka partai saat itu diklaim sebagai partai reformis. Termasuk di dalamnya adalah PAN, PKB, dan PBB. PDIP juga masuk di dalamnya karena ada imbuhan "P" atau "Perjuangan" yang membuat PDIP bukan sekedar terusan PDI era Orde Baru.

Hasil survei LSI 2003 menunjukkan gejala yang sama. Partai yang mengusung bendera reformasi ini tidak tumbuh. Untuk kasus PDIP bahkan lebih buruk lagi. Tanpa perubahan yang berarti, suara PDIP akan jauh merosot pada 2004. Sementara PAN, PKB dan PBB stagnan saja. Kemarahan publik atas lima tahun reformasi berimbas kepada semua partai yang mengusung semboyan reformasi.

Di antara partai lama, Golkar justru paling potensial menjadi pemenang Pemilu 2004. Baik buruknya Golkar sangat mempengaruhi politik Indonesia pasca Pemilu 2004. Pada pemilu 2004, bukan partai baru, tetapi partai dan pemain lama yang akan lebih berperan dalam politik. **

Upaya Menggagalkan Pemilu?

SIAPA pun yang akan memimpin Indonesia pasca -2004, sejauh menang dalam pemilu yang bebas dan bersih, dia akan punya legitimasi. Walau berasal dari partai kecil, dia punya peluang untuk membentuk koalisi pemerintahan. Walau menang sangat tipis dan kurang meyakinkan, dia juga masih punya waktu untuk membuat kebijakan yang populer guna menaikkan dukungan.

Namun, siapa pun yang memimpin Indonesia pasca 2004, tetapi tanpa lewat pemilu, melalui suasana chaos dan rusuh, dia akan digugat. Awalnya, tokoh kuat ini mungkin mampu meredam oposisi dengan seluruh pengaruh uang dan senjata. Namun, terlalu banyak rakyat Indonesia yang akan melawan. Terlalu lama waktu yang tersedia untuk menyusun oposisi. Pada gilirannya, orang kuat tadi akan pula ditumbangkan, baik melalui pemilu berikutnya atau kudeta selanjutnya.

Dua pikiran itu dengan segera melintas di benak saya. Ucapan Panglima TNI Endriartono Sutarto sangat berharga untuk disimak. Di

depan sidang DPR yang terhormat, Jenderal Endriartono menengarai gerakan yang berupaya menggagalkan pemilu 2004. Gerakan itu cukup sistematis dan strategis.

Diungkapkan Endriartono, berdasarkan data intelijen, ada berbagai manuver yang siap dilakukan kelompok itu. Mereka mungkin memperlambat undang-undang pemilu. Aneka revisi dan judicial review akan terus digulirkan. Sasarannya, pada waktunya, undang-undang pemilu tidak siap. Pemilu akhirnya dimundurkan atau dibatalkan sementara.

Kelompok itu juga siap mengadu domba berbagai pendukung partai yang sedang pecah secara internal. Mereka juga siap membentrokkan massa dan akar rumput aneka parpol. Kasus Buleleng di Bali mungkin akan menjadi model bagi mereka untuk diperluas di berbagai daerah lain.

Manuver lain yang diungkapkan Endriartono, kelompok itu juga memainkan money politics. Mereka memang sulit membeli suara rakyat yang memilih presiden secara langsung. Tetapi mereka bisa "menyuap" pelaksana pemilu. Partai yang mendapatkan seratus ribu pemilih, misalnya dipalsukan menjadi dua ratus ribu.

Tujuannya tidak lain, menurut Endriartono, ingin membuat suasana chaos. Dengan situasi yang rusuh dan tidak menentu, mereka dapat mengambil alih kekuasaan tanpa lewat pemilu.

Begitu besar akibatnya jika pemilu memang dapat digagalkan. Situasi menjadi sedikit lebih horor karena memang mudah sekali menggagalkan pemilu. Mudah sekali sat ini memancing kerusuhan masal. Publik luas di Indonesia, terutama di kalangan bawah, saat ini seperti rumput yang kering. Mereka sudah menderita cukup lama sejak krisis ekonomi 1997. Sedikit kena sulut api, rumput kering itu akan terbakar dan membakar sekelilingnya.

Kini publik Indonesia lebih sensitif diprovokasi. Mereka melihat sendiri, betapa jumlah penganggur dan setengah penganggur kini sudah mencapai sekitar 45 juta penduduk. Harga-harga membumbung naik. Pemutusan hubungan kerja terjadi di banyak tempat. Sebagian diantara mereka mencoba bekerja di luar negeri menjadi TKI. Apa daya, banyak pula TKI yang disiksa dan diperkosa.

Di saat yang sama, mereka menyaksikan betapa korupsi bertambah parah. Maling motor dibakar penduduk beramai-ramai. Namun "maling" kelas berat, para koruptor, bebas onggang-onggang kaki di luar negeri. Mereka merasa dizalimi oleh keadaan.

Sementara itu, elite politik yang ada juga berpotensi konflik. Sejak reformasi, sangat terasa betapa para elite kita sulit sekali memegang komitmen dan kesepakatan. Awalnya, Golkar dan Poros Tengah bersatu melawan PDIP. Lalu Poros Tengah bersama Golkar dan PDIP bersatu melawan PKB. Kini sedang pula dibentuk koalisi hanya "seumur jagung". Sentimen agama mudah "dimain-mainkan" untuk memenangkan pertarungan politik yang sebenar-benarnya tidak ada hubungannya dengan dunia keagamaan.

Dalam situasi ini, di tangan seorang provokator ulung yang punya dana dan jaringan, pemilu memang mudah dikacaukan. Namun, sekali pemilu itu berhasil dikacaukan, yang lahir kemudian adalah kekacauan lainnya.

Situasi kacau hanya bisa diatasi oleh munculnya orang kuat. Baik hanya untuk transisi sementara ataupun jangka waktu lain, orang kuat itu berada dalam kekuasaan melalui prosedur yang tidak demokratis. Seperti biasa, dia dapat berjanji, setelah politik stabil, akan diadakan pemilu.

Mustahil ada orang kuat jika tidak didukung aparat keamanan, terutama militer. Tetapi, dengan dukungan penuh dari militer sekalipun, berapa lama mereka mampu bertahan? Akan datang

banyak sekali perlawanan yang tidak setuju atas pengambil alihan pemerintahan, walau atas nama situasi darurat. Semakin banyak perlawanan semakin represif pemerintahan.

Di era Soeharto, pemerintah represif dapat bertahan lama karena didukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Banyak dana dapat disediakan untuk subsidi rakyat miskin. Banyak dana pula dapat didistribusikan untuk kooptasi dan membeli loyalitas pendukungnya. Namun, situasi sekarang, Indonesia justru berada dalam kebangkrutan ekonomi. Kekuatan represif yang tidak punya uang membutuhkan pelor dan senjata yang lebih banyak untuk menakut-nakuti oposisi.

Di pusat, elite akan terus saling mengganjal dan mencari peluang. Di daerah, akan muncul aneka pemberontakan. Semakin banyak daerah yang ingin memproklamasikan kemerdekaannya, terpisah dari Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka semakin punya nyali. Organisasi Papua Merdeka mendapatkan energi baru. Tidak ketinggalan, aneka provinsi kaya akan berpikir ulang soal kemungkinan merdeka juga.

Kegagalan Pemilu 2004 bahkan dapat berujung pada hancurnya Indonesia. Seperti Yugoslavia, Indonesia hanya tinggal sejarah. Di teritori Indonesia, berdiri aneka negara nasional yang lebih kecil, yang labil dan saling menyerang. Sesal dan kecewa tidak lagi berguna jika nasi sudah menjadi bubur.

Karena buruknya situasi itu, maka sejak sekarang sekuat tenaga Pemilu 2004 harus dijaga. Upaya menggagalkan pemilu sama dengan upaya menghancurkan Indonesia. **

Dewan Penyelamat Partai?

SEBUAH lembaga baru rencananya akan dibentuk. Nama lembaga itu cukup seksi, Dewan Penyelamat Partai. Berbagai tokoh senior dan aktivis PDIP yang kecewa sedang menyusunnya. Target akhir lembaga itu ingin menyelamatkan PDIP sebagai salah satu aset bangsa. Diproyeksikan, Sophan Sophian memimpin lembaga baru di luar struktur PDIP tersebut.

Apa yang sedang terjadi pada PDIP? Menjelang kampanye pemilu, konflik dan aksi protes di partai itu semakin menjadi-jadi. Ketika menang dalam Pemilu 1999, banyak pihak berharap pada PDIP. Partai ini menjadi satu-satunya partai yang mampu mengalahkan Golkar, partai pemenang semua pemilu Orde Baru.

Saat itu banyak yang membayangkan, PDIP berkembang seperti partai LDP di Jepang atau Partai Kongres di India. Di Jepang dan India, LDP dan Partai Kongres mendominasi politik nasional dalam jangka waktu lama. Lebih dari sekadar mendominasi, partai itu menjadi pengawal keberagaman politik masyarakatnya.

Namun, hasil survei lembaga independen justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Beberapa kali survei nasional dengan metode wawancara tatap muka, baik dikerjakan LSI, IFES, maupun IRI, menunjukkan bahwa perolehan PDIP merosot ke peringkat kedua, di bawah Golkar.

Kini, bahkan konflik internal paling sering terdengar di PDIP. Apa yang membuat partai pemenang Pemilu 1999 itu tampak mulai mengerut, menciut dan seolah “tidak putus dirundung malang?”

Berbeda dengan partai lain, PDIP memang partai dengan sumber anggota dan pimpinan yang sangat beragam. Keberagaman tersebut memunculkan perbedaan persepsi dan kepentingan yang jauh lebih tajam dibandingkan dengan partai lain. Di PDIP, ada kelompok yang sering disebut “pemegang saham”. Mereka adalah para nasionalis senior, simpatisan dan pendukungnya, yang mengklaim sebagai murid dan ahli waris ajaran Bung Karno. Kelompok itu mempunyai semangat untuk menjaga ideologi partai yang nasionalis, marhaenis, dan pro pada wong cilik.

Namun di partai itu juga ada para pendatang yang lebih mempunyai cara pandang teknokrat. Tokoh tersebut, misalnya, Laksamana Sukardi atau Arifin Panigoro. Mereka adalah tokoh dengan cara berpikir yang jauh lebih pragmatis dan liberal. Kedua orang itu tumbuh dalam iklim usaha yang sangat kosmopolitan dan kapitalistik. Sulit membayangkan bahwa kedua tokoh itu serta pendukungnya di PDIP pro pada kebijakan ekonomi yang sangat nasionalistik dan subsidi yang besar bagi wong cilik.

Di PDIP ada pula tokoh dengan semangat anti-Orde Baru, bahkan anti-Golkar. Mereka ikut tertindas bersama Megawati di era Orde Baru. Bahkan, sebagian di antara mereka ada yang diculik dan menjadi korban represi Orde Baru. Dalam persepsi mereka, tidak bisa terpisahkan antara Orde Baru dan Golkar.

Pada saat yang sama, di PDIP banyak pula kaum yang “hijrah” dari Golkar. Menjelang jatuhnya Orde Baru, banyak aktivis dan pimpinan yang kecewa dengan Golkar dan menyeberang ke PDIP. Bagi sebagian, integrasi kaum yang “hijrah” itu sudah selesai. Namun bagi sebagian lagi, hal tersebut mendatangkan masalah yang acap kali muncul kembali ke permukaan.

PDIP menjelang 2004 sibuk pula berkonsolidasi. Pimpinan partai, terutama calon legislatif lebih ditata dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Namun, justru di titik itu persoalan baru muncul. Banyak tokoh yang merasa berjasa kepada partai tersebut yang ikut partai di masa sulit, tersingkir. Sementara itu mereka juga melihat munculnya wajah baru yang langsung diberikan posisi empuk.

Banyak yang berjasa kepada partai tetapi tidak terlalu berkualitas. Sebaliknya banyak yang berkualitas, tetapi belum punya sumbangan kepada partai. DPP PDIP memang harus memilih. Jika kualitas yang diutamakan, apa daya, banyak sekali tokoh yang dulu berjasa terpaksa digusur di nomor buntut dalam penyusunan daftar caleg. Sementara itu, tokoh baru, bahkan artis, diselipkan di nomor jadi.

Lebih jauh lagi, DPP PDIP mulai pula berkampanye untuk mencoblos tanda gambar saja. Sosialisasi sistem pemilu baru, yang juga boleh mencoblos nama caleg, dianggap berisiko. Nama partai jelas lebih populer. Mengapa tidak mengampanyekan nama partai saja? Kebijakan itu dengan sendirinya semakin memukul tokoh senior yang diletakkan di nomor buntut. Peluang mereka untuk terpilih semakin dilibas kebijakan partai. Konflik internal pun semakin panas.

Pada saat yang sama, PDIP sangat bergantung pada figur ketua umum. Perikat partai bukanlah program atau platform, tetapi figur Megawati. Banyak masalah di PDIP selesai jika ketua umum yang kharismatik itu terlibat. Persoalannya, Megawati memiliki banyak kendala untuk menjadi ketua umum yang membina konsolidasi partai.

Kendala paling jelas adalah masalah waktu. Tugas sebagai presiden, apalagi presiden Indonesia di masa krisis, sudah mengambil banyak sekali waktu, pikiran dan tenaga. Banyak persoalan di partai yang terbengkalai karena tidak ada ketua harian yang dapat menggunakan wewenang ketua umum. Wewenang Sekjen partai juga terbatas. Perapian dan institusionalisasi partai tidak berjalan secepat partai modern yang ketua umumnya fulltime hanya mengurus partai.

Kendala lain adalah gaya leadership Megawati. Megawati bukanlah tokoh yang gemar berkomunikasi. Banyak sekali kebijakan yang salah dipahami hanya karena kurang dikomunikasikan. Ketika marak pemilihan gubernur, Megawati memilih kebijakan yang rasional. Demi kepentingan negara dia lebih mendahulukan calon partai lain yang berkompeten, ketimbang calon dari partainya. Jelas butuh kearifan dan kebesaran jiwa untuk sampai pada kebijakan tersebut.

Masalahnya, kebijakan itu tidak disosialisasikan kepada aneka pihak, terutama internal partai, jauh-jauh hari. Akibatnya, yang kemudian berkembang adalah berbagai isu money politics di balik kebijakan yang aneh. Kelemahan komunikasi Megawati itu tidak hanya terjadi pada dirinya selaku ketua umum partai. Sebagai presiden, banyak pula kebijakannya yang sebenarnya baik menjadi terkesan buruk.

Kombinasi berbagai sebab di atas membuat PDIP lebih rentan terhadap konflik internal. Dalam konteks itulah kita bisa memahami munculnya inisiatif untuk membentuk Dewan Penyelamat Partai. **

Blunder Politik Muhammadiyah?

APAKAH ormas Islam Muhammadiyah sedang membuat blunder politik? Ataukah Muhammadiyah justru sedang membuat inovasi yang brilian? Demikian kontroversi yang berkembang mengikuti pernyataan sangat tegas ketua PP Muhammadiyah. Secara resmi, ormas ini mendukung kader terbaiknya, Amien Rais, sebagai presiden RI 2004. Tidak lupa pula PP Muhammadiyah menyerukan kepada seluruh kadernya untuk menjalankan amanat tersebut.

Pro dan kontra langsung lahir setelah pernyataan itu diucapkan. Kontroversi yang paling keras justru terjadi di kalangan kader Muhammadiyah. Jika dibandingkan dengan usia partai politik yang kini bertarung dalam Pemilu 2004, usia Muhammadiyah sudah jauh lebih tua. Ormas itu sudah merakyat dan mendarah-daging bersama pertumbuhan rakyat Indonesia.

Sejak tidak lagi berpolitik praktis karena hilangnya Partai Masyumi di bumi Indonesia, Muhammadiyah sudah terlanjur menjadi tenda besar bagi semua aktivis politik dan pimpinan politik. Sebagian di

antara mereka, ada yang di Golkar, PPP, bahkan PDIP. Tentu banyak pula yang di PAN, PBB, bahkan PKS. Walaupun berbeda politik, mereka dinaungi tenda besar spiritualitas yang sama.

Sudah pasti masing-masing partai itu memiliki calon presiden. Meski rambut sama-sama Muhammadiyah, calon presiden boleh berbeda. Pemihakan Muhammadiyah kepada Amien Rais, kebetulan capres dari PAN, segera menuai protes dari kader Muhammadiyah lainnya. Pemimpin Muhammadiyah saat ini dianggap membajak ormas dakwah itu dan memasukkannya dalam kancah pertarungan politik praktis.

Bahkan, kesatuan elemen beberapa organisasi pemuda Muhammadiyah juga mengumumkan sikap untuk tetap netral dalam pemilu. Mereka sebagai organisasi tidak ingin ikut terlibat dalam penokohan capres tertentu. Namun, tentu saja banyak kader Muhammadiyah yang setuju dengan sikap politik pimpinan pusat untuk mendukung capres Amien Rais secara konkret.

Sebagai orang luar, kita tidak ingin ikut dalam debat internal kader Muhammadiyah. Namun, kita dapat membuat identifikasi argumen terbaik dari mereka yang pro ataupun kontra dengan keputusan itu. Ada tiga alasan utama yang membuat pernyataan PP Muhammadiyah tersebut didukung.

Pertama, sejak awal, Muhammadiyah sudah terlibat dan berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Setahun belakangan Muhammadiyah. namun, Muhammadiyah ke dalam dunia politik praktis? ormas ini, bersama NU, Muhammadiyah memulai gerakan menolak korupsi. Dalam lima tahun reformasi, korupsi justru bertambah liar, luas, dan parah.

Muhammadiyah dan pihak lain meyakini, mustahil korupsi dapat diberantas tanpa komitmen yang tegas dan mendalam dari pemimpin nasional. Tingkat keparahan korupsi tersebut sudah demikian akut.

Mustahil hal itu dapat diberantas tanpa mobilisasi dan usaha mati-matian dari pemimpin nasional.

Muhammadiyah mungkin tidak ingin mengambil resiko. Kepala sudah terlibat praktis dengan isu korupsi, ormas ini juga ingin menyiapkan calon pemimpin nasional yang mempunyai rekor bersih dari KKN. Kebetulan, Amien Rais memenuhi syarat tersebut.

Alasan kedua, dukungan Muhammadiyah juga sangat terbatas. Dukungan itu tidak menyebutkan partai politik. Publik Muhammadiyah dibebaskan memilih partai mana saja. Tidak ada kecenderungan menceburkan ormas itu ke dalam politik praktis. Politik yang diambil Muhammadiyah dapat dianggap sebagai politik tinggi atau high politics.

Alasan ketiga, kasus itu akan sangat jarang terjadi. Lima tahun mendatang belum tentu Muhammadiyah sekali lagi mendukung tokoh tertentu sebagai calon presiden. Kondisi khusus itu dibuat hanya karena ada figur yang agak khusus seperti Amien Rais. Selain calon presiden, ketua umum PAN, dan ketua MPR, Amien Rais pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah. Sangat jarang Muhammadiyah menemukan kombinasi beberapa elemen itu dalam satu figur.

Sebaliknya, mereka yang kontra juga mempunyai argumen terbaik. Menurut yang kontra, Muhammadiyah sudah memperkecil tendanya. Sangat sulit Muhammadiyah sampai pada statusnya sekarang sebagai payung spiritual bagi semua tokoh dan partai politik. Ketika politik begitu terfragmentasi, sangat baik memiliki ormas yang berfungsi sebagai perekat dan netral seperti Muhammadiyah.

Namun, status Muhammadiyah yang sudah sangat baik justru dirusak. Pencalonan itu membuat Muhammadiyah menganakemaskan kader dan parpol tertentu serta menganaktirikan kader yang lain. Bahkan, gerakan amal usaha Muhammadiyah

dapat terganggu karena ada citra Muhammadiyah mulai masuk ke wilayah praktis. Pimpinan sekarang dianggap tidak sabar dan tidak sadar telah menjebloskan kembali Muhammadiyah dalam kubangan pertarungan kekuasaan yang praktis sekali.

Alasan lain, dukungan PP Muhammadiyah itu belum tentu efektif ditaati para kadernya. Sejak awal, komunitas Muhammadiyah sudah terpecah secara politik dan memang tidak perlu disatukan. Di sisi lain, dengan dukungan itu, Amien terkesan mulai dimiliki secara monopoli oleh Muhammadiyah. Hal itu bukan menambah dukungan politik ormas Muhammadiyah, bahkan membuat sebagian pendukung Amien dari ormas lain melarikan diri.

Berdasarkan data yang dimiliki LSI (Lembaga Survei Indonesia), hasil survei November 2003, komunitas Muhammadiyah yang menyalurkan aspirasinya kepada Amien Rais di bawah 40 persen dan ke PAN di bawah 30 persen. Total populasi yang mengidentifikasi diri ke Muhammadiyah hanya di bawah 6 persen. Pernyataan politik Muhammadiyah mungkin tidak banyak efeknya, sedangkan citra Muhammadiyah sudah terganggu.

Apakah dukungan politik Muhammadiyah untuk calon presiden merupakan sebuah blunder politik? Jawaban yang paling akurat mengenai hal itu akan lebih netral jika diberikan beberapa tahun mendatang. * *

Wakil Presiden dari Golkar?

AKHIRNYA Akbar Tandjung membuat klarifikasi. Dia membantah pernah menyatakan akan menjadi wakil presiden bagi Megawati Soekarnoputri. Dia juga membantah pernah memprediksi PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2004. Atas berbagai kritik bahwa dia melemahkan semangat partai, Akbar menjawab lugas. Menurut Akbar, dirinya sangat tahu bagaimana memimpin partai. Selama ini berbagai upaya dan pengorbanan sudah dilakukan sampai berdarah-darah, agar partai yang dipimpinnya kembali memenangkan pemilu.

Sebelumnya, dua bakal calon presiden konvensi Golkar sangat keras memberikan respons, Wiranto dan Surya Paloh. Pernyataan Akbar dianggap Wiranto hanyalah upaya agar dirinya dilamar Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden.

Lebih jauh Wiranto menengarai pernyataan Akbar itu akan membangkitkan kecurigaan publik luas. Jangan-jangan memang ada -deal-deal politik di balik pembebasan Akbar oleh Mahkamah Agung. Akbar dibebaskan, tetapi diminta tidak menantang Megawati.

Surya Paloh mengekspresikan kekecewaan serupa. Menurut Surya, Akbar harus lebih punya nyali sebagai ketua umum partai yang mungkin nanti menjadi partai terbesar Pemilu 2004. Jika dia ingin hanya menjadi orang nomor dua, buat apa Golkar membuat konvensi? Dengan hanya posisi wakil presiden Megawati yang diincar, seluruh proses konvensi akan diarahkan ke sana. Partai Golkar akan mengalami demoralisasi.

Kontroversi di atas sebenarnya berangkat dari dua cara pandang yang berbeda dalam memahami peluang Golkar. Pandangan yang kontra atas pernyataan Akbar memahami pemenang pemilu legislative harus juga menjadi pemenang pemilu presiden. Kemenangan dalam pemilu legislatif hanya menguasai separo kekuasaan. Apalagi, kekuasaan dalam parlemen adalah kekuasaan kolektif. Satu partai tidak mungkin mampu mendominasi suara parlemen tanpa dukungan partai lain dalam sistem multipartai.

Golkar sangat mungkin menjadi pemenang Pemilu 2004. Berdasarkan survei nasional yang dilaksanakan berbagai lembaga independen yang berbeda – LSI, IFES, dan IRI – Golkar selalu berada di urutan teratas. Persentase perolehan Golkar memang berbeda-beda menurut tiga lembaga itu. Namun, grafik menunjukkan hal yang sama, Golkar unggul atas semua partai, termasuk PDIP.

Dalam kondisi seperti ini, cara pandang yang kontra Akbar menginginkan Golkar mengambil inisiatif dan kepemimpinan. Jangan tanggung-tanggung, Golkar juga harus berupaya memenangkan pemilu presiden. Justru lembaga presiden itu yang menjadi pusat kekuasaan yang sebenarnya. Apalagi dalam sistem pemilihan presiden langsung, presiden yang terpilih dapat mengklaim wakil dari seluruh populasi yang memilihnya secara langsung.

Apalagi, menurut cara pandang ini, publik sedang kecewa dengan pemerintahan sekarang. Walau pemerintahan sekarang merupakan koalisi pelangi, terdiri atas banyak partai, asosiasi kekecewaan itu

tetap akan dibebankan kepada PDIP dan Megawati selaku partai dan politisi utama rejim ini.

Justru saat ini kesempatan bagi Golkar dan Akbar untuk menjadi orang pertama. Seandainya pun ada keinginan untuk hanya mengambil posisi nomor dua, nomor satu jangan lagi diberikan kepada penguasa sekarang. Golkar harus mengambil posisi sebagai pembaharu dan penyegar pemerintahan, bukan justru memapankan pemerintahan yang dianggap publik gagal.

Sebaliknya, pandangan yang memahami posisi Akbar berangkat dari sudut yang berbeda. Pandangan ini sepenuhnya yakin, hukum-hukum yang mengatur pemilu legislative berbeda dengan yang mengatur pemilu presiden. Sebuah partai dapat saja menang dalam pemilu parlemen, tetapi tidak otomatis tokoh utama partai itu akan menang dalam pemilu presiden.

Bahkan, pada 1999, ketika presiden dipilih MPR, kenyataan itu sudah terlihat. PDIP adalah partai pemenang pemilu. Tetapi, yang terpilih menjadi presiden ternyata bukan Megawati selaku ketua umum partai pemenang pemilu. Melalui aneka kompromi dan kesepakatan, Gus Dur yang menjadi presiden. Padahal, partai Gus Dur, PKB, hanya pemenang pemilu keempat.

Apalagi, jika pemilu presiden dipilih langsung. Nama dan figur calon presiden sangat menentukan. Lihatlah praktik pemilihan presiden langsung di Amerika Serikat yang sudah berjalan lebih dari seratus tahun. Kadang parlemen dikuasai Partai Republik, namun presiden dimenangkan tokoh Partai Demokrat. Dapat juga terjadi sebaliknya. Partai yang menang dalam pemilu parlemen justru kalah dalam pemilu presiden.

Padahal, Amerika Serikat menganut sistem dua partai. Apalagi dalam politik yang menganut sistem multipartai. Sangat mungkin tokoh dari partai kecil justru terpilih karena nama dan figur tokoh

itu. Di Peru, Fujimori datang dari partai kecil. Dia terpilih sebagai presiden. Di Filipina, Ramos juga berasal dari partai kecil. Dia juga terpilih sebagai presiden.

Menurut cara pandang ini, ada kemungkinan Akbar belum dapat menjadi calon presiden yang kuat pada 2004. Dia memang ketua umum dari partai yang mungkin menang pemilu. Namun Akbar sudah hampir tiga tahun menjadi bulan-bulanan opini publik. Dia memang dibebaskan MA secara hukum. Tetapi, pengadilan politik dan publik masih terus berlangsung. Waktu yang ada belum cukup bagi Akbar untuk sepenuhnya pulih.

Jika Akbar nekat menjadi calon presiden, dia akan mudah dikalahkan calon presiden lain yang lebih siap. Akibatnya, Akbar dan Golkar tidak mendapatkan apa-apa dalam kabinet 2004. Jauh lebih baik jika Akbar mengambil posisi wakil presiden bagi presiden yang paling mungkin terpilih. Tentu itu dilakukan dengan kompensasi. Akbar dan Golkar, misalnya, mendapatkan otoritas mengangkat 50 persen kabinet.

Pandangan ini mencoba realistis dalam berpolitik. Hanya, realisme untuk menjadi orang kedua itu mungkin belum saatnya dinyatakan sekarang. Publik Golkar masih butuh disiram dengan semangat menjadi juara. Sentimen ini yang mungkin luput untuk direspons oleh Abar Tandjung. **

Koalisi Kaki Tiga untuk Presiden

TAUFIQ Kiemas, tokoh senior PDIP, orang kuat di belakang Megawati, sudah memberikan sinyal yang sangat jelas. Di arena kampanye di Yogyakarta, dia menyatakan kriteria yang akan diajak berpasangan dengan Megawati. PDIP, menurut Kiemas, tidak bisa berjalan sendirian mempertahankan Presiden Megawati. Koalisi yang kuat sedang dibangun untuk itu, yaitu koalisi kaki tiga dengan Golkar dan NU.

NU dan Golkar, ujar Kiemas, memiliki kesamaan dengan PDIP dari segi platform. PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan yang lain kecuali dengan dua kekuatan politik itu. Koalisi juga dilakukan berdasarkan kerja sama institusi, bukan orang per orang. Ini koalisi kelembagaan, bukan koalisi personal. Kiemas mengutarakan pasangan kuat Megawati sebagai presiden akan dicari dari kekuatan itu, Golkar atau NU.

Segera pandangan Kiemas mendapatkan tanggapan. Sebelumnya, Gus Dur, tokoh senior lain dari NU dan PKB, dengan

tegas menyatakan mustahil kerja sama dengan Megawati. Dia tidak ingin kejoblos kedua kali. Menurut Gus Dur, Megawati pernah berkomplot menjatuhkan dirinya sebagai presiden. NU juga bukan partai politik, tidak bisa diajak koalisi oleh partai politik.

Slamet Effendy Yusuf dari Partai Golkar juga menganggap terlalu pagi membicarakan koalisi. Apalagi Golkar hanya diposisikan sebagai wakil presiden. Bagaimana jika Golkar menang pemilu? Apakah pemenang pemilu hanya diberikan kursi wakil presiden? Lebih baik, ujar Slamet, pihaknya menunggu hasil legislatif dulu. Dari hasil pemilu itu, modal masing-masing dapat dilihat.

Koalisi yang dimaksud Kiemas adalah aliansi politik jangka panjang. Koalisi tiga kaki itu menyerupai Barisan Nasional di Malaysia. Partai Komunitas Melayu (UMNO), partai komunitas China (Malaysian Chinese Association) dan partai komunitas India (Malaysia Indian Congress) bersatu dalam Koalisi Tiga Kaki, Barisan Nasional.

Aliansi itu menang pemilu kali pertama di Malaysia pada 1959. Sampai kini, lebih dari 40 tahun, aliansi partai tersebut tetap terjaga dan tetap mendominasi politik Malaysia. Barisan Nasional mewakili mayoritas segmentasi politik Malaysia. Yang juga sama pentingnya, Barisan Nasional mengembangkan platform partai bersama bertema kebangsaan yang dihayati oleh ketiga partai yang bergabung.

Sebagaimana Indonesia, penduduk Malaysia juga beragam. Sekitar 53 persen populasi Malaysia adalah komunitas Melayu. Sebanyak 26 persen berasal dari China, dan 7 persen dari India. Total tiga komunitas itu 86 persen dari seluruh populasi Malaysia. Dari segi jumlah, etnis China dan India di Malaysia memang kalah banyak dari Melayu. Namun, dalam kekuatan ekonomi dan penguasaan ilmu pengetahuan, dalam banyak hal, komunitas China dan India lebih unggul.

Wajar jika masing-masing komunitas itu, baik Melayu, China maupun India, memiliki partai politik sendiri. Namun, di sinilah kejelian politik Tengku Abdul Rahman. Dengan inovasi yang brilian, dia membuat front bersama, aliansi jangka panjang antar tiga partai dengan tiga komunitas itu. Jauh lebih baik bagi Malaysia jika tiga partai dari tiga komunitas berbeda itu bersatu ketimbang mereka berhadap-hadapan, apalagi bermusuhan. Kerusuhan etnis akan mudah sekali pecah jika ketiga partai tersebut bersaing secara tajam.

Stabilitas politik Malaysia yang multipartai sejak 1950-an sebagian besar disebabkan stabilitas aliansi jangka panjang Barisan Nasional. Tentu saja dalam perjalanannya, Barisan Nasional mengalami dinamika. Misalnya, pada 1988, UMNO selaku partai terbesar dalam Barisan Nasional pernah dibubarkan pengadilan. Namun, Mahathir Mohammad membuat UMNO baru dan kembali bergabung dengan Barisan Nasional. Perpecahan dalam tubuh partai yang beraliansi itu juga terjadi. Namun, Barisan Nasional sebagai aliansi jangka panjang tetap berkibar.

Kita merindukan pemimpin yang kini berpengaruh di Indonesia mengambil inovasi seperti Tengku Abdul Rahman. Pola aliansi partai jangka pendek saatnya ditinggalkan. Apalagi aliansi yang menghadap-hadapkan partai Islam versus partai nasionalis. Polarisasi Islam versus nasionalis hanya menguntungkan kepentingan politisi tertentu dalam jangka pendek, namun merugikan stabilitas politik bangsa dalam jangka panjangnya.

Ide itu sudah lama saya utarakan dan pernah pula saya kumpulkan pimpinan tiga partai besar untuk bertemu membahasnya. Juga atas persetujuan Taufiq Kiemas sendiri, tokoh PDIP ikut membahas rencana pemerintahan tiga partai itu, sekitar dua tahun lalu.

Model Barisan Nasional dapat diterapkan juga di Indonesia. Namun, segmentasi politik kita tidak terdiri atas Melayu, China dan India. Sekitar 85 persen penduduk Indonesia adalah muslim.

Segmentasi politik terbesar justru berada dalam segmen politik muslim itu sendiri. Sebagian muslim Indonesia adalah abangan. Mereka menjadi pasar yang potensial politik nasionalis. Sebagian muslim lainnya adalah Islam mainstream dari basis NU atau Muhammadiyah. Hanya sebagian kecil dari komunitas muslim itu yang punya aspirasi politik Islam model Piagam Jakarta.

Agar terjadi aliansi partai politik jangka panjang, harus dikembangkan dulu platform partai yang dihayati bersama. Setidaknya ada dua visi yang dapat dijadikan pegangan bersama. Pertama, partai yang beraliansi menjadikan Pancasila sebagai ideologi bersama. Kedua, partai yang beraliansi pro kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Partai yang beraliansi, selain harus menghayati dua visi bersama itu mewakili segmen politik mayoritas yaitu Islam abangan dan Islam mainstream. Karena itu, Barisan Nasional ala Indonesia potensial melibatkan aliansi jangka panjang antara PDIP, Golkar, dan PKB; atau PDIP, Golkar dan PAN; atau Golkar, PKB dan PAN. Tiga kemungkinan aliansi ini, PDIP-Golkar-PKB, atau PDIP-Golkar-PAN, atau Golkar-PKB dan PAN, sama baiknya dan sama-sama berpotensi mendominasi politik Indonesia untuk setidaknya 15 -25 tahun.

Semoga pernyataan Kiemas tidak berujung pada aliansi partai politik jangka pendek yang mudah pecah. Stabilitas politik Indonesia yang sangat terfragmentasi sangat bergantung pada stabilitas aliansi partai politik. Persoalan yang tersisa memang, seandainya koalisi tiga kaki itu diterima, siapa yang harus memimpin dan menjadi presidennya. Dari sinilah percekocan sangat mungkin terjadi. **

Ke Mana Permainan Golkar Pasca konvensi?

SEJAK lama Akbar Tandjung dikenal sebagai the man .for all season, Soeharto boleh tumbang. Habibie boleh turun. Gus Dur boleh dijatuhkan. Namun, Akbar tetap menjadi orang penting pada era Soeharto, Habibie, Gus Dur, bahkan era pasca-Gus Dur.

Di luar dugaan banyak pihak, Akbar, sang politisi kawakan itu dikalahkan di kandangnya sendiri dalam konvensi Partai Golkar. Wiranto mendapatkan panggung baru yang begitu besar, nominasi presiden dari Partai Golkar. Pro-kontra segera terjadi.

Pihak yang pro menganggap bahwa Wiranto adalah pilihan calon presiden yang tepat. Akbar memang berjasa kepada partai. Namun dia dianggap belum sembuh benar dari hujatan publik. Sedangkan Partai Golkar harus berhadapan dengan capres lain yang kelas berat seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati.

Publik juga sedang membutuhkan tokoh dengan kesan kepemimpinan yang kuat. Figur militer sedang naik daun. Wiranto dianggap sebagai pilihan yang lebih tepat. Golkar sudah menang

dalam pemilu parlemen. Golkar juga harus menang dalam pemilu presiden. Wiranto dianggap mampu membawa probabilitas kemenangan Partai Golkar menjadi lebih besar.

Bagaimana dengan hujatan atas Wiranto untuk kasus hak asasi manusia? Hujatan negara luar seperti Amerika Serikat, menurut yang pro, dianggap saja sebagai angin lalu. Amerika Serikat melakukan hal yang jauh lebih buruk. Indonesia melalui Wiranto mencoba mempertahankan Timor-Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat menyerang Irak dan menangkap presidennya yang sah. Tidak perlu gusar atas gugatan Amerika Serikat yang menggunakan standar ganda.

Bagaimana jika yang menggugat adalah komunitas HAM domestik? Mereka menuntut klarifikasi kasus Mei 1998, Tragedi Trisakti, dan Tragedi Semanggi. Bagi yang pro, isu tersebut dianggap permainan politik kalangan elite belaka. Rakyat banyak tidak akan terganggu isu itu. Yang penting, Wiranto harus memberikan kesan kepada rakyat banyak soal KTA (kenyang, tentram dan aman). Habis perkara. Tidak perlu gusar dengan para pendekar hak asasi di Indonesia yang segelintir.

Sementara itu, pihak yang kontra melihat terpilihnya Wiranto sebagai ironi. Golkar adalah mesin politik yang paling efisien. Mesin tersebut sudah lama mengakar dan mempunyai jaringan sampai ke tingkat grass root. Golkar kini juga mendominasi parlemen era baru, 2004- 2009.

Mereka yang kontra menyayangkan, bagaimana mungkin partai sebesar Golkar akhirnya harus jatuh kepada politisi kontroversial seperti Wiranto. Bagi yang kontra, jika Wiranto terpilih, begitu banyak kasus yang akan diangkat kembali oleh para penentanginya. Sebagai presiden, dia akan terus terganggu oleh klaim aktivis sebagai dosa masa lalu.

Bahkan, mereka mengkhawatirkan juga nasib Indonesia kelak di dunia internasional. Bagi yang kontra, apa jadinya Indonesia jika

presidennya dicap sebagai penjahat terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)? Apakah justru tidak merepotkan Indonesia jika presiden kita nanti terasing dari pergaulan internasional? Bukankah nanti krisis Indonesia semakin sulit diatasi?

Partai Golkar memang harus banyak mengelaborasi kemungkinan tersebut. Tetapi elaborasi yang paling penting justru bukan ketika Wiranto menjadi presiden. Yang harus lebih dikaji justru situasi jika presiden dari Partai Golkar, Wiranto, tidak terpilih. Apa yang harus dilakukan Golkar? Akankah Golkar mempersiapkan diri menjadi partai oposisi? Sangat ironis pula jika partai terbesar dan pemenang pemilu berakhir menjadi oposisi.

Elaborasi hal itu menjadi penting jika kita melihat data LSI mengenai popularitas calon presiden. Walau kontroversial, Akbar lebih populer di mata pemilih daripada Wiranto. Jika Akbar saja sulit mengalahkan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apalagi Wiranto.

Menurut data LSI Maret 2004, keunggulan SBY atas Megawati dan tokoh lainnya belum tinggi. Untuk pertanyaan dengan format sekitar 12 capres, SBY mendapatkan dukungan sekitar 21 persen pemilih. Sedangkan Megawati berada di posisi ke dua dengan dukungan sekitar 17 persen. Amien Rais dan Akbar Tandjung berada di tempat ketiga dan keempat dengan angka 7 – 8 persen. Wiranto berada di posisi kelima dengan angka sekitar 5 persen.

Namun, sebulan kemudian, April 2004 data tersebut berubah drastis, SBY melejit cepat sekali. Dengan format pertanyaan yang sama, kini 40 persen pemilih akan memilih SBY. Sedangkan pemilih Megawati merosot menjadi sekitar 15 persen. Jauh di bawah, Akbar dan Amien di tempat ketiga serta keempat dengan angka 6- 8 persen. Sekali lagi, Wiranto berada di posisi kelima dengan angka sekitar 5 persen.

Suara pendukung SBY lebih dari 2 dua kali lipat pendukung Megawati. Suara pendukung SBY juga lima sampai tujuh kali lipat Amien dan Akbar. Dibandingkan Wiranto, suara SBY hampir delapan kali lipatnya. Dalam posisi seperti itu, bagaimana Wiranto bisa mengalahkan SBY?

Pemilu 2004 mungkin berakhir dengan situasi politik yang agak runyam. SBY sebagai calon presiden tidak hanya populer, tetapi sudah masuk dalam klasifikasi sangat, sangat dan sangat populer. Tetapi, dia berasal dari partai yang kecil saja. Partai Demokrat mempunyai kekuatan suara di parlemen sekitar 7 persen. Bagaimana mungkin politik bisa stabil jika parlemen kemudian mengambil peran oposisi mengganggu presiden?

Justru di situlah letak penting peran Partai Golkar. Selaku partai pemenang pemilu, Golkar harus mengambil inisiatif. Selaku partai terbesar, Golkar harus mengambil tanggung jawab mendesain kerja sama kepartaian pasca Pemilu 2004. Untuk kepentingan itu, Golkar tidak boleh maju hanya dengan satu skenario. Jika Golkar all-out dengan skenario capres Wiranto saja, dengan pertarungan to be or not to be, semua akan rugi.

Jika Wiranto menang memang tidak akan ada masalah. Golkar akan mengontrol politik presiden sekaligus parlemen. Tetapi, bagaimana jika Wiranto kalah? Bukankah berdasarkan data LSI, figur lebih menentukan daripada mesin politik? Jauh lebih baik jika Golkar juga menyepakati skenario sekoci.

Saat ini, yang paling mungkin terpilih sebagai presiden adalah duet SBY dan Jusuf Kalla. Duet SBY – Jusuf Kalla harus pula dianggap sebagai bagian dari strategi Golkar. Pasca konvensi, Golkar sebaiknya memang harus memainkan strategi dua kaki tersebut. * *

Memperebutkan Nahdlatul Ulama

HALAQOH Nasional alim ulama NU di Surabaya meriah bukan hanya disebabkan banyak ulama yang hadir. Bobot politik pertemuan itu menjadi sangat tinggi karena hadirnya tiga calon presiden terkuat saat ini. Tidak hanya Megawati yang hadir dalam kapasitasnya sebagai presiden Republik Indonesia dan capres pada pemilu berikutnya. Namun hadir pula dua jenderal yang kini semakin menarik perhatian publik, Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

NU kini ibarat gadis manis yang sedang disunting para jejak. Setiap jejak mendekati sang gadis dengan berbagai pendekatan dan tawaran “mas kawin”. Megawati dan Wiranto sejak lama dikabarkan ingin memininang Hasyim Muzadi, ketua Umum PBNU, sebagai pasangan Wapres. Jauh lebih afdol jika pinangan tersebut juga disepakati PKB serta Gus Dur.

Namun, SBY sudah mempunyai calon wakil presiden. Tidak kalah jurus, SBY menganjurkan sebaiknya NU bermain saja dalam tataran

high politics. Dalam posisi itu, NU tidak terlalu terjebak pada politik praktis, namun tetap menentukan. SBY juga berjanji akan melibatkan tokoh NU yang kapabel dalam pemerintahannya kelak – jika dirinya terpilih menjadi presiden.

Seperti biasa, NU yang dilamar masih bingung. Restu dari Gus Dur belum tentu akan diberikan. Sangat mungkin suara NU pecah kepada banyak tokoh.

Jauh lebih baik jika NU berpikir lebih dalam mengenai pembangunan bangsa. Indonesia yang kuat tidak hanya membutuhkan partai politik dan pemerintahan yang kuat. Indonesia yang kuat juga membutuhkan civil society serta ormas yang independen dan mengakar. Tidak ada civil society yang kuat jika ia terserap ke dalam kekuasaan. Sekali ia terserap ke dalam pemerintahan, civil society itu akan kehilangan perannya sebagai penjaga moral masyarakat serta pengontrol pemerintahan.

Jika ketua PBNU menjadi wakil presiden, apa yang bisa dilakukan NU untuk mengontrol pemerintahan? Akan timbul rasa sungkan bagi NU untuk memberikan peringatan karena ketua umumnya sendiri menjadi pemerintah. Saat oposisi di parlemen tidak bekerja civil society juga terkooptasi kepada kekuasaan. Ini bukan gejala yang sehat bagi demokrasi.

Masa depan NU akan menjadi sangat politis. Gus Dur pernah menjadi ketua umum PBNU, lalu menjadi presiden. Kini, Hasyim Muzadi menjadi ketua umum PBNU, lalu – misalnya – menjadi wakil presiden. NU akan menjadi kuda troya. Akan timbul preseden di kalangan kiai dan politisi bahwa menjadi ketua umum PBNU merupakan cara dan kendaraan untuk menjadi pemimpin pemerintahan.

Akibatnya, para kiai atau pemimpin yang bertarung untuk menjadi ketua umum PBNU di kemudian hari belum tentu murni

ingin mengembangkan NU. Bisa jadi NU hanya akan dijadikan sebagai tapakan antara karir menjadi presiden dan wakil presiden. Pertumbuhan sebuah ormas sebesar NU sebagai civil society yang berjarak dengan pemerintahan menjadi terganggu.

Para pemimpin NU sebenarnya sudah membuat pembagian kerja yang baik. NU diutamakan mengurus kemajuan umat. Jika ada ulama yang ingin berpolitik, sudah ada PKB. Walau NU dan PKB tidak identik, sudah dipahami bahwa PKB adalah kendaraan politik yang sah bagi warga NU. Pembagian kerja itulah yang seharusnya dilembagakan. NU sejak awal harus menolak semua pinangan politik dan mengembalikan persoalan politik tersebut kepada PKB saja.

Hal lain yang kurang disadari elite politik, NU sebagai organisasi pun belum tentu mampu mempengaruhi pilihan anggotanya. Para kiai atau pengurus NU boleh memberikan instruksi apa saja. Bahkan, Gus Dur boleh pula kampanye secara intensif agar warga NU memilih partai atau tokoh tertentu. Namun, dalam pemilu, warga NU adalah individu yang bebas. Di TPS, tidak ada yang bisa mengontrol mereka.

Itulah yang terjadi dalam Pemilu 2004. Akurasi data LSI sudah teruji dalam Pemilu parlemen 2004. Berdasarkan data LSI yang sama, 35 persen pemilih merasa sebagai keluarga besar NU. Mereka menghayati dan mengidentifikasi diri dengan NU. Tetapi seberapa banyak di antara mereka yang memilih PKB? Berdasarkan data KPU, sekitar 11 sampai 13 persen memilih PKB. Berarti, mayoritas NU tidak memilih PKB, apapun yang dikampanyekan para kiai di PKB.

Berdasarkan data LSI pula, April 2004, warga NU sudah mempunyai pilihan calon presidennya sendiri. Gus Dur kini bukan lagi capres yang paling populer di kalangan NU. Warga NU yang memilih Gus Dur sebagai pilpres hanya 13 persen. Warga NU yang memilih Hasyim Muzadi jauh lebih sedikit.

Saat ini, kesalahan fatal kalangan elite adalah tidak memahami hal yang mengatur perilaku pemilih. Diasumsikan saja seolah jika ia berhasil merekrut pemimpin sebuah organisasi dan organisasi itu secara formal sudah memberikan dukungan atau bahkan fatwa, keseluruhan warga organisasi tersebut akan ikut. Asumsi ini dapat menjerumuskan elite dalam memahami pemilu. Individu pemilih, baik warga NU maupun bukan jauh lebih merdeka dan bebas dibandingkan yang dibayangkan para elite.

Para pemilih memiliki hitung-hitung sendiri. Misalnya Wiranto sudah memenangkan konvensi Partai Golkar. Namun, sangat mungkin pemilih Partai Golkar justru lebih banyak memilih capres dari partai lain. Hal yang sama terjadi pada NU. Boleh saja Hasyim Muzadi berkampanye untuk Wiranto atau Megawati serta siapa saja. Namun warga NU justru bisa lari ke tokoh yang lain lagi. Karena itu, dalam pemilu presiden langsung, tokoh dari partai kecil sangat mungkin mengalahkan tokoh dari partai besar.

Daripada NU sebagai organisasi kembali “cawe-cawe” dalam politik praktis dan kalah pula, lebih baik sejak awal NU menjaga netralitasnya. Bangsa ini tidak hanya memerlukan partai politik yang kuat. Bangsa ini juga tidak hanya membutuhkan presiden yang kuat. Bangsa ini juga memerlukan ormas yang kuat seperti NU, namun menjaga jarak dengan pemerintahan. **

Duet Megawati-Hasyim Muzadi

DALAM rencana, hari ini Megawati Soekarnoputri akan membuat deklarasi penting. Ia secara definitif akan mengumumkan bahwa Hasyim Muzadi adalah calon wakil presidennya. Setelah sekian lama terombang-ambing memilih Hasyim atau Hamzah Haz, Megawati akhirnya memilih Hasyim. Hal yang sama terjadi dengan Hasyim. Setelah sekian lama ia menimbang nimbang Megawati atau Wiranto, akhirnya ia memilih Megawati Soekamoputri.

Deklarasi duet ini jauh lebih seru seandainya saja Gus Dur jadi bertemu Megawati di Jogjakarta. Hamengkubuwono X sudah mempersiapkan diri menjadi mediator dan tuan rumah. Jika pertemuan itu terlaksana, seolah terjadi reuni "kelompok Ciganjur." Sebelum reformasi, tiga tokoh itu bersama Amien Rais menjadi empat punakawan yang memimpin reformasi.

Bagaimana kah kans pasangan Megawati-Hasyim Muzadi? Mampukah Muzadi membawa serta gerbong NU yang sangat banyak itu? Akankah NU terpecah jika Gus Dur memberi respon yang keras sekali kepada pasangan ini?

Hasyim Muzadi memberikan efek positif sekaligus negatif kepada Megawati. Pemilu presiden 2004 akan menentukan, apakah efek positif yang dibawa Hasyim jauh lebih besar ketimbang efek negatifnya.

Sisi positif Hasyim, ia menyegarkan paket Megawati. Jika Megawati memilih Hamzah Haz sebagai pasangan, mudah sekali paket itu dikenakan label status quo. Padahal sentimen publik saat ini sangat ingin .perubahan politik.

Tidak bisa lagi dibantah sebuah fakta bahwa publik kecewa dengan lima tahun reformasi. Memang kebebasan politik yang dibawa reformasi luar biasa. Pers sangat bebas bahkan untuk menginvestigasi kehidupan pribadi presiden. Publik sangat bebas mendirikan organisasi dan mengontrol pemerintahan. Politisi juga berkesempatan mendirikan partai dan berkompetisi melalui pemilu.

Namun kebebasan saja tidak cukup. Publik sangat ingin demokrasi dan reformasi juga membawa kemajuan ekonomi yang berarti. Para ahli ekonomi memang dapat menunjukkan dengan data statistik betapa perekonomian sudah bergerak. Namun dalam persepsi rakyat banyak, mereka masih susah secara ekonomi. Pengangguran berjumlah 40 juta. Harga bahan kebutuhan pokok semakin mahal.

Sentimen yang negatif itu memang tidak menguntungkan bagi pihak yang berkuasa. Publik sudah menghukum PDIP. Dalam pemilu 2004, PDIP merosot luar biasa. Di tahun 1999, PDIP memperoleh suara sekitar 34%. Namun kini hampir separuhnya saja yang berhasil diraih, sekitar 18%. Walau kabinet pelangi, publik mengasosiasikan pemerintah sekarang dengan PDIP sebagai partainya presiden, yang harus bertanggung jawab dengan macetnya reformasi.

Megawati sebagai presiden juga dapat terkena hukuman publik yang sama jika ia tetap mencitrakan diri sebagai status quo. Kontribusi terpenting dari wakil presiden yang baru, siapapun dia,

menghindarkan Megawati dari labelisasi itu. Apalagi Hasyim Muzadi bukan tokoh biasa. Ia adalah ketua umum dari organisasi dengan anggota paling banyak di Indonesia.

Namun di sisi lain, Hasyim Muzadi dapat juga menyumbangkan sisi negatif. Hasyim memang tokoh utama dalam organisasi sebesar NU . Namun NU adalah organisasi keagamaan. Sementara pemerintahan adalah dunia birokrasi, politik dan organ kebijakan yang berbeda. Kompetensi Hasyim dalam mengelola pemerintahan sangat diragukan. Dibandingkan dengan Hamzah Haz, jelas Hasyim justru membuat paket Megawati semakin tidak tampak sebagai pasangan yang memiliki kompetensi teknis dalam pemerintahan.

Padahal publik luas punya harapan tertentu terhadap pemerintahan baru. Berdasarkan survei LSI sejak Agustus 2003 sampai April 2004, mereka memilih pasangan karena persepsi kompetensi pasangan itu untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keamanan. Jika paket Megawati – Hamzah Haz diragukan kompetensinya apalagi Megawati-Hasyim Muzadi. Paket ini akan terasa sangat inferior dalam kriteria kompetensi teknis dibandingkan paket Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla.

Sisi negatif lain yang dibawa Hasyim adalah keterlibatan NU dalam politik praktis. Hasyim menjadi mahal harganya bukan karena dirinya sendiri tetapi karena ia adalah ketua umum NU. Dengan sendirinya walau menjadi calon wakil presiden, Hasyim diharapkan masih menyanggah label ketua umum NU. Seandainya Hasyim Muzadi mundur dari ketua umum NU, harga politiknya menjadi turun.

Tetapi justru di situ lah letak komplikasinya. NU adalah organisasi keagamaan yang dihormati dan mengakar. Sejak lama NU sudah mendeklarasikan diri ingin kembali ke "Khitah." Sebagai civil society, harga NU justru karena ia berjarak dengan pemerintahan. Dukungan atau kontrol NU kepada pemerintahan berdasarkan kepada prinsip

dan nilai. NU tidak mendukung figur dan akan merendahkan dirinya sendiri jika ikut pula berkampanye.

Namun harga politik Hasyim justru tinggi jika NU ikut berkampanye dan menginstruksikan semua warganya mendukung Megawati-Hasyim Muzadi. Justru bobot politik Hasyim menjadi tinggi jika NU menjadi partisan. Dengan kata lain, Muzadi akan lebih memberikan keuntungan kepada Megawati jika NU meninggalkan khitahnya, dan bergerak sebagaimana layaknya organisasi politik.

Jika ini terjadi, dalam jangka panjang, NU justru akan menjadi korban. Pada gilirannya, Indonesia juga menjadi korban. Demi NU, seharusnya organisasi ini tidak ikut berkampanye. Tokohnya boleh bertarung dalam pemilu presiden. Tetapi NU sebagai organisasi tidak terlibat dalam dukung mendukung. Jika jalan ini yang akhirnya dipilih NU, Hasyim tidak terlalu menambah banyak pendukung bagi Megawati Soekarnoputri.

Sisi negatif lain yang dibawa oleh Hasyim justru larinya komunitas NU yang pro-Gus Dur. Dibandingkan Gus Dur, Hasyim belum terlalu "sakti" untuk menjadi "jimat" dan ikon lembaga. Gus Dur jelas lebih berpengaruh.

Persoalannya, Gus Dur masih menyimpan amarah kepada Megawati. Sangat jelas juga Gus Dur masih jengkel kepada Hasyim. Kini dua tokoh itu bergabung. Bukankah Gus Dur akan semakin marah dan meminta pengikutnya di NU untuk tidak memilih mereka?

Namun sekali lagi, hitung-hitungan sisi positif dan negatif Hasyim Muzadi dalam melihat pengaruhnya kepada Megawati masih bersifat spekulatif dan antisipatif. Dalam kenyataannya nanti, segala hal dapat terjadi. **

Retaknya Gerbong NU

SIAPA yang menang dalam merebut dukungan warga NU? Apakah Hasyim Muzadi lebih mampu membawa gerbong NU untuk berdiri di belakang Megawati Soekarnoputri? Ataupun Gus Sholah yang lebih diterima untuk merapatkan gerbong NU ke arah Wiranto? Sementara kita belum mengetahui siapa yang menang, yang kalah adalah NU sebagai lembaga. Setelah pemilu presiden, wibawa NU merosot akibat akrobat para kiai dan politisinya.

Demikianlah kesan umum yang sekarang tercetak dalam memori publik luas. Sebelum pemilu presiden, wibawa NU begitu tinggi di dalam dan di luar negeri. NU menjadi model ormas atau civil society yang sangat berhasil mengawal perjalanan kritis sebuah bangsa. Karena pemihakan NU pada Pancasila, persoalan negara Islam atau Piagam Jakarta tidak lagi menjadi isu yang penting dan membelah. NU sudah pula kembali ke khitah, menjaga jarak dari politik praktis.

Namun, pemilu presiden dan pesona kekuasaan rupanya membuat gerbong NU sedikit oleng. NU sebagai lembaga masih

bisa kuat untuk netral. Namun, karena banyak kiai penting yang ingin berakrobat, sedikit banyak, NU sebagai lembaga ikut pula terpengaruh.

Goncangan dimulai ketika Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi ternyata tertarik menjadi calon wakil presiden. Lebih dari itu, Hasyim dan ulama yang sepaham dengannya juga berupaya mengeluarkan imbauan kepada semua warga NU agar mendukung dirinya sebagai cawapres.

Gus Dur yang tidak sepaham dengan Hasyim membuat manuver yang tidak kalah cemerlang. Sebagian ulama ikut bergabung dalam kelompok Gus Dur, termasuk sejumlah Kiai Khos. Puncak dari persetujuan itu adalah munculnya kembali wacana fatwa haram bagi capres wanita.

Publik di luar NU sungguh tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ketua Umum NU baru saja nonaktif untuk menjadi cawapres dari capres wanita. Namun kemudian, kiai yang dihormati di NU justru menguatkan fatwa bahwa haram mendukung capres wanita. Apa yang terjadi? Ulama lain dan tokoh NU segera mengambil posisi yang berbeda. NU sebagai lembaga akhirnya menjadi korban dari pertarungan kekuasaan.

Negara demokrasi yang kuat dan sehat tidak hanya membutuhkan dunia politik (political society) yang kuat. Tentu saja, penting memiliki partai yang kuat, pemimpin yang kuat, dan pemerintahan yang kuat. Namun, demokrasi juga membutuhkan dunia masyarakat (civil society) yang juga sehat dan kuat.

Dalam literatur ilmu politik, dunia politik dan dunia masyarakat dibedakan oleh posisi politik. Dunia politik adalah wilayah berpolitik warga negara yang memang dipersiapkan untuk bertarung merebutkan posisi pemerintahan. Kendaraan utamanya adalah partai politik.

Sementara itu, dunia masyarakat adalah wilayah aktivitas warga, wilayah-wilayah aktivitas warga negara di luar pemerintahan. Kendaraan utamanya adalah ormas atau civil society. Secara sengaja, dunia civil society itu memang tidak ingin ikut dalam pertarungan kekuasaan memperebutkan posisi pemerintahan. Mereka sengaja memilih posisi di luar pemerintahan. Mereka sengaja memilih posisi di luar pemerintahan untuk mengontrol pemerintahan.

NU pernah berada dalam dunia politik, terutama pada 1955. Namun sejak kembali ke khitah, NU kembali ke dunia masyarakat. Itu reposisi yang sangat bijak dan strategis untuk pemberdayaan masyarakat ke depan.

Sumbangan terbesar NU selama ini adalah menumbuhkan kultur politik yang moderat di kalangan mayoritas muslim. Pada tahun 1955, Indonesia terbelah dalam pertarungan yang sangat ideologis antara negara Pancasila dan negara Islam. Namun, 50 tahun kemudian, wacana negara Islam dan Pancasila jauh melemah.

PBB sebagai partai yang masih menjual isu syariat Islam ditolak publik Islam sendiri dan perolehannya tidak melampaui threshold 3%. Muslim di Indonesia sudah sedemikian berubah. Tanpa dipaksa, mayoritas muslim sudah menerima Pancasila sebagai kultur politik Indonesia.

Perubahan kultur politik itu sebagian karena jasa NU sebagai ormas Islam terbesar. NU secara sadar menerima Pancasila sebagai bentuk final negara Indonesia. Ketika tokoh NU melahirkan PKB, asas yang dipilih juga asas Pancasila, sebagai partai terbuka. Itu revolusi fundamental pertama di kalangan NU dalam membangun Indonesia baru.

Kini, NU membutuhkan revolusi kedua di kalangan kiyainya. Tidak cukup bagi kiai NU hanya menerima Pancasila. Mereka juga harus membangun persepsi baru bahwa memimpin NU sama pentingnya

dan sama berharganya dengan memimpin negara Indonesia. Menjadi memimpin NU tidak kalah prestisius bila dibandingkan dengan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

Dengan semangat baru itu, pemimpin NU di masa yang akan datang tidak akan mudah digoda untuk meninggalkan NU dalam rangka bertarung dalam perebutan kekuasaan. Akan bahaya bagi NU jika terbentuk citra bahwa menjadi Ketua Umum NU adalah batu loncatan saja dalam rangka menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

Kongres NU di kemudian hari akan diramaikan bukan saja oleh para kiai yang ingin membangun NU. Para politisi dan investor akan ramai-ramai berlomba menjadi ketua umum NU. Penyebabnya, mereka tahu bahwa menjadi ketua umum NU adalah langkah paling pasti untuk dipinang menjadi calon wakil presiden atau menjadi presiden itu sendiri. Jika kultur tersebut yang terbentuk, NU tidak akan pernah kuat sebagai Ormas.

Revolusi kedua dibutuhkan untuk membangun kebanggaan memimpin NU, bahkan jika bisa, melampaui kebanggaan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Bahkan jika perlu dibuat aturan main. Mereka yang berminat menjadi ketua umum atau pengurus NU harus berkomitmen sejak awal untuk tidak ingin menjadi capres atau cawapres. Perlu ada kontrak tertulis, sehingga itu menjadi tradisi baru di NU .

Bagi Indonesia, NU terlalu penting. Sangat sayang jika gerbong NU kini oleng, karena manuver dan akrobat para kiyainya. Sangat sayang pula jika kini terjadi perang ayat di antara kiai yang berpengaruh hanya karena beda calon presiden yang didukung.

Lapisan kiai muda yang idealis sudah saatnya mengambil kepemimpinan NU. Tugas utama mereka adalah menanamkan spirit baru bahwa memimpin NU lebih prestisius ketimbang menjadi calon presiden, apalagi hanya menjadi calon wakil presiden. **

Mengapa Amien Rais Kalah?

MENGAPA Amien Rais Kalah? Ini menjadi pertanyaan, bukan hanya bagi pendukung Amien, tapi juga bagi pengamat dan akademisi. Memang, hasil resmi perhitungan suara KPU belum diumumkan. Namun, suara yang masuk sudah di atas 100 juta dan di atas 80 persen. Posisi Amien tidak diperingkat ketiga, tetapi keempat. Untuk lolos dua besar, dia harus melompati Wiranto dan Megawati sekaligus. Dengan posisi perolehan suara sementara seperti itu, dapat dikatakan secara meyakinkan bahwa Amien akan tersisih di putaran pertama.

Padahal, dilihat dari track record-nya, Amien adalah tokoh yang mungkin paling berjasa kepada reformasi. Ketika banyak tokoh lain tiarap, Amien dengan lantang meminta Soeharto mundur. Bahkan, ketika banyak tokoh reformasi bersedia berkompromi dengan Soeharto untuk "khusnul khatimah", agar Soeharto sendiri yang memimpin transisi, lalu tidak lagi ikut pemilu berikutnya, Amien menolak keras.

Dilihat dari karirnya, Amien juga mungkin capres yang paling kurang bermasalah. Di era Orde Baru, dia memang tidak masuk dalam jajaran pemerintahan. Kemungkinannya selaku bawahan untuk taat dan patuh kepada kebijakan Soeharto memang tidak ada. Namun, ketika lima tahun dalam pemerintahan, Amien juga dikenal bersih. Dia tidak terkena rumor menangani KKN .

Dilihat dari kelincahan berpolitik, Amien juga termasuk yang paling kreatif. Walau hanya didukung PAN, partai kecil, dia dapat bergerak lincah mendapatkan dukungan partai lain paling banyak. Bahkan, banyak tokoh yang terjaga kehormatan dan kevoalannya, bersedia berada di belakang Amien. Mereka antara lain, Goenawan Mohammad, Munir, bahkan Teten Masduki.

Aneka jenis kampanye dia lakukan. Misalnya naik kereta bersama rakyat menuju UI. Atau dia bermain musik bersama The Slank. Walau tidak merdu dia juga merekam suaranya dalam Campur Sari Reformasi. Cukup menyentuh hati, dia datangi seorang gadis cilik pengagumnya, bercakap, melihat koleksi sang anak itu.

Banyak tafsir politik dapat diberikan untuk menjelaskan fenomena tersingkimya Amien. Yang paling sederhana mungkin ini hanya persoalan positioning dalam spektrum politik. Amien terkesan ragu-ragu menempatkan diri dalam variasi segmen pemilih.

Jika saja pemilu langsung sudah ada sejak 1999, mungkin Amien akan menang. Saat itu dia sudah berada dalam posisi yang sangat pas, selaku bapak bangsa dan bapak reformasi. Yang bersedia berada di belakang Amien adalah tokoh dengan latar belakang yang beragam: Tionghoa, Katolik, Protestan, Jurnalis, pejuang HAM dan muslim.

Ketika ditawarkan menjadi ketua umum PPP atau PBB (reinkarnasi Masyumi) Amien sempat mengolok. "Baju" itu terlalu sempit buatnya. Pada 1999 Amien tampil sebagai tokoh nasional.

Namun terjadi kisruh politik yang kurang menguntungkan saat itu. Polarisasi terjadi antara kubu politik Habibie dan Megawati dalam percaturan menuju puncak kursi presiden. Memang ini menjadi pilihan politik Amien jika dia bermanuver dan membentuk Poros Tengah. Dalam poros tengah itu yang bergabung adalah partai dengan basis massa Islam. Yang dicalonkan sebagai presiden juga tokoh NU, Abdurrahman Wahid. Poros Tengah sukses mengantarkan Amien sebagai ketua MPR dan Gus Dur sebagai Presiden.

Namun posisi Amien dalam spektrum politik mengecil. Dia tidak lagi dianggap representasi paling utama dari segmen politik pluralis. Amien terlahir kembali sebagai tokoh Islam. Umat Islam yang sekuler dan kaum minoritas semakin menarik jarak dari Amien. Kepercayaan mereka kepada Amien selaku tokoh yang tidak ingin memainkan "Sentimen Islam dalam politik praktis" melemah.

Dua tahun kemudian, kecelakaan kedua terjadi. Gus Dur ternyata bukanlah presiden yang handal. Negara dibuatnya gonjang-ganjing hampir setiap minggu. Skandal Bulog melebar. Amien bersama tokoh lain, "terpaksa" bersikap. Gus Dur pun jatuh. Megawati naik. Itu semua hal yang lumrah.

Namun, kembali posisi politik Amien mengecil. Dia tidak lagi menjadi tokoh yang disayangi semua segmen Islam. Justru segmen Islam terbesar, dari kalangan NU, mengambil jarak dengan Amien. Bahkan sebagian menganggap Amien berkhianat atas Gus Dur. Persaingan lama antara NU dan Muhammadiyah kembali muncul ke permukaan.

Kontroversi posisi politik Amien muncul kembali pada 2004. Saat itu perolehan PAN tidak sebesar yang diharapkan. Bahkan dilihat dari dukungan suara, PAN di bawah dua partai baru, PKS dan Partai Demokrat. Amien bangkit kembali menggunakan bendera Muhammadiyah untuk maju sebagai presiden. Dia melihat peluang dukungan akan membesar.

Tetapi, sangat mungkin justru posisi politik Amien mengecil. Segmen di luar Muhammadiyah semakin ragu-ragu mendukung Amien. Sementara di kalangan Muhammadiyah sendiri, dukungan itu tidak penuh. Dalam exit poll yang dilaksanakan LP3ES, warga Muhammadiyah yang mendukung Amien kurang dari 60%. Melalui waktu akhirnya posisi politik Amien terus mengecil dari bapak bangsa di era reformasi menjadi tokoh Muhammadiyah saja.

Menyadari posisinya, langkah Amien sudah benar dalam mencari wakil presiden. Dia ingin mendulang suara dari segmen pemilih yang lain, Islam Nasionalis. Tokoh yang pas adalah Susilo Bambang Yudhoyono, wakil dari purnawirawan. Hampir saja gayung dari Amien disambut. Jika saja Partai Demokrat tidak lolos threshold, mungkin Amien yang sekarang ini menjadi pemenang pemilu presiden putaran pertama. Tentu dengan syarat, wapresnya SBY.

Karena SBY menolak, Siswono Yudo Husodo menjadi pilihan berikutnya. Gerbong kalangan nasionalis yang dibawa Siswono, Erris Djarot, Sophan Sophian dan Sukmawati ternyata kalah pamor. Di kalangan nasionalis lainnya, sudah ada figur yang lebih besar, yaitu Megawati sendiri, SBY, dan Wiranto. Kesulitan positioning dalam spektrum politik ini secara signifikan menyumbang kepada kegagalan Amien dalam pemilu presiden.

Lalu dari sini, kemana barisan pendukung Amien menuju? Diisukan sebagian dari mereka akan golput. Itu kesalahan persepsi jika menganggap dengan golput mereka tidak mau terlibat memenangkan salah satu capres. Golput mereka justru menguntungkan calon tertentu. Katakanlah jika mereka golput, yang mungkin terpilih adalah A. Namun jika mereka tidak golput yang akan terpilih adalah B. Karena golput tetap saja tidak netral atas hasil pemilu, mengapa harus golput. **

Mengapa Wiranto Kalah?

APA yang membuat Wiranto Kalah? Ini pertanyaan yang paling sering diajukan tidak hanya oleh kalangan politisi, tetapi juga akademisi. Memang, hasil resmi KPU mengenai pemilu presiden tahap pertama belum diumumkan. Namun, dilihat dari pergerakan angka yang ada, ditambah pula dengan quick count, Wiranto agaknya tergeser.

Dilihat dari partai pendukungnya, jelas Golkar adalah partai terbesar dan pemenang Pemilu 2004. Partai ini paling modern dan terlembaga dibanding semua partai yang ada. Partai ini juga paling mengakar, dengan sumber daya manusia yang secara kolektif paling berkualitas.

Tidak tanggung-tanggung, PKB ikut pula mendukung Wiranto. Ditinjau dari dukungan suara pada pemilu parlemen, posisi PKB hanya kalah dari Golkar dan PDIP. PKB juga merupakan pintu masuk ke jaringan yang jauh lebih besar, Nahdlatul Ulama. Berdasarkan data survei, kurang lebih 35% dari total pemilih mengaku warga NU.

Tidak hanya PKB, Gus Sholah dan jaringan Kiai Langitan juga berada dalam kubu Wiranto. Gus Sholah bukan saja darah biru warga NU. Dia juga adik kandung Gus Dur, jimat PKB dan NU, yang secara terbuka mendukung pasangan ini. Gus Sholah juga dikenal sebagai tokoh “putih” yang dapat melengkapi kekurangan Wiranto atas isu HAM. Lantas apa yang membuat tokoh yang didukung mesin politik terbesar itu tersingkir?

Apa gunanya mesin raksasa jika ia lumpuh? Ibarat mobil, mesin politik Wiranto sebenarnya dapat berlari paling kencang dibanding mobil lain. Tetapi, itu hanya terjadi jika mobil berada di gigi empat. Dalam pemilu presiden kemarin, mobil Wiranto tampaknya hanya main di gigi dua. Akibatnya ia dibalap oleh mobil lain, yang larinya sebenarnya tidak sekencang mobil yang dikendarai Wiranto.

Ada beberapa penyebabnya. Pertama, sebagian elite lokal Golkar mungkin memang tidak berniat menghidupkan mesin partai di wilayah masing-masing. Sungguhpun ada mobilisasi secara resmi dari pusat untuk membantu capres Golkar, aturan formal itu tidak memotivasi mereka. Mungkin, kepentingan politik dan ekonomi elite lokal itu tidak terlayani.

Memang pada pemilu parlemen, mesin politik Golkar bergerak secara penuh. Di tingkat provinsi sampai kabupaten dan ranting terendah di pedesaan, mesin Golkar terus hidup memobilisasi massa. Saat itu elite lokal memang menjadi caleg. Kepentingan elite lokal itu menjadi sumber energi hidupnya mesin politik di wilayah tersebut.

Namun, dalam pemilu presiden, apa kepentingan lokal itu? Dibutuhkan idealisme yang cukup tinggi untuk membuat mereka bersedia berkorban bagi partai, apalagi untuk capresnya. Menggerakkan mesin partai butuh dana cukup besar. Buat apa mereka mengeluarkan dana dari kocek sendiri, sementara yang akan menjadi presiden adalah orang lain? Seandainya dana disediakan

orang lain, belum tentu pula capres terpilih itu kelak menguntungkan karir politik elite lokal.

Kedua, elite lokal mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan capres dan cawapres yang dimajukan partai. Secara legal formal, tidak ada yang dapat membantah bahwa Wiranto adalah calon resmi partai. Namun, tidak semua sentimen lokal dapat tunduk kepada aturan formal. Jika secara psikologis elite lokal itu kecewa, mungkin dia tidak melawan keputusan pusat, tetapi dapat membuat dirinya pasif saja.

Konsep konvensi Partai Golkar mungkin tidak sepenuhnya berhasil. Orang di luar partai, yang belum pernah menjabat partai, dibolehkan ikut serta. Secara teoritis, pemenang konvensi partai Golkar mungkin saja tokoh yang dikenal sudah berjuang bagi jatuh bangunnya partai. Bahkan Ketua Umum Golkar, yang mereka kenal sudah pasang badan, dikalahkan di kandangnya sendiri.

Jika sentimen ini bermain, yang terjadi kemudian adalah pembangkangan diam-diam. Secara formal mereka terkesan mendukung langkah partai. Namun, di bawah permukaan, mereka mungkin pula bekerja untuk kekuatan capres lain. Muncul sinisme yang kemudian dapat melahirkan perlawanan internal. Mendukung capres pemenang konvensi bagi mereka justru akan membahayakan ketua umum mereka sendiri.

Ketiga, sangat mungkin pula penolakan di tingkat akar rumput lebih menentukan. Elite partai boleh berbicara apa saja, dan meminta apapun kepada pemilih dan konstituantnya di daerah. Namun, pemilih ini memiliki luka sosial tersendiri. Sebagian pemilih Golkar, misalnya, mempertanyakan Gus Sholah dari PKB. Bukankah Gus Dur, didukung PKB pada 2001, membubarkan Golkar? Mengapa harus mendukung Gus Sholah tokoh PKB?

Sementara bagi pemilih PKB, mereka berpikir mengapa pula harus mendukung capres Golkar? Walau sekarang berkoalisi, mereka masih ingat peristiwa 2001. Saat itu Golkar bersama partai lain

menjatuhkan Gus Dur. Elite mungkin mudah melupakan peristiwa itu. Namun massa dan pemilih akar rumput punya ingatan yang lebih panjang.

Apakah isu HAM juga mengganggu Wiranto? Isu ini sebetulnya tidak terlalu signifikan karena hanya menarik perhatian elite yang segelintir. Isu militerisme yang didengung-dengungkan juga bukan persoalan besar. Tidak banyak yang percaya ada tokoh yang ingin membalikkan demokrasi ke dalam sistem militeristik.

Namun hal lain yang juga perlu ditimbang sosialisasi figur Wiranto. Wiranto agak lambat disosialisasikan. Pemilih sudah terlebih dahulu dipenuhi oleh fantasi "figur SBY". Ibarat judul lagu "pindah ke lain hati". Dibutuhkan waktu yang cukup panjang bagi Wiranto mengambil segmen pemilih yang sudah terambil oleh SBY. Kebetulan dua tokoh ini merebut segmen yang hampir sama.

Namun, apapun hasilnya penampilan simpatik Wiranto selama kampanye, ketenangannya ketika dihujat, membuat Wiranto punya tempat yang khusus dan manis di hati sebagian besar pemilih. * *

Gerbong Golkar Melaju Kemana?

SUNGGUH ironis partai terbesar, partai pemenang pemilu parlemen 2004, Partai Golkar, kini duduk manis di “bangku penonton.” Pemilu presiden putaran kedua akan diikuti oleh dua pasangan capres, yang dua-duanya bukan calon Partai Golkar: SBY Versus Megawati. Sikap apa yang akan diambil Golkar? Akankah ia secara resmi dan kelembagaan mendukung SBY, membantu Mega atau netral?

September 2003, sekitar 10 bulan lalu, LSI sudah membuat prediksi. Menurut LSI, sesuai dengan data survey, akan terjadi pertarungan antara SBY versus Megawati dalam pemilu presiden dan Golkar sebagai King Maker. Prediksi LSI itu direkam dan dipublikasi oleh aneka media. Aneka pihak dapat mengeceknya. Prediksi itu dibuktikan kebenarannya sepuluh bulan kemudian. Kini sekali lagi LSI membuat survei di bulan Juli 2004, sekitar dua minggu setelah pemilu presiden putaran pertama.

Partai Golkar memang akan menjadi King Maker. Tetapi yang dimaksud Partai Golkar bukanlah elit yang kini sedang memimpin Golkar. Yang berpengaruh dalam pemilu presiden adalah massa pemilih Partai Golkar.

Jumlah elit Golkar yang kini mengendalikan Golkar dari pusat sampai daerah paling banyak 10.000 orang. Sementara jumlah pemilih Golkar sekitar 24% dikali 150 juta pemilih, atau sekitar 35 juta. Dalam pemilu, one man one vote. Suara satu pimpinan partai sama harganya dengan suara satu massa pemilihnya.

Pemilih saat ini sangat mandiri. Instruksi elit atas pemilih, baik elit partai, elit agama (kiai), ataupun elit pemerintahan (pejabat), tidak banyak pengaruhnya. Massa sudah kehilangan idola di tingkat elit. Di ruang bilik suara, massa pemilih itu akan sendirian mencoblos pilihannya secara rahasia, tidak ada yang tahu, terlepas apapun instruksi elitnya.

Dari survei LSI akhir bulan Juli 2004, kecenderungan pemilih Golkar sangat mencolok. Sekitar 86% menyalurkan dukungannya kepada SBY-Jusuf Kalla. Yang mendukung Megawati-Hasyim hanya sekitar 9%. Sisanya, sekitar 5% belum memutuskan. Dukungan ini memang dapat terus berubah. Namun penetrasi elit atas perilaku pemilih akar rumput semakin terbatas.

Mengapa pemilih Golkar lebih kepada SBY-Jusuf Kalla? Alasan pertama, pemilih Golkar dan pemilih PDIP sudah lama berada dalam situasi persaingan. Walau mereka berasal dari segmen yang kurang lebih sama, namun mereka tidak harmoni. Elit masing-masing partai mungkin dengan mudah dapat loncat sana dan loncat sini. Misalnya dari PDIP pindah ke Golkar, atau sebaliknya.

Namun massa pemilih di bawah dan di grass root lebih punya memori panjang. Mereka bersaing di pemilu 1999. Ketika PDIP mengalahkan Golkar di tahun 1999, goresan pemilih Golkar sudah dimulai. Konflik Buleleng di Bali sebelum dan menjelang pemilu 2004

semakin mempertegas pengkotakan itu. Apalagi saat itu terjadi saling sambut antar elit Golkar dan PDIP bahwa haram bagi mereka untuk saling mendukung.

Alasan kedua, di samping berkompetisi, massa pemilih Golkar dan PDIP juga masih diwarnai oleh permusuhan dua orde. Megawati dan PDIP bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dengan figur Soekarno dan bayangan Orde Lama. Sementara Golkar bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan dari figur Soeharto dan Orde Baru.

Jelas PDIP sudah berubah dan mereformasi diri. Jelas pula Golkar sudah berubah dan melepaskan diri dari bayangan Soeharto dan Orde Baru. Namun sentimen publik di akar rumput tidak bergerak selincah para elitnya. Permusuhan dua orde dan konflik dua figur politik besar itu masih meninggalkan bekas. Para elit boleh berbalik arah dari berkawan, bersaing, bermusuhan, lalu berkawan lagi. Tetapi massa di bawah punya emosi dan kemarahan yang lebih stabil.

Alasan ketiga, bagi pemilih Golkar, SBY dan Jusuf Kalla dianggap keluarga. Jusuf Kalla sendiri masih merupakan tokoh Golkar. Bahkan di Indonesia bagian timur, terutama di Sulawesi Selatan, Jusuf Kalla mungkin menjadi tokoh Golkar paling populer.

SBY sendiri juga masih dianggap berada dalam komunitas Golkar. Ia sendiri pernah dicalonkan untuk ikut konvensi Partai Golkar. Secara historis, SBY juga pernah di parlemen mewakili Fraksi ABRI. Hubungan Golkar dan ABRI saat itu sangat mulus. Tidak heran jika pemilih Golkar jauh lebih banyak yang berada di belakang SBY-Jusuf Kalla ketimbang Megawati-Hasyim Muzadi.

Politik massa dan pemilih adalah satu hal, sementara politik elit adalah hal lain. Selalu mungkin elit membawa gerbong Partai Golkar ke arah yang berbeda. Elit sangat mungkin memiliki pertimbangannya sendiri demi, misalnya, kepentingan partai jangka panjang.

Persoalannya, elit tidak seragam. Antara elit Golkar sendiri terlibat persaingan. Apalagi Munas Golkar, Desember 2004, hanya beberapa bulan saja setelah pemilu presiden. Elit yang salah langkah akan mudah sekali diterkam oleh elit lainnya. Pertarungan dukungan Golkar kepada capres sangat mungkin menjadi pemanasan pertarungan dalam Munas Golkar memperebutkan kursi ketua umum.

Untuk kepentingan Golkar, ada baiknya partai ini menetralkan diri saja dalam pemilu presiden tahap kedua. Sebagai partai, Golkar tidak bersikap. Namun elitnya dan pemilihnya dibebaskan untuk memilih capres sesuai dengan nurani. Siapapun yang menang, akan tetap membutuhkan Golkar dan elitnya.

Jika Golkar diarahkan mendukung salah satu capres, sangat mungkin terjadi pembangkangan terbuka. Apalagi jika yang didukung adalah capres yang tidak populer, dan bakal tidak terpilih pula. Sebagian elit memilih membangkang dengan perhitungan pada Munas Golkar bulan Desember 2004, mereka akan membuat manuver. Massa Golkar di akar rumput, sentimen publik, dan para menteri Golkar yang baru, akan bersatu dalam munas itu, melawan elit yang mengarahkan Golkar mendukung capres tertentu yang kalah.

Jika partai Golkar dibuat netral, tidak memihak capres manapun, elit Golkar sekarang ini justru jauh lebih nyaman. Siapapun yang menang, tidak akan mengganggu mereka, baik dalam power sharing di pemerintahan, ataupun munas Golkar kelak. * *

Dukungan Partai Buat Capres

PPP secara resmi mendukung Megawati untuk terpilih kembali sebagai presiden hasil pemilu 2004. Sementara partai lain yang capres dan cawapresnya kalah sedang mengambil anjang-ancang. Golkar masih menunggu. PKB juga wait and see. PAN dan PKS belum pula menentukan sikap.

Politik di parlemen sangat jelas sekali membutuhkan kerjasama antar partai. Pemilu parlemen April 2004 lalu tidak menghasilkan partai dominan. Partai terbesar bahkan meraih kursi kurang dari 25% saja. Dengan konstelasi seperti itu, kerjasama antar partai sangat penting bagi siapapun presiden terpilih nanti agar memperoleh dukungan mayoritas di parlemen.

Tetapi untuk kampanye, seberapa besar pengaruh dukungan partai? Dalam ilmu politik, sering dikatakan bahwa strategi memerintah adalah satu hal, sementara strategi kampanye adalah hal yang lain. Untuk efektif memerintah dan efektif berkampanye

kadang memerlukan strategi yang tidak hanya berbeda, tetapi bertolak belakang.

Kita teringat kisah Abu Nawas mencari kunci yang hilang. Suatu hari, di tempat yang terang, Abu Nawas terlihat mondar-mandir mencari sesuatu. Penduduk yang lewat di tempat itu segera bertanya. "Abu Nawas, apa gerangan yang engkau cari? Kau tampak sibuk dan prihatin."

Abu Nawas menjawab, "Aku mencari kunci kotak pusakaku yang hilang. Jika kunci tidak kutemukan, pusakaku itu tidak dapat kutemukan juga". Rekan Abu Nawas segera bertanya kembali. "Dimana engkau hilangkan kuncimu itu?" Ujar Abu Nawas, "kunci itu hilang di dalam rumah. Tapi aku mencarinya di sini, di luar rumah. Di dalam rumah gelap. Sementara di luar rumah, sangat terang benderang."

Kisah Abu Nawas ini mulanya ditujukan bagi pencerahan batin. Kebahagiaan spiritual itu ada di dalam diri, tidak dicari di luar diri. Tetapi kisah ini juga dapat dipahami secara lebih luas. Betapa solusi seringkali dicari di tempat yang salah. Kunci hilang di dalam rumah. Tetapi strategi untuk mencarinya justru dibuat di luar rumah.

Pemilu presiden yang dipilih secara langsung punya logika yang sama. Yang memilih dan berdaulat dalam pemilu itu adalah 150 juta pemilih yang tersebar di sekitar 60.000 desa dan kota. Persepsi dan perilaku mereka itu yang penting. Namun agak aneh jika para capres tidak mencoba merubah persepsi dan perilaku pemilih. Yang dilakukan justru sibuk bermanuver dengan politik elit partai yang sangat segelintir itu, yang tidak ada hubungannya dengan persepsi pemilih.

Pernyataan ini jangan salah dipahami sebagai ungkapan anti-partai. Partai jelas sangat penting. Tetapi letak kepentingannya adalah ketika sampai pada tahap memerintah, bukan ketika tahap

kampanye. Strategi menghadapi era memerintah, berbeda dengan strategi ketika era kampanye.

Dukungan PPP atas Megawati dapat dianalisis melalui perspektif itu. Untuk nanti memerintah, jelas PPP sangat dibutuhkan. Partai ini dilihat dari kursi perolehannya di parlemen sebanyak sekitar 10%. Partai ini juga mewakili segmen pemilih Islam, baik dari kalangan NU ataupun di luar NU.

Namun di era kampanye, dukungan PPP mungkin bisa diabaikan. Contoh kongkretnya dapat dilihat dalam pemilu presiden tahap pertama. Saat itu, PPP mendukung ketua umumnya sendiri, Hamzah Haz. Semua pemilih PPP mengerti besarnya jasa Hamzah Haz bagi PPP. Tetapi suara Hamzah Haz hanya 3%. Bahkan di kalangan PPP sendiri, paling tidak sekitar 7% tidak memilih Hamzah Haz.

Jika ketua umumnya sendiri saja tidak dipilih, instruksi resmi partai atas pemilih partai itu memang tidak signifikan. Apalagi jika yang direkomendasikan adalah ketua umum partai lain sebagai capres.

Dukungan PPP kepada Megawati dapat menjadi transaksi politik yang justru merugikan Megawati. Di satu sisi, dukungan itu tidak menjamin Megawati mampu meraih suara pemilih PPP. Namun di sisi lain, itu membuat Megawati, jika terpilih, harus pula berbagi kursi kabinet kepada PPP.

Mengapa suara elit partai, bahkan instruksi partai secara kelembagaan tidak banyak berpengaruh kepada pemilih partai itu? Secara normatif memang partai adalah penyalur aspirasi politik masyarakat. Dinamika politik masyarakat diterjemahkan menjadi dinamika partai politik. Pertarungan politik masyarakat dialihkan menjadi pertarungan dan persaingan partai politik sehingga politik lebih terlembaga.

Secara normatif memang partai adalah sokoguru demokrasi. Tidak ada demokrasi yang kuat tanpa kehadiran partai yang kuat.

Semua pemimpin dan politisi yang berpengaruh diharapkan untuk terus memperkuat posisi partai. Jika partai tidak kuat, akibatnya aspirasi politik masyarakat akan mencari saluran yang lebih tidak terkendali di luar partai politik.

Namun semua itu butuh proses. Selama 32 tahun Orde Baru, pemilih Indonesia dibuat mengambang. Ikatan emosional mereka dengan partai belum terbina. Partai masih menjadi fenomena elit perkotaan yang segelintir. Partai belum menjadi bagian dan kebutuhan masyarakat luas.

Indikator mengenai hubungan partai politik dan pemilihnya dapat dilihat dari iuran. Seberapa banyak pemilih dan simpatisan partai yang bersedia memberikan iuran bulanan atau sumbangan sukarela kepada partainya. Semakin dekat hubungan emosional, semakin pemilih itu bersedia berkorban. Setidaknya, mereka rela menyisakan dana untuk partai.

Hubungan pemilih dengan partai politik lebih permukaan dan superficial dibandingkan dengan hubungan santri dengan pesantrennya. Identifikasi santri dengan kiyainya jauh lebih dalam, emosional dan berhubungan langsung dengan keyakinan hidup.

Dengan kualitas hubungan seperti itu saja, belum tentu pula para santri itu tunduk kepada pilihan politik kiyainya. Para santri dapat membedakan, dalam hal apa ia harus patuh kepada kiyainya. Sedangkan untuk pilihan presiden, santri dapat beranggapan itu pilihan bebas ia sebagai warga negara, yang tidak ada hubungannya dengan kiai dan pesantren.

Jika santri saja tidak sepenuhnya tunduk kepada kiyainya dalam hal pemilu presiden, apalagi para pemilih partai terhadap instruksi partainya. Itu sebabnya, mencari koalisi partai dalam rangka kampanye, bukan dalam rangka memerintah nanti, itu dapat seperti kasus Abu Nawas yang mencari kunci.

Namun tentu saja kerjasama kepartaian sudah harus dijajaki sejak sekarang, namun itu bukan dalam rangka menarik dukungan pemilih. **

Menunggu Sikap Politik Golkar

AKANKAH akhirnya Partai Golkar secara organisasi mendukung Megawati untuk pemilu presiden putaran kedua? Atau sebaliknya, Golkar memutuskan bersama SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)? Atau Golkar memilih jalan aman, menunda koalisi setelah 20 September, dan siap membentuk pemerintahan yang kuat dengan siapapun presiden baru yang terpilih?

Demikianlah pertanyaan yang kini berada di “anak tangga” teratas dalam hits isu politik belakangan ini. Jika tidak ada aral melintang, pertengahan Agustus 2004 ini Golkar menyelenggarakan Rapim (Rapat Pimpinan). Berbagai pimpinan Partai Golkar pusat dan daerah propinsi berkumpul untuk mengambil sikap. Tiga pilihan sikap politik di atas sangat dipertimbangkan.

Sebagai partai terbesar dan paling modern, Partai Golkar bertanggung jawab mengambil seluruh inisiatif yang diperlukan. Apakah pemilu nanti akan berakhir dengan terbentuknya pemerintahan yang kuat atau lemah, sangat pula ditentukan oleh

manuver Partai Golkar. Idealnya, presiden yang terpilih adalah calon dari Partai Golkar, selaku partai pemenang pemilu.

Namun justru di situlah letak ironi Partai Golkar. Rakyat hanya menghendaki Partai Golkar menjadi pemenang pemilu. Untuk presiden rakyat punya pilihan lain, di luar Partai Golkar, SBY atau Megawati. Golkar terpaksa duduk di bangku penonton saja bagi pertandingan dua peserta final, yang dua-duanya bukan dari Partai Golkar.

Sungguhpun tidak lagi menjadi pemain utama, Golkar masih dapat menjadi pemain pendukung yang teramat penting. Tentu dengan satu syarat, itu hanya terjadi jika Golkar tidak mengambil keputusan yang salah dalam Rapim tersebut.

Skenario terburuk bagi Partai Golkar adalah jika Rapim memutuskan mendukung capres tertentu, namun kemudian capres itu kalah. Dengan segera terbentuk citra bahwa untuk kedua kalinya Partai Terbesar Golkar dikalahkan. Ini akan buruk tidak hanya bagi ketua umum Golkar, tetapi juga bagi Partai Golkar sendiri, serta bagi pemerintahan baru.

Ketua umum Golkar akan disalahkan karena membawa Partai Golkar, partai terbesar dan paling modern, justru untuk mendukung kapal yang tengah karam. Pasti ada kesalahan taktis dan strategi yang teramat fatal. Bagi Akbar Tandjung pribadi, ini akan menjadi kekalahan yang ketiga kali.

Kekalahan pertama ketika ia tidak dipilih oleh anak buahnya sendiri dalam Konvensi Partai Golkar. Wiranto selaku "tamu" justru terpilih di saat Akbar Tandjung sudah pasang badan bagi kemajuan organisasi Partai Golkar. Kekalahan kedua, Akbar Tandjung juga dianggap gagal memenangkan capres Golkar dalam pemilu putaran pertama. Padahal dilihat dari sisi mesin politik, seharusnya Partai Golkar ditambah dengan PKB menjadi kekuatan yang paling dahsyat.

Kekalahan ketiga adalah dalam pemilu presiden putaran kedua. Kekalahan ketiga ini akan jauh lebih fatal bagi ketua umum Golkar. Sebenarnya, pilihan yang ada sangat terbuka bagi Golkar untuk mendukung capres lainnya. Atau setidaknya, Partai Golkar dapat meneruskan koalisi setelah 20 September saja, ketika sudah jelas siapa yang akan menjadi presiden.

Bagi kompetitor Akbar Tandjung kesalahan taktis Golkar dalam pilpres 20 September dijadikan isu besar untuk merebut posisi ketua umum. Kekalahan tiga kali Akbar Tandjung itu akan dianggap sebagai kelemahan leadership. Akan diisukan bahwa sebagai partai terbesar tidak nyaman bagi Golkar jika dipimpin oleh tokoh yang acapkali dikalahkan.

Jika mendukung capres yang kalah, efeknya akan buruk pula bagi Partai Golkar sebagai organisasi. Pilihan selanjutnya bagi Golkar menjadi serba salah. Jika Golkar tetap konsisten mendukung capres yang kalah dan bersaing dengan capres yang terpilih, Golkar harus menjadi oposisi. Golkar tidak berpengalaman menjadi oposisi. Sementara begitu banyak SDM Golkar yang cemerlang yang semestinya dapat ikut dalam pemerintahan baru.

Jika Golkar langsung pindah haluan, bekerjasama dengan presiden terpilih, langkah itu pun tidak elok. Baru saja Golkar bersaing dengan presiden terpilih dalam pemilu putaran kedua, kini mendadak merapat. Citra pragmatisme politik yang ekstrem segera melekat pada Partai Golkar. Minat Golkar pada kekuasaan dinilai menjadi panglima dan mengalahkan prinsip lain yang lebih agung.

Seandainya Golkar mendukung capres tertentu dan kalah, efeknya juga buruk buat pemerintahan baru. Ia juga serba salah untuk merespon Golkar. Sebagai kompetitor, ia baru saja berseberangan dengan lawannya yang didukung Golkar. Semakin seru kompetisi itu, apalagi jika dibarengi dengan aneka pamflet dan selebaran yang kasar dan menyerang, semakin tidak mudah baginya untuk merangkul Golkar. Kini ia terpilih menjadi presiden. Jika ia tidak

mengajak Golkar, oposisi atasnya di parlemen menguat. Namun jika mengajak Golkar, bukankah Golkar baru saja mendukung lawan politiknya?

Jauh lebih mudah bagi ketua umum Golkar, bagi Partai Golkar dan bagi pemerintahan baru siapapun presidennya, jika Golkar bermain cantik dan elegan. Kenyataannya, siapapun yang menjadi presiden akan butuh Partai Golkar. Mengapa Golkar harus berkotor tangan dan beresiko mendukung salah satu capres. Apalagi jika lazim diketahui capres itu bakal kalah.

Jauh lebih baik Golkar menyatakan menunda koalisi sampai tanggal 20 September dengan catatan. Ditegaskan setegas-tegasnya bahwa Partai Golkar siap membentuk pemerintahan baru yang kuat dengan presiden terpilih. Partai Golkar tidak berniat menjadi oposisi. Power sharing dengan capres dapat diijazahkan sejak sekarang. Dengan sikap politik itu Golkar bukan saja tidak beresiko, tetapi tampak elegan pula. Segera terbentuk citra bahwa komitmen Golkar ada pada pemerintahan yang kuat dan stabil. Segera terbaca pula bahwa Golkar tidak ingin pemilu demokratis ini berujung kepada pemerintahan yang tidak efektif.

Golkar lalu bersikap sama kepada SBY dan Megawati selama masa kampanye. Golkar juga membebaskan kader dan pendukungnya untuk menentukan sikapnya sendiri dalam pemilu 20 September. Akankah sikap yang elok ini yang diputuskan Rapim? * *

Beban Berat Presiden Baru

SEBAGAI presiden baru, akan kah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) terus bersinar? Apakah dalam pemilu 2009, ia bakal terpilih kembali karena prestasi pemerintahannya? Ataukah SBY mengikuti pola sedih para presiden pendahulunya?

Sejarah presiden di Indonesia bukan kisah menyenangkan. Mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur dan Megawati, terkena pola yang sama. Awalnya mereka semua dipuja. Namun di akhir jabatan, mereka dikecam dan ditinggalkan.

Bung Karno muncul sebagai pahlawan kemerdekaan. Namun di ujung pemerintahannya, ia dijatuhkan dari kekuasaan karena dianggap gagal. Pak Harto muncul sebagai penyelamat bangsa. Namun sekali lagi, di masa akhir ia dianggap bertanggung jawab dengan krisis nasional dan kembali dijatuhkan.

Habibie muncul sebagai presiden pengganti. Ia dianggap pemimpin yang visioner. Tetapi, di akhir jabatan kembali ia ditolak oleh MPR dengan tidak menerima pidato pertanggung-jawabannya,

sehingga membunuh peluang politik Habibie untuk maju dalam pencalonan presiden berikutnya. Gus Dur muncul sebagai presiden pertama yang dipilih di era reformasi. Ia dipuja sebagai tokoh merakyat dengan gagasan yang brilian. Namun, Gus Dur dijatuhkan oleh MPR.

Megawati tampil sebagai alternatif. Rakyat berharap banyak dengan tokoh yang mewarisi kharisma Bung Karno. Di akhir jabatannya, Megawati ditolak rakyat untuk memerintah kembali dalam pemilihan langsung.

Lapangan politik dan ekonomi yang kini dihadapi SBY sangat sulit. Politik sangat terfragmentasi, keuangan negara menipis, sementara harapan atas kinerja SBY sangat tinggi. Semakin tinggi harapan, semakin mudah kecewa.

Mayoritas publik mengharapkan SBY sukses. Namun tentu saja banyak pihak dan elit yang berpengaruh mengharapkan sebaliknya. Bahkan di kalangan hardliners, para politisi garis keras, ada pula yang menginginkan SBY jatuh di tahun pertama. Tanpa konflik politik yang berarti, mengatasi kasus Indonesia sudah serba susah. Apalagi jika konflik politik ikut bermain dan menjadi sumber permanen untuk mengurangi popularitas SBY.

Bagaimana SBY mengatasi aneka gangguan itu? Dalam sistem negara demokratis, kekuasaan sudah terbagi. Lembaga presiden hanya mengontrol sebagian segmen saja dari kebijakan publik. Segmen lain dikuasai oleh lembaga tinggi negara lain atau dikuasai secara bersama.

Ada lembaga parlemen yang saat ini sangat powerful. APBN dan UU lebih didominasi oleh parlemen. Parlemen juga mempunyai kewenangan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Jika parlemen mengambil posisi oposisi, banyak gangguan dapat dikreasi. Berbagai perubahan yang memerlukan revisi dan UU baru akan terhambat.

Diskusi soal APBN juga dapat dibuat terlunta-lunta. Sementara pengawasan parlemen dimainkan secara super maksimal dengan memanggil bolak-balik aneka kementerian dan Dirut BUMN untuk diperiksa.

Hanya jika pemerintahan SBY sangat bersih dari korupsi dan kebijakan SBY populer, rakyat memihak SBY. Tetapi untuk membuat ekonomi baik, kadang kala SBY juga harus membuat kebijakan tidak populer. Mengurangi subsidi BBM, misalnya, cepat atau lambat harus dikerjakan. Saat itulah parlemen dapat semakin merepotkan SBY.

Sekitar 80% publik tidak menginginkan pemerintahan baru menaikkan BBM kapan pun. Kita tahu itu hasrat publik yang tidak realistis. Pasti datang suatu massa, SBY menaikkan harga BBM. Rakyat akan protes secara meluas Sebagian dari protes itu dimobilisasi. Dengan mendompleng kemarahan rakyat, parlemen yang partisan segera bermain politik, menggoyang-goyang SBY.

Di samping menghadapi parlemen yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, SBY juga menghadapi mafia peradilan yang sudah parah. Atas nama supremasi hukum, para hakim tidak ingin diintervensi presiden. Namun banyak hakim yang secara sukarela diintervensi oleh uang besar. Jika para hakim bermain, aneka kasus korupsi tidak akan tuntas.

Apa yang dapat dikerjakan presiden baru? Selama kampanye, presiden sudah menjanjikan perubahan termasuk korupsi. Publik ingin melihat bukti cepat dengan ditangkapnya "ikan besar" atau koruptor kelas kakap. Namun koruptor kelas kakap juga sangat kakap dalam kelihaiannya bermain mafia peradilan. Tanpa masuk merubah mafia itu, pemberantasan korupsi kembali hanya menjadi wacana.

Sedangkan untuk membongkar mafia peradilan, berapa lama waktu dibutuhkan? Rakyat Indonesia yang sudah sekian lama hanya dijanjikan, semakin tidak sabar. Mereka mengharap hasil segera

yang cepat. Presiden baru dianggap seperti superman yang dapat membuktikan janji secara kilat.

Sebersih-bersihnya para menteri yang akan ditunjuk SBY, mereka akan memimpin birokrasi yang sama. Bahkan implementasi dari kebijakan dikerjakan oleh birokrasi yang sama, yang umumnya tidak kompeten dan korup. Di tengah gaji yang tidak cukup, justru korupsi menjadi bagian dari survival hidup dan meluaskan jaringan pengaruh. Mereka berkepentingan agar korupsi tidak memudar.

Medan berat lain yang dihadapi SBY adalah keuangan negara yang menipis, di tengah situasi perekonomian makro yang juga tidak menggembirakan. Pengangguran terselubung dan setengah terselubung berjumlah sekitar 40 juta jiwa. Mereka butuh pekerjaan. Sementara pekerjaan butuh investasi. Sedangkan investasi membutuhkan kenyamanan lingkungan, mulai dari keamanan, sistem perpajakan, penerapan hukum yang pasti dan konsisten, dan birokrasi yang efisien dan bersih.

Itu semua menyangkut perubahan kultur berusaha, tradisi birokrasi dan mental tokoh yang terlibat. Perubahan ini bukan saja tidak bisa diberikan di seratus hari pertama. Bahkan mungkin waktu lima tahun juga tidak cukup untuk menyelesaikannya. Selalu muncul perlawanan dari aneka pihak yang mendapatkan keuntungan dari sistem yang rusak itu.

Presiden SBY jelas menghadapi tantangan yang sedemikian berat. Jika ia tampil dengan inovasi dan tim yang biasa-biasa saja, dapat dipastikan SBY mengulangi tradisi presiden Indonesia sebelumnya, yang dipuja di awal dan dikecam di akhir. Perlu inovasi yang luar biasa dan kerjasama tim yang maha hebat untuk membuat SBY berhasil.

Publik Indonesia harus mengambil sikap sejak dini. Karena tidak ingin negara hancur, mau tidak mau mereka harus sepenuhnya berdiri mendukung dan di belakang presiden baru. * *

Setelah Kabinet Diumumkan

BAGAIMANAKAH nasib dan prospek kabinet SBY-JK setelah lewat seratus hari pertama kelak? Di mata publik luas, apakah ini kabinet idaman, the dream team, yang segera membawa perubahan nasib bangsa, seperti yang dijanjikan ketika kampanye? Ataukah kabinet ini segera menuai kecaman, dan publik kembali seperti semula, kecewa dengan pemerintah?

Untuk sementara publik luas merespon kabinet SBY-JK dengan perasaan yang bercampur. Di sana-sini banyak terdengar pujian. Namun pada saat yang sama, di segmen yang berbeda, sudah mulai terdengar kecaman dan nada pesimisme. Yang memuji, menganggap ini kabinet yang sangat pro-bisnis. Investasi diduga akan segera subur dan pada waktunya Indonesia akan sejahtera.

Sebaliknya, yang mengecam, menyatakan kabinet ini tidak banyak beda dengan kabinet gotong royong era Megawati Soekarnoputri. Tokoh yang diangkat sebagian karena kompromi politik. Banyak menteri yang ahli, namun banyak pula yang diragukan bukan saja

keahlian di bidangnya, tetapi juga komitmen moral serta track record-nya. Yang pesimis menyatakan, SBY-JK sudah menurunkan sendiri standard kualitas pemerintahannya.

Pada akhirnya, kinerja kabinet ini sendiri yang akan berbicara. SBY memberikan sinyal yang kuat sekali untuk mengevaluasi kabinetnya bahkan di tahun pertama. Kepada para menteri yang bermasalah, seperti melakukan korupsi, diminta mengundurkan diri, atau dikenakan sanksi. Keraguan publik, seru SBY, harus dijadikan tantangan membuktikan karya dan kinerja.

Selaku warga negara yang patuh, selayaknya kita memberikan fair chance, dukungan dan kesempatan yang fair kepada kabinet ini untuk membuktikan diri. Namun kendala dan tantangan yang mengancam kabinet ini harus pula dinyatakan agar SBY-JK lebih waspada.

Lapangan politik dan ekonomi yang kini dihadapi SBY-JK cukup sulit. Tiga peristiwa terakhir memberikan sinyal yang kurang nyaman. Peristiwa pertama adalah pelantikan presiden di Gedung MPR namun tidak ada pidato sambutan presiden terpilih. Ini peristiwa yang agak unik di dunia. Seorang presiden dilantik tanpa memberikan sambutan.

Bagi sebagian, hal ini mungkin persoalan teknis belaka. Kebetulan tata tertib sidang pelantikan itu memang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa pelantikan diikuti pidato. Tidak ada masalah dengan hal itu. Presiden dapat berpidato di tempat lain, misalnya di istana.

Namun bagi sebagian, ini sinyal politik yang pesannya cukup kuat. Pesan itu hendak menyatakan bahwa MPR dapat membuat susah presiden. Bahkan jika MPR tidak memberikan tempat bagi presiden untuk pidato, walau itu di luar kelaziman, tidak ada kekuatan presiden untuk melawannya.

Publik segera berimajinasi mengenai kekuatan atau dukungan presiden di MPR. Di sana masih kokoh berdiri Koalisi Kebangsaan dengan dukungan dua partai terbesar, Golkar dan PDIP. Gabungan dua partai ini sudah melebihi 40% suara DPR. Hardliners di dua partai itu bahkan berniat mengontrol presiden dengan keras.

Sebelumnya, Koalisi Kebangsaan mendapatkan perlawanan dari koalisi lain yang menjadi pendukung SBY-JK. Namun untuk soal pidato presiden, perlawanan itu tidak tampak. Spekulasi kembali berkembang. Mungkin berbagai partai pendukung SBY-JK juga memberikan pesan politik yang kuat. Mereka dapat pula berbalik arah membuat susah presiden terpilih jika presiden tidak mengakomodasi kepentingan partai pendukung itu.

Apalagi, pelantikan presiden dilakukan sebelum kabinet diumumkan. Partai pendukung juga memasang kuda-kuda untuk menaikkan posisi tawar. Karena jatah partai belum dipastikan oleh SBY-JK, partai itu juga tidak bereaksi dengan agenda pelantikan tanpa pidato itu. Publik luas dan dunia internasional pun terbingong-bengong. Sebagian bertanya, apakah di masa datang MPR akan kembali dengan mudah membuat susah presiden terpilih?

Peristiwa kedua adalah pengumuman kabinet. Sudah dinyatakan oleh juru bicara bahwa presiden akan mengumumkan kabinetnya jam 8 malam. Namun kemudian waktunya molor. Sekali lagi juru bicara mengumumkan bahwa presiden akan membacakan susunan kabinetnya jam 11 malam. Kembali waktu pengumuman kabinet itu terlampaui.

Sebagian melihat pengunduran itu bukan masalah teknis belaka, tetapi politik. Komentator di televisi ramai membahas tarik menarik dalam pembentukan kabinet itu. Beberapa nama menteri yang muncul, diduga akan hilang. Namun nama menteri yang sudah hilang dimunculkan kembali. Sebenarnya hal yang biasa terjadi perubahan nama sebelum pengumuman resmi dibuat.

Namun perubahan nama untuk kasus SBY-JK dianggap tidak biasa karena menggambarkan seberapa besar tekanan diberikan kepada presiden. Ketika nama kabinet diumumkan, publik merasa bahwa tidak semua menteri itu pilihan presiden yang dikenal punya standard yang tinggi. Presiden dianggap telah mengalah demi menjaga kebersamaan. Tetapi presiden juga diduga telah mengorbankan beberapa prinsip dasar, seperti kualifikasi menteri di bidangnya.

Di satu sisi, mungkin ini memberikan nilai tambah kepada presiden. Ia dianggap tidak mendahulukan kepentingannya pribadi. Namun di sisi lain, ini juga memberikan rasa tidak nyaman. Presiden SBY, yang dipilih langsung oleh rakyat bukan dipilih partai, dianggap “terlalu baik” terhadap pihak penekan.

Peristiwa ketiga adalah reaksi pasar. Setelah kabinet diumumkan pasar tidak bereaksi positif. Harian Suara Pembaruan dan The Jakarta Post bahkan mengumumkan bahwa pasar bereaksi negatif. Antusiasme publik atas kabinet baru tidak terlalu menggembirakan. Publik mungkin kurang menyukai kompromi yang tergambar dalam susunan kabinet. Atau publik memberikan harapan yang terlalu tinggi kepada kabinet akibatnya harapan itu sulit terpenuhi? Semakin tinggi harapan, semakin mudah kecewa.

Tiga respon paling aktual di atas tentu harus menjadi catatan kabinet SBY-JK. Tidak ada cara lain untuk meresponnya kecuali bukti kinerja kabinet itu sendiri. Selamat bekerja buat kabinet baru. **

SUMBER NASKAH

1. Keresahan Purnawirawan Atas Amandemen, Jawa Pos, 16 Mei 2002
2. Merosot, Momentum Reformasi, Jawa Pos, 23 Mei 2002
3. Era Baru Politik Tentara, Jawa Pos, 6 Juni 2002
4. MPR Segera Jadi Dinosaurius? Jawa Pos, 25 Juli 2002
5. Tentara dan Komisi Konstitusi, Jawa Pos, 8 Agustus 2002
6. Bau Busuk di DPR, Jawa Pos, 3 Oktober 2002
7. Korupsi Gotong Royong, Jawa Pos, 10 Oktober 2002
8. Merosotnya Wibawa DPR, Jawa Pos, 6 Nopember 2002
9. Mengendalikan Politik TV dan Radio, Jawa Pos, 22 Nopember 2002
10. Konflik di Dalam Peradaban, Jawa Pos, 12 Desember 2002
11. Kontroversi Pasal Agama? Indopos, 20 Maret 2003
12. Lima Tahun Reformasi, Indopos, 22 Mei 2003
13. Memecat Anggota DPR? Indopos, 5 Juni 2003
14. Meremehkan Mahkamah Konstitusi, Indopos, 16 Juni 2003
15. Pemecatan Masal Anggota DPR? Indopos, 17 Juli 2003
16. ST MPR yang Terakhir? Indopos, 31 Juli 2003
17. Rehabilitasi Korban Komunisme, Indopos, 28 Agustus 2003
18. Mendengar Progress Report Presiden, Jawa Pos, 1 Agustus 2002
19. Nyanyian Sedih Buruh di Rantau, Jawa Pos, 22 Agustus 2002

20. TKI, Kelemahan Komunikasi Mega, Jawa Pos, 5 September 2002
21. Mengontrol Perang Irak? Indopos, 27 Maret 2003
22. Wajah Buruh Era Reformasi, Indopos, 1 Mei 2003
23. Tangis Buruh di Luar Negeri. Jawa Pos, 23 Oktober 2003
24. Menggugat Pemerintah Pusat, Jawa Pos, 9 Mei 2002
25. Jakarta Mencari Gubernur, Jawa Pos, 27 Juni 2002
26. Korupsi Mempersatukan DPRD, Indopos, 13 Maret 2003
27. Heboh Pemilihan Gubernur, Indopos, 24 Juli 2003
28. Membatalkan Pemilihan Gubernur, Indopos, 21 Agustus 2003
29. Mengatasi Gejolak Papua, Indopo., 4 September 2003
30. DPD, Forum Petualang Politik? Indopos, 11 September 2003
31. Kasus Pelantikan Gubernur Sumsel, Indopos, 18 September 2003
32. PKB Digandeng Poros Tengah? Jawa Pos, 30 Mei 2002
33. Intelektual Mendirikan Partai, Jawa Pos, 18 Juli 2002
34. Prospek Posisi Akbar Tanjung, Jawa Pos. 19 September 2002
35. Siapa The Man of The Year? Jawa Pos. 26 Desember 2002
36. Laksamana vs. Amien Rais, Jawa Pos. 2 Januari 2003
37. Kaukus Penyelamatan Bangsa, Indopos. 9 Januari 2003
38. Megawati Di UjungTanduk? Jawa Pos. 16 Januari 2003
39. Menggoyang Presiden Megawati, Indopos. 23 Januari 2003
40. Akhir Politik Gus Dur? Jawa Pos. 29 Mei 2003-03
41. Kembalinya Akbar Tanjung? Indopos. 29 Januari 2004

42. SBY Dikucilkan dari Kabinet? Indopos. 4 Maret 2004
43. Darurat Militer di Ambon, Jawa Pos. 2 Mei 2002
44. Darurat Militer untuk Aceh? Jawa Pos. 11 Juli 2002
45. Poso Kembali Bergolak, Jawa Pos. 15 Agustus 2002
46. Babak Baru Konflik Aceh, Jawa Pos. 29 Agustus 2002
47. Setahun Tragedi 11 September, Jawa Pos. 12 September 2002
48. Al Qaidah di Indonesia? Jawa Pos. 26 September 2002
49. Menangkap Abu Bakar Ba'asyir? Jawa Pos. 17 Oktober 2002
50. Jejak Al Qaidah di Bali? Jawa Pos. 24 Oktober 2002
51. Terorisme di Pundak DPR, Jawa Pos. 31 Oktober 2002
52. Akhir Islam Radikal? Jawa Pos. 21 Nopember 2002
53. Damai di Aceh? Jawa Pos. 19 Desember 2002
54. Aceh Ingin Merdeka? Indopos. 10 April 2003
55. Menjepit Gerakan Aceh Merdeka, Indopos. 17 April 2003
56. Ketegasan Buat Aceh, Indopos, 24 April 2003
57. Tujuh Tentara yang Gugur, Indopos, 12 Juni 2003
58. Teror Bom Mengguncang Jakarta, Indopos, 7 Agustus 2003
59. Pro Kontra Terhadap ISA, Indopos, 14 Agustus 2003
60. Menangkap Alumni Afghanistan, Indopos, 25 September 2003
61. Satu Tahun Bom Bali, Jawa Pos, 9 Oktober 2003
62. Amien Rais Terbentur Segmentasi Politik, Jawa Pos, 20 Juni 2002
63. Sentimen Antipemilu, Indopos, 6 Februari 2003

64. Menyeleksi Calon Presiden, Indopos, 13 Februari 2003
65. Bursa Calon Presiden, Indopos, 3 April 2003
66. Upaya Menjegal Megawati? , Indopos, 8 Mei 2003
67. Kontroversi UU Pemilu Presiden, Indopos, 10 Juli 2003
68. Presiden dari Purnawirawan? Jawa Pos, 2 Oktober 2003
69. Ical, Surya Paloh, dan Kalla, Jawa Pos, 16 Oktober 2003
70. Kerusuhan Buleleng Menjelang Pemilu, Jawa Pos, 30 Oktober 2003
71. Komplikasi Pemilu di Aceh, Indopos, 6 Nopember 2003
72. Upaya Menggagalkan Pemilu? Indopos, 13 Nopember 2003
73. Pemain Baru Pemilu 2004, Indopos, 4 Desember 2003
74. Dewan Penyelamat Partai? Indopos, 5 Februari 2004
75. Blunder Politik Muhammadiyah? Indopos, 19 Februari 2004
76. Wakil Presiden dari Golkar? Indopos, 26 Februari 2004
77. Koalisi Tiga untuk Presiden, Indopos, 18 Maret 2004
78. Kemana Permainan Golkar Pasca Konvensi? Indopos, 23 April 2004
79. Memperebutkan Nahdatul Ulama, Indopos, 29 April 2004
80. Duet Mega Hasyim, Jawa Pos, 7 Mei 2004
81. Retaknya Gerbong NU, Indopos, 11 Juni 2004
82. Mengapa Amien Rais Kalah, Indopos, 15 Juli 2004
83. Mengapa Wiranto Kalah, Indopos, 23 Juli 2004
84. Gerbong Golkar Melaju ke mana? , Indopos, 25 Juli 2004

85. Dukungan Buat Capres, *Indopos*, 5 Agustus 2004
86. Menunggu Sikap Politik Golkar, *Indopos*, 17 Agustus 2004
87. Beban Berat Presiden Baru, *Indopos*, 10 Oktober 2004
88. Setelah Kabinet Diumumkan, *Indopos*, 23 Oktober 2004

DAFTAR BUKU DENNY J.A

1. DEMOCRATIZATION FROM BELOW PROTEST EVENTS AND REGIME CHANGE IN INDONESIA Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
2. THE ROLE OF GOVERNMENT IN ECONOMY AND BUSINESS, Penerbit LKIS, 2006
3. VARIOUS TOPICS IN COMPARATIVE POLITICS, Penerbit LKIS 2006
4. DEMOKRASI INDONESIA: VISI DAN PRAKTEK (Kumpulan Tulisan di Harian Kompas), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
5. JALAN PANJANG REFORMASI (Kumpulan Tulisan di Suara Pembaruan), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
6. MELEWATI PERUBAHAN Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia (Kumpulan Tulisan di Jawa Pos dan Indopos), Penerbit LKIS, 2006
7. POLITIK YANG MENCARI BENTUK (Kumpulan Kolom di Majalah Gatra), Penerbit LKIS, 2006
8. MEMBANGUN DEMOKRASI SEHARI-HARI (Kumpulan Tulisan di Media Indonesia), Penerbit, LKIS 2006
9. PARTAI POLITIK PUN BERGUGURAN (Kumpulan Tulisan di Republika), Penerbit LKIS 2006
10. MANUVER ELIT, KONFLIK DAN KONSERVATISME POLITIK (Kumpulan Tulisan di Koran Tempo), Penerbit LKIS 2006
11. PARA POLITISI DAN LAGUNYA (Kumpulan Tulisan di Rakyat Merdeka dan Harian Seputar Indonesia), Penerbit LKIS 2006
12. MEMPERKUAT PILAR KELIMA, Pemilu 2004 Dalam Temuan Survei LSI, Penerbit LKIS 2006

13. VISI INDONESIA BARU SETELAH REFORMASI 1998, Penerbit LKIS 2006
14. CATATAN POLITIK, Penerbit LKIS 2006
15. JATUHNYA SOEHARTO DAN TRANSISI DEMOKRASI, Penerbit LKIS 2006
16. MEMBACA ISU POLITIK, Penerbit LKIS 2006
17. GERAKAN MAHASISWA DAN POLITIK KAUM MUDA ERA 80-AN, Penerbit LKIS 2006
18. ELECTION WATCH : MERETAS JALAN DEMOKRASI (Talkshow Denny J.A di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
19. PARLIAMENT WATCH: EKSPERIMEN DEMOKRASI: DILEMA INDONESIA (Talkshow Denny J.A. di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
20. NAPAK TILAS REFORMASI POLITIK INDONESIA (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006
21. JEJAK-JEJAK PEMILU 2004 (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006